

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

JILID 3 UNTUK SMA

SEJARAH

Kepada bangsa Indonesia dengan ini diumumkan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemerintahan kedaulatan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara demokrasi dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 bulan 8 tahun

1945

Sukarno/Hatta.

(Handwritten signature)

AN
torat
aan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA

769.8

NUG

S

9

SEP 1982

Milik Departemen P dan K

Tidak dijual-belikan

Diterima tgl. :

Dipakai* tgl. :

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

untuk SMA

Untuk Kejuruan
Perpustakaan
2294
L

III

Editor :

Nugroho Notosusanto

Yusmar Basri

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

1981

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta

Pengadaan naskah oleh:

**PROYEK PENGADAAN BUKU PELAJARAN, PERPUSTAKAAN DAN
KETRAMPILAN SLU – JAKARTA**

Diproduksi oleh:

**PROYEK PENGADAAN BUKU PELAJARAN, PERPUSTAKAAN DAN
KETRAMPILAN SLU – JAKARTA**

Susun huruf oleh:

NV. MASA BARU Bandung.

Cetakan tahun 1994

300.000 ex

aksi

ja : Nugroho Notosusanto
Sekretaris: Yusmar Basri
Anggota : A.B. Lopian
Bambang Sumadio
D.D. Bintarti
Djokosuryo
Edhi Wuryantoro
Hasan Mu'arif Ambary
Saleh A. Djamhari

PERPUSTAKAAN. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
NÖ INDUK 4869
TGL. 4-7-94

I. R. 897

KATA PENGANTAR

Dalam TAP No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diterangkan, bahwa pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Di samping itu dijelaskan pula, bahwa mutu pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu usaha di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah program pengadaan buku yang telah digarap selama Pelita I, II dan akan diteruskan dalam Repelita III.

Pengadaan buku-buku tersebut sejauh mungkin diarahkan guna menunjang pelaksanaan Kurikulum 1975, dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijaksanaan Pemerintah.

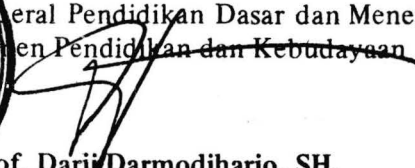
Dengan tersedianya buku-buku murid, diharapkan efektifitas dan efisiensi proses belajar-mengajar bisa ditingkatkan. Di samping itu dengan buku-buku yang baik diharapkan dapat mendorong usaha untuk menumbuhkan sifat masyarakat yang gemar membaca (reading society) serta sebagai usaha guna menambah pengetahuan dalam rangka mengejar ketinggalan-ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana kaum pelajar dan pendidik merupakan pendorong utama.

Semoga buku ini dapat memenuhi fungsinya.



Jakarta, Agustus 1979

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan


Prof. Darji Darmodiharjo, SH.

NIP. 130676351

P R A K A T A

Pada awal tahun 1975 telah terbit buku Sejarah Nasional Indonesia dalam enam jilid dan dengan tebal \pm 2000 halaman. Buku itu dimaksudkan untuk menjadi *buku standard* yang dipakai pada semua perguruan tinggi di Indonesia. Lain daripada itu buku itu juga dianggap menjadi buku "babon" atau buku "induk" bagi buku-teks Sejarah Nasional Indonesia untuk sekolah lanjutan pertama maupun untuk sekolah lanjutan atas.

Pada akhir tahun 1975 itu juga telah terbit buku-teks Sejarah Nasional Indonesia untuk SMP dalam tiga jilid dengan tebal \pm 500 halaman. Buku itu mulai tahun-pelajaran 1977 sudah dipakai pada sekolah-sekolah lanjutan pertama di seluruh Indonesia. Dan akhirnya telah terbit pula buku-teks Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA.

Dengan demikian telah lengkaplah buku-teks mengenai Sejarah Nasional Indonesia untuk perguruan-perguruan kita mulai dari sekolah lanjutan pertama sampai kepada perguruan tinggi. Dan untuk pertama kalinya putra-putri Indonesia selama masa belajarnya memperoleh penyajian fakta-fakta yang sama dan interpretasi yang sama mengenai kisah kehidupan dan perjuangan bangsanya. Dan dengan demikian generasi-generasi yang akan datang dapat memiliki persepsi yang sama mengenai perkembangan rakyatnya mulai jaman prasejarah sampai kepada jaman mutakhir sekarang ini.

Kita menyadari, bahwa pada perguruan-perguruan kita, pelajaran yang memperbedakannya secara tajam dari perguruan-perguruan di luar negeri, kecuali bahasa Indonesia, ilmu bumi Indonesia dan kewargaan-negara, adalah Sejarah Nasional Indonesia. Pelajaran-pelajaran lain seperti misalnya saja: matematika, kimia dan fisika, kiranya adalah sama dengan yang diajarkan di negeri-negeri lain. Karena itulah pelajaran Sejarah Nasional pada hakekatnya adalah sumber bagi pengertian akan kepribadian nasional.

Mengingat besarnya unsur pembinaan mental dalam pelajaran sejarah nasional, buku-buku sejarah yang baru ini tidak disusun sebagai kompilasi daripada buku-buku sejarah Indonesia karangan orang asing dengan hanya "membalik" interpretasinya, melainkan telah disusun sebagai suatu karya yang sedikit-banyak orisinal, dan sejauh mungkin

berdasarkan penelitian sarjana-sarjana Indonesia.

Pada akhirnya kami ingin menyatakan penghargaan kepada rekan-rekan para guru sejarah nasional di SMA yang telah memberikan penilaian kepada naskah buku ini dan menyampaikan saran-saran perbaikan yang positif. Tanpa bantuan mereka, pastilah buku ini akan mengandung banyak kecanggungan-kecanggungan yang hanya dapat ditemukan oleh guru-guru yang aktif mengajar. Selanjutnya kami tetap mengharapkan saran-saran perbaikan dari para pengajar sejarah nasional sesudah mereka mempergunakan buku ini dalam praktek.

Jakarta, 31 Januari 1977

TEAM REDAKSI

DAFTAR ISI

B A B I

INDONESIA MEMASUKI JAMAN MODERN

Halaman

A. STRUKTUR SOSIAL

1. Struktur Sosial—ekonomi	11
2. Penyebaran Pengajaran dan Mobilitas Sosial	14
3. Elite Nasional dan Nasionalisme	18

B. POLITIK KOLONIAL PADA PERALIHAN ABAD KE-19-20

1. Politik Etis	23
2. Politik Kolonial Sampai Akhir Hindia-Belanda	27

C. KOMUNIKASI SOSIAL

1. Pendidikan Kolonial dan Pendidikan Nasional	33
2. Perkembangan Pers Indonesia	36
3. Perkembangan Bahasa dan Identitas Bangsa	38

B A B II

PERGERAKAN NASIONAL

A. KEBANGKITAN NASIONAL

1. Awal Pergerakan Nasional	42
2. Perkembangan Pergerakan Nasional	50
3. Gerakan Islam	53

B. MASA RADIKAL

1. Pergerakan Non-kooperasi	56
2. Gerakan Pemuda dan Gerakan Wanita	64

C. MASA MODERAT

1. Pergerakan Kooperasi	70
2. Perjuangan Nasional di Volksraad	74

B A B III

JAMAN PENDUDUKAN JEPANG

A. PENGEKANGAN POLITIK

1. Pengendalian Terhadap Pergerakan Nasional	78
2. Pengarahan Total Untuk Usaha Perang Jepang	82

B. PEMERAHAN SOSIAL—EKONOMI

1. Pemerahan Bahan Makanan	84
2. Pemerahan Tenaga Manusia	87

C. PERSIAPAN UNTUK KEMERDEKAAN

1. <i>Perlawanan Terhadap Jepang</i>	88
2. <i>Persiapan Untuk Proklamasi</i>	92

B A B IV

PERANG KEMERDEKAAN

A. PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN AWAL REPUBLIK INDONESIA

1. <i>Proklamasi dan Kehidupan Politik</i>	97
2. <i>Kehidupan Ekonomi</i>	99
3. <i>Kehidupan Sosial-budaya</i>	102

B. MENGHADAPI AGRESI BELANDA DAN PEMBERONTAKAN PKI

1. <i>Diplomasi dan Konfrontasi</i>	104
2. <i>Mempertahankan Diri Terhadap Agresi</i>	108
3. <i>Menghadapi Pengkhianatan PKI di Madiun</i>	113

C. GERILYA DAN JAYA

1. <i>Gerilya</i>	116
2. <i>Memulihkan Persatuan Nasional</i>	120
3. <i>Pengakuan Kedaulatan</i>	122

B A B V

MASA DEMOKRASI LIBERAL

A. MENYEMPURNAKAN NEGARA

1. <i>Dari Sistem Federal Kembali Ke Negara Kesatuan</i>	125
2. <i>Pemilihan Umum Pertama</i>	126

B. MENINGKARI NILAI-NILAI 1945

1. <i>Percobaan Sistem Politik Demokrasi Liberal</i>	127
2. <i>Sistem Ekonomi Liberal</i>	134

C. KEAMANAN DALAM NEGERI DAN POLITIK LUAR NEGERI

1. <i>Menanggulangi Keamanan Dalam Negeri</i>	139
2. <i>Menguji Politik Luar Negeri Yang Bebas Aktif</i>	144

B A B VI

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

A. PERCOBAAN SISTEM TERPIMPIN

1. <i>Kembali Secara Tidak Murni Ke UUD-45</i>	148
2. <i>Sistem Politik Demokrasi Terpimpin dan Dominasi PKI</i>	150

B.	MENYELEWENGKAN DARI CITA-CITA 1945	
1.	<i>Sistem Ekonomi Terpimpin</i>	153
2.	<i>Politik Luar Negeri Nefo-Oldefo</i>	155
C.	PERJUANGAN DAN PENGKHIANATAN	
1.	<i>Perjuangan Membebaskan Irian</i>	157
2.	<i>Pengkhianatan G 30 S/PKI</i>	161

B A B VII

MASA ORDE BARU

A.	MENEGAKAN ORDE BARU	
1.	<i>Meletakkan Landasan Struktural</i>	167
2.	<i>Landasan Idiil Orde Baru</i>	173
B.	MEMBINA STABILITAS NASIONAL	
1.	<i>Stabilitas Politik</i>	174
2.	<i>Stabilitas Ekonomi</i>	176
C.	PEMBANGUNAN NASIONAL	
1.	<i>Pola Umum Pembangunan Nasional</i>	179
2.	<i>Pembangunan Lima Tahun</i>	181

052665

B A B I

INDONESIA MEMASUKI JAMAN MODERN

A. STRUKTUR SOSIAL

1. *Struktur Sosial-ekonomi*

Secara garis besarnya, diukur dari kepadatan penduduk dan perbedaan ekologis, daerah Indonesia dapat dibagi atas 3 kelompok:

- a). Kelompok berpenduduk padat: Jawa, Bali, Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan.
- b). Kelompok berpenduduk sedang: hampir seluruh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi bagian Tengah, Utara dan Tenggara, serta Nusatenggara.
- c). Kelompok berpenduduk jarang: Maluku, Irian Jaya, dan pulau-pulau kecil di pelbagai pelosok.

Kelihatan dari pembagian itu bahwa daerah yang padat adalah daerah persawahan dengan sistem pengairan yang cukup berkembang. Daerah yang berpenduduk jarang adalah daerah-daerah ladang, baik yang menetap maupun yang berpindah-pindah dengan tingkat teknologi yang belum tinggi.

Karena ketidak-samaan dalam cara menjawab tantangan alam, maka pertumbuhan penduduk untuk masing-masing daerah itu juga berbeda-beda. Seperti di Jawa, kenaikan jumlah dan kepadatan penduduk merupakan salah satu gejala sosial-ekonomi yang telah terjadi selama masa kolonial. Pada permulaan abad ke-19 penduduk Jawa hanya kira-kira 5 juta jiwa, sedangkan menurut sensus tahun 1930 menjadi 40 juta jiwa, penduduk Indonesia seluruhnya berjumlah 60,7 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang cepat, tidaklah semata-mata tergantung kepada masalah ekologis dan alamiah serta perkembangan teknologi pertanian saja, tetapi juga kepada faktor-faktor sosial-ekonomis lainnya seperti kesehatan, keamanan, extensifikasi dan intensifikasi pertanian, proses migrasi extern dan intern, dan sudah tentu juga pada perbandingan antara angka kelahiran dan angka kematian.

Dari sensus tahun 1930 tingkat kepadatan dan kenaikan jumlah penduduk tidaklah merata, malah kelihatan sangat timpang sekali bila diukur dengan luasnya Indonesia. Sebagai contoh: berdasarkan sensus tahun 1930, kepadatan penduduk Indonesia ialah 31,9 jiwa per kilometer persegi, di Jawa adalah 316,1 dan di luar Jawa 10,7. Perbandingan lain: di Maluku 1,8 jiwa per kilometer persegi, sedangkan di daerah Agam (Bukittinggi) 117,1 dan Bandung 671.

Umumnya rakyat Indonesia adalah petani. Karena itu masyarakatnya juga mempunyai ciri-ciri masyarakat tani. Tingkat kehidupan mereka

tergantung pada tanah yang mereka miliki dan cara pengolahannya. Bertambahnya penduduk menyebabkan luas daerah pertanian yang dimiliki setiap orang bertamabah kecil, sebab telah dibagi pada setiap keturunan baru. Bahkan akhirnya banyak yang tidak mempunyai tanah samasekali. Memang ada pembukaan tanah-tanah pertanian baru, seperti di Krawang pada tahun-tahun pertama abad ini, tetapi biasanya pembukaan tanah baru oleh penduduk kurang memperhitungkan pelbagai hal seperti pentingnya peranan hutan untuk mencegah bahaya erosi.

Pada peralihan abad ini penetrasi (penerobosan) ekonomi Barat telah masuk sampai ke desa-desa. Munculnya perkebunan-perkebunan besar menyebabkan tanah pertanian dan irigasi diperluas, dan sejalan dengan itu ditingkatkannya cara-cara pertanian. Sebaliknya juga banyak tanah pertanian rakyat, yaitu sawah dan tegalan, dibeli atau disewa oleh perusahaan. Akibatnya tanah petani yang sudah kecil itu makin sedikit, sedangkan petani-petani penyewa dan petani tak-punya-tanah bertambah banyak. Tetapi jumlah petani kaya, yang juga berfungsi sebagai tuān-tanah, makin bertambah, karena mereka membeli tanah yang dijual oleh mereka yang mengalami kesulitan uang untuk membayar pajak, dan juga karena penjualan tanah yang tadinya dimiliki oleh orang asing. Hal ini terutama dijumpai di daerah Jawa Barat dan Besuki (Jawa Timur). Untuk nafkahnya, para petani terpaksa hidup dan bekerja di perkebunan dan perusahaan industri dengan upah yang rendah. Jelaslah bahwa bertambahnya penduduk dan meluasnya penerobosan ekonomi Barat malah menambah merosotnya kemakmuran, dan menyebabkan pembagian golongan masyarakat berdasarkan pemilikan tanah, terutama di Jawa. Hal ini tentu mengubah struktur penduduk desa dan mempengaruhi pula tingkat kemakmuran, begitupun corak pergaulan masyarakat.

Sehubungan dengan terjadinya peristiwa sosial-ekonomis tersebut di atas, terjadi pula perluasan diferensiasi kerja. Jumlah dan jenis pekerjaan bertambah banyak, terutama di kota-kota. Orang tidak hanya dapat bekerja sebagai petani dan karyawan perkebunan, tetapi juga sebagai karyawan kantor-kantor dagang, perhubungan (bis dan kereta-api), industri-industri, dan bermacam-macam jenis tukang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian orang mulai terlepas dari keterikatan pada pemilikan tanah, sehingga mengurangi himpitan sosial di pedesaan, terutama di Jawa. Di samping itu hal ini juga mempengaruhi kecepatan mobilitas sosial dari masyarakat pedesaan. Di beberapa tempat seperti Sumatra Barat, kategori adat sebagai satu-satunya dasar nilai bagi pelapisan masyarakat harus ditinjau.

Di dalam masyarakat mulai tumbuh suatu golongan baru, yaitu golongan buruh yang hidupnya tergantung dari gaji yang mereka terima. Dengan demikian bentuk ekonomi-uang mulai dikenal di pedesaan. Semakin kuatnya pengaruh ekonomi-uang, menyebabkan timbulnya lambang bagi status sosial. Perubahan ini diperkuat dengan meluasnya

pengajaran, yang menimbulkan konflik-konflik terutama dengan golongan yang kuat mempertahankan tradisi. Namun jelas pelebaran jenis kerja dan terbukanya kemungkinan-kemungkinan lebih luas untuk mencari rezeki, merupakan salahsatu gejala dinamisasi di dalam masyarakat. Seiring dengan itu urbanisasi pun muncul.

Di dalam proses pelebaran diterensiasi kerja, di samping memperkenalkan penyewaan jasa dan tenaga kepada pelbagai jenis usaha dan lembaga, didapat pula proses makin bertambahnya pengusaha merdeka. Mereka ada yang menjadi pedagang kecil, pengusaha industri kecil dan sebagainya, tetapi ada juga pengusaha pribumi yang sanggup menggaji cukup banyak buruh. Meskipun dalam perkembangannya harus menghadapi persaingan dengan pengusaha keturunan Cina, namun kelompok itu selalu bertambah. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa aspek-aspek tertentu dari Pergerakan Nasional juga berkaitan dengan mulai bangkitnya pengusaha merdeka ini. Umpamanya terlihat sebagai salahsatu sebab timbulnya Sarekat Islam.

Tidak adanya keseimbangan antara bertambahnya penduduk dengan tersedianya tanah pertanian, bertambahnya lapangan kerja, baiknya keamanan dan lancarnya komunikasi, mendorong terjadinya transmigrasi dan urbanisasi. Adapun perpindahan penduduk ini disebabkan oleh beberapa sebab seperti ekonomi, politik, sosial-budaya dan tradisi. Perpindahan karena beberapa sebab tersebut sejak awal abad ini, menunjukkan seolah-olah sedang terjadinya semacam mobilitas geografis. Begitulah berdasarkan sensus tahun 1930, kira-kira 6,6 juta dari 60,7 juta penduduk Indonesia berada di luar daerah kelahirannya.

Perpindahan penduduk yang paling besar terutama terjadi karena sebab ekonomi dan sosial, dan terjadi di pulau Jawa sejak permulaan abad ini, baik dalam bentuk transmigrasi intern maupun extern. Dalam bentuk transmigrasi intern ialah perpindahan orang-orang dari Jawa Tengah atau Madura ke daerah ujung pulau Jawa. Demikian besarnya proses migrasi orang Madura ini sehingga pada tahun 1930 diperkirakan 55% dari penduduk suku Madura ada di luar pulau itu. Transmigrasi extern ialah perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke Sumatra. Kebanyakan transmigrasi jenis ini pelaksanaannya dibantu oleh pemerintah, dan sasaran yang utama ialah Lampung dan Sumatra Timur untuk menjadi petani dan buruh. Perhatian pemerintah untuk mulai melaksanakan transmigrasi sebagai salahsatu bagian dari politik etis, adalah karena laporan tentang kemiskinan penduduk daerah Kedu (Jawa Tengah). Pelaksanaannya dilakukan pada tahun 1905 dengan mengirimkan 155 kepala keluarga ke Lampung. Sampai tahun '20-an pelaksanaan transmigrasi dari Jawa ke Sumatra berjalan tidak begitu lancar. Hal itu disebabkan oleh cara pengaturannya yang kurang baik, cerita-cerita yang menyedihkan tentang nasib mereka oleh para transmigran yang kembali, dan juga adanya praktek-praktek calo yang membujuk petani-petani

miskin pergi ke Deli yang digambarkan sebagai sumber uang yang berlimpah-limpah. Baru sesudah tahun 1930 setelah diadakan perbaikan pelaksanaannya, seperti seleksi terhadap calon transmigran, sistem administrasi, kesehatan, penelitian daerah tujuan, transmigrasi berjalan dengan pesat dan setiap tahun bertambah. Tahun 1932 ada 7.000 jiwa yang ditransmigrasikan, tahun 1937 naik jadi 32.000 jiwa.

Transmigrasi karena sebab politik, budaya dan tradisi, pada umumnya bersifat spontan dan tidak dibantu pemerintah, baik secara perseorangan maupun berkelompok. Transmigrasi karena tradisi dijumpai dari Minangkabau dan Tapanuli. Transmigrasi dari Minangkabau biasanya secara perorangan dengan tujuan bekerja sebagai pedagang atau tukang. Migrasi karena faktor budaya terutama adalah karena keinginan untuk menuntut ilmu pada pendidikan menengah dan tinggi. Umumnya dilakukan oleh penduduk di luar Jawa ke kota-kota di Jawa.

Terjadinya transmigrasi spontan dari luar Jawa ke Jawa yang jumlahnya juga cukup besar, menyebabkan tujuan pemerintah untuk memindahkan sebagian penduduk pulau Jawa, menjadi agak ironis. Tetapi jelas ada keuntungan yang positif dari migrasi yang terjadi masa Pergerakan Nasional tersebut. Sebab dengan terjadinya mobilitas geografis, terwujud pula hubungan yang lebih erat antara beberapa daerah dan dengan terbukanya komunikasi antara mereka maka salah satu benih dari tumbuhnya nasionalisme Indonesia tercipta.

2. *Penyebaran Pengajaran dan Mobilitas Sosial*

Kebutuhan yang makin terasa akan tenaga administrasi karena makin luasnya jaringan administrasi pemerintah kolonial dan kemudian juga setelah meluasnya perkebunan-perkebunan besar, mendesak pemerintah untuk segera membuka suatu jaringan pengajaran. Karena tujuannya memang hanya untuk memperoleh tenaga-tenaga bawahan yang terdidik, maka sampai akhir abad ke-19 sekolah yang disebut modern terbatas sekali.

Sejak pengajaran diperkenalkan, diskriminasi rasial maupun lapisan telah diperlihatkan. Sekolah Kelas Dua dan Sekolah Kelas Satu diperuntukkan pribumi. Sekolah Kelas Dua diperuntukkan lapisan bawah, Sekolah Kelas Satu untuk golongan menengah. Untuk anak-anak Eropa didirikan sekolah khusus yakni ELS (*Europese Lagere School*). Pada awal abad ke-20 sistem sekolah desa atau *volkschool* diperkenalkan kepada masyarakat dengan lama pendidikan tiga tahun. Diciptakannya sekolah ini adalah untuk mengurangi beban biaya pemerintah dan menghilangkan anggapan adanya hubungan sekolah dengan maksud pengkristenan penduduk. Pembangunan dan penyelenggaraannya tergantung kepada kemampuan masyarakat setempat, pemerintah hanya memberi subsidi dan bimbingan. Mutu pelajarannya cukup sekedar bisa baca-tulis dan

berhitung, tetapi murid yang terpandai dan terpilih dapat melanjutkan pada sekolah sambungan atau *vervolg-school*, untuk masa dua tahun. Secara berangsur-angsur sistem ini menggantikan kedudukan Sekolah Kelas Dua sebagai lembaga pendidikan yang terpenting bagi rakyat jelata.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak golongan menengah, didirikan HIS (Hollands Inlandse School = Sekolah Dasar) di mana Bahasa Belanda juga dijadikan bahasa pengantar. Lama pendidikan 7 tahun, dan mereka yang pintar dan mampu dapat melanjutkan lagi ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* = SMP) dan seterusnya ke AMS (*Algemene Middelbare School* = SMA). Di samping itu ada HBS (*Hogere Burgerschool* = SMP + SMA jadi satu) bagi lapisan atas, dengan masa pendidikan 5 tahun. Selain sekolah umum juga ada sekolah kejuruan, seperti sekolah pamongpraja, sekolah guru, sekolah dagang, sekolah teknik dan sebagainya. Murid yang pintar dan mampu, yang biasanya sangat terbatas sekali jumlahnya, dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada mulanya tentu harus ke Eropa (Negeri Belanda), dan baru sesudah tahun 1920 kemungkinan itu lebih besar di Indonesia dengan didirikannya beberapa perguruan tinggi, seperti perguruan tinggi hukum, perguruan tinggi pertanian, perguruan tinggi kedokteran dan perguruan tinggi teknik.

Meningkatkan perhatian masyarakat akan pendidikan modern yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial itu, menyebabkan banyak anak-anak yang berminat tidak tertampung, meskipun jumlah dan jenis sekolah terus bertambah. Bertambahnya minat sekolah itu menyebabkan kemudian tujuan dari pengajaran semula telah menyimpang dan kabur. Tumbuhlah anggapan bahwa sekolah dapat menjadi alat untuk mengubah status sosial seseorang atau memperkuat kedudukan bagi anggota golongan menengah dan atas; bahwa anggota golongan atas sekalipun, bila tidak mempunyai ijazah, akan sulit diterima sebagai pegawai pemerintah atau perusahaan.

Terbatasnya daya-tampung sekolah-sekolah pemerintah, dan adanya keinginan untuk mendirikan sekolah "modern" dalam bentuk lain mendorong timbulnya sekolah swasta, baik sekolah swasta pribumi maupun sekolah swasta asing. Swasta pribumi dapat dibagi berdasarkan atas sekolah-sekolah seperti Taman Siswa, Ksatrian Instituut, Perguruan Rakyat (Jakarta), dan INS Kayutanam (Sumatra Barat); berdasarkan agama seperti yang didirikan oleh Sarekat Islam, Muhammadiyah, sekolah-sekolah agama di Sumtra Barat. Swasta asing umumnya didirikan oleh misi dan zending, terutama di Sulawesi Utara dan Tapanuli Utara. Karena dilola dengan baik, beberapa sekolah ini bahkan melebihi mutu sekolah negeri. Sekolah swasta pribumi kemudian pada umumnya bersikap nasionalistis dan anti-kolonialistis. Sesuatu yang menarik dalam pertumbuhan sekolah swasta pribumi ini ialah peranan sekolah yang diusahakan dan ditujukan untuk kepentingan kemajuan wanita. Pelopor wanita ini antara lain R.A. Kartini (Jawa Tengah), Dewi Sartika (Jawa



R.A. Kartini dengan murid-muridnya

Barat), Walanda Maramis (Sulawesi) dan Rahmah (Sumatra).

Dengan ikutnya pihak swasta dalam bidang pengajaran, maka perluasan pendidikan sudah mencapai desa-desa di seluruh Indonesia. Meskipun di beberapa daerah penyebarannya sangat tidak seimbang, akan tetapi dari jumlahnya dapat diketahui seberapa jauh penyebaran pengajaran dan campur-tangan swasta. Di Sulawesi pada permulaan abad ini diketahui bahwa pada suatu ketika untuk daerah Minahasa saja tersedia sekolah pemerintah 115 buah, swasta umum 14 dan sekolah swasta agama 23 buah, sedang untuk daerah Sulawesi lainnya hanya 20 buah. Di Sumatra, kecuali Tapanuli Utara, jumlah sekolah pemerintah, swasta pribumi, dan misi adalah 98 buah; sedangkan di Tapanuli Utara ketiganya bersama-sama berjumlah 200 buah. Meskipun penyebaran pengajaran sudah meluas, namun bila dibandingkan dengan jumlah penduduk jauh masih kurang. Bahkan yang lulus dari sekolah-sekolah itupun hanya beberapa persen saja. Keadaan ini diperburuk lagi dengan adanya pembatasan hak berdasarkan ras dalam sistem kolonial. Sebagai contoh: pada tahun 1930 jumlah murid sekolah desa adalah 1.229.666 orang tetapi yang melanjutkan ke sekolah sambungan hanya 253.736 orang, dan tahun 1940 adalah 282.358 orang. Pada tahun ajaran 1939/1940 dari 2.310.533 murid (dari segala jenis sekolah dan tingkat) yang tamat atau lulus hanya 510.095

orang. Suatu hal yang menarik juga dalam hal ini ialah bahwa sekolah umum lebih populer dari sekolah kejuruan yang sampai sekarang masih kelihatan. Sebagai contoh, dalam tahun 1930, jumlah murid semua sekolah kejuruan pemerintah adalah 5.233 orang; sedangkan jumlah murid untuk MULO (SMP) saja 6.906 orang. Pada swasta pribumi jumlahnya lebih besar yaitu 15.716 orang.

Pertumbuhan dari pengajaran ini untuk masa-masa tertentu selama periode Pergerakan Nasional juga tidak sama. Untuk sekolah-sekolah pemerintah antara tahun 1910 sampai 1930 merupakan periode perkembangan yang pesat, baik sekolah maupun muridnya. Tetapi dalam periode sesudah itu hingga akhir pemerintahan kolonial perkembangan ini menurun, antara lain karena kebijaksanaan politik waktu itu sebagai akibat depresi ekonomi dunia. Pada sekolah swasta pribumi yang kebanyakan bersifat nasionalistis keadaan yang sama juga terlihat. Karena timbulnya mobilitas sosial yang cepat, maka segala pengaruhnya, terutama di bidang politik, menyebabkan pemerintah pernah mengeluarkan peraturan sekolah-sekolah liar yang pada hakekatnya ditujukan terhadap sekolah-sekolah yang bersifat nasionalistis.

Sehubungan dengan penyebaran pengajaran yang bercorak Barat di mana pelbagai macam ilmu diajarkan, dengan cepat diperluas pula lapangan kerja baru. Dengan adanya spesialisasi bidang ilmu yang dipelajarinya maka pekerjaannya pun sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, begitupun kesempatan yang diperolehnya seharusnya sepadan dengan kemampuannya. Akan tetapi dengan masih adanya diskriminasi ras dan pembedaan golongan berdasarkan keturunan, maka seseorang yang mempunyai kecerdasan sama dalam kesempatan kerja diperbedakan: orang



Sebuah Sekolah Dasar di Maluku waktu jaman penjajahan

kulit-putih dan anak-anak bangsawan serta pejabat tinggi pemerintah (seperti bupati) harus diutamakan atau didahulukan. Sebagai akibatnya timbullah golongan orang-orang terpelajar dan tenaga terdidik Indonesia yang berada di luar sasaran semula. Karena kepincangan tersebut, mereka kemudian bersikap menolak sistem kolonial. Mereka inilah yang kemudian terpanggil untuk memimpin Pergerakan Nasional.

Menyimpangnya maksud semula dari pengadaan pendidikan, seperti timbul dan berkembangnya pelbagai ideologi di kalangan rakyat serta pelebaran diferensiasi kerja, ditambah lagi dengan makin luasnya pengaruh penerobosan ekonomi-uang, menimbulkan adanya dua macam mobilitas sosial. Pertama, *mobilitas vertikal* artinya perubahan status seseorang naik dari tingkat bawah ke tingkat yang lebih atas. Dalam lapangan kepegawaian hal ini kelihatan lebih jelas. Anak-anak dari pegawai yang rendah, karena pendidikan yang mereka peroleh, mempunyai kesempatan untuk melampaui tingkat yang pernah dicapai oleh orangtua mereka. Jadi anak seorang pegawai rendah atau guru sekolah dasar dapat menjadi guru sekolah menengah atau jadi dokter, insinyur, sarjana hukum, dan lain-lain. Dapat dilihat bahwa proses pembirokrasian dari kalangan atas masyarakat Indonesia adalah pengaruh yang terpenting dari jaringan sekolah-sekolah corak Barat. Birokrasi pada sebagian kelas atasan tidak saja terpantul pada kedudukan resmi tetapi juga pada status yang berdasarkan kekayaan. Diperkirakan bahwa 53% dari 4016 orang pribumi yang berpenghasilan 3000 gulden setahun adalah pegawai negeri. Angka-angka ini memberi gambaran betapa pentingnya peranan sekolah dalam proses birokratisasi dan bahwa sekolah lebih banyak ditujukan untuk membentuk tenaga-tenaga yang teruntut sistem kolonial. Kecenderungan ini juga dapat merugikan pemerintah dan membatasi kemampuan sekolah sebagai penerak dalam perkembangan sosial karena mereka yang tidak tertampung, menjadi tidak puas terhadap pemerintah. Pada akhirnya kita mengenal dua jenis elite, yaitu elite birokrat modern dan elite intelektual

Yang kedua adalah *mobilitas horizontal*, artinya perubahan status seseorang dapat berubah-ubah dalam tingkat yang sama. Umpamanya petani dapat menjadi buruh perkebunan atau pabrik maupun tukang yang dalam masyarakat lama belum ada.

3. *Elite-nasional dan Nasionalisme*

Dalam masyarakat umum dikenal adanya beberapa lapisan berdasarkan status-sosialnya, yaitu lapisan bawah, menengah dan atas. Lapisan bawah ialah yang umum disebut rakyat jelata dan merupakan massa yang terbesar dan hidup melarat. Terdapat di desa-desa sebagai petani dan buruh perkebunan, di kota-kota sebagai buruh kecil, tukang-tukang dan sebagainya. Lapisan menengah meliputi para pedagang kecil dan me-

nengah, petani-petani kaya dan pegawai. Adapun lapisan atas terdiri atas keturunan bangsawan atau kerabat raja yang memerintah daerah tersebut dan umumnya mereka terbagi lagi dalam beberapa tingkatan dengan gelar yang berbeda sesuai dengan tingkat hubungan mereka dengan raja. Boleh dikatakan, sifatnya yang turun-temurun itu tidak pernah berubah sampai akhir abad ke-19. Karena itu mereka sebagai elite, biasa disebut elite-tradisionil atau elite-daerah. Yang disebut *elite* adalah suatu kelompok yang berpengaruh dalam sesuatu lingkungan atau masyarakat.

Di samping elite-tradisional yang berdasarkan keturunan itu muncul juga elite-temporer atau disebut juga elite agama. Di sini kedudukan mereka di lapisan atas sukar untuk diturunkan pada anak-cucunya. Hal ini kita jumpai pada pemuka-pemuka agama, sebagai pemimpin rohani, seperti ulama-ulama dan kyai yang sangat berpengaruh tidak hanya di daerahnya tetapi jauh melampaui batas-batas daerahnya. Keadaan ini menyebabkan kadang-kadang pengaruh dan peranan mereka melebihi pengaruh raja atau golongan bangsawan. Perlawanan-perlawanan daerah, terutama yang terjadi pada abad yang lalu, baik ditujukan terhadap kolonialis dan kapitalis asing maupun terhadap elite tradisional, dipimpin oleh elite-agama. Pengaruhnya tidak diikat melalui lembaga pemerintahan (kerajaan), melainkan melalui perguruan yang didirikannya baik berupa pesantren maupun surau.

Oleh karena nasionalisme Indonesia baru tumbuh sejak Kebangkitan Nasional tahun 1908, maka elite yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Mereka hanya terpendang dan dihormati terbatas dalam lingkungan daerah masing-masing. Kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang telah menguasai daerah-daerah di Indonesia ternyata tidak mengubah kedudukan golongan elite tersebut, meskipun di atas mereka sendiri ada lagi elite yang lebih tinggi yaitu elite kulit putih. Hal ini memang disengaja oleh pemerintah kolonial sebab makin utuh masyarakat tradisional semakin baik. Karena dengan begitu mobilisasi penduduk untuk keperluan eksploitasi ekonomi akan lebih baik, dan ikatan budaya dan politik antara Hindia Belanda dan negeri-induk akan lebih terjamin. Di samping itu luasnya daerah Indonesia dengan berbagai macam ragam adat dan kebiasaan untuk mengaturnya dengan baik dan lancar tentu menghendaki suatu administrasi kolonial yang besar dan mahal. Untuk menghemat biaya, tenaga bangsa Indonesia dipergunakan untuk membantu kelancaran administrasi pemerintah kolonial dan untuk itu kekuasaan mereka tetap dipertahankan. Dengan demikian pemerintah Belanda memelihara penguasa tradisional dalam menghadapi rakyatnya sendiri, akan tetapi hal itu juga akan memperlemah mereka dalam berhadapan dengan pemerintah Belanda.

Keadaan tersebut di atas mulai berubah setelah hasil dari politik etis yang dijalankan di Indonesia kelihatan pada akhir abad ke-19. Perluasan

pengajaran, baik dalam bidang ilmunya, tingkatannya maupun penyebaran sekolahnya, makin menarik perhatian rakyat. Sekolah kemudian dianggap sebagai alat untuk dapat memasuki lingkungan hidup baru, "hidup kepriyayan", bagi golongan bawah dan untuk menambah dasar legitimasi bagi golongan atas. Di beberapa daerah seperti di Sumatra Barat dan Jawa pentingnya penguasaan ilmu sebagai hasil pendidikan sekolah dikaitkan dengan dapat-tidaknya seseorang itu menjadi pegawai. Sultan Hamengkubuwono VIII umpamanya pada akhir abad ke-19, mengharuskan adanya ijazah bagi seorang anak yang akan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pejabat pemerintah. Di samping itu pengaruh penetrasi ekonomi-uang dalam kehidupan masyarakat Indonesia makin kelihatan baik karena pembukaan perkebunan-perkebunan besar, pembangunan pabrik-pabrik maupun kedudukan uang sebagai alat penukar yang makin penting. Kedua hal tersebut telah memungkinkan terjadinya pergeseran-pergeseran dan perubahan status-sosial seseorang. Juga timbul kemungkinan tumbuhnya suatu elite baru Indonesia. Dengan demikian kita lalu mengenal bermacam-macam elite Indonesia baru, seperti elite politik, elite budaya, elite agama dan sebagainya yang karena kesemuanya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional, disebut *elite-nasional*.

Seiring dengan pertumbuhan masyarakat di segala bidang, maka kota-kota besar yang menjadi pusat pengajaran dan pendidikan, perdagangan dan industri lebih menarik perhatian generasi muda daripada kota-kota yang hanya merupakan tempat pemerintahan saja. Karena pusat-pusat tersebut terbatas hanya pada beberapa kota saja, seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya, maka ia merupakan tempat bertemunya pelajar-pelajar dan pemuda-pemuda dari berbagai daerah yang berbeda adat-istiadat dan kedudukan sosial mereka. Ilmu yang sama-sama mereka terima pada bangku sekolah memberikan kepada mereka suatu pola berpikir yang sama mengenai sesuatu. Dengan demikian sekolah juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara mereka, sehingga memudahkan pendekatan-pendekatan sesama mereka. Contoh mengenai ini dapat dilihat pada organisasi-organisasi pemuda pada masa awal kebangkitan nasional dan pada partai-partai politik.

Diperkenalkannya berbagai macam ilmu di sekolah dan masuknya paham-paham baru, memungkinkan mereka untuk mengkaji semua aspek dalam masyarakat dan membandingkan pengaruhnya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kesimpulan bersama yang diperoleh menunjukkan adanya kesamaan nasib yang buruk dari daerah-daerah itu akibat penjajahan dan adanya tekad bersama untuk memperbaikinya. Bersamaan dengan timbulnya elite-nasional karena pengaruh politik etis, kebangkitan Islam juga mendorong pertumbuhan elite nasional. Pembaharuan dalam pengajaran Islam seperti yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, Sarekat Islam dan lain-lain, memungkinkan seorang ulama atau kyai suatu daerah

juga menjadi tokoh nasional di bidang politik, sosial dan sebagainya.

Pelajar-pelajar STOVIA dan kemudian anggota Budi Utomo, mengambil kesimpulan bahwa tanpa perluasan pengajaran, kemajuan bangsa Indonesia akan lambat sekali. Sarekat Islam berpendapat tanpa meningkatkan persatuan dan kerjasama antara semua pedagang pribumi, maka kekuasaan kapitalis asing (Cina dan Barat) akan sulit diatasi. Pemikir dari elite nasional, seperti Moh. Hatta, menyatakan pokok pikirannya sebagai berikut: bahwa ekonomi bangsa Indonesia harus dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri dengan azas gotong-royong melalui sarana koperasi. Tjokroaminoto menyebut kapitalisme asing: *zondig kapitalisme* (kapitalis berdosa) karena menyengsarakan rakyat. Untuk itu rakyat harus dibangunkan dan dibimbing ke arah persatuan dan kerjasama yang kuat. Dalam anggaran dasar dan program kerja banyak partai-partai dan organisasi daerah, kelihatan tekad bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan semua cita-cita untuk meningkatkan martabat bangsa dapat dicapai.

Sesuatu yang menarik juga dalam timbulnya elite-nasional ini ialah perjuangan golongan Indo yang dalam masyarakat kolonial dianggap rendah dan kurang mendapat kesempatan. Beberapa orang tokohnya seperti Douwes Dekker, melalui Indische Partij muncul sebagai anggota elite-nasional Indonesia karena tujuan perjuangannya adalah menciptakan suatu persatuan nasional dari semua golongan yang ada di Indonesia dalam suatu negara merdeka. Di samping itu perubahan-perubahan dalam ketatanegaraan di Indonesia juga telah membantu proses timbulnya elite tersebut.

Penderitaan yang dialami sebagai rakyat terjajah, telah menimbulkan pada rakyat mitos-mitos seperti Ratu Adil, ramalan Joyoboyo dan sebagainya. Kepada tokoh-tokoh seperti HOS Tjokroaminoto yang dianggap sebagai Ratu Adil kemudian digantungkan harapan perbaikan nasib rakyat. Muncullah waktu itu tokoh-tokoh yang berpengaruh di kalangan rakyat, seperti HOS Tjokroaminoto, dr. Tjipto Mangunkusumo, dr. Sutomo, Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, Haji Agus Salim, Abdul Muis, K.H. Ahmad Dahlan, Semaun, pada masa awal Pergerakan Nasional; dan kemudian Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sartono, Muhammad Husni Thamrin, G.S.S.J. Ratu Langie dan banyak lainnya lagi pada waktu berikutnya.

Jelas bahwa pengaruh sistem pendidikan Barat adalah sangat menonjol dalam menumbuhkan elite nasional. Dengan ilmu, mereka menghasilkan ide dan pemikiran sendiri untuk kemajuan masyarakat. Begitupun keahlian seseorang dalam suatu ilmu telah mendesak keturunan sebagai ukuran bagi penentuan status seseorang. Dapat dikatakan bahwa pada masa Pergerakan Nasional secara keseluruhan, status bangsawan atau elite tradisional

merosot bahkan telah dilampaui oleh golongan intelektual atau elite nasional.

Elite nasional yang telah mempunyai dasar baru dalam memandang masyarakat sekitarnya, yaitu nasionalisme Indonesia, berusaha mengubah pandangan yang bertolak dari lingkungan daerah masing-masing. Walaupun telah memiliki pola berpikir yang sama, namun karena berasal dari tingkat sosial dan ekonomi serta daerah yang berbeda-beda, masih terdapat juga perbedaan di dalam cara mereka memandang lingkungannya. Hal itu jelas memberi warna kepada perumusan azas-azas dan cita-cita. Namun mereka yakin bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia hanya akan tercapai apabila nasionalisme telah tumbuh dengan subur sehingga merupakan kekuatan yang merata yang mengikat semua sukubangsa di Indonesia dalam ikatan persatuan nasional yang kokoh. Merekapun sadar bahwa untuk mempercepat proses tercapainya hal tersebut perlu disusun organisasi rakyat dengan membentuk partai dan perserikatan massa yang mempunyai keanggotaan yang luas.

Selaras dengan modernisasi yang terjadi di Indonesia, meluasnya pengajaran dan berkembangnya media komunikasi massa telah menguntungkan elite nasional dalam menyebar-luaskan tatapikir nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu makin luasnya penggunaan bahasa Indonesia (Melayu) pada penduduk yang bukan berbahasa Melayu, telah mempermudah usaha "nation building", sebab penjelasan mengenai ide nasionalisme tidak hanya dapat dimengerti oleh golongan atas saja, melainkan juga oleh golongan bawah. Namun dirasakan waktu itu bahwa komunikasi yang paling tepat adalah melalui pendidikan sekolah. Karena itu baik partai-partai maupun organisasi massa, bahkan perorangan, berlomba-lomba memberikan pendidikan dan pengajaran kepada rakyat. Sejak dari Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, PKI, PNI, sampai kepada partai-partai sesudah tahun 1930, seperti Partindo, Gerindo, Parindra dan sebagainya, melaksanakan hal itu.

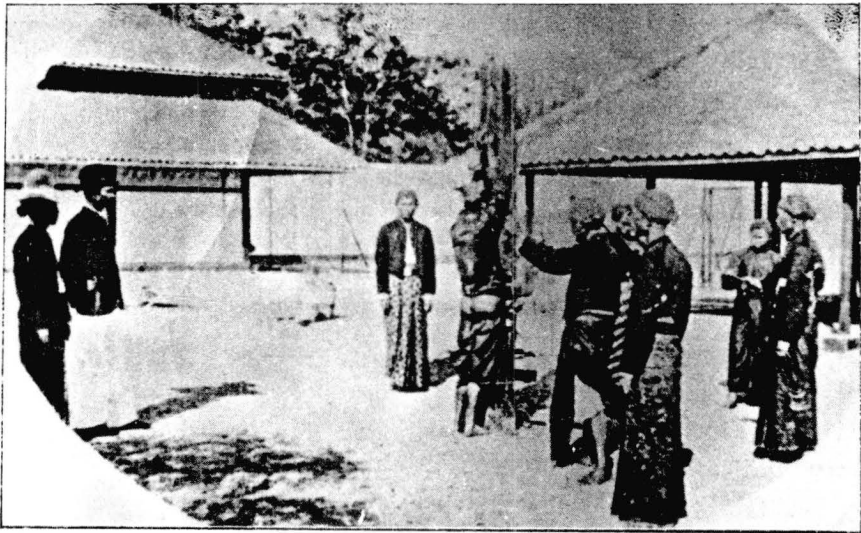
Media pers, yang dipandang paling jauh jangkauannya, juga dipergunakan, dan dalam puluhan surat kabar dan majalah yang terbit dalam lingkungan elite nasional, selalu diserukan agar rakyat Indonesia bangkit dan bersatu-padu menghadapi kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme. Bahwa tidak akan mungkin mencapai kemerdekaan apabila persatuan dan kesatuan seluruh rakyat tidak tergalang.

Puncak dari peranan elite nasional dalam menumbuhkan nasionalisme tercapai dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia. Di sini dengan tegas telah dicamkan ide nasionalisme Indonesia dalam hati sanubari Rakyat di seluruh tanahair dari Sabang sampai Merauke.

1. Politik Etis

Sistem tanam paksa yang dijalankan oleh pemerintah kolonial dengan kekerasan untuk mengejar keuntungan yang berlimpah, ternyata tidak diterima baik oleh semua orang Belanda. Penderitaan rakyat yang tiada taranya karena pengorbanan tenaga, waktu, milik, bahkan martabatnya, untuk kepentingan penjajah asing, telah menggugah hati nurani sekelompok orang Belanda. Mereka melancarkan kritik terhadap eksploitasi rakyat Indonesia yang berlebih-lebihan itu.

Eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia yang dilakukan dengan sistem ekonomi liberal, ternyata tidak mengubah nasib rakyat. Perusahaan-perusahaan raksasa asing yang diperkenankan masuk dari Inggris, Amerika, Belgia, Cina, Jepang dan perusahaan-perusahaan Belanda sendiri, sama-sama mengejar keuntungan yang tanpa batas tanpa memperhatikan kesejahteraan penduduk yang memberi keuntungan. Ratusan juta gulden mengalir ke kantong kapitalis. Politik eksploitasi itu juga menimbulkan kritik dari beberapa partai di Negeri Belanda, tetapi karena mereka sendiri terlibat dalam sistem itu maka kritik itu maknanya menjadi kabur. Ekspansi yang dilakukan Belanda ke daerah-daerah yang belum dikuasainya menjelang akhir abad ke-19, tidak terlepas dari perkembangan kapitalisme itu.



Hukuman belenggu dan kerja paksa terhadap rakyat

Dengan pesatnya perkembangan kapitalisme pada awal abad 20, seperti produksi gula yang naiknya berlipat dua antara tahun 1904 dan 1914, hasil produksi dari pembukaan daerah luar Jawa (perkebunan dan tambang) dari 74 menjadi 305 juta gulden, maka pertahanan daerah jajahan makin diperkuat. Pemerintah kolonial dengan birokrasinya menjaga kepentingan-kepentingan modal sebaik-baiknya. Akibatnya ialah bahwa tekanan terhadap rakyat semakin kuat, dan pembelaan haknya terhadap keganasan kapitalisme modern semakin lemah dan kemerosotan kesejahteraan hidupnya semakin pesat.

Rakyat semakin kehilangan hak-miliknya yang utama, yaitu tanah, bahkan industri rakyatpun mulai terdesak ke belakang. Karena penderitaan ini, lama-lama timbullah golongan yang sama-sekali tidak mempunyai tanah dan muncullah golongan buruh yang bekerja pada perkebunan, pabrik dan tambang. Untuk menunjang pesatnya kemajuan kapitalisme itu, sarana-sarana bantu diciptakan seperti pembuatan jalan raya, jalan kereta-api, bandar dan sarana-sarana telekomunikasi.



Cara mencari minyak bumi di Sumatra

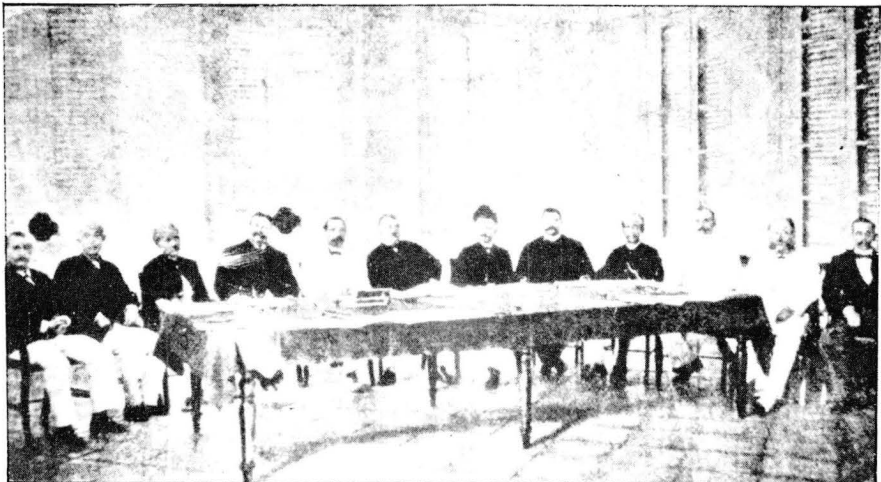
Tumbuhnya kesadaran perikemanusiaan dalam hubungan kolonial, yang melahirkan keinginan untuk memperhatikan nasib rakyat pribumi menjadi program semua partai politik di Negeri Belanda. Pandangan itulah yang kemudian dikenal sebagai haluan *etis*, yang kemudian melahirkan *politik etis*. Politik ini kemudian didukung oleh politik asosiasi yang memandang perlunya kerjasama yang erat antara golongan Eropa dan rakyat pribumi untuk kemajuan tanah jajahan. Sudah tentu kemajuan yang dimaksud itu adalah dalam rangka sistem kolonial. Akhirnya sikap

paternal (membapaki) dalam politik kolonial mulai tampak dalam pidato takhta Ratu Belanda pada tahun 1901, di mana dinyatakan bahwa "Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Hindia." Politik etis mulai dilaksanakan dengan pemberian bantuan sebesar 40 juta gulden.

Begitulah selama periode antara tahun 1900 — 1914 pemerintah kolonial mulai memperhatikan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan emansipasi dan kemerdekaan. Dicarilah bentuk pemerintahan kolonia yang merupakan suatu sistem di mana Barat dan Timur dapat hidup berdampingan dan yang memberi kemungkinan untuk mempersatukan kedua unsur dalam suatu kesatuan politik. Juga terlihat selama periode tahun 1900 — 1925 banyak kemajuan serta perubahan. Bangunan-bangunan besar didirikan, kesemuanya merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dielakkan. Di antaranya ialah:

- a). desentralisasi
- b). perubahan-perubahan pemerintahan
- c). perbaikan kesehatan rakyat, emigrasi (transmigrasi)
- d). perbaikan pertanian dan peternakan
- e). pembangunan irigasi dan lalulintas.

Pada tahun 1903 diumumkan Undang-undang Desentralisasi yang menciptakan dewan-dewan lokal, yang mempunyai wewenang membuat peraturan-peraturan tentang pajak dan urusan-urusan bangunan umum (yang sekarang dilola oleh PUTL). Pada tahun 1905 didirikan dewan kota di Jakarta, Jatinegara dan Bogor, dan sudah tentu mayoritas anggotanya orang Belanda. Dalam rangka desentralisasi ini, secara berangsur-angsur dibentuk provinsi dan kabupaten sebagai daerah otonom.



Pengangkatan Dewan Kota Jatinegara tahun 1905

Perpustakaan
Direktorat Perliadangan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Kebudayaan

Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut diadakanlah dinas pertanian, perikanan, kerajinan, kesehatan dan peternakan. Pada bidang pendidikan dilakukan perluasan pengajaran pada tahun 1907. Dan sehubungan dengan perluasan aktivitas pemerintah kolonial, didirikanlah departemen-departemen baru. Departemen Pertanian (1904), Departemen Perusahaan-perusahaan Negara, yang pada tahun 1911 digabungkan menjadi Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan.

Untuk meningkatkan kesehatan rakyat, dilakukan pemberantasan penyakit menular, seperti pes, kolera, malaria dan sebagainya. Untuk mengurangi penduduk pada daerah-daerah yang padat di Jawa, karena makin meluasnya daerah perkebunan dan bertambahnya penduduk, dilakukan transmigrasi. Mula-mula dari daerah Jawa Tengah ke ujung Jawa Timur untuk bekerja pada perkebunan tebu. Transmigrasi ke daerah luar Jawa dikirimkan sebagai tenaga kerja ke daerah-daerah perkebunan Sumatra Utara, khususnya di Deli, sedangkan transmigrasi ke Lampung mempunyai tujuan untuk menetap. Sejak permulaan abad ini telah dilakukan perluasan pengajaran baik sekolah umum maupun kejuruan dalam berbagai tingkat. Begitupun beberapa jenis perguruan tinggi dibuka seperti perguruan pertanian di Bogor (1902) dan perguruan tinggi hukum (1909). Pada masa ini sekolah swasta mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Untuk meningkatkan pertanian, pemerintah membangun sistem irigasi yang luas, seperti irigasi Brantas di Jawa Timur. Untuk kepentingan petani dan rakyat kecil didirikan bank-bank kredit pertanian, bank padi, bank simpanan dan rumah-rumah gadai. Koperasi juga didirikan, tetapi kurang mendapat kemajuan. Meskipun usaha ini tidak berhasil mendorong produksi pribumi, tetapi telah berhasil mendidik rakyat mengenai penggunaan uang.

Meskipun pemerintah telah dapat melaksanakan pembangunan di pelbagai bidang akan tetapi oleh karena tujuannya terutama sekali adalah untuk kepentingan negeri-induk dan kaum kapitalis Belanda, hasilnya tidak begitu terasa oleh rakyat. Bahkan kehidupan rakyat makin tergantung kepada pengusaha dan pemilik modal sebagai penyewa tanah dan tenaganya. Tingkat kehidupan ekonomi rakyat tetap rendah. Perbedaan di bidang ekonomi, sosial dan politik antara golongan asing dengan golongan pribumi sangat besar. Bahkan diskriminasi berdasarkan warna kulit semakin tajam. Karena menguntungkan, perbedaan yang menyolok tersebut tetap dipertahankan.

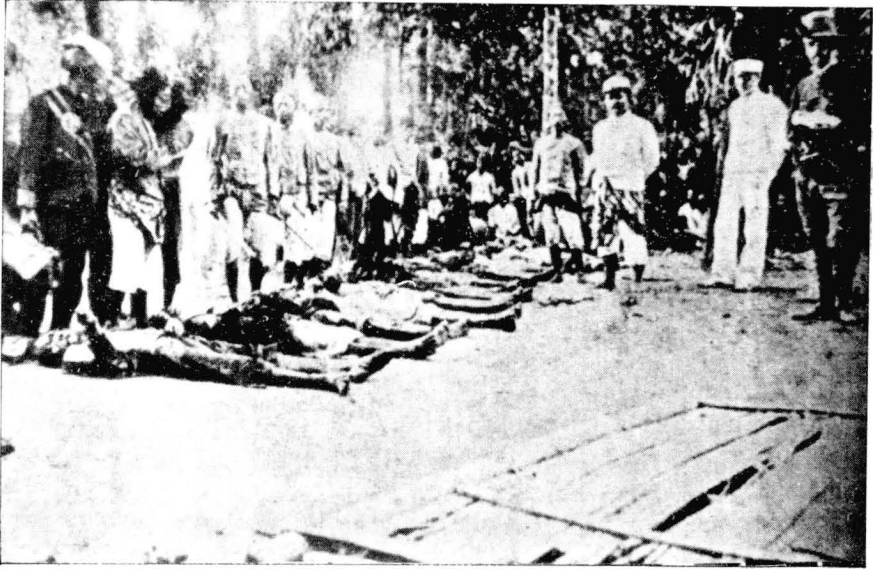
Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual Indonesia yang penuh dengan kesadaran akan harga dirinya dan sebaliknya sadar akan keadaan serba terbelakang dari masyarakatnya. Timbullah dari kesadaran kaum intelektual Indonesia itu aspirasi-aspirasi untuk mencapai kemajuan yang mereka anggap menjadi haknya dan hak masyarakatnya.

Selama masa 1900 — 1914 terdapat suasana baik bagi politik etis dan tidak banyak terdengar kritik terhadapnya. Tetapi sejak 1914 masyarakat mulai bergolak dan banyak dilancarkan kecaman-kecaman bahwa politik etis telah gagal. Dalam kecaman itu juga diutarakan bahwa politik paternalistis tidak memperhitungkan hasrat pada pribumi sendiri setelah ada kesadaran pada mereka. Begitupun dengan munculnya Pergerakan Nasional, maka politik asosiasi praktis kehilangan dasar existensinya. Perkembangan selanjutnya menunjukkan kecenderungan ke arah radikalisasi, baik pada pihak pribumi maupun pada pihak Eropa. Pada pihak pribumi, lebih radikalnya pihak Pergerakan Nasional disebabkan oposisi yang dilakukan ditandai oleh perbedaan ras, sedangkan kebebasan dan kemerdekaan diberi prioritas lebih tinggi dari pada kesejahteraan.

Menghadapi keadaan baru yang tumbuh di kalangan rakyat tersebut, di pihak kolonialis terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menganjurkan untuk menggantikan politik *bevoogding* (mengasuh selaku wali) menjadi politik *ontvoogding* (mendewasakan), di mana sikap keras dan mengancam lambat-laun harus dikurangi. Golongan yang menyokong Hindianisasi (Indonesianisasi) menganjurkan supaya nasionalisme dihadapi dengan meluaskan lembaga-lembaga pengajaran, aparat pemerintah dalam bidang sosial dan mencegah penggunaan ukuran Barat. Dengan demikian secara langsung dikehendaki agar nasionalisme Indonesia diakui secara resmi. Pihak para penguasa, terutama Gubernur Jenderal, sangat menguatirkan perkembangan itu, oleh karena dipandang dapat mengancam kelangsungan-hidup kolonialisme Belanda. Tentangan serupa juga terdapat di kalangan Belanda yang konservatif, baik pejabat pemerintah maupun pengusaha-pengusaha.

2. Politik Kolonial Sampai Akhir Hindia Belanda

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, terjadi perubahan dalam politik kolonial Belanda. Politik etis dan politik asosiasi yang semula diharapkan dapat mempererat hubungan antara Indonesia dengan Negeri Belanda, mulai ditinggalkan. Pertentangan kepentingan antara pihak nasionalis Indonesia dengan pihak kolonialis dan kapitalis Belanda semakin tajam. Perbedaan yang sangat menyolok dalam kesejahteraan antara golongan pribumi dan golongan asing menimbulkan perasaan tidak puas dan di mana-mana timbul pemberontakan-pemberontakan petani seperti di Jambi (1916), Pasarrebo (1916), Cimareme (1918) dan Toli-toli (1920). Organisasi-organisasi seperti Centraal Sarekat Islam, *Personeel Fabrieksbond* (Serikat Karyawan Pabrik) menjadi saluran bagi kegelisahan masyarakat, dan mulai menggunakan gerakan buruh sebagai senjata. Pada waktu itu pula mulai terdengar semboyan sosialis seperti perjuangan kelas melawan modal asing. Pergolakan di Indonesia kemudian mendapat dorongan dengan adanya pergolakan politik di Negeri Belanda.



*Korban penindasan pemberontakan di Kertosono (Jawa Timur)
tahun 1907*

Untuk meredakan gejolak yang terjadi di dalam masyarakat, Gubernur Jenderal van Limburg Stirum (seorang yang moderat) mengeluarkan janji pada bulan November 1918 untuk membentuk Komisi Peninjauan Kembali (*Herzienings Commissie*) yang akan meninjau kekuasaan *Volksraad* (Dewan Rakyat) dan struktur administrasi pemerintah Hindia Belanda. Meskipun kebijaksanaan ini disokong oleh Menteri Jajahan, tetapi di Negeri Belanda timbul reaksi yang keras karena dianggap sebagai konsesi yang tidak bertanggungjawab. Komisi Peninjauan Kembali kemudian melaporkan hasil penyelidikannya, antara lain:

- a). Hubungan antara Negeri Belanda dan Indonesia (Hindia Belanda) perlu diatur kembali berdasarkan landasan baru.
- b). Pusat kekuasaan perlu dipindahkan ke Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda harus mencakup unsur-unsur pribumi.
- c). *Volksraad* perlu diberi kekuasaan legislatif.

Pergantian Gubernur Jenderal dan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1921, menyebabkan politik kolonial mengalami perubahan. Gubernur Jenderal Fock, yang mendapat tugas untuk menghemat anggaran belanja dan menaikkan pendapatan dengan menaikkan pajak, memerintah secara diktatorial dengan mengabaikan kekuatan rakyat yang sedang berkembang. Krisis ekonomi menyebabkan upah karyawan menjadi turun bahkan pengangguran meningkat, yang menyebabkan kegelisahan sosial

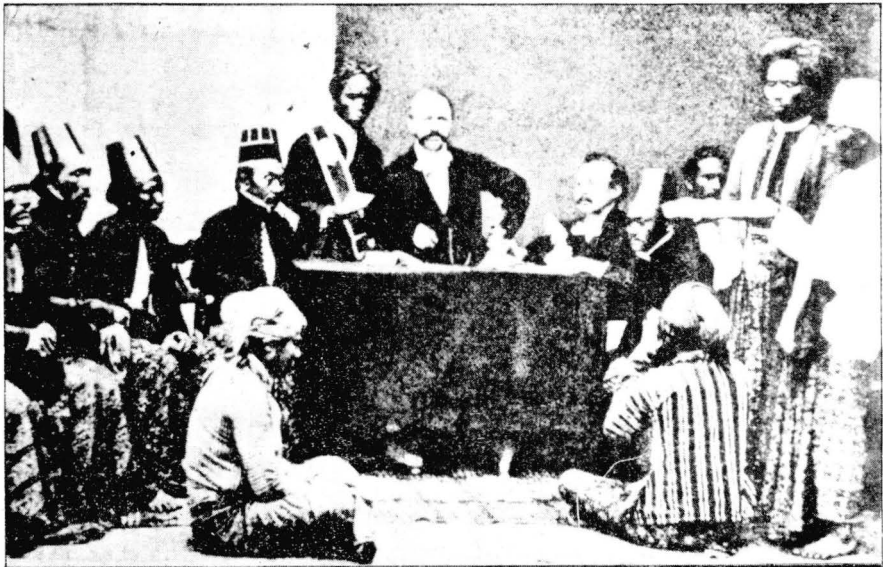
dan ketegangan politik meningkat. Dalam keadaan sosial-ekonomi yang demikian, pemerintah melaksanakan kebijaksanaan politik penindasan di mana pemerintah sepenuhnya membela kepentingan kapitalis dengan samasekali mengalahkan kepentingan rakyat yang sudah sangat menderita. Untuk kepentingan kaum kapitalis asing, pajak export minyak tanah dihapuskan dan pajak industri gula dikurangi, padahal keduanya berjumlah kira-kira 100 juta gulden setahun. Jadi jelas merugikan pemerintah kolonial. Sebaliknya pajak rakyat dinaikkan, antara tahun 1919 sampai 1921 setiap tahun kira-kira 24 juta gulden, pada tahun 1922 meningkat jadi 28 juta gulden dan pada tahun 1925 jadi 34 juta gulden. Selama pemerintah Fock tekanan pajak pada penduduk Jawa dan Madura naik dengan 40%. Semua anggaran belanja dari bidang kesejahteraan rakyat mengalami pemotongan seperti kesehatan rakyat, pertanian, peternakan, perikanan dan perdagangan.

Kebijaksanaan ini menimbulkan protes di mana-mana, antara lain pemogokan karyawan pegadaian tahun 1922 dan Jawatan Kereta-api pada tahun 1923. Reaksi pemerintah sangat keras, hak berapat dicabut, pemimpin pemogokan seperti Abdul Muis dan Suryopranoto ditangkap dan ratusan karyawan dipecat. Akibat kebijaksanaan politik pemerintah itu, Pergerakan Nasional menjalankan sikap non-kooperasi. Artinya dalam usaha mencapai cita-cita Indonesia Merdeka tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah kolonial, dan usaha membina kesatuan dan persatuan bangsa digerakkan dengan lebih intensif baik di Indonesia maupun di Negeri Belanda. Waktu itu pengaruh golongan sosialis dan komunis di dalam Pergerakan Nasional sangat kuat.

Sementara itu perubahan-perubahan di bidang administrasi pemerintahan dan ketatanegaraan terus dilaksanakan mengikuti usul Komisi Peninjauan Kembali. Dalam Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda tahun 1922 ditetapkan bahwa daerah Indonesia adalah bagian integral dari Kerajaan. Pemerintah Tertinggi Hindia Belanda ada pada Mahkota, sedangkan pemerintahan umum dijalankan oleh Gubernur Jenderal dan diatur dalam undang-undang, kecuali untuk kekuasaan yang menjadi hak Mahkota. Perubahan itu makin diperjelas lagi dengan ditetapkannya tatanegara (*staatsinrichting*) tahun 1925 untuk Hindia Belanda. Usaha perubahan pemerintahan itu tidak begitu memuaskan kaum nasionalis dan kaum progresif Belanda. Mereka membentuk suatu panitia yang diketuai Oppenheim dengan anggota ahli-ahli terkenal mengenai Indonesia, untuk merumuskan suatu pernyataan tentang sistem politik di Indonesia. Dalam laporannya mereka mengemukakan usul resmi dari Komisi Peninjauan Kembali yang hanya mementingkan perubahan undang-undang dan bukan penyerahan pemerintahan. Dalam kenyataannya perubahan yang diadakan lebih terbatas lagi, bahkan kurang dari yang diusulkan oleh Komisi Peninjauan Kembali. Jumlah anggota pribumi di dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*) dikurangi, perbedaan pendapat antara Gubernur Jenderal dan Dewan

Rakyat diserahkan keputusannya kepada Mahkota, dan anggaran belanja tetap ditentukan oleh parlemen Belanda.

Perkembangan masyarakat Indonesia yang pesat ke arah dunia modern sebagai akibat kemajuan perdagangan, perusahaan dan komunikasi memerlukan diferensiasi serta spesialisasi dalam berbagai kedinasan sebagai unsur pemerintahan modern. Struktur pamongpraja perlu diperbaiki. Dinas-dinas baru perlu dibentuk, seperti dinas pajak, dinas pajak tanah, dinas koperasi dan kredit rakyat, dinas kesehatan dan sebagainya. Contoh yang jelas dari perbaikan ini ialah pemisahan pamongpraja dan pengadilan, dengan menghapuskan pengadilan polisi oleh pamongpraja dan diganti dengan pengadilan negeri.



Sebuah pengadilan negeri di Jawa. Saksi sedang disumpah

Pada tahun 1928 timbullah suatu aliran perubahan dalam pemerintahan, yang juga terkenal sebagai gerakan *ontvoogding* (pendewasaan) terhadap pamongpraja pribumi. Dasar politik ini ialah prinsip protektorat, yaitu yang hendak membiarkan penduduk pribumi ada di bawah pimpinan kepalanya sendiri baik yang diakui maupun yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi oleh karena intensitas pemerintah Belanda di luar pulau Jawa kurang daripada di Jawa, maka juga kurang terasa pengaruh dari proses desentralisasi, spesialisasi dan *ontvoogding* seperti dilakukan di Jawa.

Bila diteliti, perubahan-perubahan yang dilakukan masih dipengaruhi dan ditentukan oleh prinsip diskriminasi-ras, yang merupakan tulang-

ini mendapat sokongan kuat dari kalangan Pergerakan Nasional. Akan tetapi kembali pemerintah Belanda mencurigai maksud GAPI, yang dituduh menanggung di air keruh. *Komisi Visman* yang dibentuk untuk menjajagi keinginan rakyat, tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diharapkan. Janji pemerintah Belanda yang akan memperbaiki status Indonesia sesudah Perang Dunia II berakhir, tidak begitu diindahkan oleh rakyat Indonesia, karena janji Asia Raya oleh Jepang dipandang lebih menarik untuk Kemerdekaan Indonesia.

C. KOMUNIKASI SOSIAL

1. *Pendidikan Kolonial dan Pendidikan Nasional*

Di bagian depan telah dibicarakan bahwa politik etis yang dijalankan pemerintah kolonial pada pertengahan abad yang lalu telah membawa pengaruh timbulnya mobilitas sosial dan selanjutnya timbulnya nasionalisme Indonesia. Timbulnya mobilitas sosial dan nasionalisme juga dihubungkan dengan adanya komunikasi sosial yang meningkat di dalam masyarakat Indonesia. Salahsatu sarana bagi meningkatnya komunikasi sosial adalah pendidikan, baik yang bercorak kolonial maupun nasional. Pendidikan yang bercorak kolonial pada umumnya dilaksanakan pada sekolah-sekolah yang diusahakan oleh pemerintah dan swasta asing dengan tujuan untuk mendidik penduduk ke arah kemajuan, dalam rangka usaha membuka pasaran bagi industri Barat maupun untuk mengisi kebutuhan akan tenaga-tenaga terlatih bagi perusahaan-perusahaan Barat itu. Pada pendidikan yang bercorak kolonial, meskipun hasilnya ada yang menyimpang dari maksud semula didirikannya, murid-murid diarahkan pada tumbuhnya kesetiaan mereka kepada pemerintah kolonial. Dengan memperkenalkan budaya Barat (Belanda) diharapkan percampuran antara budaya Barat dan Timur yang akan menguntungkan kolonialisme Belanda. Di samping itu usaha pendidikan yang dilakukan oleh misi dan zending ada kecenderungannya ke arah penetrasi agama sebagai salahsatu langkah untuk memperkuat penjajahan Belanda. Maksud yang terselubung dari pendidikan kolonial itu telah menimbulkan rasa tidak senang pada pihak orang Indonesia.

Politik asosiasi yang ingin bekerjasama dengan rakyat Indonesia tetapi secara terpisah, ternyata telah mendorong meningkatnya diskriminasi maupun radikalisasi dalam pertarungan politik. Pandangan semacam itu dikecam oleh seorang tokoh, yang bernama A.D.A. de Kat Angelino, dengan gagasan politik asosiasi, yang juga tercermin pada pendidikan kolonial, yang tidak dapat menghasilkan kesatuan karena budaya Barat hanya diterima secara dangkal dan tidak ada adaptasi antara budaya Barat dan Timur. Jalan yang sebaiknya adalah budaya Barat dan Timur saling "membuahi". Dengan demikian peranan budaya Barat adalah memberi kekuatan moral dan spiritual

untuk menjiwai evolusi Timur, jadi mewujudkan kerjasama Timur-Barat yang selaras, dengan jalan menghargai sifat masing-masing dalam segala bidang. Politik kolonial harus memajukan sintese ini dan memenuhi panggilan kepemimpinan Barat, dan juga untuk membangun suatu masyarakat dengan Timur dan Barat sebagai komponennya. Pemikiran itu jelas memperlihatkan anggapan bahwa peradaban Barat lebih tinggi dari peradaban Timur. Pada sekolah-sekolah yang bercorak kolonial terasa sekali diskriminasi dalam pemilihan murid dan lulusan sekolah, baik pada pendidikan rendah maupun pendidikan tinggi. Juga bahasa pengantar untuk ilmu, yaitu bahasa Belanda, tidak disebar-luaskan kepada penduduk. Dari kenyataan di atas kelihatan bahwa pemerintah ingin membatasi proses modernisasi atau westernisasi sampai sekecil-kecilnya. Di samping itu Belanda tidak mempunyai "misi memperadabkan" sehingga tidak ada usaha untuk mendidik elite yang menjadi pelopor dari akulturasi yang menyebarkan budaya Belanda (Barat) kepada rakyat Indonesia. Tidak ada usaha untuk mengadakan asimilasi politik di mana bangsa Indonesia dijadikan warganegara penuh dari Kerajaan Belanda dengan segala haknya. Juga tidak ada maksud untuk menjadikan Indonesia sebagai provinsi Belanda dengan ibukota politik dan pusat pemerintahan di Negeri Belanda.

Akibat dari politik non-akulturatif yang dijalankan pemerintah, proses westernisasi sangat terhambat, pendidikan terbatas, proses emansipasi sangat lambat, sangat kurang latihan ketrampilan teknik sedangkan perkembangan ke arah kemerdekaan politik sangat perlahan. Keuntungannya bagi Indonesia adalah bahwa banyak lembaga tradisional yang utuh, dan erosi kultural tidak sederas di daerah-daerah yang mengalami asimilasi dengan kekuasaan kolonial.

Kaum terpelajar yang tidak puas terhadap pelaksanaan pendidikan kolonial, karena mereka anggap terbatasnya pelaksanaan pendidikan itu maupun karena pendidikan kolonial bercorak Barat, mendirikan sekolah-sekolah yang bercorak nasional. Usaha ini juga tidak terbatas hanya pada organisasi yang dikendalikan pria saja tetapi juga dijumpai pada ruang-ruang pendidikan yang khusus didirikan, dilaksanakan dan ditujukan untuk kaum wanita. Pendidikan yang bercorak nasional inipun ada yang bersifat umum, ada pula yang berdasarkan agama mulai tingkatan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Kelihatan pada waktu itu bahwa usaha untuk mendidik angkatan muda dengan jiwa nasional merupakan bagian penting dari Pergerakan Nasional Indonesia, dan dianggap merupakan dasar bagi perjuangan meninggikan derajat rakyat. Karena itu banyak partai-partai dan organisasi massa memasukkan hal itu ke dalam programnya di samping adanya keinginan khusus pula untuk membentuk kader-kader.

Pada kaum wanita pendidikan itu pada mulanya kelihatan dalam usaha-usaha yang dirintis oleh R.A. Kartini pada tahun-tahun pertama abad ini. Pada tahun 1904 R. Dewi Sartika mendirikan Sekolah Istri dan kemudian menjadi Keutamaan Istri. Di Minahasa terdapat usaha Maria Walanda

Maramis, di Sumatra dipimpin dalam organisasi seperti Karajinan Amai Setia, di Jakarta oleh organisasi Putri Mardika. Kesemuanya itu pada mulanya bertujuan sekedar untuk meninggikan derajat kaum wanita, baru kemudian meluas ke bidang-bidang lain dalam memperkuat front Pergerakan Nasional. Pendidikan yang dilakukan seperti dalam Taman Siswa, sekolah-sekolah Sarekat Islam, Ksatrian Instituut, Perguruan Rakyat, INS-Kayutanam dan lain-lain pada umumnya memperlihatkan bahwa meskipun caranya berbeda-beda, namun tujuannya adalah mendidik watak anak-anak menjadi orang yang percaya pada diri-sendiri, berjiwa bebas, dan menghargai budaya nenek-moyangnya; kesemuanya jauh berbeda dari pendidikan kolonial. Unsur-unsur yang kemudian tercermin dalam Pancasila kelihatan dalam usaha pendidikan nasional ini.

Pada Taman Siswa, yang didirikan pada bulan Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara, pernyataan asas yang berisi 7 pasal memperlihatkan bagaimana pendidikan diberikan untuk menyiapkan rasa kebebasan dan tanggungjawab, agar anak-anak berkembang merdeka menjadi orang yang serasi, terikat erat kepada milik budaya sendiri sehingga terhindar dari pengaruh yang tidak baik dan tekanan dalam hubungan kolonial seperti rasa rendah-diri, ketakutan, keseganan dan peniruan yang membuta. Lain daripada itu anak-anak dididik untuk menjadi putra tanahair yang setia dan bersemangat, dan dengan patriotisme memiliki rasa pengabdian yang mendalam kepada nusa dan bangsa. Untuk mengetrapkan dasar-dasar itu, lebih dahulu perlu dikembangkan sistem-pondok Indonesia, artinya murid-murid lelaki dan perempuan serta guru lelaki dan perempuan tinggal dalam satu asrama. Dalam pendidikan di Taman Siswa nilai rohani dijunjung jauh lebih tinggi dari nilai jasmani. Di dalam perkembangannya, maka pelaksanaan asas-asas tersebut bukan hanya merupakan dasar bagi pendidikan dan pengajaran, melainkan sejak tahun 1930, ternyata juga merupakan konsepsi sebuah aliran budaya. Tefutama sehubungan dengan polemik budaya dengan *Pujangga Baru*.

Di samping ciri-ciri umum pendidikan nasional itu, pada masing-masing sekolah juga ada ciri-ciri khusus yang membedakan yang satu dengan yang lain. Di sekolah Sarekat Islam, yang berpusat di Semarang, anak-anak dididik dan dilatih untuk dapat menjalankan suatu organisasi yang berguna baginya di masadepan. Kemelaratan rakyat adalah tugas mereka nanti untuk menghapuskannya, karena itu kepada anak-anak ditanamkan rasa tanggung-jawab mereka terhadap kaum melarat. Pendidikan yang dilakukan sekolah ini juga menginginkan suatu bentuk haluan tersendiri bagi pendidikan yang sesuai dengan cita-cita SI-Semarang yang kemudian condong kepada sosialisme-marxisme.

Pada Ksatrian Instituut, yang berpusat di Bandung, ciri integrasi bangsa dan sifat non-agama tertentu, sangat kelihatan. Di sekolah INS-Kayutanam, Sumatra Barat, menonjol unsur pembentukan watak, membiasakan murid pada kerja sistematis dan intensif dan rasa setiakawan di antara mereka. Di

sekolah Perguruan Rakyat, yang didirikan pada tahun 1928 di Jakarta, pengajaran terpengaruh oleh tokoh-tokoh pengasuh dan pengajarnya yaitu para pemimpin Pergerakan Nasional: pendidikan untuk menanamkan nasionalisme Indonesia sangat menonjol. Para pelajar dididik untuk berani melihat kenyataan yang ada dan berani mencari kemenangan di antara keadaan yang nyata. Dengan demikian sifat-sifat menggantungkan nasib pada takdir, misalnya dengan semedi, harus dibuang. Sekolah ini meskipun dapat menarik beberapa sekolah di daerah, tidak dapat berkembang pesat karena kesulitan dana.

Pendidikan yang dilakukan oleh partai-partai politik karena jelas tujuannya untuk mendidik kader-kader, sangat berpengaruh pada perkembangan Pergerakan Nasional. Dikeluarkannya Ordonansi Sekolah-sekolah Liar tahun 1932 disebabkan oleh ketakutan pemerintah kolonial terhadap pendidikan yang bercorak nasional ini. Pada sekolah-sekolah Islam yang non-politik seperti Muhammadiyah tekanan diletakkan kepada pembaharuan ajaran agama.

2. Perkembangan Pers Indonesia

Sejalan dengan masuknya teknologi modern dan paham-paham baru ke Indonesia pada akhir abad ke-19, masuklah pula pers sebagai media massa-baru. Pada mulanya media massa tersebut, yaitu surat kabar dan majalah, hanya digunakan oleh orang Barat dan orang Cina, dan tujuan penerbitannya juga berbeda, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Waktu itu kebebasan pers masih belum ada karena adanya sensor yang keras. Di kalangan pers Melayu-Cina pada masa peralihan abad ini, sudah mulai dijumpai berita yang bersifat politik seperti cita-cita gerakan Cina modern yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-Sen, dan berita yang menentang pemerintah Belanda.

Pers berbahasa Melayu, umumnya berbahasa Melayu rendah dan kebanyakan dimodali serta diterbitkan oleh orang Cina, namun mempunyai lingkungan pembaca yang luas di kalangan rakyat pribumi. Beberapa surat kabar waktu itu adalah: di Sumatra *Sinar Soematra*, *Tjahaja Soematra*, *Pemberita Atjeh* dan *Pertja Barat*. di Jawa: *Bromantani*, *Pewartas Soerabaja*, *Kabar Perniagaan*, *Pemberitaan Betawi*, *Pewartas Hindia*, *Bintang Pagi*, *Sinar Djawa*, *Slomporet Melajoe* dan *Poetra Hindia*. Di Kalimantan: *Pewartas Borneo*, dan di Sulawesi: *Pewartas Manado*.

Di samping yang berbahasa Melayu tentu saja ada yang berbahasa daerah setempat. Dapat dikatakan bahwa sudah sebelum Kebangkitan Nasional, hampir semua kota besar di Indonesia memiliki surat kabar sendiri. Surat kabar atau majalah yang mempunyai oplag beberapa ribu, waktu itu sudah dianggap besar.

Selain itu ada surat kabar yang dikenal membawa suara pemerintah. Di antaranya yang dua terbit di Jakarta yaitu: *Pantjaran Warta* dan *Bentara Hindia*, dan satu di Ujungpandang: *Sinar Matahari*. Suatu surat kabar

Indonesia yang muncul tahun 1903 disusun secara modern dan menggunakan surat kabar sebagai alat untuk membentuk pendapat umum ialah *Medan Prijaji* yang diterbitkan di Bandung.

Perkembangan pers Indonesia kecuali dipengaruhi oleh pers Belanda, juga oleh penerbit-penerbit dan percetakan-percetakan yang umumnya dimiliki oleh orang-orang Belanda dan Cina di kota-kota terpenting. Keadaan ini merupakan indikator munculnya unsur perubahan masyarakat kota, terutama di Jawa. Sudah tentu hal ini bertalian pula dengan makin berkembang ekonominya, terutama perdagangan.

Bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia dan berdirinya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan Indische Partij, mendorong pemerintah kolonial untuk menghambat pengaruh pers bumiputra itu. Caranya adalah dengan mendirikan surat kabar sendiri dalam bahasa Melayu dan memberikan subsidi kepada surat kabar yang moderat dalam pemberitaannya. Kelihatan bahwa hampir setiap organisasi massa atau partai yang tumbuh di Indonesia mempunyai surat kabar atau majalah sebagai pembawa suara organisasinya masing-masing untuk menarik massa. Kadang-kadang satu organisasi memiliki lebih dari satu surat kabar atau majalah. Akan tetapi terlihat juga dalam perkembangannya, bahwa karena kekurangan modal dan keahlian, banyak dari surat kabar atau majalah tersebut tidak berumur lama. Di samping itu ada kemungkinan bahwa penerbitannya dilarang oleh pemerintah kolonial karena dianggap menghasut dan merusak ketenteraman dan ketertiban umum. Waktu itu sangat terkenal apa yang disebutkan *pers-delict*.

Budi Utomo memiliki surat kabar *Darmo Kondo*, dengan gaya berita yang tenang dan mempunyai pembaca yang cukup besar di pulau Jawa. Sarekat Islam memiliki *Oetoesan Hindia* (1913—1923) yang mempunyai pengaruh luas terhadap surat kabar yang terbit di daerah-daerah. Surat kabar ini dikendalikan oleh pimpinan Centraal Sarekat Islam dan kebanyakan pemimpinya ikut mengisi halaman surat kabar ini dengan artikel yang bermutu tinggi. Tidak hanya soal politik yang dibahas, tetapi juga ekonomi dan sosial-budaya, bahkan juga soal keamanan dalam negeri. Singkatan nama-nama terkenal waktu itu sebagai penulis artikel lain: O.S.Tj. (Oemar Said Tjokroaminoto), A.M. (Abdul Muis), H.A.S. (Haji Agus Salim), Tj. Mk. (Tjipto Mangunkusumo), A.P. (Alimin Prawirodirdjo), A.H.W. (Wignyodisastro), dan lain-lain. Indische Partij memiliki *Het Tijdschrift* dan *De Expres*, yang dipimpin oleh E.F.E. Doewes Dekker. Meskipun kedua media ini menggunakan bahasa Belanda, namun isinya, terutama yang berhubungan dengan masadepan Indonesia, jelas merupakan pokok-pokok pikiran yang ternyata merupakan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Tokoh-tokoh Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Abdul Muis dan lain-lain juga sering menulis artikel dalam media itu. Suatu risalah yang ditulis waktu itu oleh Ki Hajar Dewantara dengan judul "Als ik eens

Nederlander was” (Andaikata aku orang Belanda), ternyata telah menggoncangkan pemerintah kolonial. Kelihatan sekali waktu itu bahwa Pergerakan Nasional terjalin erat dengan perkembangan pers nasional. Banyak dari tokoh-tokoh pers adalah juga tokoh-tokoh partai. Untuk kepentingan orang-orang Belanda, banyak dari berita-berita surat kabar/majalah Indonesia dibuatkan suatu ikhtisar dan dimuat dalam surat kabar Belanda seperti Koloniaal Tijdschrift dan Java Bode, dan kemudian juga dalam IPO.

Lahirnya PKI pada tahun 1920 menambah jumlah surat kabar partai. Terutama setelah partai itu menjalankan agitasi dan propaganda dan untuk membangkitkan kegelisahan sosial, maka pengaruhnya menjalar sampai ke seluruh pelosok tanahair. Golongan masyarakat yang selama itu terisolasi dari bacaan, kini mulai mendengar dan melihat media yang tidak sepenuhnya mereka pahami.

Suatu majalah yang juga mempunyai pengaruh besar pada Pergerakan Nasional ialah *Indonesia Merdeka* yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dalam dua bahasa: Belanda dan Indonesia. Penulis artikel dalam majalah ini tidak dicantumkan. Bahkan penyebarannya di Indonesia dilakukan secara rahasia.

Jelaslah bahwa sejalan dengan Kebangkitan Nasional, pers Indonesia juga mengalami kemajuan, dan juga berpengaruh pada bidang kehidupan lain. Adakalanya surat kabar Islam, yang beraneka-ragam di tengah-tengah tekanan pemerintah dan depresi (tahun '20 an) merupakan juga pertanda bahwa umat Islam telah bangun. Untuk mengimbangi semua hal tersebut, pemerintah Belanda menerbitkan beberapa ratus judul berupa buku-buku "netral", dan setiap tahunnya dicetak sejumlah sejuta exemplar dan disebar ke seluruh Indonesia. Penerbitan ini dilaksanakan oleh Balai Pustaka. Adanya penerbitan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia sedang terjadi suatu evolusi. Surat kabar telah menyatakan hal itu dengan jelas. Proses-proses yang terjadi di Barat (Eropa) dalam waktu berabad-abad, di Indonesia terjadi dalam beberapa puluh tahun saja.

Keampuhan pers sebagai media massa yang utama membuat pemerintah kolonial memperlakukannya dengan keras. Pada permulaan tahun '30-an tatkala pemerintah kolonial sangat reaksioner sekali, pers mengalami kelumpuhan. Boleh dikatakan bahwa untuk masa-masa terakhir penjajahan Belanda, pers nasional, apalagi yang radikal, sulit untuk bersuara.

3. *Perkembangan Bahasa dan Identitas Bangsa*

Sejak berabad-abad yang lalu, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar antar daerah-daerah di Kepulauan Indonesia sudah dipergunakan. Karena penggunaannya lebih banyak di bidang ekonomi daripada di bidang politik, maka ia lebih dikenal sebagai bahasa perdagangan di bandar-bandar Nusantara. Begitupun dalam penyebaran agama, Islam dan

Kristen, bahasa Melayu juga dipergunakan sebagai bahasa perantara. Sewaktu imperialis Barat mulai campurtangan dalam bidang perdagangan dan politik di Indonesia, bahasa inipun digunakan di samping bahasa Belanda dalam perjanjian-perjanjian dagang dan politik.

Pelaksanaan pengajaran bagi penduduk pribumi dengan tujuan untuk memperoleh tenaga administrasi rendah dan bagi perusahaan-perusahaan maupun bagi pemerintah kolonial, dilaksanakan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Akan tetapi karena tujuan pengajaran pada mulanya hanya kepentingan kolonial dan kapitalis, maka penguasaan bahasa Belanda lebih diutamakan di sekolah-sekolah. Akibatnya kemudian ialah bahwa dalam pergaulan sehari-hari, seseorang merasa lebih terhormat bila menggunakan bahasa Belanda dibandingkan dengan apabila menggunakan bahasa Melayu.

Munculnya suatu elite Indonesia baru sebagai hasil politik etis, menumbuhkan beberapa organisasi politik yang bercita-cita untuk mencapai kemajuan dan kemerdekaan bangsa. Penyebaran dari keanggotaan partai-partai tersebut di daerah-daerah Indonesia, memungkinkan penggunaan bahasa Melayu di samping bahasa Belanda, dan kadang-kadang bahasa Jawa, sebagai bahasa komunikasi antar-anggota. Dalam kongres-kongres Sarekat Islam, bahasa Melayu mendapatkan identitas sebagai bahasa nasional sebagai ungkapan nasionalisme Indonesia yang sedang tumbuh. Kenyataannya memang kongres itu dihadiri oleh wakil-wakil SI dari seluruh Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia, perkembangan pers berbahasa Melayu juga mendorong pertumbuhan bahasa Indonesia dan identitas bangsa, sebab bahasa ini dapat langsung mencapai dan dimengerti oleh penduduk pribumi. Dalam surat kabar *Medan Prijaji*, yang terbit pada tahun 1907, nada isinya jelas menunjukkan kesadaran bahasa Melayu sebagai media untuk membentuk pendapat umum mengenai berbagai persoalan masyarakat waktu itu. Keadaan ini juga terlihat pada sekolah-sekolah swasta nasional, baik yang bersifat umum maupun keagamaan, seperti sekolah Taman Siswa, Muhammadiyah, INS-Kayutanam, sekolah yang diusahakan oleh kaum ibu; bahasa Melayu (Indonesia) menjadi wahana bagi nasionalisme Indonesia.

Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan penegasan yang nyata akan perkembangan bahasa dan identitas bangsa. Rumusan Sumpah Pemuda jelas menunjukkan bahwa bahasa Melayu, yang tadinya hanya dipakai oleh suatu suku Melayu, dinyatakan sebagai bahasa persatuan nasional, dan diberi nama bahasa Indonesia. Begitupun sumpah satu nusa dan satu bangsa yaitu Indonesia, merupakan peresmian adanya nasionalitas Indonesia, produk daripada nasionalisme yang telah berkembang sejak permulaan abad ke-20.

Semenjak itu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan sejalan dengan kesadaran akan identitas nasional. Latarbelakang budaya

dan sosial pemakaian bahasa Indonesia tercermin dalam karangan-karangan mereka. Polemik tentang budaya Indonesia, antara tahun 1935—1939, memperlihatkan penggunaan bahasa Indonesia yang makin sempurna dalam bermacam langgam. Hasil karya sastra Indonesia, baik sebagai terbitan Balai Pustaka maupun di luarnya, jelas menuju kesempurnaan bahasa Indonesia. *Poedjanga Baroe* yang terbit sejak tahun 1933 dan yang tokoh utamanya adalah St. Takdir Alisyahbana, Armyn Pane, Sanusi Pane dan Amir Hamzah, merupakan cermin kegiatan intelektual elite-nasional baru yang dengan sadar menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern di tengah-tengah perkembangan ilmu dan teknologi.

Kongres Bahasa Indonesia pada bulan Juni 1938 di Solo membahas kemungkinan penggunaan bahasa yang lebih efektif di berbagai bidang. Keputusan-keputusannya, seperti maksud untuk mendirikan sebuah lembaga bahasa, fakultas bahasa, penggunaan bahasa Indonesia sebagai "bahasa hukum", sebagai media dalam sidang dewan-dewan perwakilan, dan niat menyusun suatu tata-bahasa baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur bahasa, karena efeknya luas bagi nasionalisme Indonesia, masih sulit untuk dilaksanakan pada waktu itu. Heboh peristiwa penggunaan bahasa Indonesia di sidang Volksraad pada tahun 1938, yang dilancarkan oleh Moh. Husni Thamrin dan Fraksi Nasional, telah membuktikan hal itu.

Penggunaan kata Indonesia untuk daerah Nusantara, sudah mulai diperkenalkan pada pertengahan abad yang lalu. Dalam arti geografis J.R. Logan, seorang pegawai pemerintah Inggris di Penang dan seorang redaktur majalah *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia*, telah memperkenalkan kata Indonesia dalam sebuah artikelnya di majalah itu tahun 1850. Nama itu dipergunakannya untuk kepulauan dan penduduk di Nusantara ini. Seorang etnolog Inggris lainnya, G. Windsor Earl, pada tahun yang sama dan dalam majalah yang sama menulis sebuah artikel tentang ciri-ciri utama penduduk di Nusantara dan penduduk asli Australia. Ia mempergunakan istilah Indos-nesians dan Melayu-nesians bagi penduduk di kepulauan ini. Tetapi dalam pilihannya ia lebih condong untuk pemakaian istilah Malayu-nesians, karena pengertiannya khusus untuk kepulauan di Nusantara. Dengan demikian A. Bastian bukanlah orang yang pertama penemu kata Indonesia, karena istilah itu baru dipakainya pada tahun 1884. Dan melalui karya-karya gurubesar universitas di Negeri Belanda terutama van Vollenhoven, Snouck Hurgronje, R.A. Kern dan lain-lain, istilah *Indonesisch*, *Indonesië* dan *Indonesiër* makin tersebar luas.

Sesudah Kebangkitan Nasional, pemakaian kata ini oleh kaum nasionalis makin berkembang dalam arti politik dan ketatanegaraan. Sebelum tahun 1920, dijumpai nama-nama seperti *Indonesisch Verbond van Studerenden*, *Indische Vereeniging*, *Indische Partij*, *Indonesisch Persbureau*, dan lain-lain. Sesudah tahun 1920 kata Indonesia lebih umum pemakaiannya oleh orang-orang Indonesia dan mencapai puncaknya pada

tanggal 28 Oktober 1928. Dan sejak itu pula dituntut kepada pemerintah Belanda untuk mengganti istilah *Nederlandsh-Indië* dan *Inlandër* dengan *Indonesië* dan *Indonesiër*.

BAB II

PERGERAKAN NASIONAL

A. KEBANGKITAN NASIONAL

1. *Awal Pergerakan Nasional*

Revolusi industri yang terjadi di Eropa pada abad ke-19 membawa nafas baru bagi banyak negeri terjajah di Asia, termasuk Indonesia. Walaupun pengaruhnya pada waktu itu belum menguntungkan rakyat, tetapi sedikitnya telah menyebabkan munculnya suatu golongan baru dalam masyarakat yang mempunyai pandangan dan gagasan lain dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang pembebasan diri dari belenggu penjajahan. Lapisan baru ini yang menjadi elite nasional mulai menyadari bahwa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh masing-masing daerah secara tersendiri dengan perlengkapan yang terbelakang tidak mungkin akan berhasil.

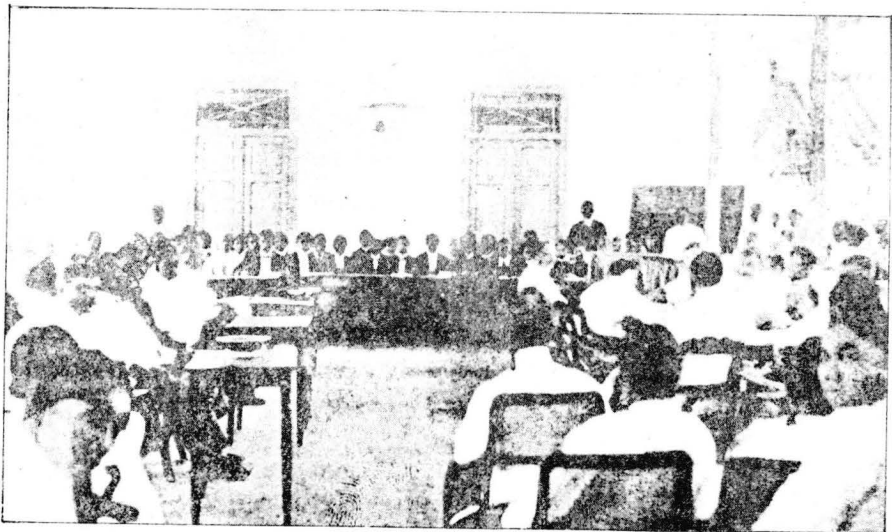
Gejala sejarah yang terjadi itu dikenal sebagai Kebangkitan Nasional, yang tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri. Faktor dalam negeri adalah pelaksanaan politik etis yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda yang memungkinkan masuknya ide-ide dari Barat, maupun pengaruh pembaruan-pembaruan di dalam agama Islam. Faktor luar negeri antara lain adalah masuknya gagasan nasionalisme modern, khususnya pengaruh pergerakan nasional dan modernisasi di beberapa negara Asia seperti di Turki, negeri Cina dan India, serta Restorasi Meiji di Jepang dan kemenangan negeri itu atas Rusia pada tahun-tahun pertama abad ke-20, suatu kemenangan yang dianggap sebagai kemenangan orang Asia (kulit berwarna) terhadap orang Eropa (kulit putih).

Karena pengaruh gagasan-gagasan modern, anggota elite nasional menyadari bahwa perjuangan untuk memajukan bangsa Indonesia harus dilakukan dengan mempergunakan organisasi modern. Baik pendidikan, perjuangan politik, perjuangan ekonomi, maupun perjuangan sosial-budaya, memerlukan organisasi.

Berdasarkan pandangan yang demikian, beberapa pemimpin di dalam masyarakat mulai menggerakkan pemuda-pemuda, khususnya kaum terpelajar, untuk mengorganisasi diri, baik pada bidang politik, ekonomi maupun sosial-budaya. Begitulah dalam tahun 1906 dan 1907 dr. Wahidin Sudirohusodo, mengadakan suatu perjalanan kampanye ke beberapa daerah di pulau Jawa. Ia menggugah pikiran kaum priyayi untuk mencari jalan bagi usaha meningkatkan derajat orang Indonesia yang nampaknya hanya dapat dilakukan dengan memperluas pengajaran. (Masyarakat Indonesia di Jawa pada masa itu terbagi atas tiga lapisan, yakni lapisan bangsawan atau

ningrat paling atas, lapisan priyayi di tengah dan lapisan "orang kecil" atau rakyat biasa di bawah). Tujuan itu dapat dilaksanakan tidak hanya dengan menuntut kepada pemerintah, tetapi juga atas usaha sendiri. Caranya adalah dengan merembentuk "dana belajar", yang hasilnya akan digunakan untuk menyokong pelajar-pelajar yang kurang mampu. Walaupun hasil kampanye ini tidak sebegitu hebat, namun hasilnya ada juga, sejak itu di daerah Jawa Tengah terbuka hubungan luar jabatan di antara pejabat pribumi. Di samping itu yang sangat penting adalah hasil pertemuan antara dr. Wahidin Sudirohusodo dengan pemuda Sutomo, pelajar STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandse Artisen* = Sekolah untuk mendidik dokter pribumi) di Jakarta pada akhir tahun 1907. Ternyata bahwa keduanya mempunyai gagasan dan cita-cita yang bersamaan. Pertemuan itu makin mendorong hasrat untuk melaksanakan cita-cita tersebut yang sesungguhnya sudah mulai bersemi dalam pikiran para pelajar STOVIA.

Sebagai buah daripada cita-cita mereka, maka pada tanggal 20 Mei 1908 di gedung perguruan mereka, pelajar STOVIA membentuk organisasi modern pertama di kalangan bangsa Indonesia yang diberi nama Budi Utomo. Sebagai ketua terpilih Sutomo. Budi Utomo jangkauannya lebih luas daripada hanya membentuk dana belajar, lagipula disusun dalam bentuk organisasi modern yang mempunyai susunan pengurus, anggaran dasar, anggaran rumahtangga dan sebagainya. Tanggal berdirinya Budi Utomo dipandang sebagai hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahun diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Begitupun gedung STOVIA, setelah sekarang dipugar, disebut Gedung Kebangkitan Nasional.



Suasana pembentukan Budi Utomo tahun 1908

Sejak awal berdirinya sampai kepada kongresnya yang pertama dalam bulan Oktober 1908, Budi Utomo merupakan organisasi pelajar dengan para pelajar STOVIA sebagai intinya. Tujuannya masih dirumuskan secara samar-samar yaitu: "kemajuan bagi Hindia", sedangkan jangkauan gerakannya terbatas pada Jawa dan Madura; baru kemudian terbuka bagi orang Indonesia lainnya tanpa memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin dan agama. Berdirinya Budi Utomo ternyata sangat menarik perhatian masyarakat. Dalam 6 bulan saja yaitu antara bulan Mei sampai bulan Oktober 1908, cabang Budi Utomo telah berdiri di Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya dan Probolinggo.

Untuk mengkonsolidasi diri, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908. Setelah melalui perdebatan yang panjang, diambil keputusan sebagai berikut:

- a) Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan politik
- b) Kegiatan terutama ditujukan kepada bidang pendidikan dan budaya
- c) Ruang gerak terbatas hanya pada daerah Jawa dan Madura.

Kongres juga memutuskan susunan pengurus besar, di mana R.T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, ditunjuk sebagai ketua. Pusat organisasi ditetapkan di Yogyakarta.

Dalam perkembangan selanjutnya kelihatan bahwa anggota Budi Utomo kebanyakan adalah dari kalangan priyayi dan pegawai negeri. Terpengaruh oleh hal tersebut, tujuannyapun mulai condong kepada kepentingan mereka. Sebagai pengetahuan, bahasa Belanda mendapat prioritas pertama, karena tanpa menguasai bahasa itu seseorang jangan berharap akan dapat memperoleh kedudukan yang layak dalam jenjang kepegawaian kolonial. Dengan demikian, maka Budi Utomo cenderung untuk memajukan pendidikan golongan priyayi daripada bagi penduduk pribumi pada umumnya. Begitupun ketuanya, R.T. Tirtokusumo, sebagai seorang bupati, lebih banyak memperhatikan reaksi dari pemerintah kolonial daripada memperhatikan reaksi dari rakyat Indonesia. Jadi jelas menonjolnya pengaruh golongan priyayi yang lebih mengutamakan jabatannya, khususnya golongan tuanya yang moderat. Dan jelas juga kelihatan bahwa sikap yang lebih nasionalistis pada pihak para pelajar STOVIA yang terkemuka pada awal berdirinya Budi Utomo, kini terdesak ke belakang.

Melihat perkembangan Budi Utomo tersebut, para pelajar merasa kecewa dan memutuskan untuk ke luar dari organisasi itu. Begitupun beberapa tokoh yang radikal seperti dr. Tjipto Mangunkusumo ke luar dari organisasi. Karena tidak melibatkan diri dalam politik, dan karena itu dipandang tidak berbahaya, sebagai organisasi Budi Utomo disahkan oleh pemerintah kolonial sebagai badan hukum. Dengan demikian diharapkan bahwa organisasi itu akan melancarkan aktivitas secara luas. Harapan tersebut tidak terkabul karena gerak organisasi kemudian ternyata menjadi lamban karena beberapa hal, seperti kesulitan keuangan, para bupati men-

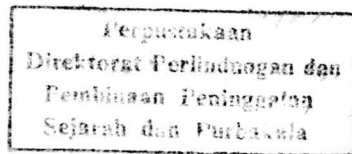
dirikan organisasi sendiri, ke luarnya anggota-anggota dari golongan pelajar-mahasiswa. Meskipun demikian sampai akhir tahun 1909, Budi Utomo telah mempunyai cabang di 40 tempat dengan jumlah anggota kurang lebih 10.000 orang, suatu jumlah yang pada waktu itu dianggap sudah cukup besar. Usaha-usaha untuk memajukannya pada tahun-tahun berikutnya tidak begitu mencapai sukses.

Kekhawatiran mula-mula pemerintah kolonial terhadap munculnya Budi Utomo sebagai organisasi yang memelopori Kebangkitan Nasional yang dipandang berbahaya bagi kolonialisme, menjadi hilang setelah dinilai bahwa pengaruh Budi Utomo terhadap penduduk pribumi tidak begitu besar. Lebih-lebih melihat kenyataan bahwa organisasi itu tidak berpolitik, telah mengurangi minat mereka yang cenderung ke arah radikalisme, yang pada waktu itu sudah mulai terbayang dengan munculnya organisasi nasional lainnya, terutama Sarekat Islam dan Indische Partij, yang sifatnya lebih memenuhi keinginan rakyat. Karena itu kedua partai tersebut menarik unsur-unsur yang tidak puas ke luar dari Budi Utomo. Sungguhpun prinsip-prinsip utama tentang netralisasi agama dan aktivitas non-politik Budi Utomo membedakan dirinya dengan organisasi-organisasi lain, tetapi ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa selama prinsip-prinsip itu dipertahankan dengan sifat yang pasif tidaklah dapat diharapkan pengaruhnya akan makin meluas, malahan sebaliknya. Meskipun pengaruhnya menurun, namun Budi Utomo tetap melaksanakan kegiatan di bidang sosial-budaya.

Dalam suasana mulai bangkitnya nasionalisme, bagaikan suatu percikan api di tengah padang alang-alanglah munculnya Sarekat Islam. Pada mulanya Sarekat Islam, yang didirikan pada tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi, dimaksudkan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman pedagang Cina. Akan tetapi kenyataannya kemudian ialah bahwa kegiatannya lebih luas dari maksud semula. Ia seolah-olah merupakan suatu isyarat bagi orang Muslim untuk memulai suatu gerakan untuk melawan semua kepincangan dan ketidak-adilan yang menimpa rakyat Indonesia, baik yang datangnya dari pemerintah kolonial, saudagar-saudagar Cina, maupun dari kalangan bangsa sendiri yang bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial.

Kalau ditinjau dari anggaran dasarnya, maka dapat disimpulkan tujuan Sarekat Islam adalah sebagai berikut:

- a). mengembangkan jiwa dagang.
- b). membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.
- c). memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.
- d). memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam
- e). hidup menurut perintah agama.



Melihat tujuan Sarekat Islam yang tercantum di dalam anggaran dasarnya, nampak tidak adanya kegiatan politik. Dan memang partai politik waktu itu belum dibolehkan. Akan tetapi dari kegiatan organisasi ini dapat dilihat, bahwa Sarekat Islam memperjuangkan hal-hal yang sesungguhnya terletak di bidang politik juga. Yang selalu diperjuangkan dengan gigih adalah keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan pmerasan oleh pemerintah kolonial. Seluruh media massa Indonesia telah membantu menyebarkan-luaskan cita-cita Sarekat Islam, dan sudah tentu juga aksi-aksinya.

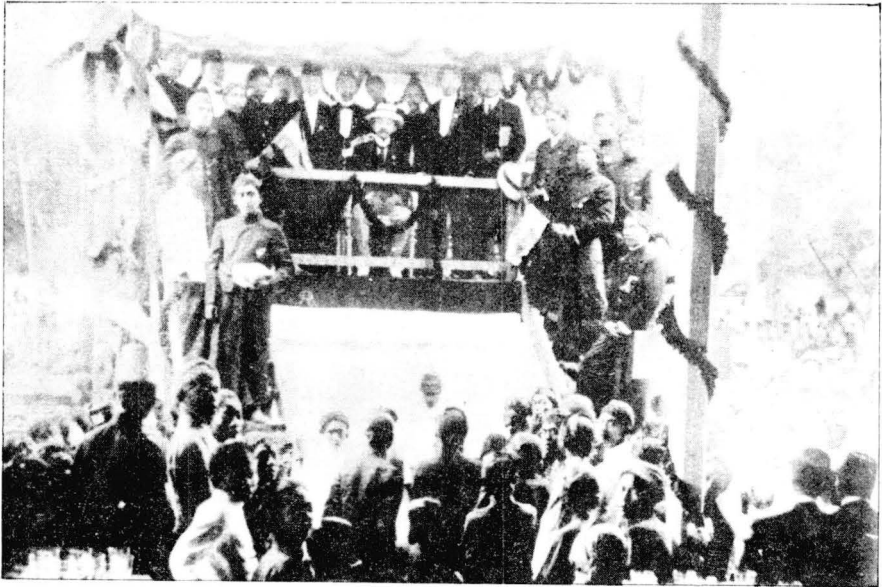
Menghadapi situasi yang demikian hidup dan mengandung unsur-unsur revolusioner, pemerintah jajahan Belanda mulai bersikap waspada dan mengawasi Sarekat Islam dengan cermat. Gubernur Jenderal Idenburg merasa perlu untuk meminta nasehat-nasehat dari para residen untuk menetapkan kebijaksanaan politiknya. Pernah dalam bulan Agustus 1912 untuk sementara waktu Sarekat Islam diskors, yaitu dengan melarangnya menerima anggota-anggota baru, mengadakan rapat dan dengan penggeledahan atas rumah-rumah.

Timbul juga pertanyaan dalam pikiran kita, mengapa Sarekat Islam dapat dengan cepat diterima oleh rakyat Indonesia? Situasi di dalam masyarakat sendiri waktu itu memang mengharapkan sekali kehadiran suatu organisasi massa yang tidak bersifat elite untuk menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia. Telah kita ketahui bahwa sejak abad yang lalu nilai-nilai tradisional mengalami erosi sebagai akibat penetrasi budaya Barat melalui lembaga-lembaga pemerintahan kolonial maupun karena kebijaksanaan ekonomi yang telah menyertai masyarakat pedesaan sampai pelosok-pelosok yang terpencil sekalipun. Proses "penjembelan" rakyat desa karena tanam paksa dan masuknya perkebunan-perkebunan Barat, desorganisasi kehidupan pertanian, dan berbagai tekanan keuangan serta tuntutan-tuntutan berat dari penguasa-penguasa setempat, semuanya telah menimbulkan kegelisahan di daerah pedesaan. Dalam situasi di mana penduduk mengalami pergolakan sosial sebagai akibat daripada pertentangan kepentingan yang menajam antara kaum penjajah dan kaum terjajah, Sarekat Islam muncul sebagai pembela. Di samping itu bagi rakyat awam politik, kedudukan pemimpin-pemimpin Sarekat Islam juga mendorong suksesnya Sarekat Islam. Organisasi ini digerakkan oleh orang-orang yang tidak menjadi pegawai pemerintah kolonial, bahkan ditegaskan bahwa pegawai negeri tidak boleh menjadi anggota pengurus. Banyak tokoh-tokoh yang sangat dihormati dalam masyarakat Indonesia, terutama oleh lapisan bawah, menjadi anggota, umpamanya alim-ulama dan kyai-kyai. Ia membela kepentingan rakyat kecil, yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti persoalan penguasaan oleh pedagang-pedagang Cina terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Di sini harus dipahami bahwa dalam perlawanannya terhadap orang Cina, Sarekat Islam lebih menekankan pertentangan ekonomi daripada pertentangan rasial. Dan untuk masa

selanjutnya pedagang Cina menjadi sasaran rasa ketidak-puasan rakyat karena dianggap menjadi penghalang bagi perkembangan ekonomi pribumi. Dan juga karena organisasi ini bertalian dengan Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Itulah sebabnya, dalam pertumbuhannya, organisasi ini berhasil masuk sampai ke lapisan bawah masyarakat, yaitu orang kecil yang sejak berabad-abad hampir tidak pernah mengalami perubahan nasib, dan paling banyak menderita.

Kongres Sarekat Islam pertama kali diadakan pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Di sini ditegaskan bahwa Sarekat Islam bukan partai politik. Ia tidak bermaksud melawan pemerintah Hindia Belanda. Haji Qemar Said Tjokroaminoto dipilih sebagai Ketua Sarekat Islam. Surabaya ditetapkan sebagai pusat kedudukan Sarekat Islam.

Laju perkembangan Sarekat Islam tidak dapat dibendung lagi. Dalam kongres di Solo diputuskan bahwa Sarekat Islam hanya terbuka untuk bangsa Indonesia. Untuk menjaga agar Sarekat Islam tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai negeri sebagai anggota.



Suasana rapat Sarekat Islam di Solo, Januari 1913

Kekuatan yang terhimpun dalam lingkungan Sarekat Islam dan keberaniannya bergerak mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Dalam tahun-tahun 1913 — 1914 terjadi banyak kerusuhan-kerusuhan anti-Cina di Jawa seperti di Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon, Tangerang dan Bekasi,

dan banyak desa-desa yang diresahkan oleh ketegangan-ketegangan "komunal". Bahkan tahun 1913 mungkin adalah tahun yang paling buruk dalam rangkaian kerusuhan-kerusuhan anti Cina di dalam sejarah Indonesia. Di samping itu juga timbul keributan-keributan yang ditimbulkan oleh agitasi yang dipimpin oleh Sarekat Islam yang arahnya menentang pemerintah kolonial. Memang bermacam-macam tujuan keributan-keributan yang diatur oleh anggota-anggota Sarekat Islam, tetapi kerusuhan atau pergolakan itu terutama dianggap sebagai hal yang membahayakan apabila pergolakan itu ditujukan terhadap pejabat-pejabat.

Karena kekhawatiran itulah, maka pada tahun 1913 pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang menetapkan bahwa cabang-cabang Sarekat Islam harus berdiri sendiri untuk daerah masing-masing. Jadi setiap cabang merupakan suatu badan hukum tersendiri. Namun suatu pengurus sentral yang merupakan badan perwakilan dari Sarekat Islam-Sarekat Islam daerah itu diizinkan.

Bersamaan dengan munculnya Sarekat Islam, muncul pula *Indische Partij* (IP). Organisasi ini mempunyai cita-cita menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli, maupun golongan Indo, Cina, Arab dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Pencetus gagasan ini adalah E.F.E. Douwes Dekker yang kemudian berganti nama menjadi Danudirdja Setyabuddhi. Ia seorang Indo-Belanda yang merasa dirinya orang Indonesia sejati, bukan orang asing. Sebelum mendirikan partainya pada tahun 1912, terlebih dahulu ia berkeliling pulau Jawa untuk memperkenalkan gagasannya tersebut. Kepada orang-orang Indo ia menekankan bahwa masa depan mereka tidak terletak pada pihak pemerintah kolonial Belanda tetapi terletak pada pihak Indonesia dalam kerjasama dengan penduduk Indonesia lainnya; bahkan lebih jauh ia menginginkan hilangnya golongan Indo dengan jalan peleburan ke dalam masyarakat pribumi. Ia juga berusaha menyadarkan golongan Indo dan penduduk pribumi, bahwa nasib mereka diancam oleh bahaya yang sama, bahaya eksploitasi kolonial. Ia bertemu dan berbicara antara lain dengan dr. Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (yang kemudian dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara) dan Abdul Muis. Semuanya menyokong gagasan tersebut.

Setelah *Indische Partij* didirikan pada tahun 1912, cita-citanya lebih disebar-luaskan ke mana-mana melalui surat kabar, terutama *De Expres*. Ditegaskan bahwa nasib dan masadepan mereka yang ada di Indonesia terletak di tangan mereka sendiri. Karena itu kolonialisme harus dihapus.

Dalam permusyawaratan wakil-wakil daerah *Indische Partij* di Bandung pada bulan Desember 1912, tersusunlah anggaran dasar dan program kerja partai. Dalam anggaran dasarnya telah tergambar sifat nasionalistisnya yang radikal: "Tujuan *Indische Partij* ialah untuk membangunkan patriotisme *Indiërs* terhadap Tanahair, yang telah memberi lapangan hidup kepada

mereka, agar mendapat dorongan untuk bekerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan Tanahair Hindia dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka". Jadi jelas tujuan utama *Indische Partij* yaitu menumbuhkan dan meningkatkan jiwa integrasi antara semua golongan untuk memajukan Tanahair dengan dilandasi jiwa nasional, maupun mempersiapkan diri bagi kehidupan rakyat yang merdeka.

Untuk mensukseskan cita-cita *Indische Partij*, dalam program kerja telah ditetapkan langkah-langkah yang akan diambil, antara lain:

- a). meresapkan cita-cita kesatuan nasional Hindia (Indonesia)
- b). memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan.
- c). memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan lainnya.
- d). memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan.
- e). berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia.
- f). dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia.
- g). memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia, terutama dengan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.

Pasal-pasal ini pulalah yang membuktikan bahwa *Indische Partij* adalah partai politik yang pertama di Indonesia. Dalam waktu yang singkat telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih dari 7.000 orang, kebanyakan orang Indo.

Oleh karena programnya tegas menyatakan diri sebagai partai politik dan bercita-cita mencapai Hindia merdeka, maka sikap yang diambil pemerintah berbeda dengan sikap terhadap organisasi-organisasi yang lain. Terhadap Budi Utomo dan Sarekat Islam, pemerintah mengambil sikap berhati-hati, tetapi terhadap *Indische Partij* diambil sikap yang tegas. Permohonan yang diajukan kepada pemerintah untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret 1913 ditolak dengan alasan bahwa organisasi ini bersifat politik dan mengancam hendak merusak keamanan umum. Meskipun kemudian ada perubahan dalam anggaran dasarnya, namun permohonannya tetap ditolak. Keputusan pemerintah itu merupakan peringatan bagi *Indische Partij* dan juga bagi organisasi Pergerakan Nasional lainnya bahwa kemerdekaan tidak dapat diharapkan sebagai hadiah dari penjajah. Kemudian tiga orang tokoh utama IP karena kegiatannya di hukum buang. Mereka itu adalah Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat dan dr. Tjipto Mangunkusumo dan memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingan. Selama dalam pembuangan mereka tetap berusaha untuk menanamkan jiwa nasional dan menggerakkan orang Indonesia di Negeri Belanda supaya menuntut Indonesia Merdeka.

2. Perkembangan Pergerakan Nasional

Pada awal Pergerakan Nasional telah kita lihat adanya 3 organisasi yang menonjol dengan sifat yang berbeda. Budi Utomo lebih bersifat organisasi budaya, Sarekat Islam bersifat sosial-ekonomis dan religius, sedangkan *Indische Partij* bersifat politis. Tetapi ketiga-tiganya, meskipun dengan taraf yang berbeda-beda, berjiwa nasionalistis. Pada masa selanjutnya muncul organisasi yang berjiwa lain, yakni internasionalistis dengan ideologi sosialis-tis dan komunistis. Di samping itu muncul pula organisasi-organisasi ke-daerahan serta organisasi-organisasi khusus lainnya, misalnya organisasi pemuda dan wanita maupun organisasi yang bersifat keagamaan.

Perang dunia pertama meletus pada tahun 1914 dan pengaruhnya juga terasa di Indonesia. Budi Utomo, yang pengaruhnya makin menurun berusaha untuk mengembalikan kekuatan yang dulu pernah ada. Dengan mengetengahkan pentingnya pertahanan sendiri untuk menghadapi kemungkinan bahaya intervensi asing, Budi Utomo melontarkan gagasan wajib-militer bagi penduduk Indonesia. Tindakan itu memperlihatkan bahwa Budi Utomo-pun sudah mulai bergerak di lapangan politik. Lebih-lebih dengan adanya penegasan bahwa hal itu harus diputuskan dalam parlemen yang berhak membuat undang-undang, dan karena di Indonesia belum ada dewan perwakilan rakyat (parlemen) maka lebih dahulu dewan itu harus dibentuk.

Gagasan itu kemudian melahirkan suatu panitia yang diberi nama *Indie Weerbaar* (Hindia yang berketahanan). Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk membicarakan soal wajib militer, soal dewan perwakilan rakyat, dimana kepentingan rakyat dapat dibicarakan dengan leluasa, meningkat menjadi hal yang penting. Utusan *Indie Weerbaar*, antara lain Dwidjosewojo dan Abdul Muis, yang dikirim ke Negeri Belanda, gagal dalam usahanya untuk mendesak pemerintah kerajaan Belanda supaya melaksanakan undang-undang wajib militer di Indonesia. Akan tetapi mereka berhasil memperoleh kesediaan pemerintah untuk membahas soal perwakilan rakyat. Pada bulan Desember 1916 undang-undang pembentukan *Volksraad* (dewan rakyat) disahkan oleh parlemen Belanda. Untuk menghadapi pemilihan anggota *Volksraad* dibentuk sebuah komite nasional, yang beranggotakan wakil-wakil organisasi-organisasi Indonesia. Barulah pada bulan Mei 1918, dewan ini dibuka dengan resmi, dengan jumlah anggota yang berimbang antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Sebagian dari anggota itu tidak ditunjuk oleh partai tetapi ditunjuk oleh pemerintah.

Selaras dengan perkembangan politik, dalam tubuh Budi Utomo juga terjadi perkembangan dalam menilai cara-cara untuk mendapatkan kebutuhan sosial. Pada tahun 1917, Budi Utomo menetapkan sebuah program politik yang bercita-cita membentuk pemerintahan parlementer yang berazaskan kebangsaan. Di samping itu juga menghendaki adanya

persamaan hak untuk semua agama. Meskipun ada perubahan dalam pandangan, namun Budi Utomo tetap tidak menyetujui aksi-aksi yang bersifat kekerasan.

Pada tahun 1915 di Surabaya didirikan Central Sarekat Islam (CSI). Tugasnya adalah membantu SI daerah ke arah kemajuan dan mengatur kerjasama antar SI daerah. Pada bulan Juni 1916 di Bandung diadakan suatu kongres nasional SI yang pertama. Yang menarik dalam kongres ini adalah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Waktu itu SI telah tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota kira-kira 800.000 orang. Suatu jumlah yang pada waktu itu adalah sangat luar biasa. Sebagai organisasi massa yang pertama di Indonesia sampai tahun 1920, pengaruh SI sangat terasa dalam dunia politik di Indonesia. Dalam kongres yang kedua tahun 1917 di Jakarta, meskipun kritikan terhadap pemerintah lebih berani, tetapi tuntutan aksi melalui parlemen masih disukai. Mereka berharap lambat-laun dapat mengubah Volksraad menjadi parlemen sejati. Sebagian kecil dari pimpinan SI (Semaun cs) menolak SI ikut serta dalam Volksraad, karena menilai bahwa badan itu hanya suatu alat kaum kapitalis untuk mengelabui rakyat. Persoalan Volksraad kemudian menjadi masalah yang hangat dalam kehidupan politik pada waktu itu. Beberapa organisasi, seperti SI, Budi Utomo, Insulinde (penerus IP) menyokong adanya Volksraad. Sebaliknya golongan sosialis-radikal menolak.

Sementara itu sifat SI yang demokratis dan berani serta berjuang terhadap kapitalisme untuk kepentingan rakyat kecil, sangat menarik perhatian kaum sosialis kiri yang tergabung dalam Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan pada tahun 1914. Pemimpinnya ialah seorang Belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet. ISDV sudah mencoba menanamkan pengaruhnya, tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia melainkan di-import dari Eropa oleh orang Belanda, usahanya kurang berhasil. Menyadari kelemahannya, dengan taktik infiltrasi yang dikenal dengan nama "blok di dalam" mereka berhasil menyusup ke dalam SI. Oleh karena tujuannya bersamaan yaitu sama-sama membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme tetapi dengan cara yang berbeda, mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda SI antara lain Semaun, Darsono, Tan Malaka dan Alimin Prawirodirdjo. Akibatnya banyak anggota SI yang menjadi sosialis dan sebaliknya. Menyambut suasana yang buruk akibat Perang Dunia I, panen padi yang jelek, serta ketidak-puasan karyawan perkebunan terhadap upah yang rendah dan membumbungnya harga-harga, ISDV makin memperkuat pengaruhnya di kalangan rakyat melalui SI. Di samping itu mereka mendekati oknum-oknum tentara Belanda (darat dan laut), pegawai-pegawai negeri bangsa Belanda dan lain-lain untuk dipengaruhi dengan ideologi sosialis-komunis.

Ada beberapa hal yang menyebabkan ISDV berhasil melakukan infiltrasi ke dalam tubuh SI:

a). Centraal Sarekat Islam (CSI) sebagai badan koordinasi pusat, kekuasaan-

annya masih sangat lemah. Tiap-tiap cabang SI bertindak sendiri-sendiri secara bebas. Para pemimpin lokal yang kuat mempunyai pengaruh yang menentukan di dalam SI cabang.

- b). Kondisi kepartaian waktu itu memungkinkan orang untuk sekaligus menjadi anggota lebih dari satu partai. Hal ini disebabkan karena pada mulanya organisasi-organisasi itu didirikan bukan sebagai suatu partai politik melainkan sebagai suatu organisasi guna mendukung sebagian kepentingan sosial-budaya dan ekonomi. Di kalangan terpelajar menjadi kebiasaan bagi setiap orang untuk memasuki berbagai macam organisasi yang dianggapnya dapat membantu kepentingannya. Dengan cara demikian beberapa pemimpin muda SI juga menjadi pemimpin ISDV, terutama SI cabang Semarang. Di sini Semaun berhasil meningkatkan anggota ISDV dari 1.700 orang pada tahun 1916 menjadi 20.000 setahun kemudian. Tetapi karena orientasinya yang Marxistis di bawah pengaruh ISDV, mereka menjadi lawan daripada CSI yang dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto. Tidak mengherankan bila SI Semarang menyerang CSI sama sengitnya seperti mereka menyerang pemerintah kolonial dan kapitalis asing.

Sikap yang terlalu radikal dari pimpinannya ternyata telah membawa perpecahan dalam tubuh ISDV. Golongan moderat membentuk lagi partai sosialis, yang kemudian bernama: Indische Sociaal-Democratische Partij (ISDP). Sejak itu golongan radikal dalam ISDV sikapnya telah bersikap komunistis dan condong ke Rusia. Begitupun SI cabang Semarang berhasil dibawa Semaun ke arah komunis.

Sewaktu Revolusi Rusia tahun 1917 berhasil, kaum komunis di Indonesia tanpa mempertimbangkan keadaan yang nyata di Indonesia menyerukan agar di Indonesia juga diadakan suatu revolusi. Dengan menarik unsur-unsur yang tidak puas di kalangan tentara dan buruh sesuai dengan model Rusia mereka berhasil menghimpun kekuatan dan mengadakan demonstrasi-demonstrasi. Melalui media-massa yang dimiliki, mereka berusaha mempengaruhi rakyat untuk mengadakan suatu pemberontakan dan menganjurkan dikibarkannya bendera merah. Sebagai akibat terjadi bentrokan dengan polisi di banyak tempat.

Dalam pada itu partai-partai yang dianggap moderat, yang terpengaruh oleh situasi pada waktu itu, antara lain berakhirnya Perang Dunia I, mulai tidak puas atas partisipasi mereka di dalam pemerintahan melalui Volksraad. Manfaat perjuangan mereka melalui dewan tersebut tidak terasa karena kurang begitu diperhatikan oleh pemerintah kolonial. Karena itu kepada pemerintah kolonial didesak untuk segera mengganti Volksraad dengan parlemen pilihan rakyat. Serikat-serikat sekerja, yang merupakan organisasi karyawan berbagai macam perusahaan dan perkebunan, juga menuntut perbaikan nasib. Tuduhan bahwa pemerintah melindungi kapitalisme semakin kuat. Dalam kongres SI ketiga pada bulan Oktober 1918 di Surabaya tuduhan ini pun dilontarkan dengan keras. Untuk

memperkuat tuntutan kepada pemerintah, partai-partai menggabungkan diri, dalam organisasi *Radikale Concentratie*. Suasana menjadi gawat, dan situasi krisis timbul di Indonesia.

Untuk meredakan situasi, pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal mengeluarkan suatu pengumuman pada bulan November 1918, yang berisi janji pemerintah untuk memperbaharui ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai realisasi daripada janji, yang dikenal sebagai *Novemberbelofte* (Janji November), pada tahun 1919 dibentuklah Komisi Peninjauan Kembali yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Belanda dan Indonesia. Hasil komisi ini kemudian juga tidak memuaskan Pergerakan Nasional Indonesia. Ketika keadaan sudah reda, pemerintah mengambil tindakan keras. Orang-orang Belanda yang radikal seperti Sneevliet diusir dari Indonesia. Beberapa pemimpin Indonesia seperti Darsono dan Abdul Muis ditangkap. Aksi-aksi menentang kapitalisme semakin hebat. Dalam tahun 1919 di beberapa daerah seperti Toli-toli (Sulawesi Utara) dan Cimareme (Garut) terjadi kerusuhan anti-pemerintah oleh anggota-anggota SI. Dalam tahun itu juga dalam kongres nasional di Surabaya, SI meninjau kebijaksanaannya dalam soal perjuangan serikat sekerja. Persaingan keras untuk menguasai serikat sekerja terjadi dengan orang-orang komunis (ISDV), karena hal itu juga sangat menentukan dalam suksesnya aksi-aksi politik.

3. Gerakan Islam

Masyarakat Islam di Indonesia pada peralihan abad ini dapat dibagi dalam dua golongan yakni "kaum tua" dan "kaum muda". Golongan pertama terdiri dari mereka yang tetap berpegang kepada hal-hal yang tradisional, sedangkan golongan kedua menghendaki adanya pembaharuan.

Perbedaan ini pada umumnya bersifat perbedaan dalam bidang agama. Tetapi sesudah tahun 1920-an perbedaan itu meluas ke bidang politik. Banyak di antara anggota Sarekat Islam, meninggalkan partainya dan beralih kepada komunisme. Bahkan beberapa pemimpin Sarekat Islam mempunyai hubungan langsung dengan *Komintern* (gerakan komunis internasional) sedangkan beberapa pemimpin lembaga pendidikan Islam, antaranya di Minangkabau, terpengaruh oleh ideologi komunis.

Sebelum abad ke-20 dapat dikatakan Islam di Indonesia adalah identik dengan kepribumian. Dengan demikian umumnya seseorang yang beragama Islam berarti ia termasuk golongan penduduk pribumi, apakah ia orang Melayu, Jawa, Sulawesi atau Maluku; bahkan di Sumatra orang Cina yang masuk Islam sering juga disebut Melayu. Karena itu nama Sarekat Islam di samping menggambarkan aspek agama juga menggambarkan aspek kebangsaan. Sebaliknya semua yang berbau Barat atau Belanda dicap Kristen atau kafir; karenanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah, tata-pergaulan dan cara berpakaian Barat dipantangkan.

Begitu pun dalam pergaulan sehari-hari penduduk pribumi yang beragama Kristen dituduh kurang nasionalistis karena memperoleh keuntungan dari pemerintah kolonial.

Selama berabad-abad pengajaran Islam di Indonesia dicampuri oleh bermacam-macam ajaran yang berasal dari luar agama Islam. Terlihat waktu itu pengaruh mistik, pantheisme, tarekat, penghormatan pada guru dalam tarekat secara berlebih-lebihan, sistem kurikulum yang masih kuno dan sederhana, kyai yang juga menjadi dukun, dan lain-lain. Dan kebanyakan dari pengaruh itu menyebabkan kaburnya ajaran Islam yang sesungguhnya. Bahkan banyak yang keliru dalam menilai sesuatu yang sesungguhnya bukan ajaran Islam tetapi mengiranya suatu unsur ajaran Islam. Umpamanya dalam soal pemujaan dengan sesajian di kuburan orang yang dianggap keramat, membakar kemenyan, doa-doa dukun yang bercampur aduk dengan doa dan pujaan kepada makhluk halus serta dewa agama Hindu.

Perselisihan antara ajaran Islam dengan peraturan adat, yang terpusat kepada pertanyaan apakah adat itu sesuai dengan Islam, di beberapa daerah kadang-kadang meningkat menjadi perang. Contoh yang jelas tergambar di daerah Minangkabau yang pada abad ke-19 telah menimbulkan terjadinya Perang Padri antara golongan adat dan golongan ulama. Tidak hanya soal-soal penting seperti soal warisan bahkan kadangkala juga soal kecil seperti soal makan sirih dapat menimbulkan perselisihan yang kadangkala diakhiri dengan pembunuhan. Di Jawa pertentangan sistem adat dengan Islam tidak sebegitu menonjol seperti di Minangkabau. Perbedaan yang terdapat adalah perbedaan dalam cara hidup antara golongan yang sama-sama beragama Islam. Pada umumnya perbedaan itu, yang kelihatan sampai sekarang, diukur dengan "tebal" atau "tipis"-nya ketaatan seseorang terhadap agama. Perbedaan ini telah menimbulkan pembagian masyarakat dalam dua golongan yaitu "abangan" dan "putihan". Abangan adalah mereka yang namanya saja beragama Islam, akan tetapi sebenarnya kurang memperhatikan rukun Islam. Mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan agama terbatas pada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seperti pada waktu kelahiran, pengkhitanan, perkawinan dan kematian. Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa itu mereka meminta pertolongan pada golongan putihan. Putihan adalah mereka yang taat beragama dan biasanya mendapat pelajaran dan latihan pada sekolah agama serta berdiam dekat mesjid.

Dari uraian di atas nampak betapa pentingnya posisi Islam dalam kehidupan masyarakat, penyamaannya dengan nasionalisme serta kenyataan bahwa Islam pada waktu itu dijadikan ukuran bagi loyalitas golongan. Islam sebagai suatu ukuran bagi loyalitas golongan dan sebagai dasar persatuan di Indonesia merupakan hal yang penting sehubungan dengan perkembangan kekuasaan kolonial Belanda ke seluruh pelosok Indonesia. Karena itu mudah dimengerti mengapa pemerintah Belanda memandang Islam sebagai suatu ancaman potensil bagi kedudukan mereka. Dan sebaliknya, ke-

datangan bangsa Belanda dalam pandangan orang Islam Indonesia merupakan ancaman bagi Islam. Karena itu Belanda dianggap musuh Islam dan kaum Muslimin. Prasangka ini sesungguhnya jauh berakar di luar Indonesia yaitu sejak Perang Salib dan kemudian jatuhnya Konstantinopel (Istanbul) ke tangan Turki pada abad ke-15. Oleh karena itu untuk mempertahankan kekuasaannya, Belanda berusaha menarik simpati dan rasa senang orang-orang Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. Dalam hal ini terdapat dua konsepsi:

- a. usaha di bidang budaya, erat hubungannya dengan politik asosiasi, artinya ingin memasukkan budaya Barat (Belanda) ke dalam budaya Indonesia hingga bercampur erat.
- b. bagaimana mengubah agama penduduk yang beragama Islam dan lain-lain menjadi Kristen. Pandangan ini terutama bersifat politis dan tujuannya adalah untuk memperkuat kedudukan kolonial Belanda. Bagi pihak missi sendiri hal ini berarti bahwa bila pandangan pertama berhasil tentulah usaha mereka akan lebih diterima oleh penduduk. Sebaliknya juga bila hal ini berhasil tentulah loyalitas penduduk, kepada pemerintah kolonial akan kokoh karena sudah memeluk satu agama. Memang politik kolonial tidak sejelas kedua konsepsi tersebut, malahan merupakan campuran kedua pandangan tersebut tetapi ada kecenderungan pada yang kedua. Ini kelihatan dalam pertimbangan yang dipakai untuk menetapkan dan menjelaskan politik etis. Dalam rangka inilah kemudian kyai-kyai yang dianggap sebagai pemimpin masyarakat sangat diawasi bahkan ada yang dibuang. Bahkan juga pegawai-pegawai pemerintah dari golongan pribumi yang sering mengadakan dakwah agama di tempat-tempat tugas mereka, dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan tahun 1899 dilarang ditugaskan ke daerah-daerah yang belum beragama Islam, terutama di luar pulau Jawa. Sehubungan dengan itu aspek internasional Islam seperti yang tercermin dalam ibadah haji dan pan-Islamisme dengan pimpinan khalifah juga sangat menguatirkan Belanda. Dalam rangka inilah sarjana Snouck Hurgronje dikirim ke Arab Saudi untuk menyelidiki di mana sesungguhnya sumber penggerak golongan pribumi untuk menentang pemerintah. Dari penyelidikan itu diketahui bahwa sumber penggerak daripada pesantren, surau, langgar dan mesjid di Indonesia umumnya berpusat di Mekah, yaitu pada orang-orang Indonesia sendiri yang telah lama bermukim dan belajar di sana. Juga saran perlunya umat Islam Indonesia menggabungkan diri pada gerakan pan-Islam yang pada waktu itu dipimpin oleh Turki, bersumber di sana.

Gerakan yang kemudian timbul dalam bentuk gerakan pembaharuan telah dibantu dengan makin lancarnya komunikasi sosial, antara lain melalui media massa. Gerakan pembaharuan (penjernihan) ajaran Islam itu hendak dicapai melalui gerakan, baik di bidang pendidikan dan sosial, mau-

pun di bidang politik, yang keduanya adalah pengaruh yang berasal dari luar Indonesia. Gerakan yang pertama berwujud gerakan seperti Perserikatan Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan sekolah-sekolah agama di Minangkabau. Gerakan yang kedua terlihat dari kegiatan partai-partai yang mendasarkan dirinya pada cita-cita Islam, seperti yang dilakukan oleh Sarekat Islam. Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), Partai Islam Indonesia yang menyalurkan keinginan serta cita-cita dari anggota-anggota Muhammadiyah, Persatuan Islam dan organisasi lainnya, yang karena sesuatu hal tidak dapat menyalurkan aspirasi politik mereka melalui Sarekat Islam atau penerusnya Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

Berdasarkan hal di atas, Snouck Hurgronje seorang penasihat pemerintah mengenai Islam menyarankan agar membedakan antara: Islam sebagai ajaran agama dan Islam sebagai ajaran politik. Selama umat Islam menganutnya sebagai agama, maka mereka perlu diberi kebebasan melakukan kewajibannya. Sebaliknya apabila Islam digunakan sebagai alat agitasi politik, maka pemerintah kolonial tidak boleh tanggung-tanggung memberantasnya. Sebab apabila ideologi Islam disebarkan sebagai doktrin politik yang digunakan untuk membuat agitasi terhadap pemerintah asing sebagai pemerintah kaum kafir sehingga rakyat meragukan atau mengingkari legalitas pemerintah Belanda, maka di sini timbul bahaya bahwa fanatisme agama akan dapat menggerakkan rakyat untuk menghapuskan orde kolonial. Sehubungan dengan saran tersebut kelihatan bagaimana sikap hati-hati pemerintah kolonial dalam menghadapi Sarekat Islam. Demikian juga dalam menghadapi usaha-usaha untuk mempersatukan perjuangan Islam di Indonesia, seperti dalam kongres-kongres al-Islam di tahun 1920-an, dan Majelis Islam A'la Indonesia di tahun 1930-an yang diikuti oleh partai-partai politik Islam.

B. MASA RADIKAL

1. *Pergerakan Non-kooperasi*

Setelah Perang Dunia I berakhir, perasaan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme pada bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika semakin menonjol, lebih-lebih setelah adanya seruan Presiden Amerika Serikat tentang hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa. Partai-partai politik di Indonesia dan Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda juga terpengaruh oleh situasi demikian. Kematangan dalam perjuangan dan sikap keras yang diambil pemerintah kolonial menyebabkan sikap moderat makin ditinggalkan dan sikap radikal makin menonjol. Sikap radikal ini ditandai oleh taktik non-kooperasi dari pihak partai-partai politik. Artinya dalam memperjuangkan cita-citanya mereka tidak mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial, terutama di bidang politik. Semua hal yang diperlukan untuk mencapai cita-cita itu akan diusahakan sendiri, antara lain dengan

memperkokoh persatuan nasional, memajukan pendidikan, meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial untuk kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Mereka juga tidak mau memasuki dewan-dewan perwakilan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial baik di pusat maupun di daerah.

Taktik non-kooperasi pada masa radikal ini dilakukan oleh organisasi-organisasi: Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Proses radikalisasi ini bertambah kuat sejak tahun 1921, antara lain disebabkan oleh:

- a). timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1921 dan krisis perusahaan gula sejak tahun 1918.
- b). penggantian kepala pemerintahan dengan Gubernur Jenderal Fock yang bersikap sangat reaksioner, yang kebijaksanaan politiknya sangat mengabaikan kekuatan rakyat yang sedang berkembang.

Perhimpunan Indonesia (PI) didirikan pada tahun 1908 mula-mula dengan nama *Indische Vereeniging* (IV) oleh orang-orang Indonesia yang berada di Negeri Belanda, antara lain Sutan Kasayangan, R.M. Noto Suroto. Pada mulanya hanya bersifat organisasi sosial yang berjuang untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang perantauan Indonesia. Melalui majalah *Hindia Putra*, yang mulai diterbitkan pada bulan Maret 1915, kelihatan unsur politik mulai masuk dalam tubuh PI, lebih-lebih sejak kedatangan tiga serangkain IP yang dibuang ke Negeri Belanda. Dengan adanya perkembangan baru di dunia setelah Perang Dunia I, di mana semangat nasionalisme semakin kuat, IV berganti nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922. Majalahnya pada tahun 1923 juga berganti nama menjadi *Indonesia Merdeka*; dan nama organisasinya berubah lagi pada tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia.

Kegiatan politik itu meningkat terutama sejak aktifnya Ahmad Subardjo dan Mohammad Hatta, yang masing-masing pernah mengetuai PI. Untuk mempertegas dasar perjuangannya, pada tahun 1925 dikeluarkan anggaran dasar yang antara lain mengandung uraian sebagai berikut: "Bahwa PI akan berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan untuk Indonesia yang hanya bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia. Hal ini akan dicapai tanpa minta pertolongan kepada siapapun, juga tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kemerdekaan penuh bagi Indonesia akan dicapai dengan aksi bersama dan serentak oleh rakyat Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan persatuan nasional yang murni di antara seluruh rakyat Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda yang telah merusak kehidupan bangsa Indonesia".

Dasar perjuangan ini akan dipropagandakan sekuat-kuatnya di Indonesia dan di luar negeri. Sejak itu tindakannya meningkat di samping bersifat nasional-demokratis juga menjadi anti-kolonial. Propaganda ke tanahair dilakukan dengan penyebaran secara rahasia majalah *Indonesia Merdeka* melalui anggota-anggota PI yang kembali ke tanahair atau orang-

orang yang cuti ke Negeri Belanda. Majalah ini juga disebarakan ke negara-negara lain di mana mahasiswa Indonesia belajar. Di luar negeri, PI bertemu dan bekerjasama dengan perhimpunan-perhimpunan dan tokoh-tokoh pemuda serta mahasiswa yang berasal dari negeri-negeri jajahan di Asia Afrika yang mempunyai cita-cita yang sama dengan Indonesia.

Untuk mendapatkan perhatian dunia, PI ikut dalam kegiatan organisasi internasional seperti: Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, Liga Demokrasi Internasional, Kongres Wanita Internasional dan juga mengadakan hubungan dengan gerakan Komunis Internasional (Komintern). Dalam kongres Liga Demokrasi Internasional untuk perdamaian pada bulan Agustus 1926 di Paris, Moh. Hatta dengan tegas menyatakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia. Kegiatan dalam forum internasional ini cukup menggembirakan, karena dalam beberapa kongres seperti Kongres Liga bulan Februari 1927 di Berlin diambil keputusan akan menyokong perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dengan segala daya menuntut kepada pemerintah Belanda untuk memberi kebebasan bergerak kepada Pergerakan Nasional Indonesia. Hubungan dengan Liga kemudian diputuskan pada tahun 1929 setelah unsur komunis yang dikendalikan oleh Uni Sovyet menguasainya.

Aktivitas PI di Eropa dan pengaruhnya yang makin kuat di Indonesia mulai dicurigai oleh pemerintah Belanda. Dalam pada itu kegagalan pemberontakan komunis di Indonesia pada akhir tahun 1926, menyebabkan kaum komunis menumpahkan perhatiannya kepada PI sebagai wahana utama dalam perjuangan. Pengakuan ini walau hanya sebentar, dituangkan dalam suatu dokumen rahasia antara pimpinan PI dengan Semaun.

Dengan tuduhan akan memberontak terhadap pemerintah, dan juga untuk mencari hubungan antara pemberontakan PKI dengan kegiatan PI, pada bulan Juni 1927 diadakan penggeledahan terhadap pemimpin-pemimpin PI, dan pada bulan September empat orang tokoh di Negeri Belanda ditangkap dan diadili. Mereka adalah: Mohammad Hatta, Nazir Datuk Pamontjak, Ali Sastroamidjojo dan Abdulmadjid Djoyoadiningrat. Di dalam pemeriksaan sidang pengadilan di Den Haag pada bulan Maret 1928 mereka tidak terbukti bersalah, lalu dibebaskan. Namun gerak-gerik PI tetap diawasi dengan ketat.

Pada tahun '20 an itu pengaruh PI di tanahair terasa cukup kuat. Beberapa organisasi bahkan lahir berdasarkan ilham dari perjuangan PI, seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) tahun 1926, Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 dan Jong Indonesia (Pemuda Indonesia) tahun 1928.

Telah kita ketahui bahwa dalam tubuh SI terjadi perpecahan di dalam karena infiltrasi kaum komunis. Pada tahun 1920 SI sudah mencapai puncak perkembangan dengan anggota kira-kira 2 juta orang, suatu kekuatan yang sangat besar sekali. Kekuatan yang besar itu mulai ditarik oleh PKI untuk kepentingan perjuangannya. Adanya orientasi yang berbeda dalam

tujuan dan taktik perjuangan antara golongan kanan (H. Agus Salim, Abdul Muis, Surjopranoto cs.) yang berpusat di Yogyakarta dengan golongan kiri (Semaun — Alimin — Darsono cs.) yang berpusat di Semarang, suatu perpecahan yang sudah tampak sejak SI — Semarang dipengaruhi ISDV, tidak dapat dicegah. HOS Tjokroaminoto sebagai penengah di antara kedua aliran itu sangat besar pengaruhnya di dalam SI sehingga untuk sementara waktu perpecahan tidak terbuka. Akan tetapi pada akhirnya pertentangan itu makin lama makin mendalam juga. Dalam usaha untuk menguasai buruh, timbullah kompetisi antara Semaun dengan Surjopranoto. Golongan kiri kemudian mendirikan organisasi yang dinamai *Revolutionnaire Vak-centrale* (serikat sekerja revolusioner) dan berkedudukan di Semarang.

Dengan keluarnya pernyataan Komintern yang menentang cita-cita Pan — Islamisme, maka jurang antara golongan kiri dan kanan makin melebar. Di dalam kongres SI bulan Maret 1921 di Yogyakarta, Haji Fachruddin, Wakil Ketua Muhammadiyah mengedarkan brosur di mana dinyatakan bahwa Pan-Islamisme tidak mungkin tercapai apabila tetap bekerjasama dengan komunis. Keduanya memang bertentangan, yang satu percaya pada adanya kekuatan "gaib" yang menguasai alam-semesta yaitu Allah, sedangkan komunis tidak mempercayainya karena sifatnya yang materialistis. Di samping itu Agus Salim juga mengecam SI — Semarang yang mendukung PKI. Membalas kecaman itu, Darsono (SI — Semarang) melancarkan pula suatu kecaman terhadap beleid keuangan HOS Tjokroaminoto. SI — Semarang juga menentang percampuran antara agama dan politik di dalam SI. Karena kecaman-kecaman dari Semaun cs., Tjokroaminoto lalu lebih condong ke golongan kanan.

Pengaruh golongan kanan makin lama makin berkembang sehingga akhirnya kantor pusat CSI dipindahkan dari Surabaya ke Yogyakarta. Dalam kongres SI tanggal 6 — 10 Oktober 1921 di Surabaya pertentangan-pertentangan itu makin memuncak. Agus Salim dan Abdul Muis mendesak agar ditetapkan disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Organisasi-organisasi lain waktu itu seperti Budi Utomo dan PKI sendiri sudah melakukan disiplin partai walau ada kekecualian terhadap SI dengan tujuan untuk menarik anggotanya. Usul itu sangat mengkhawatirkan PKI, karena itu Tan Malaka meminta agar terhadap disiplin partai itu diadakan pengecualian bagi PKI. Akan tetapi disiplin partai diterima oleh kongres dengan mayoritas suara. Dengan demikian langkah pertama untuk mengakhiri infiltrasi dan pengaruh PKI ke dalam tubuhnya telah diambil oleh SI. Karena itu cabang-cabang SI yang terkena pengaruh PKI kemudian memisahkan diri.

Keputusan disiplin partai itu diperkuat lagi pada kongres SI bulan Februari 1923 di Madiun di mana Tjokroaminoto mempertajam disiplin partai dan meningkatkan pendidikan kader SI dalam usaha memperkuat organisasi partai. Dalam kongres itu juga diputuskan mengubah nama CSI menjadi Partai Sarekat Islam (PSI); sikap non-koperasi terhadap pemerintah

kolonial tetap dijalankan akan tetapi anggota yang sudah duduk dalam dewan-dewan perwakilan tetap diperbolehkan asal tidak membawa nama partai.

Untuk melakukan konsolidasi, Haji Agus Salim mencoba memperkuat pengaruhnya di bidang agama dengan melancarkan gerakan Pan-Islamisme. Gerakan ini juga dalam rangka mencari hubungan dengan pihak luar negeri. Kongres Al-Islam yang pertama diadakan di Cirebon pada bulan Nopember 1922 dan bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara kaum Muslimin. Di samping itu SI juga memasuki Radicale Concentratie, yang merupakan pengaturan partai yang radikal dalam usaha memenangkan perjuangan terhadap kolonialis, tetapi ternyata pengaruh SI dalam organisasi ini sudah lemah. Dalam tahun-tahun berikutnya kelihatan kegiatan SI untuk mencoba memperbaharui diri dengan jalan Pan-Islamisme, nasionalisme Islam, aksi menentang kapitalisme dan non-kooperasi terhadap dewan-dewan perwakilan. Meningkatkan radikalisme dalam Pergerakan Nasional yang kemudian memuncak dalam pemberontakan PKI tahun 1926/1927, menyebabkan pemerintah kolonial melakukan penekanan terhadap aksi-aksi SI. Beberapa tokoh SI di beberapa daerah ditangkap dan ditahan oleh pemerintah kolonial.

Pengaruh Partai Sarekat Islam makin mundur sebagai akibat tindakan pemerintah terhadap pemberontakan PKI, tetapi juga karena munculnya PNI dan perlawanan dari pihak Nahdatul Ulama. Pada tahun 1929 Partai Sarekat Islam berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) sebagai akibat bertambah majunya aliran yang bercita-cita Indonesia Raya.

Berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada bulan Mei 1920, yang merupakan jelmaan ISDV, tidak membawa perubahan dalam program politik. Partai tetap berpegang teguh kepada prinsip internasionalisme dan menganggap nasionalisme sebagai musuh utama. Sewaktu PKI berafiliasi dengan Komintern, maka sikap PKI harus diserasikan dengan garis politik daripada Komintern pada waktu itu yang bersikap merangkul kaum nasionalis. Dengan itu berarti sikap PKI terhadap partai-partai non-komunis juga berubah, bahkan PKI bersedia memasuki Volksraad yang dipandang waktu itu hanya sebagai dewan tipuan belaka dari pihak penjajah.

Infiltrasi yang dilakukan PKI dalam tubuh SI mendapat hambatan dengan adanya keputusan Komintern menentang Pan-Islamisme, yang diartikan oleh mereka yang anti-komunis dalam tubuh SI sebagai sikap anti-Islam secara keseluruhan. Infiltrasi PKI yang menimbulkan pertentangan dalam tubuh SI, terbendung dengan ditegakkannya disiplin partai pada tahun 1921. Meskipun unsur PKI sudah keluar dari SI, namun PKI tetap menggerakkan cabang-cabang SI yang pro-komunis yang mendapat nama SI-Merah untuk mengimbangi pengaruh SI-Tjokroaminoto.

Sementara itu dalam tubuh PKI terjadi pergantian pimpinan. Semaun dan Darsono yang menghindari penangkapan pemerintah kolonial karena aksi-aksi politiknya, lari ke Rusia dan Tan Malaka mengambil-alih pimpinan

an PKI. Akan tetapi karena keterlibatan organisasi politik SI dan PKI dalam pemogokan besar-besaran pada bulan Januari 1922, maka Abdul Muis, Tan Malaka dan Bergsma ditangkap dan diasingkan. Tan Malaka memilih pengasingan ke luar negeri di mana ia dengan bebas dapat berhubungan dengan Komintern. Tidak lama kemudian Semaun kembali ke Indonesia.

Sebagai akibat perpecahan terbuka di dalam tubuh SI, PKI kemudian menggerakkan SI-Merah untuk menandingi SI-Tjokroaminoto, dan dalam kongres PKI bulan Maret 1923 diambil keputusan untuk mendirikan SI-Merah di tempat di mana ada "SI-Putih". SI-Merah pada tahun 1924 berganti nama menjadi "Sarekat Rakyat" dan berada di bawah pengendalian PKI. Pada bulan Februari 1923 Darsono kembali dari Moskwa atas perintah Komintern untuk mendampingi Semaun. Ditambah dengan Alimin dan Musso (dari PKI Cabang Jakarta) maka PKI semakin aktif dalam percaturan politik di Hindia Belanda. Segala cara dihalalkan oleh PKI dalam propagandanya, sampai-sampai tidak segan-segan untuk mempergunakan kepercayaan rakyat kepada ayat-ayat al-Qur'an, hadith bahkan juga ramalan Joyoboyo dan Ratu Adil.

Kemajuan yang diperolehnya ternyata membuat PKI lupa diri. Mereka merencanakan suatu petualangan politik yang akan membawa bencana dan korban ribuan pemimpin rakyat. Petualangan itu dikenal dengan nama Pemberontakan 1926/1927. Pemberontakan itu telah dirancang dalam suatu pertemuan rahasia di Prambanan oleh pemimpin-pemimpin PKI seperti Sardjono, Budi Sutjitro, Sujono dan lain-lain. Sejak semula rencana itu tidak diterima secara bulat oleh cabang-cabang PKI. Yang tidak setuju berpendapat bahwa PKI belum mampu untuk mengadakan suatu pemberontakan. Begitupun Tan Malaka, sebagai wakil Komintern di Asia Timur menilai usaha pemberontakan itu tidak akan berhasil karena massa belum siap.

Akhirnya pemberontakan meletus pada tanggal 13 Nopember 1926 di Jakarta dan disusul di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam tempo satu hari saja pemberontakan di Jakarta dapat ditumpas dan di daerah-daerah dalam tempo satu minggu. Di Sumatra Barat baru pada tanggal 1 Januari 1927 pemberontakan meletus, akan tetapi dalam tempo tiga hari sudah dapat ditumpas.

Pemberontakan gagal karena memang massa belum siap dan organisasi PKI sendiri masih lemah. Ribuan pengikut PKI dan ribuan bukan-pengikut tetapi yang dapat dihasut untuk ikut menjadi korban petualangan itu. Puluhan ribu yang ditangkap, dipenjarakan atau dibuang ke daerah yang sangat terpencil dan buas yakni Tanah Merah, Digul Atas, Irian Jaya. Banyak di antara mereka hanya namanya saja yang kembali.

Petualangan yang sia-sia ini yang hanya menurutkan nafsu ingin berkuasa secepatnya tanpa memperhitungkan kenyataan yang ada dan tanpa dukungan seluruh rakyat yang sedang memperjuangkan Indonesia

Merdeka, bukanlah suatu peristiwa yang dapat dibanggakan. Bahkan sebaliknya, sebagai akibat petualangan PKI itu dalam tahun-tahun berikutnya Pergerakan Nasional Indonesia mengalami penindasan yang luar biasa sehingga sama sekali tidak dapat bergerak karena memang tidak siap untuk mengadakan gerakan di bawah tanah.

Dalam situasi yang tidak menggembirakan itu Pergerakan Nasional Indonesia memerlukan darah baru yang segar. Darah baru itu diperoleh dengan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. PNI didirikan dan dipimpin oleh kaum terpelajar Indonesia, yang selain terpelajar juga telah mendapat pendidikan politik. Kebanyakan dari mereka adalah bekas anggota Perhimpunan Indonesia yang setelah kembali ke Indonesia telah turut aktif dalam Pergerakan Nasional di tanahair. Sebagai Ketua PNI dipilih Ir. Sukarno.

Di dalam anggaran dasar PNI telah dinyatakan bahwa tujuannya adalah "Indonesia Merdeka". Tujuan itu hendak dicapai dengan azas "percaya pada diri sendiri", artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial-budaya yang sudah dirusak oleh penjajahan, dengan kekuatan sendiri. Segala itu akan dicapai melalui:

- a. Usaha politik: memperkuat rasa kebangsaan (nasionalisme) dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat kerjasama dengan bangsa-bangsa Asia, dan menumpas segala rintangan bagi kemerdekaan diri dan kehidupan politik.
- b. Usaha ekonomi: memajukan perdagangan pribumi, kerajinan, bank-bank dan koperasi.
- c. Usaha sosial: memajukan pengajaran yang bersifat nasional, meningkatkan derajat kaum wanita, memerangi pengangguran, memajukan transmigrasi, memajukan kesehatan rakyat antara lain dengan mendirikan poliklinik dan memberantas pepadatan (morfinisme) mendirikan dan menyokong serikat-serikat sekerja.

Karena perjuangannya sangat bertentangan dengan kolonialisme, maka PNI bersikap non-kooperasi, tetapi berusaha menggalang persatuan dengan partai-partai lain untuk mencapai cita-cita. Ideologi PNI, kemudian dikenal sebagai Marhaenisme, diciptakan oleh Ir. Sukarno berdasarkan aliran-aliran yang dianggap ada di Indonesia waktu itu yakni aliran nasionalis, Islam dan marxis.

Aksi PNI pertama-tama ditujukan pada masalah politik yang muncul waktu itu, terutama pembelaan terhadap tokoh-tokoh PI yang ditangkap di Negeri Belanda dan mutlaknya persatuan bangsa Indonesia. Pemimpin-pemimpin PNI seperti Mr. Sartono, Mr. Suyudi, Mr. Iskaq Tjokrohadi-suryo, dr. Samsi, Mr. Budyarto, Mr. Ali Sastroamidjojo dan terutama Ir. Sukarno sebagai seorang ahli pidato berhasil menggerakkan rakyat sesuai dengan tujuan PNI. Pengaruh PNI mulai meluas dari daerah pusatnya di

Priangan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Pengaruh aksi-aksi PNI menimbulkan suatu suasana kesegaran baru di dalam masyarakat. Meskipun anggotanya tidak sebanyak SI, namun pengaruhnya terhadap Pergerakan Nasional sangat besar. Kegiatan PNI yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan nasional itu dicap oleh pemerintah kolonial sebagai suatu gerakan nasionalisme yang ekstrim dan memusuhinya. Meskipun ada peringatan tersebut, cabang-cabang PNI telah tumbuh di seluruh Indonesia.

Aksi persatuan yang diusahakan oleh PNI berbuah dengan terbentuknya federasi Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dalam konferensi tanggal 17—18 Desember 1927 di Bandung. PPPKI beranggotakan PNI, SI, Budi Utomo, Pasundan, Sumatranenbond, Kaum Betawi, Indonesische Studieclub dan Algemene Studieclub. PPPKI berusaha untuk mencapai:

- a. Persamaan arah aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi dan melakukan kerjasama dalam perjuangan.
- b. menghindarkan perselisihan antar-anggota yang hanya akan merugikan perjuangan.

Sesuai dengan tujuan PPPKI, partai-partai tetap berdiri sendiri-sendiri, keputusan PPPKI adalah hasil musyawarah anggota dan tidak mengikat bagi yang tak setuju.

Dalam kongres I PNI bulan Mei 1928 disyahkanlah suatu anggaran dasar, program azas dan daftar usaha (kegiatan). Dalam program azas dinyatakan bahwa imperialisme Belanda, yang menjadikan Indonesia sebagai negeri tempat mengambil bahan mentah, pasar untuk hasil industri dan penanaman modal, telah merusak struktur sosial, ekonomi dan politik Indonesia dan menghalang-halangi usaha memperbaikinya. Syarat utama untuk dapat memperbaiki kembali susunan masyarakat Indonesia ialah kemerdekaan politik.

Nasionalisme melalui persatuan rakyat yang selalu ditekankan oleh PNI tidak hanya terungkap dengan terbentuknya PPPKI tetapi juga berpengaruh pada organisasi-organisasi pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Bahkan juga diadakannya Kongres Perempuan di Yogyakarta pada tgl. 22 Desember 1928 merupakan manifestasi daripada pengaruh PNI.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam membawa rakyat ke arah kemerdekaan menimbulkan kecemasan orang-orang reaksioner Belanda di Indonesia. Meskipun politik pemerintah kolonial Belanda sudah sangat menekan rakyat sehingga kesejahteraan hidup rakyat-banyak ada di bawah batas minimum, toh orang-orang reaksioner itu masih mengecam pemerintah kolonial karena dianggap terlalu berbuat baik bagi rakyat Indonesia. Organisasi reaksioner *Vaderlandse Club* yang didirikan pada tahun 1929 mendesak pemerintah kolonial agar segera mengambil tindakan tegas terhadap PNI. Di samping itu media-massa Belanda mengadakan

kampanye yang aktif menentang aksi PNI. Berbagai macam issue dilansir oleh mereka untuk menjelekkan PNI. Pada tanggal 6 Agustus 1929 pemerintah kolonial mengeluarkan ancaman terhadap PNI supaya menghentikan kegiatannya yang dianggap menentang pemerintah. Bahkan Ir. Sukarno dilarang melakukan kegiatan partai ke luar pulau Jawa.

Issue bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada tahun 1930, dijadikan alasan oleh pemerintah kolonial untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan. Tindakan itu dilaksanakan pemerintah pada tgl. 24 Desember 1929 dengan mengeledah kantor-kantor PNI di seluruh Indonesia dan melakukan penangkapan atas diri beberapa pemimpin PNI. Pada tgl. 9 Desember 1929 Ir. Sukarno cs. ditangkap di Yogyakarta dan selanjutnya dikirim ke Bandung. Dalam peristiwa ini pemerintah melakukan 400 penangkapan terhadap PNI di seluruh Indonesia. Seluruh Pergerakan Nasional mengajukan protes.

Pengadilan terhadap 4 tokoh PNI : Ir. Sukarno, R. Gatot Mangku-pradja, Maskun Sumadiredja dan Supriadinata oleh pengadilan negeri (landraad) merupakan suatu peristiwa bersejarah bagi Pergerakan Nasional. Dalam pidato pembelaan Ir. Sukarno, yang terkenal dengan nama *Indonesia Menggugat* ditandaskan bahwa "Kini telah jelas bahwa Pergerakan Nasional di Indonesia bukanlah buatan intelektual dan komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam bathinnya telah merdeka. Revolusi Indonesia adalah revolusinya zaman sekarang, bukan revolusinya sekelompok-sekelompok kecil kaum intelektual, tetapi revolusinya bagian terbesar rakyat dunia yang terbelakang dan diperbudak".

Berbeda dengan nasib tokoh-tokoh PI, maka pemimpin-pemimpin PNI dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan kolonial pada tgl. 20 Desember 1930. Peristiwa yang menimpa PNI ini ternyata merupakan pukulan besar bagi PNI. Atas inisiatif Mr. Sartono, PNI dibubarkan pada tgl. 25 April 1931. Hilanglah unsur utama Pergerakan Nasional waktu itu.

Di samping partai-partai politik yang utama di atas, partai-partai kecil tapi cukup punya pengaruh seperti Budi Utomo, Permi, Pasunda, Kaum Betawi, Sarekat Sumatra, Sarekat Ambon dan lain-lain, juga melakukan kegiatan politik yang berazaskan kebangsaan.

2. Gerakan Pemuda dan Gerakan Wanita

Sebelum tumbuhnya dengan cepat organisasi-organisasi pemuda daerah pada dasawarsa kedua abad ini, Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 pada mulanya dapat dipandang sebagai organisasi pemuda. Hanya sesudah kongres I, peranan pemuda dalam organisasi ini menjadi lemah, bahkan kemudian hilang karena sama ke luar karena merasa kecewa atas kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinannya.

Beberapa tahun sesudah Budi Utomo didirikan, pada tahun 1915 berdiri *Tri Koro Dharmo* di Jakarta, Pendirinya, yakni antara lain R.

Satiman Wirjosandjoyo, Kadarman dan Sunardi menetapkan bahwa perkumpulan itu dibentuk khusus untuk anak-anak sekolah menengah yang berasal dari daerah Jawa dan Madura. Tri Koro Dharmo yang berarti tiga tujuan mulia (Sakti, Budi, Bakti) bertujuan menimbulkan pertalian antara murid-murid bumiputra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan; menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggota dan membangkitkan dan mempertajam peranan buat segala bahasa dan budaya. Dengan ini hendak dicapai tujuan untuk mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali dan Lombok.

Untuk menghindari perasaan tidak puas dari pihak sementara anggota yang dapat melemahkan organisasi, pada tahun 1918 dalam kongresnya di Solo namanya diubah menjadi *Jong Java*. Dalam kongres tahun 1919 diputuskan untuk menunjuk seorang anggota wanita duduk dalam pengurus besar dan dalam anggota redaksi majalah organisasi. Kegiatannya berkisar pada bidang sosial-budaya, seperti pemberantasan buta huruf, kepramukaan, seni dan lain-lain. Pada kongres bulan Mei 1922 diputuskan bahwa Jong Java tidak mencampuri urusan politik. Anggota-anggota dilarang menjalankan politik atau menjadi anggota perkumpulan politik.

Meningkatnya radikalisme Pergerakan Nasional mempengaruhi Jong Java untuk toh bergerak di bidang politik. Dalam kongres ke VII bulan Desember 1924, akibat pengaruh Sarekat Islam, usul Ketua Jong Java yaitu Sjamsuridjal agar anggota yang sudah berumur 18 tahun diberi kebebasan untuk berpolitik dan memasukkan program memajukan agama Islam, mendapat tantangan dari anggota. Adanya program memajukan agama Islam didorong oleh H. Agus Salim seorang tokoh Sarekat Islam dengan alasan peranan agama sangat besar dalam mencapai cita-cita Indonesia Merdeka. Usul ini ditolak, dan yang setuju berpolitik mendirikan *Jong Islamieten Bond (JIB)* dengan agama sebagai dasar perjuangan. Untuk menggalang persatuan dengan organisasi pemuda Islam lainnya dibentuklah Pemuda Muslimin Indonesia. JIB yang terpengaruh SI, dan Jong Java yang terpengaruh oleh Budi Utomo, secara per-orangan tidak melarang anggotanya bergerak dalam politik. Banyak dijumpai kasus di mana anggota JIB adalah juga anggota Jong Java dan sebaliknya.

Dalam kongres-kongres selanjutnya diambil keputusan untuk memupuk persatuan di kalangan rakyat Indonesia seluruhnya, meningkatkan nasionalismenya dan juga telah diputuskan untuk lebih banyak menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa Belanda, di samping itu juga kata *Inlands* (bumiputra) diganti dengan *Indonesisch*.

Sejalan dengan munculnya Jong Java, pemuda-pemuda daerah lain juga membentuk organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Sumatranen Bond, Pasundan, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, Timorees Verbond dan lain-lain. Pada dasarnya organisasi itu semua masih bersifat kedaerahan tetapi semuanya mempunyai

cita-cita ke arah kemajuan Indonesia, khususnya memajukan budaya dan daerah masing-masing.

Jong Sumatranen Bond didirikan pada bulan Desember 1917 di Jakarta dengan cabang-cabang di Padang dan Bukittinggi. Tujuannya adalah mempererat hubungan di antara pemuda-pemuda yang berasal dari Sumatra, mendidik mereka untuk menjadi pemimpin bangsa, mempelajari dan mengembangkan budaya yang ada di Sumatra. Tokoh utama dari organisasi itu adalah Moh. Hatta dan Muh. Yamin.

Di luar negeri di mana pemuda-pemuda Indonesia banyak menuntut ilmu, organisasi pemuda juga muncul. Tetapi yang paling terkenal dan kemudian juga sangat berpengaruh dalam Pergerakan Nasional ialah Perhimpunan Indonesia. Melalui majalah *Indonesia Merdeka* gagasan-gagasan PI disebar ke Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1908 dengan nama *Indische Vereeniging* hanya untuk kegiatan sosial, tetapi sesudah tahun 1920 terutama bergerak di bidang politik. Nasionalisme dan percaya pada diri-sendiri dalam mencapai cita-cita Indonesia Merdeka merupakan dasar utama perjuangan PI. Tokoh-tokohnya yang utama adalah Moh. Hatta, Ahmad Subardjo, Sukiman, Sunaryo, Ali Sastroamidjyo, Iskak, Samsi, Budhyarto Martoatmodjo, Iwa Kusumasumantri, Sutan Sjahrir, Nazir Datuk Pamontjak dan lain-lain yang ternyata kemudian memegang peranan penting dalam Perjuangan Nasional sejak 1945, dalam pemerintah Republik Indonesia, dan dalam partai-partai politik.

Meningkatnya nasionalisme yang mendorong keinginan untuk bersatu dalam perjuangan, mendorong organisasi-organisasi pemuda yang masih bersifat kedaerahan itu untuk bersatu dalam satu wadah. Pada tanggal 30 April — 2 Mei 1926 diadakan Kongres Pemuda Indonesia I di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan oleh suatu komite yang diketuai oleh Tabrani dengan anggota Bahder Djohan, Sumarto, Jan Toule, Soulehuwij, Paul Pinontuan. Komite itu adalah hasil dari pertemuan antara Jong Java, Jong Sumatranenbond, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun dan lain-lain pada tanggal 15 Nopember 1925. Tujuan kongres ialah untuk menanamkan semangat kerjasama antara perkumpulan pemuda di Indonesia untuk menjadi dasar persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. Usul untuk membentuk suatu organisasi bagi pemuda Indonesia tidak berhasil karena rasa kedaerahan masih kuat. Karena itu pada tanggal 15 Agustus 1926 beberapa organisasi pemuda mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan suatu badan tetap bagi kepentingan pemuda Indonesia. Hasilnya adalah bahwa pada tanggal 31 Agustus 1926 disyahkan anggaran dasar suatu organisasi baru yang bernama Jong Indonesia dengan tujuan menanamkan dan mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Organisasi ini berbentuk permanen dan berdiri di luar organisasi-organisasi pemuda yang sudah ada.

Akan tetapi harapan pada Jong Indonesia itu tidak begitu terpenuhi. Karenanya pada permulaan tahun 1926 oleh Algemene Studieclub di

Bandung dibentuk pula organisasi baru juga dengan nama Jong Indonesia. Tujuan tidak begitu banyak berbeda dengan yang lama, tidak berpolitik tetapi membolehkan anggotanya berpolitik secara perorangan.

Sementara itu para pelajar di Jakarta dan Bandung melihat adanya dua kepentingan yang bertentangan dalam penjajahan, yang disebut mereka sebagai antithese kolonial yang sangat merugikan pihak Indonesia. Antithese ini akan hapus apabila penjajahan sudah lenyap. Untuk itulah para pelajar tersebut, yang berasal dari berbagai daerah, pada bulan September 1926 mendirikan organisasi Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) di Jakarta. Berdasarkan pandangan tersebut, PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia Merdeka dan untuk itu para anggota dididik untuk menjadi pemimpin rakyat sejati. Dengan demikian para anggota harus rajin belajar. Cita-cita itu hanya akan tercapai apabila sifat kedaerahan lenyap, begitupun perselisihan pendapat antara sesama nasionalis harus lenyap. Dalam aksi-aksinya kelihatan militansi PPPI di bidang pergerakan pemuda, sosial dan politik. Tokoh-tokohnya antara lain adalah : Abdullah Sigit, Sugondo, Suwiryo, Sumitro Reksodiputro, Muh. Yamin, A.K. Gani, Moh. Tamzil, Sunarko, Sumanang, dan Amir Sjarifuddin.

Pada tahun 1928 alam politik di Indonesia sudah dipenuhi oleh jiwa persatuan. Rasa bangga, rasa telah menemukan diri-sendiri, rasa memiliki cita-cita tinggi yaitu Indonesia Merdeka, telah mencekam jiwa rakyat Indonesia yang terjajah. Dalam Kongres Pemuda Indonesia II pada tanggal 27 — 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang dihadiri oleh utusan organisasi-organisasi pemuda, diikrarkanlah sumpah yang terkenal dengan nama *Sumpah Pemuda*. Isinya adalah :

- Pertama: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia
- Kedua : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
- Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Kepada Kongres juga diperkenalkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, dan bendera Merah Putih yang dipandang sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan salahsatu puncak Pergerakan Nasional. Karena itu peristiwa yang bersejarah ini setiap tahun diperingati sampai sekarang sebagai hari besar nasional.

Sebagai kelanjutan kongres ini pada tanggal 24 — 28 Desember 1929 di Yogyakarta disetujui gagasan *fusi* daripada organisasi-organisasi pemuda yang telah ada. Persiapan ke arah itu dilakukan oleh suatu komisi dan pada tanggal 31 Desember 1930 dalam konferensi di Solo berdirilah *Indonesia Muda*, yang pada saat berdirinya telah mempunyai 25 cabang, 4 di Sumatra

dan satu di Sulawesi. Jong Islamieten Bond dan Pemuda Muslimin karena alasan tertentu tidak ikut dalam Indonesia Muda. Organisasi ini memutuskan tidak akan bergerak dalam aksi politik walau hanya sebagai taktik belaka. Tetapi justru keputusan ini kemudian menyebabkan organisasi ini agak mundur. Meskipun telah ada pernyataan demikian, namun kecurigaan pemerintah kolonial tetap besar, bahkan sampai melarang murid-murid beberapa sekolah untuk menjadi anggotanya. Tekanan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap organisasi ini menyebabkan banyak anggotanya ke luar. Akibatnya perasaan tidak puas terhadap pemerintah kolonial bertambah dalam.

Politik reaksioner Gubernur Jenderal de Jonge yang mengadakan bermacam-macam peraturan larangan bagi kegiatan organisasi-organisasi nasional menyebabkan aksi-aksi menjadi lesu. Untuk memperkuat barisan, kembali diusahakan suatu kongres pemuda pada tahun 1936. Usaha itu gagal karena tidak ada ijin dari pemerintah. Barulah pada tahun 1938 dapat diadakan Kongres Pemuda Indonesia III di Yogyakarta, dihadiri utusan 22 organisasi, yang melahirkan fusi baru organisasi pemuda yaitu Permuafakatan Perhimpunan-perhimpunan Pemuda Indonesia (Perpindo) dengan pusat di Jakarta. Dalam organisasi ini organisasi-organisasi pemuda yang bernaung di bawah sesuatu partai politik tidak turut serta.

Di samping organisasi yang bersifat "sekuler" juga ada organisasi yang bersifat keagamaan seperti, Anshor Nahdatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, JIB, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katholik, dan lain-lain. Begitupun organisasi yang terbatas lingkungannya masih banyak juga seperti Pemuda Taman Siswa, Unitas Studiosorum Indonesiensis (USI) dan lain-lain. Bahkan organisasi pemuda yang tumbuh pada masa-masa terakhir penjajahan Belanda yang ada sifat kedaerahannya juga masih ada seperti: Pemuda-Pemudi Cirebon, Pemuda Sriwijaya, Minangkabau Muda dan sebagainya.

Sejalan dengan gerakan pemuda, dalam Pergerakan Nasional juga ada gerakan wanita. Terutama yang khusus berjuang untuk meninggikan derajat wanita, emansipasi wanita dan hal-hal yang bertalian dengan kesejahteraan rumahtangga yang menjadi tiang suksesnya pembangunan sesuatu bangsa. Semenjak dirintis oleh R.A. Kartini pada permulaan abad ini, gerakan wanita berkembang seiring dengan gerakan pemuda. Pada umumnya bergerak di bidang sosial-budaya, dan di samping mendirikan organisasi, mereka juga menerbitkan majalah-majalah dan brosur-brosur yang kesemuanya mempercepat proses kemajuan wanita Indonesia. Perkumpulan wanita berdiri di mana-mana seperti Perkumpulan Kartinifonds di Semarang, Putri Mardika di Jakarta, Maju Kemuliaan di Bandung, Wanita Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Solo, Kerajinan Amai Setia di Kota Gadang, Serikat Kaum Ibu Sumatra di Bukittinggi, Ina Tunj di Ambon, Gorontaloesche Mohammedaansche Vrouwenvereniging, dan sebagainya. Banyaknya perkumpulan ini juga menunjukkan bahwa golongan

wanita tidak mau ketinggalan dalam proses kemajuan nasional.

Suratkabar gerakan wanita yang terkenal antara lain adalah: *Poetri Hindia* di Bandung (1909), *Wanita Sworo* (1913) di Pacitan-Brebes, *Soenting Melayoe* di Bukittinggi, *Estri Oetomo* di Semarang, *Soeara Perempuan* di Padang, *Perempoean Bergerak* di Medan dan *Poetri Mardika* di Jakarta.

Kalau pada awalnya gerakan wanita lebih terdapat pada golongan elite yang sadar, maka sesudah tahun 1920 gerakan itu sudah sampai ke lapisan bawah. Perkembangan itu juga terjadi karena perluasan pengajaran bagi wanita dan kesediaan organisasi-organisasi untuk membentuk bagian wanita. Contoh: Aisyah yang merupakan bagian organisasi Muhammadiyah, pada tahun 1929 telah mempunyai 5.000 orang anggota dari 32 sekolah dengan 75 guru-guru wanita.

Terpengaruh oleh gerakan pemuda, maka organisasi-organisasi wanita mengadakan pula suatu kongres nasional yang dinamai Kongres Perempuan Indonesia, pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Hasilnya adalah dibentuknya Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI) yang pada tahun 1929 diubah namanya menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Tanggal lahir PPII tanggal 22 Desember 1928 kemudian dikenal sebagai "Hari Ibu" dan tiap tahun diperingati dan dapat dipandang sebagai hari lahirnya kesadaran yang mendalam pada pihak wanita Indonesia mengenai martabatnya.



Suasana Kongres Wanita III di Surabaya tahun 1930

Berbeda dengan PPII, Istri Sadar yang didirikan di Bandung pada tahun 1930 lebih bercorak sesuatu organisasi politik, begitupun Istri Indonesia yang ikut serta dalam pemilihan anggota dewan-dewan kotapraja pada tahun 1938. Namun bila dibandingkan dengan jumlah wanita dari golongan bawah, hasil-hasil gerakan wanita selama penjajahan belumlah banyak.

C. MASA MODERAT

1. Pergerakan Kooperasi

Tindakan keras pemerintah kolonial terhadap PNI pada akhir tahun 1929 dengan menangkapi pemimpin-pemimpinnya yang dicurigai akan melakukan suatu pemberontakan, merupakan pertanda bahwa masa radikal bagi Pergerakan Nasional mendekati akhirnya. Krisis ekonomi dunia yang meletus pada tahun 1929 juga melanda Indonesia dan mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang politik juga terpengaruh dan terhadap kegiatan partai-partai politik Indonesia yang radikal yang dipandang dapat mengganggu tindakan-tindakan untuk menanggulangi krisis ekonomi, dilakukan pembatasan dan pengawasan yang lebih ketat. Kebetulan Gubernur Jenderal de Jonge (1931 — 1936) yang ditugaskan untuk mengendalikan pemerintahan, terutama untuk mengendalikan ekonomi Hindia Belanda yang menjadi tulang punggung Kerajaan Belanda, adalah seorang yang sangat konservatif dan bahkan reaksioner. Ia pernah mengatakan bahwa ia tidak melihat adanya Pergerakan Nasional itu. Yang diketahuinya hanyalah ikhtiar beberapa orang dan itupun secara perorangan saja yang mencoba hendak menghasut, dan dengan tangan besi ia berhasil membatalkan "maksud yang jahat" itu. Bahkan karena ketakutannya kepada pengaruh pendidikan yang berjiwa nasional Indonesia ia telah mengeluarkan ordonansi pengawasan terhadap sekolah-sekolah pada tahun 1932. Meletusnya pemberontakan di atas kapal perang *de Zeven Provinciën* pada bulan Februari 1933 sebagai protes atas gaji yang terlalu kecil, yang menyebabkan pemerintah kolonial mengambil sikap yang lebih keras lagi terhadap partai non-kooperasi karena kuatir pemimpin nasionalis di dalam keadaan krisis ekonomi akan berhasil menghasut rakyat untuk memberontak. Berkurangnya radikalisme Pergerakan Nasional bukan karena berkurangnya usaha ke arah Indonesia Merdeka melainkan karena belum memiliki kemampuan untuk bertahan secara memadai terhadap hantaman kolonialisme.

Sejak tahun 1930 sesudah ditangkapnya Ir. Sukarno cs., dalam tubuh PNI timbul perpecahan. Hal ini disebabkan karena pada kongres luarbiasa ke II PNI di Jakarta, pada tanggal 25 April 1931 ditetapkan untuk membubarkan PNI dengan alasan keadaan yang sangat memaksa sehubungan dengan putusan pengadilan Bandung untuk menghukum

Ir. Sukarno cs., yang dianggap juga mengenai organisasi.

Putusan pembubaran PNI itu tidak hanya menggoncangkan anggota-anggota PNI sendiri tetapi juga mengagetkan kalangan politik Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa keputusan kongres itu mencerminkan pendirian yang lemah. Anggota-anggota yang menyetujui pembubaran, mendirikan Partai Indonesia (Partindo) pada tanggal 30 April 1931 dan Mr. Sartono dipilih sebagai ketua. Meskipun nama berbeda, sesungguhnya azas dan tujuan Partindo tidak begitu berbeda dengan PNI, hanya rumusnya yang berbeda. Tujuannya adalah tetap mencapai Indonesia Merdeka. Untuk itu diusahakan untuk memperoleh hak-hak politik yang lebih luas, dan perbaikan susunan masyarakat dan kesejahteraan. Partindo percaya bahwa organisasi massa dengan aksi massa adalah senjata yang tetap ampuh untuk mencapai kemerdekaan. Karena itu sikap non-kooperasi terhadap pemerintah tetap dilaksanakan oleh Partindo.

Anggota-anggota PNI yang tidak senang atas keputusan kongres menamakan diri "Golongan Merdeka" dan kemudian menghimpun diri dalam suatu organisasi baru yang diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan dibentuk pada bulan Desember 1933. Moh. Hatta yang sangat tidak menyetujui pembubaran PNI menuduh Mr. Sartono cs. sangat gegabah dalam mengambil keputusan tanpa mendengar pendapat mayoritas anggota PNI, yang dapat mencerminkan adanya sifat kerakyatan dan musyawarah. Bahkan dianggapnya suatu kekeliruan besar mengambil keputusan pembubaran sebelum pemerintah kolonial sendiri membubarkannya. PNI—Baru, sekalipun tidak memakai nama partai, di bawah pemimpin-pemimpin Moh. Hatta, dan Sutan Sjahri muncul sebagai kekuatan politik yang berdasarkan nasionalisme dan demokrasi. Tujuannya juga untuk mencapai Indonesia Merdeka yang dicapai dengan taktik non-kooperasi. Usaha mencapai cita-cita itu akan dilaksanakan melalui pendidikan politik dan sosial, dan terpengaruh oleh hal ini maka PNI-Baru tidak mempunyai massa yang luas bila dibandingkan dengan Partindo. Sekeluanya Ir. Sukarno dari penjara pada pertengahan tahun 1932, ia menemui dua warisan PNI yang tidak mungkin lagi dapat dipersatukan. Menghadapi suatu pilihan ia memasuki Partindo, dan kemudian diangkat menjadi ketua.

Kegiatan kedua partai tersebut, meskipun telah terjadi perpecahan, namun tetap mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Untuk membatasi gerak-gerik Pergerakan Nasional, pemerintah mengeluarkan bermacam-macam peraturan yang terutama tertuju kepada partai-partai dan organisasi yang bersikap non-kooperasi. Mula-mula dilakukan pengawasan yang lebih keras oleh polisi politik (PID) terhadap rapat-rapat, diadakan larangan bagi pegawai-pegawai negeri untuk menjadi anggota Partindo dan PNI-Baru, kemudian dikeluarkan larangan bagi partai-partai untuk mengadakan rapat-rapat di seluruh Indonesia dan akhirnya pemimpin-pemimpinnya ditangkapi dan dibuang ke daerah-daerah yang terpencil. Pada bulan

Februari 1934 Moh. Hatta dan tiga anggota pengurus besar PNI-Baru termasuk Sutan Sjahrir ditangkap dan diasing, mula-mula ke Tanah Merah, Digul Atas (Irian Jaya), sesudah satu tahun dipindah ke Bandaneira. Setiap kali ada pemimpin PNI-Baru ditangkap dan dibuang, segera diganti lagi oleh pemimpin baru, dan karena itu ia tetap berdiri terus. Penangkapan dan larangan berapat menyebabkan lama-lama pengaruhnya mulai berkurang, meskipun kemudian diusahakan melalui kursus-kursus tertulis dan propaganda dari rumah ke rumah. Pihak Partindo juga mengalami keadaan yang serupa. Dalam tahun 1934 Ir. Sukarno ditangkap lagi dan dibuang ke Flores dan kemudian ke Bengkulu. Larangan berapat bagi Partindo ternyata telah menyulitkan PPPKI hingga pada tahun 1933 Partindo ke luar dari federasi tersebut. Terlihat kemudian bahwa larangan-larangan yang ditimpakan kepada Partindo menyebabkan timbulnya suara-suara agar partai dibubarkan dan diganti dengan nama baru, berlainan dengan sikap kalangan PNI — Baru. Akhirnya Partindo memang dibubarkan pada bulan November 1936 oleh Mr. Sartono, dan seperti pada tahun 1931 juga tanpa mayoritas suara.

Dari proses perkembangan kedua partai tersebut di atas kelihatan bahwa pemerintah kolonial meskipun bertindak keras tetapi tidak samasekali menghancurkannya. Meskipun demikian tindakan keras terhadap partai non-kooperasi, menyebabkan partai-partai yang kecil dan menjalankan kooperasi, terkena pengaruh. Mereka berpendapat bahwa sikap non-kooperasi tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi politik waktu itu, karena kalau diteruskan hanya akan merugikan perjuangan. Timbul suara-suara agar mengubah taktik perjuangan. Untuk memperkuat barisan, mereka menyatukan diri (fusi) ke dalam suatu organisasi yang lebih besar untuk tampil ke depan menggantikan partai-partai non-kooperasi. Partai baru yang terutama adalah *Partai Indonesia Raya* (Parindra) yang merupakan hasil fusi antara Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Parindra terbentuk dalam kongres fusi pada tanggal 24 — 26 Desember 1935 di Solo di mana juga dr. Sutomo dipilih sebagai ketua dan Surabaya ditetapkan sebagai pusat partai. Sarekat Sumatera dan Sarekat Selebes juga menggabungkan diri ke dalam Parindra. Tujuan partai sebagai disebutkan dalam anggaran dasar ialah "Indonesia Raya", dan ini hendak dicapai dengan memperkokoh semangat persatuan kebangsaan; berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme, dan berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat baik di bidang ekonomi maupun sosial. Terhadap pemerintah kolonial, Parindra tidak bersikap kooperasi tetapi juga tidak non-kooperasi, dan karena itu Parindra mempunyai wakil-wakil dalam Volksrad dan mengambil sikap sesuai dengan situasi sidang. Parindra dapat berkembang dengan baik hingga menjadi partai utama karena sikap "luwes" yang dijalankan. Ia berusaha memajukan kaum tani dengan mendirikan rukun tani, membentuk serikat-serikat sekerja, menganjurkan *swadeshi* dalam bidang

ekonomi dan mendirikan "Bank Nasional Indonesia". Perjuangan Parindra di dalam Volksraad berlangsung sampai akhir penjajahan Belanda; terkenal kegigihan M.H. Thamrin, walaupun hasilnya tidak semuanya menggembirakan, tetapi cukup efektif untuk memaksa pemerintah melaksanakan pelbagai tuntutan, umpamanya pemakaian bahasa Indonesia pada sidang Volksraad, mengganti istilah "Inlander" menjadi "Indonesier", dan lain sebagainya.

Tidak lama sesudah Partindo bubar, anggota yang tidak setuju pembubaran membentuk partai *Gerakan Rakyat Indonesia* (Gerindo) pada bulan Mei 1937. Sesuai dengan situasi, Gerindo melakukan taktik kooperasi dengan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencapai kemerdekaan politik ekonomi dan sosial. Pemimpinnya yang terkenal antara lain Mr. Muh. Yamin, dr. A.K. Gani, Mr. Amir Sjarifuddin, Mr. Sartono dan Mr. Wilopo. Berbeda dengan Parindra, Gerindo bersedia menerima anggota dari kalangan peranakan (Indo).

2. Perjuangan Nasional di Volksraad

Ditangkapnya pemimpin-pemimpin PNI pada akhir tahun 1929 dan dibentuknya *Vaderlandse Club* yang sangat reaksioner pada bulan Oktober 1929 mendorong munculnya suatu fraksi baru di dalam Volksraad dengan nama Fraksi Nasional. Fraksi itu didirikan pada bulan Januari 1930 di Jakarta beranggotakan 10 orang wakil-wakil dari daerah Jawa, Sumatra dan Kalimantan. Moh. Husni Thamrin dipilih sebagai ketua. Tujuan fraksi ialah untuk menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan jalan:

- a) mengusahakan perubahan ketatanegaraan;
- b) berusaha menghapuskan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi dan intelektual sebagai antithese kolonial;
- c) mengusahakan kedua hal tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Masalah yang hangat waktu itu ialah penangkapan pemimpin-pemimpin PNI yang juga melanda orang-orang di luar PNI. Menurut Fraksi Nasional tindakan itu membuktikan bahwa pemerintah telah berlaku tidak bijaksana dan tidak adil terhadap gerakan yang tumbuh di kalangan rakyat. Ketidakadilan itu pada dasarnya berpangkal pada artikel 169 sub, 153 bis dan 161 bis, karena itu Volksraad berdasarkan mosi Fraksi Nasional membentuk suatu komisi untuk meninjau kembali artikel-artikel tersebut. Oleh pemerintah kolonial usul agar perkara yang dituduhkan kepada para pemimpin Indonesia itu disidangkan dalam pengadilan tinggi dan bukan pada pengadilan negeri (*landraad*), ditolak dengan alasan bahwa perkara itu menyangkut hukum pidana dan tidak merupakan suatu penuntutan politik. Jelaslah dari penolakan itu bahwa pemerintah tidak memandang kegiatan Pergerakan Nasional sebagai gerakan politik melainkan hanya sebagai suatu

kegiatan kejahatan yang mengganggu keamanan umum.

Sewaktu masalah pertahanan kembali dibicarakan di sidang Volksraad, Fraksi Nasional menentang maksud pemerintah untuk meningkatkan kekuatan pertahanan. Kekuatan pertahanan yang besar tentu akan membutuhkan biaya yang besar sedangkan keadaan keuangan sangat buruk dan lagi peningkatan itu tidak ada untungnya bagi rakyat Indonesia yang masih dijajah. Bahkan mungkin kekuatan itu akan digunakan untuk menindas rakyat. Disarankan agar biaya tersebut digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat yang sudah sangat menderita karena depresi ekonomi. Penekanan kegiatan politik oleh pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge dengan mengeluarkan bermacam-macam larangan seperti berkumpul, berapat dan berpropaganda serta pembreidelan surat kabar mendorong makin pentingnya peranan Volksraad bagi perjuangan nasional. Sebaliknya juga para nasionalis di Volksraad seolah-olah didorong ke arah sikap non-kooperasi. Sesuai dengan keadaan waktu itu, maka masalah sosial-ekonomi lebih diperhatikan untuk diperjuangkan. Gambaran kehidupan rakyat dalam periode pemerintahan de Jonge dapat dilihat dari perbandingan di bawah ini: harga padi turun dari f.7,50 menjadi f.2,50 sekuintal, pemilikan tanah turun dari 0,27 menjadi 0,24 bahu untuk satu keluarga, pajak naik sampai 80%, gaji pegawai turun sampai 45% dan gaji buruh yang sudah kecil itu makin dikurangi lagi hingga kemelaratan rakyat betul-betul tidak tertahan lagi dan pengangguran terjadi di mana-mana. Kesabaran rakyat dalam menderita tidak membuat sabar para nasionalis di Volksraad untuk memperjuangkan nasibnya. Ordonansi Sekolah-sekolah Liar, yang dikeluarkan untuk menindas sekolah-sekolah swasta nasional yang melahirkan banyak nasionalis yang berjuang untuk kemerdekaan, ditentang di dalam sidang-sidang Volksraad maupun di luarnya. Bagi Indonesia, Ordonansi itu sangat penting karena mempunyai pengaruh yang luas, sehingga Moh. Husni Thamrin mengancam akan ke luar dari Volksraad bila Ordonansi itu tidak dicabut. Setelah mendapat kritik yang pedas dari kaum nasionalis Indonesia, Ordonansi itu dicabut. Walaupun peristiwanya kelihatan kecil tetapi pencabutan kembali Ordonansi itu merupakan suatu kemenangan yang berarti bagi Pergerakan Nasional.

Meskipun hasrat dan aspirasi rakyat sudah dapat disalurkan dalam wadah Parindra dan Gerindo dan juga PNI — Baru, yang sudah mengambil sikap moderat dalam perjuangannya, akan tetapi rasa tidak puas terhadap kebijaksanaan umum pemerintah kolonial tetap bergejolak di dalam masyarakat. Karena banyak cara yang diambil pemerintah kolonial untuk melarang kegiatan politik, maka pemikiran yang sesungguhnya menyimpang dari pemikiran radikal muncul di dalam masyarakat. Heboh yang paling besar yang melibatkan pertentangan pendapat mengenai masadepan Indonesia timbul dengan dilontarkannya Petisi Sutardjo pada bulan Juli 1936 di sidang Volksraad. Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua Persatuan

Pegawai Bestuur/Pamongpraja Bumiputra (PPBB) dan wakil organisasi ini di Volksraad, adalah seorang demokrat yang memandang bahwa kelesuan dan kelumpuhan Pergerakan Nasional waktu itu disebabkan karena tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah. Lebih-lebih situasi politik dunia waktu itu dengan makin berkembangnya Naziisme dan Fasisme seharusnya membuat pemerintah waspada melihat bahaya yang mungkin mengancam Indonesia, dan karena itu perlu mengeratkan hubungan dengan Pergerakan Nasional Indonesia. Berdasarkan itu Sutardjo, yang didukung oleh beberapa wakil golongan dan daerah di Volksraad, mengusulkan agar diadakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dengan utusan-utusan kerajaan Belanda yang akan menetapkan masadepan Indonesia di mana diharapkan dalam jangka waktu 10 tahun Indonesia sudah dapat berdiri sendiri meskipun tetap dalam lingkungan kerajaan Belanda.

Sebelum maksud Indonesia berdiri sendiri itu tercapai, Sutardjo mengusulkan untuk mengambil langkah-langkah tertentu memperbaiki keadaan Indonesia. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah:

- (1) Volksraad dijadikan parlemen yang sesungguhnya;
- (2) direktur departemen diberi tanggungjawab;
- (3) dibentuknya suatu Dewan Kerajaan (*Rijksraad*) sebagai badan tertinggi antara Negeri Belanda dan Indonesia yang anggota-anggotanya merupakan wakil-wakil kedua belah pihak; dan
- (4) penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahiran, asal-usul dan cita-citanya memihak Indonesia.

Petisi melahirkan pro dan kontra, baik di kalangan Indonesia maupun di kalangan Belanda. Penentang dari pihak Belanda menuduh bahwa Indonesia belum waktunya untuk mengajukan hal-hal seperti itu. Setelah disetujui dengan mayoritas suara anggota Volksraad, petisi disampaikan kepada pemerintah Kerajaan dan parlemen Belanda. Partai-partai nasional yang utama waktu itu (Parindra, Gerindo, PSII, PNI-Baru) sudah memperingatkan para pendukung petisi bahwa tindakan yang diambil untuk memperbaiki keadaan Indonesia melalui forum dewan perwakilan rakyat yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Volksraad, hanyalah usaha sia-sia belaka. Telah beberapa kali terbukti, antara lain pada tahun 1918, bahwa dalam hal yang prinsipil bagi penjajahan tuntutan melalui dewan ini hanyalah menambah suramnya harapan di masa datang. Namun penyokong Petisi dengan membentuk suatu komite berusaha agar petisi itu mendapat dukungan luas di kalangan rakyat. Komite itu tidak hanya bergerak di dalam negeri tetapi juga di Negeri Belanda, sehingga ada orang-orang Belanda yang menyetujui Petisi tersebut.

Dua tahun setelah diajukan, tanpa melalui perdebatan di parlemen Belanda, Petisi ditolak oleh pemerintah Belanda pada tanggal 16 Nopember 1938. Alasannya antara lain: "Bahwa bangsa Indonesia belum matang

untuk memikul tanggungjawab memerintah diri-sendiri". Dengan demikian bangsa Indonesia telah dinilai belum mampu untuk berdiri sendiri apalagi untuk mengurus suatu negara yang merdeka.

Cara penolakan tanpa melalui sidang parlemen sangat mengecewakan pihak Pergerakan Nasional, meskipun pihak yang ditolak sesungguhnya telah menduga sebelumnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa tuntutan rakyat Indonesia tidak dibicarakan secara terbuka oleh pemerintah Kerajaan Belanda dengan wakil-wakil rakyatnya, dan sebaliknya memperkuat keyakinan bahwa fungsi Volksraad dalam memperjuangkan kemerdekaan, tidak begitu berarti. Kekecewaan atas penolakan, mendorong terbentuknya suatu federasi yang kemudian sesudah berdiri bernama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Kegagalan petisi dan pembentukan GAPI memperlihatkan bahwa PPPKI belum dapat menggalang persatuan yang sangat dibutuhkan, di samping juga belum merupakan suatu pemusatan dari segala tenaga dalam Pergerakan Nasional.

Sebelum GAPI lahir pada bulan Mei 1939, gagasan pembentukan suatu federasi baru telah diajukan oleh PSII pada bulan April 1938 dengan pembentukan Badan Perantara Partai-Partai Politik Indonesia (Bapeppi). Karena pembentukannya kurang lancar, maka atas inisiatif Moh. Husni Thamrin dibentuk suatu konsentrasi baru yang terjelma dalam GAPI dengan anggota-anggota seperti Parindra, Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katholik, Persatuan Minahasa, Pasundan, dan Partai Islam Indonesia. Dalam anggaran dasarnya ditetapkan dasar perjuangannya:

- a) hak untuk menentukan diri sendiri;
- b) persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia, dengan berdasarkan kerakyatan dalam faham politik, ekonomi dan sosial;
- c) persatuan aksi seluruh Pergerakan Indonesia.

Dengan semboyan "Indonesia Berparlemen", GAPI menuntut adanya suatu dewan perwakilan rakyat yang berdasarkan kepada sendi-sendi demokrasi. Sementara itu Perang Dunia ke II sudah meletus di Eropa. Melalui manifestonya tanggal 20 September 1939, GAPI menilai bahwa untuk menanggulangi bahaya fasisme yang akan menimpa daerah kerajaan Belanda, sebaiknya diadakan kerjasama antara rakyat-rakyat Negeri Belanda dan Indonesia. Hal ini akan tercapai apabila kepada rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan dengan suatu parlemen yang dipilih oleh dan dari rakyat; dan pemerintah tersebut bertanggungjawab kepada parlemennya. Dengan demikian rakyat merasa punya taruhan dalam menghadapi fasisme Jepang. Untuk menyokong aksi GAPI, dalam kongres tanggal 23 — 25 Desember 1939 diputuskan untuk membentuk Kongres Rakyat Indonesia. Kongres juga menetapkan bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia, serta meningkatkan pemakaian bahasa Indonesia bagi seluruh rakyat.

Usaha-usaha GAPI dalam Volksraad ternyata mendapat tanggapan yang sinis dari pihak pemerintah kolonial yang menuduh GAPI ingin menangguk di air keruh. Pertentangan menjadi semakin panas ketika membicarakan masalah pertahanan bagi Indonesia melalui suatu milisi. Dalam suasana itulah Moch. Husni Thamrin, tokoh utama yang gigih memperjuangkan "Indonesia Berparlemen" di dalam Volksraad, digeledah rumahnya oleh pemerintah kolonial tanpa tuduhan yang jelas. Pada waktu itu Thamrin sedang sakit keras dan beberapa hari sesudah pengeledahan ia meninggal. Sewaktu Negeri Belanda telah diduduki Jerman dan pemerintah kerajaan Belanda mengungsi ke Inggris, GAPI mengeluarkan resolusi agar segera diadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia, dan langkah pertama ke arah itu adalah mengubah kedudukan Volksraad menjadi parlemen sesungguhnya, dan kedudukan kepala-kepala departemen menjadi menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen itu.

Tuntutan yang makin keras dilakukan di forum Volksraad serta di luarnya mendorong pemerintah kolonial untuk membentuk suatu komisi yang akan menyelidiki keinginan orang Indonesia mengenai perubahan-perubahan ketatanegaraan. Komisi ini, yang kemudian dikenal sebagai Komisi Visman, tidak mendapat sambutan dari Volksraad; juga GAPI pada mulanya menyatakan tidak setuju. Ternyata yang ditanyai pendapatnya bukanlah pemimpin-pemimpin Pergerakan Nasional, melainkan orang-orang Indonesia yang menjadi pejabat pemerintah kolonial.

Pada saat-saat bangsa Belanda sedang dalam terjepit itu, negerinya diduduki oleh kaum Nazi Jerman, sedang tanah jajahannya diancam oleh kaum fasis Jepang, Pergerakan Nasional Indonesia mengulurkan tangannya. Kaum nasionalis Indonesia menawarkan kerjasama dalam menghadapi ancaman Jepang.

Tetapi pemerintah kolonial Belanda membuta-tuli dan tetap melanjutkan penindasannya terhadap kaum nasionalis. Kaum nasionalis mengharapkan bahwa rakyat Indonesia diberi suatu taruhan dalam mempertahankan tanahnya terhadap serbuan Jepang. Tetapi pemerintah kolonial menyatakan bahwa penetapan suatu perubahan ketatanegaraan Indonesia ke arah pemerintahan sendiri harus menunggu sampai sesudah perang selesai.

Tidak mengherankan bahwa para pemimpin Pergerakan Nasional sangat kecewa. Sedangkan rakyat yang pikirannya sederhana kemudian mudah temakan oleh propaganda Jepang yang bersemboyan "pembebasan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa-bangsa Barat".

Demikianlah situasi hubungan antara nasionalisme Indonesia dan kolonialisme Belanda ketika tentara-tentara Jepang membanjir ke selatan dan menyerbu Indonesia. Pertahanan Belanda runtuh dalam waktu hanya kurang lebih dua bulan. Dan dengan demikian berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia untuk selama-lamanya.

BAB III

JAMAN PENDUDUKAN JEPANG

A. PENGEKANGAN POLITIK

1. *Pengendalian Terhadap Pergerakan Nasional*

Dalam rangka membangun suatu wilayah kekuasaan di Asia, Jepang meletuskan perang terhadap Amerika Serikat. Perang dibuka dengan pemboman terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor (Hawaii) pada tanggal 8 Desember 1941. Setelah pemboman dilakukan, baru disampaikan pernyataan perang secara resmi. Hindia Belanda yang menjadi salah satu sekutu Amerika Serikat di kawasan Pasifik, menyatakan perang terhadap Jepang lima jam sesudah peristiwa pemboman itu.

Serentak dengan itu Jepang bergerak masuk ke Asia Tenggara dengan taktik gerak cepat. Sasarannya adalah Indocina, Muang Thai, Birma, Malaya, Filipina dan Hindia Belanda. Di Hindia Belanda, Jepang memperoleh kemajuan yang pesat. Berturut-turut kota minyak yang penting seperti Tarakan, Balikpapan, jatuh pada bulan Januari 1942. Kemudian Pontianak, Palembang pada bulan Februari 1942. Dalam Pertempuran Laut Jawa tanggal 19 Februari 1942, armada gabungan Serikat berhasil dihancurkan oleh armada Jepang. Dan kini terbukalah pintu gerbang ke pulau Jawa yang menjadi pusat pertahanan tentara Serikat. Adapun kekuatan Serikat di Jawa pada waktu itu terdiri atas pasukan gabungan Belanda, Inggris, Amerika Serikat dan Australia, di bawah komando Serikat (ABDACOM) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten. Pada bulan Februari itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda memindahkan pemerintahannya ke Bandung. Tentara Jepang yang khusus dikerahkan untuk merebut pulau Jawa ada di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitosyi Imamura. Pada tanggal 1 Maret 1942 mereka mendarat di tiga tempat sekaligus, yakni di Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat) dan di Kragan (Jawa Tengah). Sesudah pendaratan itu pada tanggal 5 Maret 1942 dengan mudah mereka memasuki kota Jakarta (pada waktu itu Batavia) yang oleh Belanda dinyatakan sebagai kota terbuka. Pasukan Jepang kemudian bergerak ke Bogor.

Dalam rangka penyerbuan ke kota Bandung, pasukan yang mendarat di Eretan merebut Subang dan pangkalan udara Kalijati. Pasukan Serikat melakukan serangan balasan pada tanggal 3 — 4 Maret 1942 untuk merebut kembali kedua tempat itu, tetapi dipukul mundur. Setelah berhasil di dua tempat itu, pihak Jepang mempersiapkan diri untuk menusuk jantung pertahanan Belanda/Serikat di Bandung dan pegunungan Priangan. Mereka menusuk ke selatan dari daerah Subang dan terhenti sebentar di depan garis

pertahanan terakhir Belanda/Serikat di Ciater. Juga di sini pasukan-pasukan Belanda tidak berhasil bertahan dan dipukul mundur sampai ke Lembang. Pada titik itu pihak Belanda minta berunding dan sesudah tukar-menukar utusan, disepakati untuk mengadakan pertemuan antara panglima yang paling senior dari kedua belah pihak.

Perundingan itu pada tanggal 8 Maret 1942 dilaksanakan di Kalijati dan menghasilkan penyerahan tanpa syarat daripada seluruh angkatan perang Serikat di Indonesia, yang diwakili oleh Letnan Jenderal Ter Poorten. Dalam perundingan itu hadir pula Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborg Stachouwer selaku penguasa tertinggi Hindia Belanda. Dengan penyerahan itu berakhirilah masa penjajahan Belanda di Indonesia, diganti oleh kekuasaan Kemaharajaan Jepang. Rakyat Indonesia yang sama sekali tidak dipersiapkan untuk menentukan nasibnya sendiri, oleh pihak Belanda dilemparkan begitu saja kepada kekejaman penguasa-penguasa Jepang. Dengan demikian secara moril pihak Belanda telah kehilangan haknya di Indonesia.

Sesudah penyerahan itu Indonesia dibagi atas tiga pemerintahan militer pendudukan yaitu :

1. Tentara Keenambelas (Angkatan Darat) memerintah Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta (pada waktu itu Batavia);
2. Tentara Keduapuluhlima, memerintah Sumatra, berpusat di Bukittinggi;
3. Armada Selatan Kedua memerintah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya, berpusat di Ujungpandang.

Pemerintahan pada masing-masing di antara ketiga wilayah itu dipimpin oleh Kepala Staf Tentara/Armada dengan gelar *gūnsēikan* (kepala pemerintahan militer) dan kantornya disebut *gūnsēikānbu*. Karena kekurangan tenaga-tenaga pemerintahan, orang Jepang terpaksa mengangkat orang-orang Indonesia pada jabatan-jabatan tinggi. Pada jaman Hindia Belanda belum pernah jabatan-jabatan tinggi itu dipercayakan kepada orang Indonesia.

Untuk mengarahkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membikin Gerakan Tiga A, yang berarti "Nippon Cahaya Asia; Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia". (Selama jaman pendudukan sebutan Jepang adalah "Nippon"). Namun gerakan ini tidak berumur lama, karena tidak mendapat simpati dari rakyat. Untuk dapat menarik rakyat, pihak Jepang menawarkan kerjasama kepada tokoh-tokoh Pergerakan Nasional Indonesia. Untuk itu pemimpin-pemimpin Indonesia, seperti Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Sjahrir, dan lain sebagainya dibebaskan dari penahanan pemerintah Hindia Belanda.

Para pemimpin itu memperhitungkan, bahwa kerjasama lebih menguntungkan perjuangan untuk kemerdekaan daripada perlawanan. Karena

pemerintahan Jepang di Indonesia pada waktu itu adalah suatu pemerintahan militer pada jaman perang. Apalagi pihak Jepang dalam propagandanya tidak menentang cita-cita Indonesia Merdeka.

Kerjasama itu dimulai pada akhir tahun 1942 dalam suatu komisi untuk menyelidiki adat-istiadat Indonesia. Komisi terdiri dari 13 orang Jepang beserta beberapa pemimpin nasionalis, seperti Sukarno, Hatta, K.H. Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, Sutardjo Kartohadikusumo, Abikusno Tjokrosuyoso, Prof. Dr. Supomo dan lain-lainnya. Kemudian empat orang nasionalis yang dianggap paling terkemuka, yang dikenal dengan nama empat serangkai, yakni Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara, mendapat kepercayaan untuk membentuk gerakan baru. Gerakan ini diberi nama "Pusat Tenaga Rakyat" (Putera). Tujuan Jepang adalah: membujuk kaum nasionalis sekuler dan golongan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdikan kepada usaha perang Jepang. Putera dibentuk secara resmi pada tanggal 16 April 1943. Adapun yang memungkinkan kerjasama ini adalah kemenangan Jepang atas Belanda. Kemenangan itu menimbulkan keyakinan pada kaum nasionalis akan perlunya untuk bekerjasama, dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk tetap memelihara Pergerakan Nasional.

Agar aktivitas Putera tidak membahayakan kedudukannya, oleh pemerintah Jepang dibatasi pada beberapa macam kegiatan saja. Yang terpenting adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar pro Jepang. Organisasi Putera disusun atas pimpinan Pusat dan Daerah. Kepemimpinan Empat Serangkai diketengahkan sebagai lambang daripada aliran-aliran dalam Pergerakan Nasional.

Pada awal berdirinya, Putera mendapat sambutan dari semua organisasi massa yang ada pada waktu itu. Pengurus Persatuan Guru Indonesia (PGI) menyatakan bergabung dengan Putera. Kemudian disusul Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos, Telegraf, Telepon dan Radio (PTTR), Pengurus Besar Isteri Indonesia di bawah pimpinan Mr. Maria Ulfah Santoso dan Ny. Yusupadi Danuhadiningrat, menyatakan bergabung dengan Putera. Organisasi pemuda dan pelajar masing-masing Barisan Banteng dan Badan Perantaraan Pelajar-Pelajar Indonesia (BAPERPI) di bawah pimpinan Supeno, juga menyatakan diri bergabung dengan Putera, organisasi olahraga Ikatan Sport Indonesia (ISI) juga ikut bergabung.

Di tingkat daerah *syū* dan yang lebih rendah, perkembangan Putera tidak pesat, karena kondisi sosial-ekonomi. Sekalipun Putera merupakan organisasi pemerintah, namun bantuan pemerintah tidak dapat dirasakan oleh Putera. Organisasi ini harus menghidupi diri sendiri, dengan mengerahkan dana dari anggotanya dan hasil keuntungan badan perdagangan yang didirikan. Namun dengan segala kekurangannya Putera berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi jaman kemerdekaan yang segera akan datang. Dengan menggunakan media komunikasi-massa pihak Jepang,

seperti surat kabar dan radio, pemimpin Indonesia dapat berkomunikasi dengan rakyat secara lebih luas. Pada Jaman Jepanglah, sampai ke pelosok-pelosok desa terdapat radio-radio umum yang selama siaran pasti dikerumuni oleh rakyat.

Rupa-rupanya pihak Jepang menganggap bahwa Putera lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada untuk pihak Jepang. Orang Indonesia melalui Putera kurang menunjukkan dukungannya kepada pemerintah militer Jepang. Oleh karena itu pemerintah militer Jepang berusaha menciptakan organisasi baru yang berbeda dengan Putera. Organisasi baru itu adalah *Jawa Hokokai* (Himpunan Kebaktian Jawa). Alasan pembentukannya adalah bahwa perlu rakyat dihimpun tenaganya lahir dan batin, untuk digalang kebaktiannya sesuai dengan *hōkō seisyin* (semangat kebaktian). Di dalam tradisi Jepang kebaktian ini memiliki tiga dasar, yaitu mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Dalam rangka kebaktiannya, tiga hal itulah yang dituntut dari rakyat oleh pemerintah militer Jepang. Dalam *Hōkōkai* potensi politik-ekonomi dan sosial-budaya digabungkan, dan dikerahkan mulai dari bawah sampai ke atas. *Jawa Hōkōkai* dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah, yang strukturnya diintegrasikan ke dalam tubuh pemerintah. Pimpinan tertinggi dipegang langsung oleh *gunseikan* (kepala pemerintahan militer) dan di tingkat daerah dipimpin oleh *syucokan* (gubernur/residen). Kaum nasionalis disisihkan dan mereka diberi jabatan-jabatan baru dalam pemerintah. Kegiatan mereka diawasi, komunikasi dengan rakyat dibatasi.

Sebagai organisasi sentral yang terkendali, *Jawa Hōkōkai* terdiri dari pelbagai macam *hōkōkai* profesi seperti *Izi Hōkōkai* (himpunan kebaktian dokter), *Kyōiku Hōkōkai* (himpunan kebaktian para pendidik), *Fujinkai* (organisasi wanita), *Keimin Bunka Syidōsyō* (pusat budaya) dan *hōkōkai* perusahaan. Dalam kegiatannya, *hōkōkai* adalah pelaksana pengerahan atau mobilisasi barang yang dipergunakan untuk perang, seperti emas, permata, besi, aluminium, dan lain-lain barang yang dianggap penting untuk perang.

Sekalipun pemerintah Jepang mengekang aktivitas semua kaum nasionalis, namun golongan nasionalis Islam mendapat perlakuan lain. Golongan ini memperoleh kelonggaran, karena dinilai paling anti Barat. Jepang menduga golongan ini akan mudah dirangkul. Sampai bulan November 1943, Jepang masih memperkenankan berdirinya MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) yang dibentuk pada jaman Hindia Belanda. Para pemuka agama diundang oleh Gunseikan, Mayor Jenderal Okazaki, ke Jakarta untuk mengadakan pertukaran pikiran. Hasilnya adalah bahwa MIAI diakui sebagai organisasi resmi umat Islam, dengan syarat harus merubah azas dan tujuannya. Kegiatan MIAI terbatas pada pembentukan baitul-mal (badan amal) dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam. Organisasi ini mendapat simpati penuh dari umat Islam sehingga

MIAI sekonyong-konyong tumbuh menjadi organisasi yang besar. Pihak Jepang tidak mengira bahwa pertumbuhannya sedemikian pesatnya. Para tokoh MIAI di daerah-daerah mulai diawasi. Untuk meyakinkan bahwa itu tidak berbahaya, pemerintah mulai menyelenggarakan latihan-latihan kyahi. Pengikut latihan disaring dan dipilih oleh *kēncō* (bupati), diutamakan mereka yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungannya. Selama tahun 1943 pemerintah Jepang melatih Kyahi sejumlah 3 angkatan.

MIAI yang selama itu dianggap sebagai organisasi resmi, masih juga tidak memuaskan Jepang. Pada bulan Oktober 1943, MIAI dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (*Masyumi*). Pada bulan November 1943, Masyumi dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma'ruf, K.H. Hasyim, Kartosudarmo, K.H. Nachrowi dan Zainul Arifin.

Dengan demikian pemerintah Jepang berhasil melakukan pengekan terhadap pelbagai kegiatan Pergerakan Nasional kita. Namun mereka tidak berhasil mengekang berkembangnya kesadaran nasional di dalam dada bangsa Indonesia.

2. *Pengerahan Total Untuk Usaha Perang Jepang*

Situasi Perang Pasifik pada awal tahun 1943 mulai berubah. Pukulan Serikat di daerah Pasifik mulai dirasakan, terutama dalam pertempuran laut di sekitar Midway (Juni 1942) dan Laut Karang (Agustus 1942 — Februari 1943). Ofensif tentara Jepang berhasil dihentikan oleh Serikat, dan Jepang beralih ke sikap defensif. Karena sudah kehabisan tenaga manusia, Jepang menyadari, bahwa mereka memerlukan dukungan dari penduduk masing-masing daerah yang diduduki.

Sejak memasuki tahun kedua dari pendudukannya, Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Pada tanggal 9 Maret 1943 diresmikan berdirinya gerakan *Seinendan* (barisan pemuda). Sedang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 29 April 1943. Pembentukan barisan itu tujuannya adalah untuk melatih dan mendidik para pemuda Indonesia agar mampu menjaga dan mempertahankan tanahairnya dengan kekuatan sendiri. Tetapi maksud yang tersembunyi adalah untuk memperoleh tenaga cadangan yang cukup untuk kepentingan perangnya.

Syarat-syarat untuk menjadi anggota *seinendan* adalah pemuda-pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. *Seinendan* dibentuk juga di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan. Pada sekolah-sekolah, para pelajar diharuskan bergabung pada *Gakutotai* (barisan pelajar) dari sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas. Tidak disadari oleh pihak Jepang bahwa dalam kedua organisasi itu dipesemaikan semangat nasionalisme, percaya kepada diri-sendiri serta disiplin. Golongan nasionalis sekuler memainkan peranan penting di dalam membina dan mengisi jiwa pemuda dengan semangat nasionalisme tersebut. Bahkan pada pucuk pimpinan *seinendan*

diduduki beberapa nasionalis muda seperti Sukarni, Abdul Latif dan lain-lain. Kecuali Jawa *Seinendan*, dibentuk pula barisan khusus yang membantu pelaksanaan tugas kepolisian. Kelompok khusus ini disebut *Keibodan* (barisan bantu polisi). Syarat yang diperlukan untuk menjadi anggota *Keibodan*, lebih ringan dari pada *Seinendan*. Batas usia rata-rata 23 — 35 tahun. Semua laki-laki yang berbadan sehat dari setiap desa (*ku*) pada usia tersebut diharuskan menjadi anggota *keibodan*.

Dalam pembentukan *Keibodan* ini Jepang berusaha agar badan ini tidak dipengaruhi oleh golongan nasionalis. *Keibodan* dibentuk di desa-desa di mana pengaruh golongan nasionalis sangat tipis, dan penguasaannya diserahkan kepada Polisi. Di Sumatra *Keibodan* dikenal dengan nama *Bogodan*. Di daerah angkatan laut khususnya di Kalimantan, disebut *Borneo Konon Hokokudan*. Jumlah anggota *Keibodan* lebih kurang 28.000 orang.

Seinendan dan *Keibodan* adalah badan-badan yang dibentuk sampai ke pelosok terkecil. Sebelum itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah Indonesia, pengorganisasian pemuda secara besar-besaran seperti pada jaman Jepang. Barisan semi-militer yang khusus dari golongan Islam adalah *Hizbullah* (tentara Allah). Memasuki tahun 1944, keadaan perang Jepang bertambah buruk. Satu demi satu daerah pendudukan Jepang direbut oleh Serikat, sehingga serangan mulai langsung diarahkan ke negeri Jepang sendiri. Jepang mulai memberikan janji "kemerdekaan" kepada negara-negara yang mereka duduki, termasuk Indonesia. Pada tanggal 9 September 1944 Perdana Menteri Koiso berjanji akan memberi kemerdekaan "di kelak kemudian hari". Beberapa hari sesudah janji kemerdekaan itu di dalam Jawa Hokokai dibentuk Benteng Perjuangan Jawa (*Jawa Sentotai*). Organisasi itu membentuk Barisan Pelopor (*Suisyintai*) yang dipimpin oleh Ir. Sukarno, Sudiro, R.P. Suroso, Oto Iskandardinata dan dr. Buntaran Martoatmodjo.

Sebagai barisan para-militer, organisasi-organisasi pemuda itu diberi latihan militer dengan menggunakan senapan kayu atau bambu runcing. *Seinendan*, Barisan Pelopor, *Hizbullah* dikerahkan untuk mendengarkan pidato-pidato kaum nasionalis. Dalam Barisan Pelopor golongan terpelajar ikut serta terjun ke dalam kegiatan massa rakyat, dan sebaliknya golongan pemuda yang tidak terpelajar dapat menyesuaikan diri untuk bersama-sama mengobarkan semangat nasional.

Pada tahun 1943, Jepang juga mulai memanfaatkan tenaga pemuda-pemuda Indonesia untuk diberi latihan militer. Pada bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman tentang kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk dilatih menjadi pembantu prajurit Jepang (*heiho*). Yang diterima adalah pemuda-pemuda yang berusia 18 — 25 tahun, dengan pendidikan terendah SD (Sekolah Dasar). *Heiho* ini ditempatkan langsung pada Angkatan Perang Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Sekalipun *heiho* ini diberi status pembantu prajurit, namun ketika perang semakin menghebat mereka dipersenjatai bahkan ada yang dilatih

untuk melayani meriam-meriam pertahanan udara. Mereka ikut bertempur ke front di Solomon, Irian, Birma dan lain-lain.

Di samping pengerahan heiho, Jepang juga melatih pemuda-pemuda Indonesia dalam suatu tempat latihan yang bernama *Seinen Dōjō* (tempat latihan pemuda) di Tangerang. *Seinen Dōjō* adalah tempat latihan militer yang pertama, untuk mencari bibit-bibit tenaga cadangan yang memiliki kemampuan tinggi.

Sebagian dari kaum nasionalis berpendapat bahwa masuknya pemuda-pemuda Indonesia ke dalam lingkungan militer Jepang, hanya semata-mata akan menguntungkan Jepang saja. Kemudian R. Gatot Mangkupraja, mengusulkan kepada pemerintah Jepang agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang tidak saja di garis belakang, tetapi juga di medan perang. Akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1943 Panglima Tentara Keenambelas, Letnan Jenderal Kumakici Harada mengeluarkan *Osamu Seirei* No. 44, yang mengatur pembentukan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Pada bulan itu juga mulai dilatih puluhan calon perwira Indonesia pada *Jawa Bōei Giyugun Kanbu Renseitai* atau Korps Latihan Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Bogor. Juga di Sumatra dibentuk *Giyugun* pada tanggal 22 November 1943. Para calon perwiranya dilatih di Prapat. Di Jawa setelah lulus dari pendidikan, mereka diangkat sebagai *daidancō* (komandan batalyon), *cludancō* (komandan kompi), dan *syodancō* (komandan peleton). Kecuali latihan untuk perwira, di beberapa tempat dilatih para calon *budancō* (komandan regu) seperti di Magelang dan Cimahi. Mereka akan ditempatkan dalam *daidan-daidan* (batalyon) yang disusun. Anggota Peta ini terdiri dari pelbagai golongan masyarakat. Perwira yang menjadi komandan batalyon dan komandan kompi biasanya pemuka masyarakat, pemimpin agama atau pejabat pemerintah. Sedangkan untuk komandan peleton umumnya dipilih dari pelajar sekolah menengah.

Dengan dibentuknya Tentara Peta ini di Indonesia pada jaman Jepang timbul golongan yang memperoleh pendidikan militer. Mereka menjadi pelopor yang penting selama Perang Kemerdekaan Indonesia dan sesudahnya.

B. PEMERAHAN SOSIAL-EKONOMI

1. Pemerahan Bahan Makanan

Sesudah berhasil menduduki Asia Tenggara, Jepang berusaha menyusun suatu wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Wilayah ekonomi itu disebut Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Ketika Jepang menduduki Indonesia, obyek-obyek vital, aparat-aparat produksi telah hancur. Sehingga pada saat pertama pendudukan Jepang, sebagian besar kehidupan ekonomi lumpuh.

Pemerintah pendudukan Jepang mulai mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjalankan ekonomi. Pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang diperketat. Untuk mencegah meningkatnya harga barang-barang dikeluarkan peraturan pengendalian harga dan dijatuhkan hukuman berat kepada pelanggarnya. Semua hartabenda dan perusahaan perkebunan bekas milik orang Serikat disita dan beberapa perusahaan vital seperti pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perusahaan transport langsung dikuasai pemerintah pendudukan Jepang.

Perkebunan teh, kopi, karet, kina diawasi dan pemerintah memegang monopoli penjualan hasilnya. Hanya perkebunan tertentu saja yang direhabilitasi. Larangan ini dikaitkan dengan kepentingan perang, karena tidak semua hasil perkebunan dinilai sebagai bahan penunjang usaha perang. Hanya perkebunan karet dan kina yang mendapat perhatian khusus. Perkebunan teh, kopi, tembakau dibatasi, karena diklasifikasi sebagai barang kenikmatan. Oleh karena itu banyak perkebunan yang telah dirusak, diganti tanamannya dengan yang berguna untuk perang. Hasil perkebunan lainnya yang dimonopoli pemerintah adalah perkebunan tebu. Sekalipun pabrik dibumihanguskan oleh Belanda, namun beberapa pabrik gula berhasil diperbaiki dan dapat bekerja kembali. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pengelolaan pabrik-pabrik gula adalah *Meiji Seitō Kaisya*, *Okinawa Seitō Kaisya*, dan lain-lain.

Adanya peraturan-peraturan pembatasan dan penguasaan alat-alat produksi oleh pemerintah merupakan ciri daripada ekonomi perang. Pola ekonomi perang yang direncanakan adalah, bahwa di setiap wilayah, lingkungan daerah harus melaksanakan autarki, artinya setiap daerah itu harus mencukupi kebutuhan sendiri serta harus pula dapat menunjang kebutuhan perang. Pulau Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki. Sumatra dibagi atas 3 lingkungan, dan 3 lingkungan bagi daerah *Minseifu* (yang diperintah Angkatan Laut). Tugas daripada autarki daerah ini adalah memenuhi kebutuhan sendiri untuk ketahanan daerahnya maupun untuk memproduksi bahan-bahan untuk kebutuhan perang. Kedua tugas ini dilaksanakan secara konsekwen oleh pemerintah pendudukan Jepang. Rakyat beserta kekayaan Indonesia dikorbankan untuk kepentingan perangnya.

Tuntutan kebutuhan bahan-bahan semakin meningkat ketika perang menginjak kepada tingkatan kritis pada tahun 1944. Pengerahan kebutuhan perang meningkat pula. Mulailah dilancarkan kampanye pengerahan barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Jawa *Hökōkai*, *Nōgyō Kumiai* (Koperasi Pertanian) dan instansi-instansi resmi pemerintah lainnya.

Keadaan kebutuhan pangan rakyat di Jawa yang sudah tidak mencukupi sejak tahun 1942, bertambah parah. Pemerintah Jepang menganjurkan untuk memperbesar produksi pangan dengan membuka areal baru.

Bekas perkebunan tembakau, kopi dan teh dipaksakan untuk ditanami bahan makanan. Di Sumatra Timur dibuka 10.000 hektar ladang padi baru, di daerah Karo juga dibuka persawahan baru yang menggunakan tenaga tawanan Serikat. Di Kalimantan penduduk diwajibkan menanam padi. Hal yang sama juga dilaksanakan di Sulawesi.

Akibat yang timbul daripada kebijaksanaan pemerintah itu ialah pengrusakan hutan. Di pulau Jawa saja tidak kurang dari 500.000 hektar hutan yang ditebang secara liar. Pernah diusahakan memberikan bimbingan bertani modern kepada para petani. Namun usaha ini tidak mendapat sambutan yang baik dari petani, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan menikmati hasil jerih-payahnya. Produksi pangan secara drastis terus merosot. Faktor lain yang mempengaruhi adalah pemotongan hewan untuk keperluan militer sehingga menurunkan angka kelahiran hewan pertanian.

Pengerahan bahan makanan ini dilakukan dengan cara penyeteroran padi atau panen lainnya kepada pemerintah. Dari jumlah hasil panen, rakyat hanya boleh memiliki 40% saja dari hasil jerihpayahnya. Yang 30% harus diserahkan kepada pemerintah melalui *kumiai* penggilingan padi, dibeli dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Sedang 30% lainnya disediakan untuk bibit dan disetorkan kepada lumbung desa.

Sebenarnya rakyat tidak mau menyeter padinya sehingga bagaimanapun kerasnya tindakan pemerintah Jepang, mereka tidak berhasil memecahkan masalah setoran padi ini. Gagalnya penyeteroran padi ini merupakan akibat perlawanan diam-diam dari rakyat desa. Tidak mengherankan jika timbul pasaran gelap serta kecurangan dalam pelaksanaan penyeteroran.

Rakyat yang dituntut untuk menaikkan produksi pangan dan setoran hasil panennya, masih pula dibebani pekerjaan tambahan yang bersifat wajib, seperti menanam jarak. Pekerjaan ini mengurangi waktu kerja bagi petani. Bahkan rakyat juga dipaksa menjadi *romusya*, dan melakukan kerja paksa pada obyek-obyek militer Jepang. Sudah barang tentu hal ini mengurangi jumlah tenaga untuk bertani, karena sebagian besar dari para *romusya* adalah petani. Kebijakan itu sesungguhnya berlawanan dengan gagasan peningkatan produksi. Tindakan pemerintah itu menimbulkan suatu lingkaran kesengsaraan bagi rakyat. Penebangan hutan secara liar menimbulkan bencana alam, seperti banjir yang kronis. Tenaga kerja yang semakin menipis di desa-desa, kekurangan makan akibat setoran-setoran dan mutu gizi yang rendah, menyebabkan gairah kerja dan stamina mereka mundur. Pelbagai penyakit timbul akibat kekurangan gizi dan angka kematian meningkat. Kelaparan melanda di pelbagai tempat. Di Wonosobo angka kematian mencapai 53,7% dan di Purworejo 24,7%. Penyeteroran-penyeteroran ini juga berlaku bagi nelayan. Tiap nelayan yang melakukan penangkapan ikan diharuskan menyeter kepada *kumiai* perikanan. Mereka mendapat bagian penghasilan atas dasar belas kasihan pengurus *kumiai*.

Masalah pokok lainnya yang menyangkut kehidupan rakyat adalah masalah sandang. Pada masa sebelum pecah perang, masalah sandang

sangat tergantung pada import dari Negeri Belanda. Kekurangan sandang ini telah dirasakan sejak awal pendudukan Jepang. Untuk memecahkan masalah ini dilakukan percobaan menanam kapas di pelbagai daerah. Di Jawa, daerah Kediri dan Besuki yang merupakan tempat yang baik. Di Sumatra kapas ditanam di daerah Palembang. Di Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan. Usaha pemintalan rakyat secara massal didirikan dan rakyat dilatih untuk memintal. Percobaan mencari ganti benang kapas diintensifkan. Masalah sandang merupakan masalah yang serius bagi pemerintah Jepang. Sebagian besar rakyat di desa-desa telah memakai pakaian dari karung goni atau babor. Bahkan sudah ada yang menggunakan lembaran karet sebagai penutup tubuhnya.

2. Pemerahan Tenaga Manusia

Pemerahan oleh Jepang tidak semata-mata dilakukan terhadap kekayaan alam Indonesia saja, melainkan juga terhadap tenaga rakyatnya. Dalam rangka usaha perangnya, Jepang juga memerlukan tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya untuk membangun sarana pertahanannya. Sarana-sarana itu berbentuk kubu-kubu pertahanan, termasuk gua-gua, gudang-gudang di bawah tanah, lapangan udara darurat dan sebagainya. Sudah barang tentu pembangunan ini memerlukan pekerja-pekerja kasar. Tenaga-tenaga didapat dari desa-desa pulau Jawa sebagai pulau yang paling padat penduduknya sehingga merupakan sumber tenaga kerja yang memungkinkan diadakannya pengerahan secara besar-besaran. Mula-mula tugas-tugas yang dilakukan bersifat sukarela dan tidak begitu jauh dari tempat tinggal penduduk. Pengerahan tenaga tersebut memang tidak begitu sukar dilakukan, mengingat masih tebalnya semangat gotong-royong di desa-desa ditambah lagi dengan dilancarkannya propaganda yang muluk-muluk. Bahkan di beberapa kota dibentuk barisan *romusya* sebagai sarana propaganda.

Tetapi pengerahan tenaga yang mula-mula bersifat sukarela itu berubah menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan menyediakan sejumlah tenaga *romusya* menurut jatah tertentu. Panitia pengerahan disebut *Romukyokai*, yang diadakan di setiap daerah. Tenaga *romusya* umumnya petani; karena itu pengerahan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap ekonomi desa.

Di tempat-tempat mereka bekerja, mereka diperlakukan secara kasar berbeda dengan propaganda dan upacara-upacara pada saat pemberangkatannya. Kesehatan mereka tidak dijamin, makanan tidak cukup, pekerjaan mereka sangat berat. Banyak diantara *romusya* yang meninggal di tempat kerjanya karena sakit, kekurangan makan serta kecelakaan ataupun kecelakaan. Berita buruk ini kemudian menjalar dari mulut ke mulut, sehingga menjadi rahasia umum bahwa kerja *romusya* merupakan kerja-paksa yang mengerikan. Sudah barang tentu rakyat takut untuk menjadi *romusya*.

Untuk menghilangkan ketakutan penduduk dan menutupi rahasia itu, sejak tahun 1943 Jepang melancarkan kampanye baru, yang mengatakan bahwa *romusya* adalah "prajurit ekonomi" atau "pahlawan pekerja". Penggunaan kata kuli bagi *romusya* dianggap menghina dan merendahkan derajat para "prajurit ekonomi" ini. Mereka digambarkan sebagai prajurit-prajurit yang menunaikan tugas sucinya untuk angkatan perang Jepang dan sumbangan mereka terhadap usaha perang itu mendapat pujian setinggi langit.

Tetapi kenyataan adalah sebaliknya. Beribu-ribu dari mereka dikirim ke luar Jawa dan bahkan ke luar Indonesia, seperti Birma, Muangthai, Vietnam, Malaya, Serawak dan tempat-tempat lain. Menurut taksiran sejumlah 300.000 tenaga *romusya* yang dikirim ke luar Jawa, dan diperkirakan sejumlah 70.000 orang dalam kondisi menyedihkan.

Pengerahan di desa-desa Indonesia menimbulkan perubahan sosial yang luas. Para *romusya* yang berhasil melarikan diri dari kesengsaraan yang mereka alami, maupun pemuda-pemuda yang pernah lari ke kota-kota sesudah Jepang menyerah, kembali ke desa masing-masing. Mereka telah mempunyai pengalaman-pengalaman baru. Karena peristiwa-peristiwa itu maka desa-desa menjadi terbuka dari isolasinya. Selain itu ada pula pemuda desa yang masuk organisasi-organisasi *Seinendan* dan *Keibodan*, serta menjadi heiho atau anggota Peta. Mereka memperoleh pengalaman dan keahlian baru.

Pada bulan Januari 1944, Jepang memperkenalkan sistem *tonarigumi* (rukun tetangga). *Tonarigumi* merupakan kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 10-20 rumahtangga. Beberapa *tonarigumi* dikelompokkan menjadi *ku* (desa atau bagian kota). Maksud diadakannya sistem tonarigumi ialah untuk mengawasi aktivitas penduduk, untuk pengendalian terhadap mereka dan memperlancar pelaksanaan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Karena perang semakin mendesak, maka tugas yang harus dilakukan oleh *tonarigumi* adalah mengadakan latihan tentang pencegahan bahaya udara, kebakaran, pemberantasan kabar bohong dan mata-mata musuh.

Dengan diperkenalkannya sistem baru ini wajah desa-desa Indonesia berubah. Pengaruhnya sangat besar terhadap struktur pedesaan pada umumnya. Kini desa menjadi lebih terbuka. Mereka yang pernah ke luar dari desanya mendapatkan status yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketika ia masih menjadi petani di desanya. Pengalaman seperti itu tidak pernah terjadi pada jaman Hindia Belanda.

C. PERSIAPAN UNTUK KEMERDEKAAN

1. *Perlawanan Terhadap Jepang*

Tentara Jepang datang ke Indonesia membawa semboyan yang simpatik yaitu: membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa-bangsa

Barat. Selanjutnya mereka menyatakan diri sebagai "cahaya, pelindung dan pemimpin Asia". Karena itu pada awal kedatangannya orang Jepang disambut sebagai pahlawan pembebas. Tetapi beberapa bulan saja sejak kedatangannya, sudah kentara bahwa segalanya itu semboyan kosong belaka. Mereka membuka kedoknya dan secara terang-terangan mulai menindas rakyat Indonesia. Tatakehidupan rakyat beserta pelbagai norma tidak dihormati bahkan diinjak-injak. Tindakan itu akhirnya menimbulkan perlawanan dari rakyat yang akhirnya berpuncak pada pemberontakan bersenjata.

Beberapa bulan sejak mulainya pendudukan Jepang, di Aceh timbul pemberontakan yang dipimpin oleh seorang ulama muda bernama Tengku Abdul Jalil. Ia seorang guru mengaji di Cot Pliëng. Jepang mencoba membujuk Tengku Abdul Jalil untuk berdamai saja. Namun ulama itu menolak tawaran berdamai Jepang, karena menyadari bahwa tawaran itu sekedar muslihat belaka.

Setelah pemerintah Jepang gagal membujuk Tengku Abdul Jalil, maka pada dinihari 10 November 1942 pasukan Jepang yang bermarkas di Lho' Seumawe menyerang Cot Pliëng. Pada waktu itu kebetulan rakyat sedang bersembahyang subuh di mesjid. Dengan bersenjatakan pedang, kelewang, rencong dan lain-lainnya, rakyat beramai-ramai menahan serangan Jepang. Pasukan Jepang berhasil dipukul mundur dan kembali ke Lho' Seumawe. Kemudian Jepang melakukan serangan untuk kedua kalinya. Serangan kedua ini pun berhasil digagalkan oleh rakyat. Barulah pada serangan yang ketiga kalinya Jepang berhasil setelah mereka membakar mesjid. Pemimpin pemberontak Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dari kepungan pasukan Jepang. Tetapi akhirnya ia tertembak ketika sedang bersembahyang. Dalam pemberontakan ini di pihak tentara Jepang jatuh korban beberapa puluh orang. Pemberontakan ditindas secara kejam, setiap laki-laki yang berada di sekitar tempat pemberontakan dibunuh.

Nampaknya pemerintah pendudukan Jepang berhasil menindas pemberontakan yang dipimpin oleh para ulama ini, namun di tempat lainpun terjadi pemberontakan yang serupa. Para ulama adalah pemimpin agama tradisional. Mereka dihormati dan terpandang karena pengetahuannya yang mendalam mengenai agama. Karena itu mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat pedesaan karena kepemimpinan mereka yang bersifat karismatis.

Pada masa pendudukan Jepang ada beberapa hal yang dipaksakan kepada mereka untuk dikerjakan. Misalnya di dalam upacara, mereka diharuskan melakukan *saikeirei*, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap dewa, dengan cara menghadap ke Tokyo dan membungkukan badan dalam-dalam. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena dirasakan sebagai musrik (menyekutukan Tuhan). Sudah barang tentu paksaan ini menyinggung perasaan umat Islam Indonesia.

Beberapa ulama besar menentang paksaan ini, antara lain K.H. Karim

Amrullah (ayah Dr. Hamka), dan K.H. Zainal Mustafa dari pesantren Sukamanah (Singaparna, Jawa Barat). K.H. Zainal Mustafa adalah seorang ulama yang tegas pendiriannya. Ia menolak semua ajaran yang berbau Jepang dan tidak mentaati peraturan yang dikeluarkan pemerintah pendudukan Jepang. Karena itu hubungan K.H. Zainal Mustafa dengan pemerintah pendudukan menjadi renggang dan tegang. K.H. Zainal Mustafa tidak tahan melihat kehidupan rakyat yang sudah melarat semakin menderita, karena dibebani pelbagai macam setoran dan kerjapaksa. Ia memerintahkan kepada rakyat Sukamanah untuk tidak menyeter padinya dan menolak kerjapaksa. Untuk menghindari kemungkinan yang bakal terjadi, ia mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk menggiatkan latihan kemahiran beladiri pencak-silat.

Melihat kejadian itu pihak Jepang mengambil tindakan, karena perilaku K.H. Zainal Mustafa dianggap membahayakan kewibawaan pemerintah Jepang. Mereka mengirim utusan untuk menangkap K.H. Zainal Mustafa. Setibanya di Sukamanah utusan Jepang itu dikeroyok oleh rakyat, namun sempat melarikan diri ke Tasikmalaya dalam keadaan luka-luka parah. Dengan terjadinya peristiwa itu, Jepang mengirim pasukan untuk menggempur Sukamanah dan menangkap K.H. Zainal Mustafa. Pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 1944, sehabis sembahyang Jum'at, meletuslah perlawanan bersenjata melawan pasukan Jepang. Dalam peristiwa ini banyak tokoh rakyat yang luka-luka bahkan di antara mereka ada yang gugur. Di antara rakyat ratusan korban yang jatuh. K.H. Zainal Mustafa berhasil ditangkap sekalipun telah melakukan perlawanan yang gigih. Ia ditahan di Tasikmalaya dan kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili. Selama ditahan ia mendapat siksaan yang berat dan kemudian dihukum mati dan dimakamkan di Ancol.

Pemberontakan rakyat melawan Jepang tidak terbatas di Sukamanah. Pada bulan April 1944 meletuslah pemberontakan di Indramayu, yang disusul pula oleh pemberontakan rakyat di Lohbener dan Sindang (masih di daerah Indramayu). Pemberontakan timbul lagi di Aceh, pada bulan Nopember 1944, yang dilakukan oleh prajurit-prajurit *Giyugun*. Teuku Hamid seorang perwira *Giyugun*, bersama 1 peleton anakbuahnya melarikan diri ke hutan, kemudian melakukan perlawanan. Untuk menumpas pemberontakan itu Jepang melakukan siasat licik: mereka mengancam akan membunuh keluarga anggota *Giyugun* yang berontak; karena ancaman itu Teuku Hamid terpaksa menyerah. Di daerah yang sama tidak lama kemudian pecah pemberontakan Pendreh di Kabupaten Berenaih, yang dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu oleh satu regu *Giyugun*. Pemberontakan ini ditindas secara kejam oleh Jepang. Hampir seluruh rakyat yang tertawan, dibunuh oleh Jepang.

Kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Jepang dalam menindas pemberontakan tidak mematikan semangat rakyat untuk mengadakan perlawanan. Pada tanggal 14 Februari 1945 pecahlah pemberontakan yang paling menggoncangkan Jepang, karena bukan dilakukan oleh rakyat yang

tidak terlatih, melainkan oleh tentara Peta. Pemberontakan Peta di Blitar itu merupakan pemberontakan yang terbesar pada zaman pendudukan Jepang. Sesudah diumumkan berdirinya tentara Peta pada bulan Oktober 1943, di Karesidenan Kediri dibentuk dua *daidan* (batalyon) Peta. Salah satu di antaranya ditempatkan di kota Blitar. *Daidan* Blitar ini dipimpin oleh *Daidancō* Surachmad. Kekuatan *daidan* terdiri atas 4 *cudan* (kompi) dan 12 *syōdan* (peleton) ditambah beberapa orang perwira staf di antaranya dr. Ismangil selaku dokter batalyon. Prajurit Peta *daidan* Blitar ini sebagian berasal dari daerah Blitar sendiri.

Tugas mereka di samping melakukan latihan-latihan adalah juga untuk mengawasi romusya yang dikerahkan untuk membuat kubu-kubu pertahanan di daerah pantai Blitar Selatan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa berat pekerjaan para romusya dan betapa sengsara hidupnya. Makanan yang diberikan tidak cukup sehingga badan mereka kurus-kurus lagi pula pakaiannya compang-camping, bahkan banyak yang sudah telanjang. Banyak di antara mereka meninggal karena kelaparan, kecapaian dan menderita sakit malaria. Hampir setiap hari mereka menyaksikan romusya mati. Melihat keadaan ini lambat-laun mereka tergugah sanubarinya, tidak tega melihat rakyat sendiri diperlakukan sedemikian buruk oleh Jepang. Pada kesempatan liburan mereka juga melihat keadaan sanak-saudaranya yang semakin parah penderitaannya.

Di bawah pimpinan *Syōdancō* Supriyadi, Muradi, Suparyono dan *bundancō* Sunanto, Sudarmo dan Halir, serta *cudancō* dr. Ismangil sebagai sesepuhnya mereka sepakat untuk melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Kemudian pemberontakan pecah dan diikuti oleh sebagian besar Peta *daidan* Blitar. Mereka meninggalkan kota Blitar, setelah membunuh orang-orang Jepang di Blitar. Sebagian menuju ke lereng Gunung Kelud, sebagian lagi ke daerah Blitar Selatan. Sayang sekali pemberontakan ini mengalami kegagalan karena keadaan memang belum matang. Kerjasama dengan *daidan-daidan* lain tidak ada, dan rakyat tidak siap mendukungnya. Pemberontakan berhasil dipadamkan dengan tipu-muslihat. Para komandan beserta seluruh anakbuahnya tertangkap atau kembali ke *daidan* setelah berunding. Sebagian di antaranya diajukan ke mahkamah militer di Jakarta, kemudian mereka dijatuhi hukuman sesuai dengan peranan masing-masing. Mereka yang mendapat hukuman mati adalah: dr. Ismangil, Muradi, Suparyono, Halir, Sunanto dan Sudarmo. Beberapa orang lagi dijatuhi hukuman seumur hidup dan yang paling ringan hukuman 1 tahun. Mereka dipenjarakan di penjara Cipinang Jakarta. Sedangkan Supriyadi pemimpin utama pemberontakan tidak disebut-sebut dalam sidang pengadilan dan juga tidak pernah diadili "in absentia" (tanpa hadirnya tertuduh). Pada umumnya orang menganggap bahwa ia tertangkap dan dibunuh secara diam-diam oleh Jepang.

Pemberontakan Peta Blitar, sekalipun gagal, namun pengaruhnya besar sekali terhadap semangat kemerdekaan rakyat Indonesia, yang ketika itu

meringkuk di bawah penindasan Jepang. Peristiwa ini kita peringati setiap tahun tanggal 14 Februari dan kita abadikan sebagai Hari Pemberontakan Peta Blitar.

2. *Persiapan Untuk Proklamasi*

Sampai akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat terdesak. Dalam bulan Juli 1944 Pulau Saipan yang strategis jatuh ke tangan Amerika Serikat. Hal ini merupakan ancaman langsung terhadap negeri Jepang. Di mana-mana tentara Jepang menderita kekalahan. Beberapa faktor yang tidak menguntungkan itu menyebabkan jatuhnya kabinet Tqjo.

Pada tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberikan janji "kemerdekaan di kelak kemudian hari" kepada rakyat Indonesia. Untuk menghibur rakyat Indonesia, kantor-kantor diperbolehkan mengibarkan bendera Merah Putih tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Sementara itu perjalanan perang telah mencapai tingkatan kritis, bayangan kekalahan Jepang telah tampak jelas.

E.P.V.K.I Pada tanggal 1 Maret 1945 Panglima Tentara Keenambelas Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan dibentuknya Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritsu Junbi Cosakai*) yang disingkat menjadi Badan Penyelidik. Badan ini bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang penting mengenai masalah tatapemerintahan Indonesia Merdeka. Anggotanya berjumlah 67 orang yang terdiri dari mereka yang dianggap tokoh dari seluruh Indonesia ditambah 7 orang anggota Jepang, tanpa hak suara. Pengangkatan para anggota diumumkan pada 1 April 1945. Sebagai ketua ditunjuk K.R.T. Rajiman Wediodiningrat, seorang nasionalis tua. Wakil ketuanya dua orang, masing-masing adalah R. Suroso dan seorang lagi orang Jepang.

Upacara peresmiannya dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945, yang dihadiri oleh seluruh anggota serta dua pembesar militer Jepang yaitu Panglima Tentara Wilayah Ketujuh Jenderal Itagaki (yang membawahi tentara Keenambelas yang menguasai Jawa), serta Panglima Tentara Keenambelas yang baru Letnan Jenderal Yaiciro Nagano. Sidang selanjutnya berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam persidangan pertama ini pembicaraan dipusatkan kepada usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.

Pada sidang 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan lima "Azas dan Dasar Negeri Kebangsaan Republik Indonesia" yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat.

Tiga hari kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mengucapkan pidato mengenai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang juga terdiri atas 5 azas yakni:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima azas itu "dengan petunjuk seorang ahli bahasa" oleh Ir. Sukarno dinamakan Pancasila. Sesudah persidangan pertama itu, *Dokuritsu Junbi Cosakai* menunda persidangan sampai bulan Juli. Pada tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggota yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakkir, Wachid Hasyim, H. Agus Salim dan Abikusno Tjokrosuyoso, membentuk panitia kecil. Panitia kecil ini menghasilkan dokumen yang berisi azas dan tujuan negara Indonesia Merdeka. Dokumen ini dikenal sebagai Piagam Jakarta, sesuai dengan penamaan Muh. Yamin. Perumusan dasar filsafat negara di dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 3 Juni 1945 para pemuda di Jakarta mengadakan rapat rahasia, untuk membentuk panitia khusus yang akan merealisasi lahirnya organisasi baru. Panitia ini diketuai oleh B.M. Diah dengan anggota Sukarni, Sudiro, Sjarif Thayeb, Harsono Tjokroaminoto, Chairul Saleh, Supeno dan Asmara Hadi. Pada pertemuan kedua pada tanggal 15 Juni 1945 berhasil dibentuk Gerakan Angkatan Baru Indonesia. Kegiatan organisasi baru itu digerakkan oleh para pemuda dari Asrama Menteng 31. Dalam perkembangan selanjutnya pemuda dari kelompok ini banyak mengemukakan pendapat yang mempengaruhi usaha pembentukan negara Indonesia. Gerakan Angkatan Baru itu kemudian diambil-alih oleh Jepang, yang susunan organisasinya disesuaikan dengan kepentingan Jepang. Beberapa pemuda seperti Chairul Saleh, Sukarni, B.M. Diah, Adam Malik, Asmara Hadi, Harsono Tjokroaminoto, Sudiro, S.K. Trimurti, Sutomo, Pandu Kartawiguna, oleh Jepang diikutsertakan dalam suatu organisasi yang dinamakan Gerakan Rakyat Baru. Bahkan organisasi *Jawa Hokokai* dan Masyumi dilebur ke dalamnya. Namun tak seorang pemudapun yang bersedia duduk di dalamnya.

R/K
g/y

Pada tanggal 7 Agustus 1945 *Dōkuritsu Junbi Cosakai* dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk *Dōkuritsu Junbi Inkkai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kemudian pada tanggal 9 Agustus, tiga orang tokoh Pergerakan Nasional, Ir. Sukarno, Drs. Moh Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat, berangkat ke Dalat (Vietnam Selatan) atas panggilan Marsekal Darat Terauci, Panglima Mandala seluruh Asia Tenggara. Marsekal Terauci menyampaikan kepada ketiga pemimpin itu mengenai keputusan Pemerintah Kemaharajaan Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pelaksanaannya dapat dilaksanakan segera setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

Anggota PPKI mula-mula berjumlah 21 orang yang terdiri dari wakil-wakil dari seluruh Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Sukarno sedangkan Drs. Moh Hatta menjadi wakil ketua. Tanpa seizin Jepang, PPKI menambah 6 orang anggota lagi. Dengan demikian PPKI diambil-alih oleh pemimpin-pemimpin Indonesia dari badan bentukan Jepang menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia sendiri.

Keesokan harinya tanggal 15 Agustus 1945 Sukarno-Hatta tiba kembali di tanah air. Ternyata sementara itu Jepang telah menyerah kepada Serikat. Berita tentang kekalahan Jepang ini diketahui oleh sebagian pemimpin Indonesia terutama pemimpin pemuda. Para pemuda menghendaki agar Sukarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lepas dari Jepang. Pihak Sukarno-Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia melanjutkan usaha yang sudah dimulai di bawah atau lepas dari proses yang sudah berjalan itu, tidaklah menjadi soal, karena Jepang toh sudah kalah. Yang penting adalah menghadapi Serikat yang akan mengembalikan kekuasaan Belanda. Sukarno-Hatta masih ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah ditentukan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pendapat itulah yang tidak disetujui oleh golongan pemuda, karena PPKI tetap dianggap badan buatan Jepang. Proklamasi Kemerdekaan harus dilaksanakan dengan kekuatan sendiri lepas samasekali dari segala apa yang berbau Jepang. Sutan Sjahrir, yang sesungguhnya masih termasuk generasi tua, juga mendesak Sukarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan lepas dari rencana Jepang.

Para pemuda kemudian menyelenggarakan rapat pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 di ruang Laboratorium Mikrobiologi di Pegangsaan Timur. Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh, mendesak agar Sukarno-Hatta memutuskan ikatannya dengan Jepang dan mengadakan permusyawaratan dengan mereka. Kemudian Darwis dan Wikana diutus menemui Sukarno-Hatta, untuk menyatakan kemauan golongan pemuda. Namun Sukarno-Hatta tidak menyetujui kemauan golongan muda, sehingga

timbul suasana tegang.

Golongan pemuda tetap mendesak agar diproklamasikan kemerdekaan dengan segera, yakni keesokan harinya pada 16 Agustus 1945, sedang golongan tua menekankan masih perlunya diadakannya rapat PPKI sebagai persiapan. Karena perbedaan pendapat ini golongan pemuda memutuskan akan memaksakan kehendaknya kepada Sukarno-Hatta. Tindakan yang dilakukan adalah menculik Sukarno-Hatta ke luar kota, sebagai keputusan tanggal 16 Agustus dini hari di asrama Baperpi, Kebun Binatang, Cikini.

Tugas itu dilaksanakan oleh Sukarni, Jusuf Kunto, dan *Syodanco Singgih*. Pada dini hari tanggal 16 Agustus itu juga Sukarno-Hatta dibawa ke Rengasdengklok, sebuah kota kawedanaan di pantai utara Kabupaten Karawang dan tempat kedudukan sebuah *cudan* (kOMPI) Tentara Peta. Pada sore harinya Ahmad Subardjo, seorang tokoh generasi tua menyusul ke Rengasdengklok untuk mengusahakan pengembalian Sukarno-Hatta. Setelah Ahmad Subardjo memberikan jaminan bahwa selambat-lambatnya keesokan harinya Sukarno-Hatta sudah akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, *cudanco* Subeno, komandan kOMPI tentara Peta di Rengasdengklok, bersedia melepaskan Sukarno-Hatta yang pada malam hari itu juga kembali ke Jakarta.

Pada malam itu juga para anggota PPKI berhasil dikumpulkan. Anggota-anggota PPKI maupun pemimpin-pemimpin pemuda berkumpul untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi. Untuk amannya pembicaraan-pembicaraan itu, mereka berkumpul di rumah *Laksamana Muda Maeda*, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ia bersedia menjamin keselamatan mereka selama berkumpul di rumahnya. Kesediaan Maeda itu diberikan atas dasar permintaan Ahmad Subardjo, yang bekerja pada stafnya. Pada malam itu juga dari rumah Maeda, Sukarno-Hatta menemui *Somubuco* (Kepala Pemerintahan Umum) Mayor Jenderal Nisyimura untuk menjajagi sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nisyimura menyatakan bahwa karena Jepang sudah menyerah kepada Serikat, mereka harus mempertahankan status quo, yang berarti, bahwa mereka tidak dapat mengidzinkan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian yakinlah Sukarno-Hatta, bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan lepas dari rencana Jepang. Untuk mengadakan persiapan-persiapan mereka kembali ke rumah Maeda.

Sementara itu di rumah Maeda telah berkumpul para pemuda dan sebagian anggota PPKI. Diputuskan untuk segera merumuskan teks Proklamasi. Mereka yang merumuskan teks Proklamasi ialah Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo. Perumusan itu disaksikan oleh Sajuti Melik, Sukarni, B.M. Diah dan Sudiro (mBah). Setelah selesai, konsep teks Proklamasi yang ditulis tangan oleh Ir. Sukarno dibacakan di hadapan pemimpin-pemimpin Indonesia yang menunggu di ruang depan. Mereka menyetujui isinya, tetapi memperdebatkan siapa yang akan menandatangani. Akhirnya pemuda Sukarni mengusulkan agar Sukarno-

Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Usul itu diterima baik oleh segenap hadirin. Kemudian konsep itu diketik oleh Sajuti Melik, dan ditandatangani oleh Sukarno-Hatta. Naskah inilah yang merupakan naskah Proklamasi yang otentik. Malam itu juga diputuskan bahwa Proklamasi akan dibacakan di tempat kediaman Ir. Sukarno, jalan Pegangsaan Timur 56, pada pukul 10.00 W.I.B.

B A B IV

PERANG KEMERDEKAAN

A. PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN AWAL REPUBLIK INDONESIA

1. Proklamasi dan Kehidupan Politik

Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Ir. Sukarno di Pegangsaan Timur (sekarang Jalan Proklamasi) No. 56 telah diadakan persiapan-persiapan untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pemuda-pemuda Indonesia, khususnya Barisan Pelopor telah bersiap memenuhi halaman. Lebih-kurang 1.000 orang hadir untuk ikut menyaksikan Proklamasi Kemerdekaan, suatu peristiwa yang maha penting bagi Indonesia. Pukul sepuluh kurang 5 menit Drs. Mohammad Hatta telah datang dan langsung masuk rumah untuk menemui Ir. Sukarno. Kedua pemimpin itu kemudian ke luar menuju ruang depan. Acara dimulai pukul 10.00. Sukarno tampil ke depan mikrofon, mengucapkan beberapa kalimat pengantar lalu membaca dengan khidmat naskah Proklamasi yang diketik, yang telah ditandatangani bersama dengan Hatta.

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoekaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

*Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta*

Setelah pembacaan naskah selesai, acara diteruskan dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih yang dilakukan oleh pemuda Suhud dan ex-cudancó Latief Hendraningrat, dengan disaksikan oleh segenap hadirin. Upacara diakhiri dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam suasana yang sangat sederhana itu, telah sampailah bangsa Indonesia ke ambang pintu kemerdekaannya. Dan satu persatu hadirin meninggalkan tempat itu dengan tenang, tetapi dengan tekad yang bulat untuk mempertahankan kemerdekaan itu.

Sehari sesudah Proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan adalah:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar yang telah dipersiapkan oleh *Dokuritsu Junbi Cōsakai* (yang sekarang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945).
2. Memilih Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum tersusun.

Pada hari berikutnya, 19 Agustus 1945, Presiden memanggil anggota PPKI dan pemuda untuk:

1. membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
2. merancang pembentukan 12 departemen dan menunjuk para menteri.
3. menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia, atas 8 provinsi, yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil (Nusatenggara), Kalimantan, Sulawesi, Maluku serta Irian, dan sekaligus menunjuk gubernur-gubernur.

Pada tanggal 23 Agustus Presiden mengumumkan dibentuknya 3 badan baru yaitu: Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Komite Nasional Indonesia (KNI) adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum diselenggarakan pemilihan umum. KNI disusun dari tingkat pusat sampai ke daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kawedanaan disebut Komite Nasional Daerah. PNI yang dirancang sebagai partai negara yang tunggal tidak jadi dibentuk. Badan Keamanan Rakyat (BKR), berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada masing-masing daerah. BKR dibentuk karena Pemerintah sengaja tidak mau segera membentuk tentara nasional berdasarkan pertimbangan politik. Pimpinan Nasional (Pemerintah) berpendapat bahwa pembentukan tentara nasional pada saat itu akan mengundang pukulan gabungan Tentara Serikat dan Jepang. Diperkirakan bahwa kekuatan nasional belum mampu menghadapi pukulan tersebut. Kebijakan Pemerintah ini tidak memuaskan golongan pemuda. Mereka mengharapkan dibentuknya tentara nasional sebagai tulang-punggung pertahanan-keamanan negara yang baru. Karena itu sebagian golongan pemuda membentuk badan-badan perjuangan atau lasykar-lasykar bersenjata. Kemudian terbentuklah badan-badan perjuangan seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dan lain-lain, hampir di seluruh pelosok tanahair. Para bekas anggota Peta dan heiho pada umumnya memasuki BKR di daerah masing-masing dan bertekad untuk menjadikan badan ini sebagai alat perjuangan bersenjata untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Mereka menganggap dirinya *pejuang*, seperti juga

warganegara yang mempunyai rasa tanggungjawab. Sekolah-sekolah dibuka bagi seluruh warganegara. Metode pengajaran ditekankan kepada sistem sekolah kerja, otonomitas dan kreativitas serta memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar lingkungannya.

Pendidikan luar sekolah digiatkan dalam bentuk pendidikan masyarakat melalui kursus-kursus kejuruan atau ketrampilan yang dibimbing oleh Pemerintah. Peraturan tentang kewajiban belajar diadakan, dan anak-anak diwajibkan masuk sekolah. Pendidikan kejuruan seperti pertanian, industri dan pelayaran mendapat perhatian yang khusus. Juga berolahraga merupakan keharusan. Pendidikan dibagi atas 3 tingkatan yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini disebabkan oleh kuatnya semangat nasional yang melampaui batas kedaerahan dan kesukuan. Adanya larangan penggunaan bahasa Belanda di jaman Jepang telah memberikan peluang bagi perkembangan bahasa Indonesia, di bidang administrasi, pendidikan, komunikasi-massa dan penterjemahan buku-buku pelajaran. Perkembangan yang pesat di bidang sastra, kodifikasi bahasa, peristilahan dan kata-kata baru membuktikan hal tersebut.

Pada awal Kemerdekaan, bahasa Indonesia telah melaksanakan fungsi sebagai bahasa nasional. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berjalan serentak dengan perkembangan sastra Indonesia. Tampililah sastrawan-sastrawan baru yang dipelopori oleh Chairil Anwar dan Idrus, yang kemudian terkenal dengan nama Angkatan 45.

Di samping sastra juga senilukis, sendrama dan film serta seni musik mengalami perkembangan pesat. Sudjoyono, Agus Djayasuminta, Trisno Sumardjo, Sunindyo, Affandi, Rusli, Sundoro, Zaini, Nasyah, Syahri, Nahar, Solihin, Kusnadi dan lain-lain, tampil ke muka di samping Basuki Abdullah. Lagu-lagu ciptaan baru muncul dengan tema nasional yang dapat memberikan semangat dan menghilangkan rasa rendah diri. Ismail Marzuki, Cornel Simanjuntak, Amir Pasaribu, Kusbini, dan lain-lain adalah komponis-komponis muda yang berbakat.

Sendrama dan film yang pada umumnya menjadi cermin masyarakat yang tidak membohong, dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti dr. Huyung, Usmar Ismail, Djamaluddin Malik, Suryosumanto, D. Djayakusuma, dan lain-lain. Demikian pula media komunikasi-massa, khususnya pers, berkembang dengan pesatnya. Surat kabar-surat kabar yang terbit di daerah-daerah yang diduduki Belanda pada umumnya menunjukkan sikap anti Belanda. Sampai akhir 1948, di Indonesia terdapat 124 surat kabar, sedangkan Radio Republik Indonesia merupakan sarana komunikasi untuk memberitakan perjuangan rakyat ke dalam dan luar negeri.

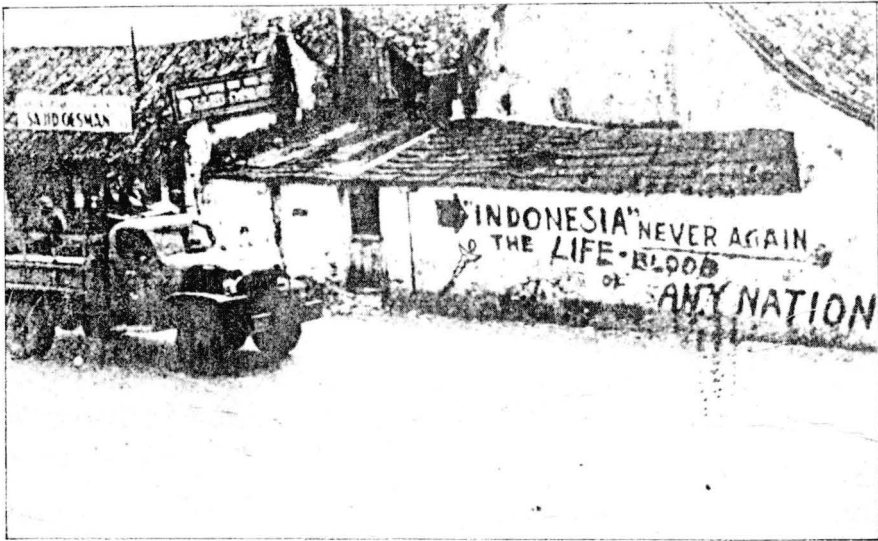
B. MENGHADAPI AGRESI BELANDA DAN PEMBERONTAKAN PKI

1. *Diplomasi dan Konfrontasi*

Oleh Serikat pasukan pendudukan Jepang di Indonesia, diharuskan mempertahankan keadaan seperti adanya (*status quo*) pada saat penyerahannya kepada Serikat. Sebagai pihak yang kalah perang, pasukan-pasukan Jepang dengan cermat melaksanakan perintah tersebut. Pada saat yang hampir sama bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan sekaligus telah siap untuk mempertahankannya. Serentak dengan itu pula, rakyat langsung bertindak untuk melaksanakan pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang dan menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia yang baru berdiri itu. Kantor-kantor pemerintah, obyek-obyek vital, seperti kantor telekomunikasi, pelabuhan, lapangan udara, hotel-hotel dan lain sebagainya serta-merta diambil-alih oleh rakyat Indonesia. Jalannya pengambil-alihan kekuasaan tidak selalu lancar. Sebagian pihak Jepang mencoba mempertahankannya demi *status quo*, tetapi sebagian lagi menyerahkannya tanpa melawan demi keselamatan jiwanya.

Di samping pengambil-alihan kekuasaan, rakyat berusaha untuk memperoleh senjata-senjata Jepang. Karena umumnya pihak Jepang enggar menyerahkan senjatanya kepada pihak Indonesia, terjadilah pertempuran-pertempuran dahsyat melawan pasukan-pasukan Jepang yang masih utuh kekuatannya. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Medan, Palembang, Ujungpandang, dan tempat-tempat lain di seluruh Indonesia yang ada pasukan Jepang, berjatuh korban-korban. Namun pengorbanan mereka tidaklah sia-sia, karena akhirnya berhasil kita tegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Proses perebutan kekuasaan ini berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Oktober 1945.

Sementara itu pasukan-pasukan Serikat mulai mendarat di Tanjung Priok Jakarta pada tanggal 15 September 1945. Puncak daripada perjuangan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Jakarta yang dipelopori oleh pemuda-pemuda yang bermarkas di Menteng Raya 31 dan para mahasiswa yang berasrama di Parapatan 10, adalah Rapat Raksasa tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) di sudut tenggara Medan Merdeka yang sekarang. Jepang berusaha menggagalkan rapat itu dengan pasukan-pasukan bersenjata lengkap didukung oleh mobil berlapis-baja, tetapi mereka tidak mampu menghadapi desakan rakyat yang membanjir membenamkan mereka. Dalam rapat itu berpidato Presiden Sukarno yang didampingi oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Presiden mengharap rakyat tetap tenang dan pulang ke tempat masing-masing. Sekalipun semangatnya sedang bergelora rakyat patuh terhadap Pimpinan Nasional mereka dan membubarkan diri dengan tertib.



Salah satu semboyan perjuangan kemerdekaan memenuhi tembok-tembok di berbagai kota

Pada waktu yang bersamaan di Surabaya terjadi suatu peristiwa yang dikenal sebagai Insiden Bendera. Insiden disebabkan oleh perbuatan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato, Tunjungan (sekarang Hotel LMS) karena mereka merasa dirinya sebagai penguasa di Indonesia. Padahal Pemerintah RI daerah Surabaya telah melarang pengibaran bendera lain, kecuali Merah-Putih. Rakyat berbondong-bondong menyerbu Hotel Yamato dan warna biru bendera Belanda itu berhasil dirobek, dan dikibarkan kembali sebagai Merah Putih. Di Semarang pecah pertempuran antara pemuda-pemuda Indonesia melawan tentara Jepang. Pertempuran berlangsung selama lima hari yang berlangsung antara tanggal 14—19 Oktober 1945, yang kemudian terkenal dengan sebutan Pertempuran Lima Hari di Semarang.

Perbenturan bersenjata yang terjadi di seluruh Indonesia, menyadarkan Pemerintah bahwa adanya sesuatu tentara nasional mutlak perlu. Karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Adapun yang ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi adalah Supriyadi, salah seorang pemimpin pemberontakan Peta di Blitar terhadap Jepang. Sedang yang ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum adalah Oerip Soemohardjo, seorang pensiunan mayor KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger, Tentara Hindia Belanda Kerajaan), yang beberapa saat sesudah Proklamasi menyatakan dirinya mendukung RI. Oerip Soemohardjo segera mengambil langkah-langkah untuk menyusun organisasi TKR. Sementara itu di mana-mana maklumat Pemerintah itu disambut oleh pemimpin BKR-BKR dengan membentuk

TKR di daerahnya masing-masing. Kesatuan-kesatuan BKR ditransformasi menjadi TKR.

Pada waktu TKR baru saja disusun, pihak Serikat telah mendaratkan pasukan-pasukannya di beberapa kota besar di Indonesia. Pemerintah dan rakyat Indonesia menerima baik kedatangan pasukan-pasukan Serikat dengan catatan bahwa mereka tidak akan mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda. Namun ketika diketahui bahwa mereka membiarkan dirinya diboncengi oleh Belanda yang bermaksud untuk mengembalikan pemerintah kolonialnya, rakyat Indonesia terpaksa mengadakan perlawanan. Apalagi ketika mereka mempersenjatai serdadu-serdadu Belanda yang dibebaskan dari tawanan Jepang. Timbullah pertempuran di pelbagai tempat antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris yang mewakili Serikat. Di Surabaya satu brigade pasukan Inggris nyaris hancur oleh kekuatan rakyat dalam pertempuran pada tanggal 28—29 bulan Oktober 1945, sehingga pimpinan militer Inggris meminta campur-tangan Presiden Sukarno untuk menghentikannya. Karena usaha Presiden Sukarno yang didampingi oleh Wakil Presiden Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, untuk sementara waktu pertempuran terhenti. Hari berikutnya pertempuran pecah kembali di depan gedung Internatio di Jembatan Merah. Pada pertempuran itu Brigadir Jenderal Mallaby, komandan brigade Inggris, tertembak mati. Karena peristiwa itu pihak Inggris mengeluarkan ultimatum yang sangat menyinggung perasaan dan harga diri bangsa Indonesia. Ultimatum itu menyatakan bahwa pemuda-pemuda dan pemimpin-pemimpin Indonesia diharuskan menyerahkan senjatanya dengan membawa bendera putih dan mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah pada tempat-tempat yang ditentukan, sampai batas waktu pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. Ultimatum ditolak oleh seluruh rakyat Surabaya di bawah Gubernur Suryo. Sampai pada batas waktu yang ditentukan, tidak seorangpun bangsa Indonesia yang sudi menyerah. Mulailah pihak Inggris yang sementara itu telah selesai mendaratkan satu divisi penuh, menggempur kota Surabaya dengan seluruh kekuatannya dari darat, laut dan udara. Namun pemuda Surabaya tetap mempertahankan kotanya. Dengan menyusun organisasi tempur yang rapih dan dengan tekad yang bergelora, di bawah pimpinan Sungkono, Sutomo (Bung Tomo) dan lain-lainnya, pemuda-pemuda Surabaya berhasil mempertahankan kota itu hampir sebulan lamanya.

Pertempuran hebat yang terjadi di Surabaya yang dimulai pada tanggal 10 November itu, sekarang kita abadikan sebagai Hari Pahlawan, untuk memperlambangkan kepahlawanan bangsa Indonesia dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan. Peristiwa ini kita peringati sebagai hari bersejarah nasional pada setiap tanggal 10 November. Pada rongga di kaki Monumen Pahlawan Nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, berbaring kerangka jenazah pahlawan tak dikenal yang gugur pada hari itu dalam Pertempuran Surabaya.

Demikian pula pasukan Inggris yang datang di Magelang, ingin memaksakan kehendaknya kepada rakyat Indonesia. Dimulai dari insiden kemudian pecalah pertempuran dalam kota. Pasukan Inggris kemudian berhasil dipukul mundur ke Ambarawa. Di kota ini kemudian terjadi pertempuran-pertempuran sengit. Di bawah pimpinan Panglima Divisi V Banyumas Kolonel Soedirman pada tanggal 15 Desember 1945 TKR dan pasukan-pasukan lainnya berhasil merebut Ambarawa dan menghalau Inggris ke Semarang. Kemenangan di Ambarawa ini dicapai dengan taktik infanteri. Oleh karena itu peristiwa ini oleh TNI-AD diperingati saban tahun sebagai hari infanteri.

Kedatangan pasukan Inggris di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945, juga dalam rangka hendak memaksakan kehendaknya. Pemuda-pemuda diharuskan menyerahkan senjatanya dan membagi kota Bandung menjadi dua bagian. Pihak Inggris menduduki bagian utara kota, dan pihak Republik di bagian selatan dengan batas jalan kereta-api yang memanjang dari barat ke timur. Pemuda-pemuda menolak menyerahkan senjatanya, sehingga akhirnya terjadilah pertempuran yang sengit di dalam kota. Juga di kota-kota Medan, Palembang, dan lain-lainnya, Inggris mendapat perlawanan dari para pemuda.

Setelah mengalami perlawanan-perlawanan yang hebat di mana-mana, Panglima Inggris berkesimpulan bahwa sengketa Indonesia — Belanda tidak mungkin diselesaikan dengan kekuatan senjata, tetapi harus diselesaikan dengan cara diplomasi. Hal itu dilaporkan kepada pemerintah Inggris yang kemudian mengambil langkah-langkah untuk mempertemukan kedua pihak. Usaha merintis perundingan dilakukan sendiri oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) dengan jalan pada bulan Oktober 1945 mempertemukan Presiden Republik Indonesia dengan "Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda" Dr.H.J. van Mook. Usaha Christison ini gagal karena masing-masing pihak berpegang pada pendirian yang bertolak-belakang. Baru sesudah kabinet Sjahrir dibentuk pada bulan November 1945, perundingan dirintis kembali. Pemerintah Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr (kemudian bernama Lord Inverchapel) sebagai duta istimewa ke Indonesia. Perundingan Indonesia — Belanda dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam perundingan ini van Mook mengulangi pendirian pemerintah Belanda, akan menjadikan Indonesia sebagai negara commonwealth (persemakmuran) melalui masa peralihan 10 tahun. Pihak Indonesia berpegang kepada pendirian, harus diakuinya RI sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Sebagai syarat untuk berunding pihak RI memberikan konsesi bahwa pemerintah RI akan membayar semua hutang-hutang pemerintah Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942. Belanda menolak konsesi-konsesi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, yang oleh sebagian besar rakyat Indonesia sendiri sesungguhnya juga tidak disetujui. Tetapi perundingan diteruskan juga di Negeri Belanda di kota

Hooge Veluwe, pada bulan April 1946. Dalam perundingan ini Belanda menolak usul yang diajukan Clark Kerr tentang pengakuan kepada kedaulatan Republik Indonesia secara *de facto* di Jawa dan Sumatra. Mereka hanya bersedia memberikan pengakuan *de facto* kepada RI atas pulau Jawa saja. Sebaliknya usul Belanda agar Indonesia tetap berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda ditolak oleh RI.

Pihak Inggris kembali menawarkan jasa-baiknya. Karena Belanda sangat bergantung kepada Inggris, maka saran-saran Inggris terpaksa diterimanya. Kini Belanda menawarkan pengakuan *de facto* atas Jawa dan Sumatra, dengan syarat RI harus tetap berada dalam lingkungan persemakmuran. Usul Belanda ini pun ditolak oleh RI karena dianggap tidak mengandung sesuatu yang baru. Untuk memulai perundingan baru harus terlebih dahulu diciptakan suasana damai, melalui gencatan senjata. Komisi gencatan senjata dibentuk oleh kedua belah pihak. Pihak RI, dipimpin oleh dr. Sudarsono, Jenderal Soedirman, Jenderal Oerip Soemohardjo. Kemudian Inggris mengirimkan Lord Killearn sebagai penengah setelah komisi gencatan senjata terbentuk. Indonesia dan Belanda kembali ke meja perundingan di Jakarta, yang dimulai pada tanggal 7 Oktober 1946. Pihak Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Setelah pertemuan pendahuluan, perundingan diteruskan di Linggajati, sebelah selatan Cirebon. Perundingan berhasil dan diparaf pada tanggal 10 November 1946, untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari parlemen masing-masing. Isi persetujuan Linggajati antara lain adalah:

- (1). pemerintah RI dan Belanda bersama-sama membentuk Negara federasi yang bernama Indonesia Serikat.
- (2). Negara Indonesia Serikat tetap mengikat diri dalam kerjasama dengan Kerajaan Belanda dengan berwadahkan Uni Indonesia—Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda.

Setelah naskah berhasil diparaf, timbul pelbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia, ada yang pro dan ada yang kontra. Golongan yang pro adalah partai-partai pendukung pemerintah, yakni golongan sosialis yang tergabung dalam Sayap Kiri, dan yang kontra adalah golongan nasionalis, Islam dan sekuler, yang bergabung dalam Benteng Republik Indonesia. Dengan menambah jumlah suara dalam KNIP, pemerintah berhasil mendapat dukungan dari KNIP dan pada tanggal 25 Maret 1947 persetujuan Linggajati berhasil ditandatangani oleh keduabelah pihak.

2. Mempertahankan Diri Terhadap Agresi

Pada awal kemerdekaan, kebijaksanaan Pimpinan Nasional dalam melaksanakan perjuangan ditekankan kepada diplomasi, yaitu usaha untuk memperoleh pengakuan Dunia Internasional. Kebijakan ini dilakukan

berdasarkan kondisi politis internasional yang belum jelas. Karena itu pemerintah belum mau membentuk tentara nasional sebagai tulang-punggung kekuatan negara. Yang dibentuk hanya Badan Keamanan Rakyat (BKR) suatu organisasi yang bersifat lokal, yang bertugas memelihara keamanan setempat.

Satu bulan setelah proklamasi jelas bahwa Republik Indonesia yang sangat muda itu harus mempertahankan kelangsungan-hidupnya itu sendiri terhadap ancaman dari kekuatan-kekuatan asing bersenjata yang telah hadir di bumi tanahair. Maka yakinlah Pemerintah bahwa suatu tentara nasional bukanlah sesuatu hal yang berlebihan. Maka pada tanggal 5 Oktober dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Supriyadi, pemimpin pemberontakan PETA Blitar ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi TKR. Tetapi sampai satu bulan ia tidak tampil ke muka, sehingga jabatan Pemimpin Tertinggi TKR lowong. Atas inisiatif Kepala Staf Umum TKR, Oerip Soemohardjo, pada bulan November 1945 diselenggarakan Konferensi TKR yang dihadiri oleh wakil-wakil TKR seluruh Jawa dan Sumatra. Acara pokok konferensi adalah memilih Pemimpin Tertinggi TKR untuk menggantikan Supriyadi. Akhirnya terpilih Kolonel Soedirman, Panglima Divisi V/Banyumas, yang pada waktu itu sedang memimpin pertempuran merebut kota Ambarawa. Sedang Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo kembali terpilih sebagai Kepala Staf Umum TKR. Pemimpin Tertinggi TKR yang terpilih itu dilantik oleh Presiden pada tanggal 18 Desember 1945, tiga hari sesudah Ambarawa jatuh. Kolonel Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Letnan Jenderal sedangkan Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo tetap menjadi Kepala Staf Umum.

Sesudah diangkatnya Soedirman menjadi Panglima Besar, dalam bulan Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat dua kali diubah, pertama kali menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dan kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). TRI kemudian berkembang mempunyai Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Organisasi TRI terus disempurnakan, mengingat jumlah divisi di daerah-daerah yang dibentuk secara spontan, tanpa satu rancangan dan bimbingan serta perlengkapan dari Pemerintah. Hal ini dapat dimengerti karena TRI tumbuh dari bawah dari lingkungan rakyat pejuang bersenjata. Karena itu anggota-anggota Tentara tetap merasa dirinya pejuang meskipun kini mereka sudah berstatus militer. Inilah yang menjadi dasar bagi Dwifungsi ABRI.

Usaha penyempurnaan organisasi TRI dimulai pada tanggal 26 Februari 1946, melalui sebuah Panitia. Hasil yang dicapai antara lain adalah pengurangan jumlah divisi, yang semula 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatra menjadi 7 divisi di Jawa dan 4 divisi untuk Sumatra. Untuk mengorganisasi badan-badan perjuangan, dibentuk Biro Perjuangan. Pada tanggal 5 Mei 1947 Pemerintah memutuskan untuk mempersatukan TRI dengan lasykar-lasykar dalam satu wadah. Setelah melalui suatu proses,

maka pada tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan demikian TNI menjadi satu-satunya wadah bagi pejuang bersenjata. TNI mempunyai pimpinan kolektif yang terdiri dari ex-pimpinan TRI di satu pihak dan ex-pimpinan badan-badan perjuangan di lain pihak; kesemuanya di bawah Jenderal Soedirman.

Kepolisian Negara mulai diresmikan existensinya sejak diangkatnya R. Sukanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara, pada tanggal 29 September 1945. Di kalangan kepolisian yang menjadi pelopor adalah angkatan muda polisi yang sebagian besar adalah anggota Polisi dan Polisi Istimewa di bawah Jepang (Keisatsutai dan Tokubetsu Keisatsutai). Berlainan dengan kesatuan-kesatuan Peta dan heiho mereka tidak dilucuti oleh Jepang. Rupa-rupanya Jepang menganut konsepsi Barat bahwa polisi tidak ikut dalam perang, melainkan bertugas tetap melaksanakan fungsi memelihara keamanan meskipun daerahnya dikuasai oleh musuh. Karena itu mereka tetap mengizinkan anggota Kepolisian bangsa Indonesia memegang senjatanya. Ternyata pemuda polisi itu mempergunakan senjatanya untuk perjuangan. Mereka merasa dirinya menjadi pejuang kemerdekaan. Karena itulah anggota polisi RI, karena latarbelakang sejarahnya, juga menganggap dirinya sebagai pejuang.

Dalam bulan November 1946 diselenggarakan perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda di Linggajati (atau Linggarjati), sebuah tempat peristirahatan di sebelah selatan Cirebon. Persetujuan Linggajati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 itu berisi antara lain :

1. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara yang berbentuk federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS)
2. Pemerintah RIS dan Pemerintah Belanda akan bekerjasama dalam sebuah perserikatan negara yang bernama Uni Indonesia — Belanda.

Sesudah Persetujuan Linggajati ditandatangani, hubungan RI-Belanda semakin memburuk. Oleh pihak kolonialis Belanda, Persetujuan Linggajati memang hanya dianggap sebagai alat untuk memungkinkan mereka mendatangkan pasukan-pasukan yang lebih banyak dari negerinya. Setelah mereka merasa cukup kuat, mereka beralih kepada maksud semula, yakni menghancurkan Republik dengan kekuatan senjata. Untuk memperoleh dalih guna menyerang RI, mereka mengajukan tuntutan yang bukan-bukan, seperti:

- (1) Supaya dibentuk pemerintah federal sementara yang akan berkuasa di seluruh Indonesia sampai pembentukan RIS yang berarti RI ditiadakan.
- (2) pembentukan gendarmerie (pasukan keamanan) bersama yang juga akan masuk ke daerah Republik.

Dengan sendirinya Republik tidak mungkin menerima usul-usul itu karena akan berarti likwidasi bagi dirinya. Dengan penolakan RI itu

Belanda lalu merobek-robek Persetujuan Linggajati dan pada tanggal 21 Juli 1947 melancarkan Aksi Militer I ke dalam wilayah kekuasaan RI.

Agresi militer Belanda menimbulkan reaksi hebat dari Dunia Internasional. Pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan agar masalah Republik Indonesia segera dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kepada kedua belah pihak mulai tanggal 4 Agustus 1947. Untuk sementara waktu pengawasan gencatan senjata dilakukan oleh apa yang disebut Komisi Konsuler, yang anggota-anggotanya terdiri dari para konsul jenderal asing yang berada di Indonesia. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa sesudah tanggal 4 Agustus Belanda masih terus melakukan gerakan militernya. Pihak Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh Belanda berdasarkan gerakan pasukannya sesudah perintah gencatan senjata 4 Agustus 1947.



Pejuang-pejuang Indonesia yang dituduh teroris oleh Belanda sedang diperiksa

Kemudian Dewan Keamanan membentuk sebuah Komisi Jasa-jasa Baik yang bertugas mengawasi gencatan senjata. Tiga negara yang terpilih sebagai anggota Komisi Jasa-Jasa Baik adalah Amerika Serikat, Australia dan Belgia; Australia dipilih oleh Indonesia, Belgia dipilih oleh Belanda dan dua negara bersama-sama memilih Amerika Serikat. Oleh karena itu komisi PBB terkenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN). Di bidang militer KTN dapat mengambil inisiatif, tetapi di bidang politik KTN hanya memberikan saran dan usul, karena tidak berhak untuk memutuskan persoalan

politik. Dengan perantaraan KTN, kedua pemerintah (RI-Belanda) sepakat untuk kembali ke meja perundingan.

Perundingan diadakan di tempat yang netral yaitu di atas geladak kapal-angkut pasukan Amerika Serikat USS *Renville* dan dibuka resmi pada tanggal 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedang delegasi Belanda di bawah pimpinan Abdulkadir Widjoyoatmodjo. Jalannya perundingan ternyata tidak selancar yang diharapkan. Untuk sementara waktu perundingan mengalami jalan buntu karena masalah militer. Untuk mengatasi kemacetan ini, masing-masing pemerintah secara tersendiri berunding dengan KTN. Sebagai hasil perundingan ini KTN menyimpulkan bahwa perundingan Linggajati bisa dijadikan dasar perundingan bilateral, namun masalah garis demarkasi antara daerah kekuasaan masing-masing pihak, masih tetap menjadi penghalang. Pihak Belanda tetap berkeras pada tuntutanannya mengenai apa yang dinamakan "Garis van Mook," yaitu garis yang menghubungkan pucuk-pucuk terdepan pasukan Belanda yang masih bergerak sesudah perintah gencatan senjata 4 Agustus Dewan Keamanan PBB. Pihak Republik menolak, pertama karena Belanda hanya menguasai kota-kota dan jalan-jalan besar, sedang TNI menguasai sepenuhnya daerah pedalaman. Kedua kalinya, Republik berpendapat bahwa tidak sepatutnya daerah hasil agresi Belanda itu diakui.

Karena desakan KTN, Pemerintah RI akhirnya menyetujui isi Perseutujuan *Renville* yang pada hakekatnya menguntungkan pihak Belanda. Karena RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat dengan masa peralihan, daerah RI yang diduduki Belanda melalui agresinya diakui oleh RI, sampai diselenggarakannya plebisit untuk menentukan apakah rakyat di sana berhasrat bergabung pada RI atau tidak. Tambahan pula Pemerintah RI juga bersedia menarik semua pasukan TNI yang berada di daerah pendudukan Belanda atau kantong-kantong gerilya masuk ke daerah RI. Pelaksanaan penarikan pasukan dari kantong-kantong gerilya ini terkenal dengan nama *hijrah*. Perseutujuan *Renville* ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Dengan berat hati, pasukan-pasukan TNI dalam kantong-kantong gerilya ber-hijrah ke daerah Republik. Bagaimanapun juga mereka adalah prajurit yang berdisiplin dan taat kepada keputusan Pemerintahnya.

Sementara itu, pihak Belanda berusaha memecah-belah Bangsa Indonesia dengan membentuk negara-negara boneka di daerah yang didudukinya, seperti "Negara Indonesia Timur", "Negara Sumatra Timur", "Negara Pasundan", "Negara Jawa Timur", "Negara Madura", dan sebagainya. Tokoh-tokoh dari "negara-negara" itu kemudian dihimpun di dalam *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) atau "pertemuan untuk musyawarah federal". Semuanya itu bertujuan untuk mengepung dan melemahkan Republik Indonesia supaya kemudian mudah menghancurkannya. Namun ternyata usaha-usaha Belanda itu tidak mengenai sasaran, karena ternyata persatuan nasional di kalangan Bangsa Indonesia terlalu kuat.

(istilah bahasa Jerman yang berarti "lingkaran pertahanan"). Sistem *Wehrkreise* artinya membagi-bagi daerah dalam lingkaran-lingkaran pertahanan yang dapat berdiri sendiri. Di dalam daerah *Wehrkreise* ini semua tenaga manusia dan sumber materiil yang ada dimobilisasi dan dibina secara terintegrasi. Satu daerah *Wehrkreise* mempunyai kekuatan satu brigade pasukan mobil maupun unsur-unsur teritorial. Konsepsi strategis *Wehrkreise* ini dilengkapi dengan taktik perang gerilya. Selain itu pasukan-pasukan yang dulunya ber-hijrah ke daerah RI, harus melakukan *wingate* ke daerah pendudukan. Yang dinamakan *wingate* ialah melakukan infiltrasi ke daerah atau tempat asal pasukan itu yang telah menjadi daerah pendudukan musuh. (Istilah ini berasal dari nama seorang jenderal Inggris, yakni Orde Wingate, yang dalam Perang Dunia II di front Birma melancarkan operasi-operasi ke belakang garis-garis Jepang). Di daerah asalnya pasukan-pasukan itu kembali membentuk kantong-kantong gerilya atau *Wehrkreise*.

Di bidang organisasi, telah dibentuk Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution dan Markas Besar Komando Sumatra (MBKS) dipimpin oleh Kolonel Hidayat. Persiapan-persiapan untuk menyelenggarakan pemerintahan militer telah dilakukan pula. Dalam pemerintahan militer itu kacamatanlah yang menjadi basis utama pertahanan dengan sandaran kekuatan pada tenaga rakyat di desa-desa. Pasukan-pasukan TNI dan pejabat pemerintahan telah mempunyai tugas-tugas tertentu. Tempat untuk pengungsian Kepala Negara dan tokoh pemerintahan telah disiapkan. Sekali ini pada hakekatnya RI telah mempunyai persiapan untuk menghadapi aksi militer Belanda.

Dan memang, sebagaimana yang telah diduga semula, Belanda melakukan aksi militernya yang kedua. Serangan dibuka pada tanggal 19 Desember 1948. Dengan taktik "perang kilat" Belanda melancarkan serangan di semua front di daerah Republik Indonesia. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan payung di pangkalan udara Maguwo (sekarang Adisoetjpto) dan dengan gerak cepat berhasil menduduki ibukota Yogyakarta. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota meskipun mereka tahu bahwa dengan demikian mereka akan ditawan oleh musuh. Alasan mereka adalah supaya mereka mudah ditemui oleh KTN dan kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Mereka tidak mementingkan pukulan psikologis yang akan dialami oleh rakyat dan Angkatan Perang, karena Presiden/Panglima Tertinggi maupun Wakil Presiden/Menteri Pertahanan sudah ada di tangan musuh. Mereka lebih mengandalkan bantuan luarnegeri melalui diplomasi, daripada kekuatan Rakyat dengan perlawanan bersenjata.

Sebagai akibat daripada keputusan itu Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta beserta sejumlah menteri, Kepala Staf Angkatan Udara, Komodor S. Suryadarma dan lain-lain ditawan oleh tentara Belanda. Namun

kelangsungan resmi Pemerintah Republik Indonesia dapat dipelihara karena sebelum pihak Belanda sampai ke istana Presiden, masih sempat dikirimkan radiogram berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Dalam pana itu beberapa bulan sebelum Belanda menyerang, Jenderal Soedirman, Panglima Besar Angkatan Perang, menderita sakit paru-paru yang sangat parah sehingga harus dirawat di rumah sakit dan kemudian di rumah. Namun ketika situasi menjadi gawat, ia berkata bahwa jika Belanda menyerang kembali ia akan memegang kembali pimpinan Angkatan Perang dan memimpin prajurit-prajuritnya dalam suatu perlawanan gerilya. Janji itu ditepati. Pada saat Belanda menyerang, ia bangkit dari tempattidurnya dan meminta diri kepada Presiden untuk pergi ke luar kota guna memimpin gerilya. Maka dengan diiringi oleh ajudan dan pasukan pengawalnya, Jenderal Soedirman naik gunung turun gunung, masuk hutan ke luar hutan, menempuh terik matahari dan curahan hujan lebat untuk memimpin perlawanan rakyat semesta terhadap musuh. Dalam masa yang paling gelap bagi Republik, pak Dirman memberikan pegangan dan kekuatan batin kepada Rakyat dan prajurit-prajurit yang berjuang habis-habisan untuk kelangsungan hidup negaranya. MBKD dan MBKS segera diaktifkan di bawah Panglimanya masing-masing. Pemerintah Militer memutar rodanya dengan lancar. Dengan demikian di mana masih ada prajurit TNI, di sana Republik Indonesia masih berdiri.

Dengan menduduki Yogyakarta Belanda mengira bahwa TNI sudah hancur berantakan dan bahwa dengan demikian kampanye militernya selesai, tinggal melaksanakan operasi pembersihan yang akan memakan waktu satu-dua bulan saja. Dugaan Belanda itu ternyata meleset samasekali. Pada pukulan pertama itu TNI tidak hancur: gerak maju pasukan pasukan Belanda dibiarkan untuk memberikan ruang dan waktu bagi pelaksanaan *wingate* dan penyusunan *Wehrkreise*. Dalam waktu satu bulan saja, TNI telah selesai dengan konsolidasinya dan mulai memberikan pukulan-pukulan secara teratur kepada musuh. Sekarang tidak ada lagi garis demarkasi dan front ada di mana-mana. Seluruh Jawa dan Sumatra menjadi satu daerah gerilya yang menyeluruh dan tekanan terhadap pasukan Belanda ditingkatkan secara terus-menerus. Penghadangan terhadap konvoi-konvoi perbekalan dan balabantuan tentara Belanda semakin berhasil. Serangan umum terhadap kota-kota yang diduduki Belanda mulai dilaksanakan. Yang paling terkenal di antaranya adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta di bawah pimpinan komandan Brigade X, Letnan Kolonel Soeharto (sekarang Presiden RI). Kali ini TNI tidak menyerang pada malam hari, melainkan di tengah-tengah terang cahaya matahari dan berhasil menduduki Yogya selama 6 jam.



*Letkol Soeharto (sekarang Presiden RI) beserta anak buah
sewaktu bergerilya mempertahankan kemerdekaan*

Dalam pada itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX menolak tawaran kerjasama dari Belanda dan kratonnya menjadi tempat pertemuan pemimpin-pemimpin gerilya. Perjuangan menegakkan RI juga dilakukan di luar negeri. Dengan modal pesawat sumbangan rakyat Aceh, Wiweko Supono membentuk armada udara komersial yang berpangkalan di Birma. Hasil dari penerbangan komersial ini digunakan untuk membiayai perwakilan RI di luar negeri. Usaha inilah yang menjadi modal Garuda Indonesian Airways. Juga dibuka komunikasi radio Wonosari-Bukittinggi-Rangoon-New Delhi.

Juga tidak dapat diupayakan peranan para pelajar. Para pelajar sekolah menengah yang badannya sehat sebagian besar bergabung di dalam Tentara Pelajar. Pelajar-pelajar Jawa Timur membentuk Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan Tentara Genie Pelajar (TGP) yang terdiri dari pelajar-pelajar sekolah teknik. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat dibentuk Tentara Pelajar (TP) dan SA (*Sturm Abteilung*) yang terdiri dari pelajar-pelajar sekolah teknik. Pelbagai satuan tentara pelajar ini pada masa reorganisasi dan rasionalisasi disatukan dalam Brigade 17 TNI. Secara bergilir mereka belajar dan bertugas ke front. Selama bergerilya, sudah barang tentu mereka samasekali mengorbankan studinya. Di samping Tentara Pelajar, terdapat pula Corps Mahasiswa (CM) dan Mobilisasi Pelajar. Mereka disebarkan ke pelbagai *Wehrkreise* untuk tugas staf, khususnya dalam bidang perhubungan dan teritorial. Dengan demikian tradisi perjuangan pelajar/mahasiswa yang dirintis sejak berdirinya Budi Utomo, dilanjutkan pula dalam Perang Kemerdekaan.

Aksi militer kedua Belanda juga menarik perhatian PBB, karena secara terang-terangan Belanda merobek-robek Persetujuan Renville di depan hidung Komisi Tiga Negara yang ditugaskan oleh PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar RI dan Belanda segera menghentikan permusuhan. Kegagalan Belanda di medan-tempur dan tekanan Amerika Serikat yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan.

1. Memulihkan Persatuan Nasional

Sesudah terlihat titik-titik terang bahwa kedua belah pihak, RI dan Belanda, bersedia maju ke meja perundingan maka atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 4 April 1949 diadakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota Komisi dari Amerika Serikat. Delegasi RI di bawah pimpinan Mr. Moh. Roem sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. H. van Royen. Sebagaimana biasa, perundingan berjalan sangat lamban, karena masih jauhnya kehendak masing-masing pihak: RI tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka bagi perundingan-perundingan selanjutnya. Sebaliknya pihak Belanda menuntut agar lebih dahulu dicapai persetujuan tentang perintah penghentian perang gerilya oleh RI.

Namun akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 telah tercapai persetujuan. Kemudian dibacakan kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 dan petunjuknya dari tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah RI dibacakan oleh ketua delegasi Indonesia Mr. Moh. Roem yang berisi antara lain:

- (1) pemerintah RI akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya
- (2) turut serta dalam KMB yang bertujuan untuk mempercepat "penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat" kepada Negara Republik Indonesia Serikat.

Kemudian delegasi Belanda membacakan pernyataannya, yang dibacakan oleh Dr. J. H. van Royen yang berisi antara lain:

- (1) Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi karesidenan Yogyakarta
- (2) Pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat pemimpin-pemimpin RI dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948
- (3) Pemerintah Belanda setuju RI akan menjadi bagian daripada Republik Indonesia Serikat (RIS)
- (4) Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan selekasnya di Den Haag sesudah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut, Pemerintah Darurat RI di Sumatra memerintahkan kepada Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil-alih pemerintahan di Yogyakarta dari pihak Belanda.

Dalam pada itu pihak Angkatan Perang (TNI) menyambut hasil persetujuan itu dengan perasaan curiga. Panglima Besar Jenderal Soedirman memperingatkan kepada segenap komandan kesatuan agar tidak memikirkan masalah perundingan. Untuk mempertegas amanat Panglima Besar itu, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution memperingatkan kepada para komandan agar membedakan gencatan senjata untuk kepentingan politik dan kepentingan militer. Pada umumnya kalangan TNI tidak mempercayai sepenuhnya hasil-hasil perundingan, karena menurut pengalaman dengan Persetujuan Linggajati dan Renville, hasil perundingan selalu merugikan perjuangan.

Melalui perundingan segitiga RI-BFO-Belanda pada tanggal 22 Juni 1949 di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Critchley, dihasilkan tiga keputusan, yaitu pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1949. Perintah penghentian perang gerilya akan diberikan setelah Pemerintah RI berada di Yogyakarta. Sidang KMB akan dilaksanakan di Den Haag. Pada 1 Juli 1949 secara resmi Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Kemudian disusul dengan datangnya para pemimpin RI dari medan gerilya. Panglima Besar Soedirman tiba kembali di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kedatangan beliau disambut dengan kebesaran militer. Sekalipun menyambut hasil perundingan dengan perasaan curiga, namun Jenderal Soedirman taat kepada putusan politik Pemerintah.



Panglima Besar Jenderal Soedirman menghadap Presiden dan Wakil Presiden setelah kembali dari bergerilya pada tanggal 10 Juli 1949

Sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu Mr. Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Hatta. Sidang Kabinet juga memutuskan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan merangkap Ketua Koordinator Keamanan.

Dengan tercapainya persetujuan Roem-Royen, maka terbukalah jalan ke arah persatuan nasional di seluruh Indonesia, antara mereka yang berada di pihak Republik dan mereka yang tadinya ada di pihak Belanda. Dengan semangat persatuan yang mengatasi pelbagai emosi, diadakan pendekatan antara RI dan BFO. Selanjutnya perundingan RI-BFO yang sudah dirintis dilanjutkan untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada bulan Juli dan Agustus 1949 diadakan Konferensi Antar-Indonesia, mula-mula di Yogyakarta kemudian diteruskan di Jakarta. Dalam konferensi ini diperlihatkan bahwa politik *divide et impera* Belanda, untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik dari RI, mengalami kegagalan. Hasil yang disetujui bersama di Yogyakarta antara lain yang terpenting adalah:

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS), berdasarkan demokrasi dan federalisme (Serikat).
2. RIS akan dikepalai oleh seorang Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Presiden.
3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari RI maupun dari Kerajaan Belanda.
4. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
5. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan inti Angkatan Perang RI (TNI) bersama-sama dengan orang Indonesia yang ada dalam KNIL, dan kesatuan-kesatuan Belanda lainnya.

3. *Pengakuan Kedaulatan*

Sesudah bangsa Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri di dalam Konferensi Antar-Indonesia, kini bangsa Indonesia secara keseluruhan menghadapi KMB. Sementara itu pada bulan Agustus 1949, Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi di satu pihak dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda pada lain pihak, mengumumkan perintah penghentian tembak-menembak. Perintah penghentian tembak-menembak itu berlaku mulai tanggal 11 Agustus untuk Jawa dan 15 Agustus untuk Sumatra. Pada tanggal 4 Agustus 1949, telah disusun delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri KMB yang terdiri dari Drs. Moh. Hatta (ketua) Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Supomo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastro-

Panitia mengumumkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum untuk DPR akan dilakukan pada tanggal 29 September 1955 dan untuk Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Dengan adanya pengumuman itu partai-partai politik mulai berkampanye. Sekalipun Kabinet Ali Sastroamidjoyo jatuh pada bulan Juli 1955, dan diganti oleh Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi), tanggal pelaksanaan pemilihan umum tidak berubah.

Akhirnya saat yang dinanti-nanti tiba. Pada tanggal 29 September 1955, 39 juta rakyat Indonesia menuju ke kotak suara untuk memberikan suaranya secara tertib dan berdisiplin. Jumlah rakyat yang memberikan suaranya dinilai sangat tinggi. Peninjau-peninjau luar negeri menilai bahwa bangsa Indonesia telah memperlihatkan taraf kematangan yang tinggi di dalam melaksanakan pemilihan umum sebagai salah satu ungkapan demokrasi. Pemilihan umum yang telah berhasil dilaksanakan oleh bangsa Indonesia itu ternyata membawa beberapa hal yang baru. Empat partai muncul sebagai pemenang yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk DPR, PNI mendapat 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, PKI 39 kursi. Munculnya NU dan PKI sebagai partai besar merupakan satu hal yang sebelumnya tidak terduga.

Pemilihan umum untuk Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955, dengan hasil yang sejajar dengan yang telah tercapai untuk DPR. Bagaimanapun juga, berhasilnya pelaksanaan pemilihan umum yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia itu memberikan rasa bangga pada bangsa Indonesia. Ternyata bangsa Indonesia cukup matang untuk menyelenggarakan suatu acara yang begitu rumit seperti sebuah pemilihan umum. Apalagi penyelenggaraannya tertib dan "bersih" bebas dari bentrokan-bentrokan fisik maupun kecurangan-kecurangan. Partisipasi rakyat yang demikian besar, menunjukkan kesadaran politik yang tinggi di kalangan rakyat.

Sebaliknya, hasil daripada pemilihan umum yang begitu didambakan oleh rakyat itu ternyata tidak memenuhi harapan. Ternyata konfigurasi politik baru tidak membawa stabilitas politik. Bahkan "dagang sapi" atau tawar-menawar kedudukan dan cekcok antar-partai berlangsung terus seperti semula. Dengan demikian timbul kesimpulan, bahwa sistemnyalah yang tidak cocok; bahwa sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan kondisi-kondisi Indonesia.

B. MENGIKARI NILAI-NILAI 1945

1. *Percobaan Sistem Politik Demokrasi Liberal*

Pada awal Kemerdekaan, kelompok sosialis di dalam BP-KNIP berhasil mendorong terbentuknya sebuah kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Juga atas usul BP-KNIP, Pemerintah menyetujui

pembentukan partai-partai politik dengan dikeluarkannya Maklumat pada tanggal 3 November 1945. Kemudian lahirlah partai-partai politik yang dengan demikian menjelmakan sistem multi-partai. Sebagai kelanjutan daripada sistem politik pada masa Perang Kemerdekaan, kehidupan kepartaian pada masa Demokrasi Liberal ini bertambah subur, terutama sesudah bubarnya RIS. Dari sini dapat dilihat bahwa RI sejak 1950 telah melaksanakan demokrasi parlementer yang liberal meniru sistem parlementer Eropa Barat. Secara yuridis keadaan semacam itu adalah wajar, karena memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dengan demikian partai-partai inilah yang memerintah melalui pertimbangan kekuasaan di dalam parlemen. Antara tahun 1950-1959, PNI dan Masyumi merupakan partai-partai yang terkuat dalam DPR. Dalam waktu lima tahun (1950-1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan, dalam 4 buah kabinet. Jadi rata-rata hampir setiap tahun terdapat pergantian kabinet. Karena tiap-tiap kabinet tidak berumur panjang, program-programnya belum sempat dilaksanakan sudah diganti dengan kabinet lain dengan program lain pula. Hal ini sudah barang tentu menimbulkan instabilitas di bidang politik, sosial-ekonomi dan keamanan.

Sesudah bubarnya RIS, kabinet yang pertama memerintah, adalah *Kabinet Natsir* (6 September 1950 — 21 Maret 1951). Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. PNI sebagai partai kedua terbesar memilih kedudukan sebagai oposisi. PNI menolak untuk ikut serta dalam Kabinet ini karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai dengan kekuatannya. Tokoh-tokoh Masyumi sebagai inti Kabinet Natsir dibantu oleh tokoh-tokoh non-partai. Karena banyak tokoh-tokoh yang terkenal dan mempunyai keahlian dan reputasi dalam bidangnya, kabinet ini termasuk salah-satu kabinet yang formasinya kuat. Tokoh-tokoh yang terkenal di antaranya ialah Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Assaat (bekas pejabat Presiden RI), Ir. Djuanda dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo.

Program Kabinet Natsir antara lain adalah:

1. menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
2. konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan
3. menyempurnakan organisasi Angkatan Perang
4. mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat
5. memperjuangkan penyelesaian masalah Irian.

Pada masa itu dipelbagai daerah Indonesia timbul macam-macam pemberontakan yang menimbulkan masalah keamanan dalam negeri. Hal itu akan dibahas di dalam bagian lain.

Mengenai masalah pengembalian wilayah Irian, Kabinet Natsir telah merintis perundingan dengan pihak Belanda. Perundingan menemui jalan buntu. Kegagalan inilah yang menyebabkan timbulnya mosi-mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir. Mosi tidak percaya dari PNI, berkenaan

dengan pencabutan Peraturan Pemerintah No. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang dianggap menguntungkan Masyumi, disampaikan dalam sidang parlemen pada tanggal 22 Januari. Mosi ini memperoleh kemenangan dalam parlemen. Natsir yang mencoba memperpanjang umur kabinetnya, berusaha berunding dengan PNI, tetapi sia-sia. Pada tanggal 21 Maret 1950, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden, setelah bertugas 6½ bulan lamanya.

Sesudah jatuhnya Kabinet Natsir, berhasil dibentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI dipimpin oleh dr. Sukiman dari Masyumi. Kabinet ini terkenal dengan sebutan *Kabinet Sukiman-Suwiryo*. Program Kabinet Sukiman sebagian besar meneruskan program kabinet terdahulu. Namun kabinet ini berumur singkat pula (27 April 1951 — 3 April 1952) karena masalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Subardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan *Matual Security Act* (MSA). Masalah ini mendapat tantangan baik dari Masyumi maupun dari PNI. Peristiwa ini ditafsirkan bahwa Kabinet Sukiman telah memasukkan Indonesia ke blok Barat dan dengan demikian menyimpang dari garis politik luar negeri yang dikenal dengan sebutan politik bebas-aktif. DPR menggugat kebijaksanaan itu, dan jatuhlah Kabinet Sukiman. Dalam masa 2 tahun sesudah RIS bubar, sudah dua kali terjadi pergantian kabinet, dan rata-rata program yang dibuat tidak sempat dilaksanakan. Kabinet ini juga dihadapkan pada meningkatnya masalah keamanan. Di Sulawesi Selatan Kahar Muzakkar dan kawan-kawannya membangkang terhadap pemerintah dan memberontak. Jatuh bangunnya kabinet adalah akibat sistem demokrasi liberal yang dianut. Pada DPR saat itu terdapat 10 partai dan beberapa fraksi yang mayoritasnya dipegang oleh Masyumi dan PNI. Sebagai syarat untuk membentuk pemerintah yang kuat, perlu dukungan dari kedua partai besar itu. Namun kedua partai itu tidak pernah dapat sepakat, karena lebih mengutamakan kepentingan golongannya dari pada kepentingan nasional. Banyak segi kepentingan nasional diabaikan, karena kabinet sibuk dengan usaha mencegah agar-supaya tidak dijatuhkan oleh DPR. Pada masa itu telah timbul gagasan untuk membentuk "zakenkabinet" yang terdiri dari para ahli dalam bidang masing-masing. Kabinet Sukiman jatuh diganti oleh *Kabinet Wilopo* (3 April 1952 — 3 Juni 1953). Program kabinet ini terutama ditujukan kepada persiapan pemilihan umum, kemakmuran yang ditekankan pada peningkatan taraf hidup rakyat dan keamanan dalam negeri. Program luar negeri ditekankan kepada perjuangan pengembalian wilayah Irian dan melaksanakan politik bebas-aktif menuju perdamaian dunia. Masalah yang berat selama Kabinet Wilopo adalah timbulnya gejala separatisme di daerah-daerah dan masalah Angkatan Perang. Gejala separatisme timbul karena kekecewaan terhadap imbalan alokasi keuangan antara pusat dan daerah. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada pusat lebih besar daripada yang dikembalikan oleh Pusat ke Daerah.

Mereka menuntut diperluasnya hak-hak otonomi daerah. Akibatnya timbul perkumpulan-perkumpulan yang bersifat kedaerahan, yang direstui oleh pimpinan daerah itu sendiri. Padahal kejadian semacam itu membahayakan persatuan nasional, yang sudah dipupuk sejak Sumpah Pemuda tahun 1928.

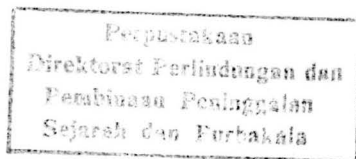
Masalah Angkatan Perang yang timbul adalah "Peristiwa 17 Oktober 1952". Peristiwa ini didahului oleh demonstrasi rakyat yang menuntut agar Parlemen dibubarkan. Latarbelakang peristiwa ini adalah sikap kurang bijaksana DPR terhadap Angkatan Perang. Angkatan Perang (TNI) yang terdiri dari pejuang-pejuang dari masa Perang Kemerdekaan, telah mengalami serangkaian kekecewaan: mereka dipaksa menerima keputusan KMB sebagai keputusan politik, dan harus menerima bekas musuhnya dari pelbagai kesatuan Belanda. Kemudian mereka dilatih oleh bekas musuhnya pula dalam rangka Misi Militer Belanda. Situasi psikologis demikian, diperberat lagi dengan suasana liberal yang ingin menempatkan TNI dalam posisi alat sipil seperti di negara-negara Barat. Konsolidasi di lingkungan TNI untuk menjadikan TNI sebagai Angkatan Perang yang tinggi mutu profesionalnya namun tetap berjiwa pejuang, tidak menyenangkan golongan politik. Jika usaha itu berhasil, pasti Angkatan Perang (TNI) menjadi satu kekuatan sosial-politik yang kompak yang dapat mengimbangi kekuatan partai-partai politik. Karena itu kaum politisi berusaha membuat pion-pion di dalam tubuh Angkatan Perang. Pada saat itu di dalam TNI terdapat pergolakan intern yang menyangkut kebijaksanaan KSAD. Tokoh yang menentang kebijaksanaan KSAD adalah Kolonel Bambang Supeno. Ia mendatangi para panglima mengajak mereka menandatangani petisi untuk mengganti KSAD Kolonel A.H. Nasution. Ketika Bambang Supeno membicarakan masalah KSAD dengan Presiden ia mendapat tanggapan baik. Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Mayor Jenderal T.B. Simatupang, mendapat laporan mengenai tindakan Kolonel Bambang Supeno yang berusaha mengganti KSAD dengan meninggalkan norma-norma hierarki militer dan disiplin militer. Pada tanggal 12 Juli 1952 KSAP memanggil semua perwira di bawah pimpinan KSAD dari pusat dan daerah untuk menjernihkan laporan mengenai tindakan Kolonel Bambang Supeno. Mereka sepakat tidak dapat menerima cara yang ditempuh oleh Bambang Supeno karena merusak solidaritas intern TNI. Selanjutnya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX bersama KSAD melaporkan sikap para senior TNI-AD kepada Presiden, namun Presiden tetap pada pendiriannya. Presiden tetap memberi dukungan terhadap oknum yang merongrong kebijaksanaan pimpinan TNI. Karena merasa mendapat dukungan moril dari Presiden, Kolonel Bambang Supeno mengirim surat kepada Menteri Pertahanan yang berisi petisi penggantian KSAD. Tembusan surat itu dikirim kepada Seksi Pertahanan Parlemen. Peristiwa ini menimbulkan perdebatan dalam Parlemen. Sementara itu timbul pula issue dari luar TNI. Dua orang anggota Parlemen Bebas Daeng Lalo dan Rondonuwu, mengirim surat kepada Pemerintah. Mereka mencela kebijaksanaan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Tentara

dan Teritorium VII (Indonesia bagian Timur) dalam melaksanakan pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan. Surat ini menimbulkan kegemparan di kalangan anggota parlemen. Kolonel Gatot Subroto membantah dengan mengatakan bahwa laporan kedua anggota Parlemen itu tidak berdasarkan kenyataan dan akan menyulitkan tugasnya selaku penanggungjawab keamanan di Sulawesi Selatan. Inilah yang menjadi bibit ketegangan TNI dengan Parlemen. Pada bulan Oktober 1952 Manai Sophiaan beserta beberapa orang anggota Parlemen mengajukan mosi tidak percaya kepada Pemerintah, dan menuntut diadakannya reformasi dan reorganisasi Angkatan Perang. Juga kebijaksanaan KSAD dikecam secara tajam.

Perdebatan mengenai masalah internnya dalam Parlemen, dirasakan oleh kalangan yang luas dalam TNI-Angkatan Darat sebagai intervensi langsung dalam tubuhnya. Hal itu juga membangkitkan prasangka terhadap politisi bekas boneka Belanda dan menajamkan kembali pertentangan antara *non* (mereka yang berjuang di pihak Republik) dan *ko* (mereka yang memihak Belanda). Kemudian terjadilah demonstrasi rakyat yang menuntut dibubarkannya Parlemen. Pada waktu yang sama sejumlah tokoh TNI-AD di bawah pimpinan KSAD Kolonel A.H. Nasution menghadap Presiden dan menyarankan supaya Parlemen yang sekarang dibubarkan. Saran itu ditolak oleh Presiden Sukarno.

Tambahan pula terjadi peristiwa tanah di Tanjung Morawa (Sumatra Utara bagian timur). Pada tanggal 16 Maret 1953 Polisi dengan kekerasan mengusir penghuni liar dari tanah perkebunan itu, yang sejak lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Penduduk yang dihasut oleh kader-kader Komunis menolak untuk pergi dan membangkang alat Negara. Sebagai akibat terjadilah bentrokan sehingga beberapa orang petani tewas. Peristiwa ini mendapat sorotan yang tajam dan emosional dari pers dan Parlemen. Kabinet mendapat mosi tidak percaya dan pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden. Perlu dicatat bahwa pada masa Kabinet Wilopo ini Presiden Sukarno mulai tampil ke muka sebagai suatu kekuatan politik yang berdiri sendiri.

Setelah hampir 2 bulan mengalami krisis kabinet, terbentuklah *Kabinet Ali Sastroamidjoyo* (31 Juli 1953 — 12 Agustus 1955) yang merupakan kabinet terakhir sebelum Pemilihan Umum. Kabinet didukung oleh PNI dan NU, sedang Masyumi menjadi oposisi. Kabinet Ali Sastroamidjoyo masih juga harus menghadapi masalah keamanan yang tak kunjung selesai. Persiapan Pemilihan Umum yang dimulai oleh Kabinet Wilopo, diteruskan oleh kabinet Ali, dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum. Prestasi yang paling menonjol pada masa Kabinet Ali ini adalah berhasil diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika, yang dibuka pada tanggal 18 April 1955. Kabinet Ali terpaksa menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 24 Juli 1955 karena terjadinya konflik dengan TNI-AD mengenai penggantian KSAD pada tanggal 27 Juni 1955. Peristiwa ini merupakan ekor daripada peristiwa 17 Oktober 1952. Mayor Jenderal



Bambang Sugeng, Kepala Staf Angkatan Darat mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh Kabinet. Sebagai penggantinya oleh Pemerintah ditunjuk Kolonel Bambang Utoyo, Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya. Penunjukan Pemerintah ini tidak disetujui oleh pihak Angkatan Darat. Karena itu pada pelantikan Kasad pada tanggal 27 Juni 1955 tidak seorangpun dari Panglima TT yang hadir, sekalipun mereka berada di Jakarta. Wakil Kasad Kolonel Zulkifli Lubis pun menolak melakukan serah-terima dengan Kasad baru, karena pemerintah dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan TNI-AD yang menyangkut pencalonan Kasad. Keadaan ekonomi semakin merosot dan inflasi menunjukkan gejala yang membahayakan. Terjadi pula pertikaian yang memuncak antara PNI dengan NU. Pada tanggal 20 Juli NU memutuskan untuk menarik menteri-menternya dari Kabinet Ali. Karena itu pada tanggal 24 Juli 1955 Kabinet Ali jatuh. Kabinet Ali digantikan oleh *Kabinet Burhanuddin Harahap* dari Masyumi (12 Agustus 1955 — 3 Maret 1956). Jalannya pembentukan kabinet ini melalui "tawar-menawar" mengenai kedudukan menteri yang memakan waktu agak lama. Wakil Presiden Moh. Hatta menunjuk tiga orang formator Kabinet yaitu dr. Sukiman (Masyumi) Wilopo (PNI) dan Asaat (non-partai). Pada waktu itu Presiden Sukarno sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ketiga tokoh tersebut gagal membentuk kabinet. Kemudian Wakil Presiden menunjuk Burhanuddin Harahap (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru. Hasil yang menonjol pada kabinet ini adalah pelaksanaan pemilihan umum yang pertama bagi Indonesia, yang berlangsung pada 29 September 1955 untuk DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk Konstituante. Pemilihan umum berhasil dilaksanakan secara sukses. Peristiwa 27 Juni 1955 yang menjadi sebab jatuhnya Kabinet Ali berhasil diselesaikan dengan mengangkat Kasad baru, yakni tokoh lama Kolonel A.H. Nasution. Prestasi lainnya adalah pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Sesudah Pemilihan Umum ternyata Kabinet Burhanuddin Harahap tidak cukup mempunyai dukungan mengingat jumlah suara yang diperoleh oleh partai-partai yang diwakili di dalamnya, dan pada tanggal 3 Maret 1956 Kabinet mengembalikan mandatnya.

Kembali Ali Sastroamidjoyo diserahkan mandat untuk membentuk kabinet, pada tanggal 20 Maret 1955. Kabinet baru merupakan kabinet koalisi, di mana tiga partai besar PNI, Masyumi, NU ikut serta dalam kabinet. Program kabinet adalah pembangunan lima tahun, perjuangan membebaskan Irian, melaksanakan politik luar negeri yang bebas-aktif. Namun kabinet hasil Pemilihan Umum ini belum berhasil memperbaiki ekonomi sebagaimana yang diprogramkan. Di daerah-daerah telah timbul dewan-dewan yang memperlihatkan gejala separatisme. Di Sumatra Barat Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel A. Husein pada 20 Desember 1956, Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon pada tanggal 22 Desember 1956 di Medan, dan Piagam Perjuangan Semesta

(Permesta) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual di Ujungpandang pada tanggal 2 Maret 1957, telah menyatakan memisahkan diri dari Pemerintah Pusat dan mengambil-alih pemerintah daerah. Sedang Dewan Garuda dibentuk di Palembang pada tanggal 17 Januari 1957 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian, pada tanggal 9 Maret 1957 juga mengambil-alih pemerintahan daerah. Dewan-dewan ini menganggap bahwa Pemerintah Pusat mengabaikan pembangunan daerah.

Dalam pada itu di dalam kabinet sendiri timbul perpecahan antara PNI dan Masyumi: Masyumi menghendaki agar Kabinet Ali menyerankan mandatnya sesuai dengan tuntutan daerah. Namun Perdana Menteri Ali Sastroamidjyo berpendapat bahwa Kabinet tidak wajib mengembalikan mandat karena tuntutan daerah. Hal ini akan meninggalkan azas demokrasi dan azas parlementer. Pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik menteri-menterinya dari Kabinet.

Peristiwa ini sangat melemahkan kedudukan kabinet Ali hasil Pemilihan Umum sehingga pada tanggal 14 Maret 1957 Ali terpaksa menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Sukarno. Penyakit lama dari kaum politisi kambuh kembali. Kali inipun mereka melakukan "dagang sapi" untuk memperebutkan kedudukan. Di pihak lain Konstituante yang bersidang di Bandung tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekalipun badan itu telah bersidang satu tahun lamanya namun belum berhasil menyusun Undang-Undang Dasar baru.

Dengan terbentuknya dewan-dewan di daerah-daerah yang menentang Pemerintah Pusat, situasi Negara menjadi gawat. Sehari sebelum menerima penyerahan mandat kabinet Ali, pada tanggal 13 Maret 1957 Presiden menyatakan Negara dalam keadaan bahaya. Pembentukan kabinet baru pengganti kabinet Ali terkatung-katung. Partai-partai tetap masih menginginkan cara tawar-tawaran kedudukan dalam membentuk kabinet baru. Akhirnya Presiden menunjuk Ir. Djuanda yang non-partai untuk menyusun kabinet.

Kabinet Djuanda resmi terbentuk pada tanggal 9 April 1957, dalam keadaan yang tidak menggembirakan. Kabinet ini adalah *zaken-kabinet*, dengan komposisi perdana menteri: Ir. Djuanda, dengan tiga orang wakil perdana menteri: Mr. Hardi, Idham Chalid dan dr. Leimena. Kabinet ini tugasnya berat, terutama untuk menghadapi pergolakan daerah, perjuangan mengembalikan wilayah Irian dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Untuk mengatasi masalah itu Kabinet Djuanda menyusun program 5 pasal yang disebut Pancakarya. Karena itu Kabinet Djuanda disebut *Kabinet Karya*. Program-programnya ialah:

1. membentuk Dewan Nasional
2. normalisasi keadaan Republik
3. melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. perjuangan Irian Jaya
5. mempergiat pembangunan.

Dewan Nasional adalah badan baru yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Existensi Dewan ini diusulkan oleh Presiden Sukarno dalam rangka konsepsinya yang merupakan pangkal-tolak untuk menegakkan sistem Demokrasi Terpimpin. Sekalipun Dewan ini telah terbentuk, namun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Negara semakin meningkat. Pergolakan daerah menyebabkan terganggunya hubungan dengan daerah yang berakibat buruk pada ekonomi, sehingga merupakan hambatan bagi pelaksanaan program Pemerintah.

Untuk meredakan pergolakan daerah, pada tanggal 14 September 1957, dilangsungkan Musyawarah Nasional (Munas). Musyawarah ini dilangsungkan di gedung Proklamasi di Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi) dan dihadiri oleh tokoh-tokoh pusat dan daerah antara lain Sukarno-Hatta. Musyawarah membahas beberapa masalah terutama masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan Angkatan Perang dan pembagian wilayah RI. Musyawarah Nasional kemudian diteruskan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Manap) pada bulan November 1957. Usaha-usaha pemerintah ini tidak menghasilkan pemecahan masalah sebagaimana yang diharapkan. Tidak lama kemudian terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno. Peristiwa ini terjadi di Jakarta pada tanggal 30 November 1957 di depan Perguruan Cikini dan terkenal dengan sebutan Peristiwa Cikini. Sesudah Peristiwa Cikini, keadaan Negara semakin memburuk. Daerah-daerah yang bergolak semakin membuka kedoknya bahwa mereka bermaksud memisahkan diri dari Pemerintah Pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng, Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Pusat, bahwa dalam 5 X 24 jam Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri, jika tidak, Dewan Banteng akan memisahkan daerah Sumatra Tengah dari Pemerintah Pusat. Pemerintah memutuskan untuk segera menindak oknum-oknum yang terlibat dalam gerakan-gerakan daerah itu. Beberapa perwira TNI yang terlibat dipecat dengan tidak hormat. Mereka adalah Letnan Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Djambek dan Kolonel Zulkifri Lubis. Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Husein mempermaklumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai "Perdana Menteri". Pembentukan PRRI disusul dengan bergeraknya Permesta di Sulawesi Utara. Krisis Demokrasi Liberal telah mencapai puncaknya. Republik Indonesia hasil perjuangan dan pergerakan Rakyat terancam desintegrasi.

2. Sistem Ekonomi Liberal

Dalam periode sejak Pengakuan Kedaulatan, keadaan ekonomi Indonesia buruk dan menyedihkan. Hal itu merupakan akibat dari pendudukan Jepang dan Perang Kemerdekaan yang bersama-sama

berlangsung lebih dari 7 tahun. Dalam pada itu seluruh masyarakat mencita-citakan diselenggarakannya pembangunan ekonomi Indonesia, yang akan mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang lebih bebas dari kegoncangan ekonomi dunia. Untuk mencapai cita-cita dan sekaligus menanggulangi kerusahan-kerusahan akibat pendudukan dan Perang Kemerdekaan, dua masalah yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah yaitu perbaikan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Masalah jangka pendek yang harus diatasi adalah:

1. mengurangi jumlah uang yang beredar
2. mengatasi kenaikan biaya hidup.

Sedang masalah jangka panjang adalah peningkatan taraf hidup, mengatasi peledakan jumlah penduduk. Pada waktu itu Pemerintah mengalami defisit Rp. 5,1 milyar. Namun semua orang menyadari bahwa beban yang berat itu merupakan konsekwensi daripada KMB. Defisit ini sebagian berhasil dikurangi dengan pinjaman Pemerintah, sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa Perang Kemerdekaan. Pelaksanaan pinjaman Pemerintah ini adalah dengan jalan mengambil tindakan keuangan yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950. Tindakan itu berupa pemotongan uang. Tindakan itu dilakukan dengan cara memotong menjadi dua semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas, hingga nilainya tinggal setengahnya. Tindakan Pemerintah ini terkenal dengan julukan "gunting Syafruddin", sesuai dengan nama menteri keuangan yang mengeluarkan peraturan itu. Jumlah yang dihasilkan dari pinjaman wajib Pemerintah ini sebesar Rp. 1,6 milyar. Dengan demikian Pemerintah berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian dengan kesepakatan sidang menteri Uni Indonesia-Belanda, RI mendapat kredit sebesar Rp. 200,— juta dari pemerintah Belanda.

Di bidang perdagangan luar negeri, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan baru bagi export yang dilakukan dengan sistem sertifikat devisa. Nilai-tukar rupiah diubah dari Rp. 3,80 setiap US\$1, menjadi Rp. 7,60 untuk setiap US\$1 guna export dan Rp. 11.40 untuk setiap US\$1 guna import. Tujuan Pemerintah adalah untuk merangsang export, sebab sistem ini memberikan penghasilan besar kepada exportir dalam rupiah sehingga mereka dapat membayar harga lebih tinggi kepada produsen.

Dengan pecahnya Perang Korea, export RI pada kwartal kedua tahun 1950 ini meningkat. Pada bulan April 1950 meningkat sampai 187% dan 243% pada bulan Mei yang bernilai sebesar US\$115 juta. Inilah yang dikenal di seluruh dunia dengan sebutan *Korea boom*.

Untuk menanggulangi perbaikan ekonomi jangka panjang, telah dipikirkan pembangunan prasarana ekonomi. Pemerintah berusaha mendapatkan kredit dari pemerintah Amerika Serikat. Kemudian dikirim misi untuk membicarakannya dengan Pemerintah Amerika Serikat. Misi itu

dipimpin oleh Ir. Djuanda, Menteri Kemakmuran RIS. Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda berhasil mendapatkan kredit dari Pemerintah Amerika Serikat melalui Exim Bank of Washington, sebesar \$ 100 juta. Dari jumlah itu berhasil direalisasi \$ 52.245.000,— dengan ketentuan bahwa kredit itu digunakan untuk pembangunan prasarana ekonomi yang berupa proyek-proyek pengangkutan yang otomatis, seperti pembangunan jalan, telekomunikasi, bandar, kereta-api dan perhubungan udara. Pemerintah RIS sebagai pemerintah peralihan telah meletakkan landasan bagi pembangunan ekonomi Indonesia, walaupun landasan itu tidak begitu kokoh dan sempurna. Sesudah RIS menjelma menjadi Negara Kesatuan RI, tetap dianut sistem demokrasi liberal. Demikian juga sistem ekonominya adalah sistem ekonomi liberal yang berlandaskan kepada persaingan bebas.

Ketika memasuki tahun 1951, pendapatan Pemerintah berkurang dibandingkan dengan tahun 1950. Berkurangnya pendapatan ini disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak memiliki produksi export lain yang besar, kecuali produksi perkebunan. Perkembangan ekonomi Indonesia tidak menuju ke arah yang stabil, bahkan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama ialah bahwa kita mewarisi struktur ekonomi yang berat-sebelah, yaitu menggantungkan diri pada hasil pertanian, khususnya perkebunan. Dengan kurangnya permintaan barang-barang export hasil perkebunan, sudah pasti laju export kita menurun. Sektor produksi lainnya seperti pertambangan dan industri, belum dikembangkan. Faktor kedua, yakni keamanan dalam negeri sangat berpengaruh bagi kelancaran perkembangan ekonomi sedangkan operasi keamanan dalam negeri memerlukan biaya yang besar. Faktor ketiga, adalah instabilitas politik, yang menyebabkan masing-masing kabinet membuat program-program sendiri yang makin meluas karena tuntutan golongannya atau pendukungnya. Belum adanya badan perancang yang mengarahkan prioritas pembangunan secara integral, mengakibatkan naiknya pengeluaran Pemerintah. Faktor keempat, bahwa politik keuangan (finansial-ekonomi) Pemerintah tidak dibuat di Indonesia melainkan di Negeri Belanda pada masa KMB, yang sangat menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil KMB mengenai masalah tersebut memberi kedudukan istimewa kepada Belanda.

Jadi sumber kemerosotan dan menurunnya pendapatan Pemerintah dan instabilitas di bidang ekonomi, saling berkaitan antara faktor yang satu dengan lainnya, ditambah dengan pertambahan penduduk karena naiknya angka kelahiran. Hal lainnya adalah karena dari Pemerintah Belanda kita tidak mewarisi ahli-ahli ekonomi yang cakap, sehingga di dalam mengubah sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak terasa perubahannya. Tokoh yang mencurahkan perhatiannya terhadap masalah-masalah ekonomi sesudah Pengakuan Kedaulatan adalah Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Sumitro membangun ekonomi nasional melalui bidang perdagangan. Ia

berpendapat bahwa pada bangsa Indonesia harus secepat mungkin ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha Indonesia yang pada umumnya bermodal lemah, diberi kesempatan untuk berpartisipasi membangun ekonomi nasional. Mereka harus dibimbing dan diberi bantuan kredit, karena Pemerintah menyadari bahwa pada umumnya mereka tidak mempunyai cukup modal. Apabila usaha ini berhasil, secara bertahap pengusaha Indonesia akan dapat berkembang maju, maka tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional di bidang perdagangan akan tercapai. Sumitro memasukkan gagasannya ini ke dalam salahsatu program Kabinet Natsir, ketika ia memegang jabatan menteri perdagangan. Program Sumitro ini terkenal dengan nama Gerakan Benteng (Benteng Group). Selama tiga tahun (1950 — 1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia mendapat kredit Program Benteng ini. Namun usaha ini tidak mencapai sarannya. Pengusaha-pengusaha Indonesia ternyata lamban untuk menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan Pemerintah itu. Kegagalan program ini disebabkan karena pengusaha-pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam rangka sistem ekonomi liberal. Faktor lainnya berasal dari mentalitas pengusaha-pengusaha kita yang lebih cenderung kepada pola konsumtif yang ingin cepat mendapat keuntungan dan menikmati cara hidup yang mewah.

Pada akhir tahun 1951 kebijaksanaan ekonomi dan keuangan ditinjau kembali, sesudah menasionalisasi *De Javasche Bank*, menjadi Bank Indonesia. Dalam rangka menaikkan pendapatan, Pemerintah menurunkan biaya export dan melakukan penghematan secara drastis. Defisit pada tahun 1952 telah meningkat menjadi Rp. 3,— milyar. Meningkatnya defisit ini karena anggaran belanja Pemerintah belum pernah disahkan oleh DPR. Baru pada tahun 1952 rencana anggaran belanja diajukan ke DPR untuk disetujui. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjoyo I, diperkenalkan sistem ekonomi baru, yang dikenal dengan sebutan "sistem Ali-Baba". Sistem ini diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo. Sistem Ali-Baba ini juga ditujukan untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali menggambarkan pengusaha pribumi dan Baba menggambarkan pengusaha non-pribumi, khususnya Cina. Dalam memajukan ekonomi Indonesia pengusaha pribumi harus bekerjasama dengan pengusaha non-pribumi. Dalam rangka ini Pemerintah menyediakan bantuan berupa kredit dari bank. Tetapi dalam kenyataannya sistem Ali-Baba ini juga mengalami kegagalan, karena pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi. Pengusaha pribumi hanya dijadikan alat oleh pengusaha non-pribumi untuk memperoleh bantuan kredit. Dalam suasana liberal, persaingan lebih diutamakan. Pengusaha pribumi ternyata belum sanggup bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

Sejak tahun 1951 pemerintah masih terus dilanda defisit. Sebagai jalan keluar untuk mengatasi defisit, Pemerintah cenderung untuk

terus-menerus mencetak uang, yang berarti membuka jalan ke arah inflasi. Kabinet Ali Sastroamidjoyo pada tahun 1953 mengalami kenaikan defisit pada anggaran belanja Negara. Jumlah uang yang beredar mencapai Rp. 7,6 milyar. Defisit meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1957 telah mencapai Rp. 5.300,— juta.

Sebagai usaha untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah, pada masa Kabinet Natsir telah dirintis usaha menumbuhkan industrialisasi yang dikenal sebagai Rencana Sumitro. Sasaran Rencana Sumitro dipusatkan kepada pembangunan industri dasar, seperti pabrik-pabrik semen, percetakan pabrik karung, dan pemintalan. Kebijakan ini diikuti perbaikan prasarana liberalisasi pertanian dan penanaman modal asing.

Sesudah Pemilihan Umum, pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955—Maret 1956), melaksanakan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Sebelumnya Pemerintah mengirim misi Anak Agung Gde Agung untuk merundingkan masalah finek (finansial-ekonomi) dengan suatu delegasi Belanda di Jenewa. Pada tanggal 7 Januari 1956 tercapai rencana persetujuan finek yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan finek hasil KMB dibubarkan. Hubungan finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
2. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Namun persetujuan ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda. Bagi pihak Indonesia tidak ada jalan lain kecuali membubarkan Uni Indonesia-Belanda secara sepihak, untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Sebagai lanjutan dari pembubaran Uni tersebut pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Akibat dari rangkaian peristiwa itu ialah bahwa banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya kepada orang-orang Cina. Itulah sebabnya mengapa pada tanggal 19 Maret 1956 Mr. Assaat di depan Kongres Nasional Importir Indonesia di Surabaya menganjurkan agar Pemerintah melindungi pengusaha-pengusaha nasional, karena pengusaha-pengusaha pribumi belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi, khususnya Cina. Pernyataan Assaat ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Pemerintah menanggapi dengan mengeluarkan pernyataan akan memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan yang 100% diusahakan oleh orang Indonesia. Perasaan anti-Cina timbul di kalangan masyarakat, dan timbul tindakan pengrusakan-pengrusakan di beberapa kota di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surakarta.

Ketika Kabinet Djuanda terbentuk, ekonomi Indonesia telah menjadi buruk sekali. Sebagai usaha jalan keluar dari kekalutan ekonomi itu diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Hasil

musyawarah itu tidak berhasil menolong keadaan ekonomi Indonesia. Dalam keadaan demikian, dewan-dewan separatis di daerah-daerah di luar Jawa telah menempuh kebijaksanaan ekonomi sendiri-sendiri. Daerah-daerah mengadakan perdagangan barter sendiri langsung ke luar negeri. Tindakan tersebut jelas-jelas merugikan Negara, sehingga keadaan ekonomi yang buruk bertambah merosot lagi. Peristiwa-peristiwa di atas menunjukkan bahwa sistem politik liberal maupun sistem ekonomi liberal ternyata tidak cocok bagi Indonesia.

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956 — April 1957) dibentuk suatu badan perencana pembangunan nasional yaitu Biro Perancang Negara. Tugas Biro ini merencanakan pembangunan jangka panjang, karena Pemerintah terdahulu hanya merancang pembangunan sebagai program jangka pendek, sehingga hasilnya belum dirasakan oleh masyarakat. Biro Perancang Nasional ini dipimpin oleh Ir. Djuanda, yang kemudian diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Pada bulan Mei 1956 Biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT 1956 — 1961). Akibat instabilitas politik, pada tahun 1957, Rencana Pembangunan Lima Tahun diubah prioritas dan sarasannya karena adanya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Biaya RPLT diperkirakan akan mencapai Rp. 12,5 milyar didasarkan harapan bahwa harga barang dan upah buruh tidak naik selama 5 tahun. Karena timbulnya depresi di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1957 — 1958, harga barang export kita turun. Juga sebagai akibat dinasionalisasinya perusahaan milik Belanda sehubungan dengan perjuangan merebut kembali Irian pada bulan Desember 1958, pelaksanaan RPLT tertunda. Faktor lain yang menghambat pelaksanaan RPLT adalah timbulnya ketegangan antara Pusat dan Daerah. Adanya barter gelap menimbulkan tendens yang berbahaya bagi pemasukan uang dan pendapatan negara.

C. KEAMANAN DALAM NEGERI DAN POLITIK LUAR NEGERI

1. *Menanggulangi Keamanan Dalam Negeri*

Kabinet RIS di bawah pimpinan Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta menghadapi rongrongan bukan saja yang bersifat politis, tetapi juga bersifat militer. Tentu saja hal ini mengancam keamanan dan integritas nasional. Gejala ini sudah terlihat sejak pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Pembentukan APRIS sebagai salah satu Keputusan KMB dengan TNI sebagai intinya dengan penambahan unsur-unsur dari KNIL, menimbulkan masalah psikologis yang menegangkan. Di satu pihak banyak anggota TNI berkeberatan untuk bekerjasama dengan bekas musuhnya, yaitu bekas anggota KNIL yang menjadi APRIS. Sebaliknya banyak bekas anggota KNIL tidak menyesuaikan diri dengan situasi baru, bahkan ada yang menuntut status sebagai tentara atau alat

negara dari suatu negara bagian.

Di Jawa Barat pada bulan Januari 1950 di kalangan KNIL timbul gerakan yang bernama "Angkatan Perang Ratu Adil" (APRA) yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini mengajukan "ultimatum" kepada Pemerintah RIS dan negara Pasundan, supaya APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya negara itu.

Pada tanggal 23 Januari 1950, di Bandung terjadi teror yang dilakukan oleh APRA. Dengan kekuatan 800 orang dan dilindungi dengan kendaraan tempur, pasukan APRA secara mendadak menyerbu kota Bandung dari arah Cimahi. Mereka menembak setiap anggota TNI yang mereka jumpai dan menduduki markas staf Divisi Siliwangi. Di pihak TNI gugur 79 orang termasuk Letnan Kolonel Lembong. Pada hari itu juga Kepala Staf Divisi Siliwangi Letnan Kolonel Dr. Eri Sudewo menemui Panglima Divisi C Tentara Belanda Mayor Jenderal Engels untuk menuntut konsinyasi bagi anggota-anggota tentara Belanda maupun KNIL. Kemudian Jenderal Engels mengkonsinyasi pasukannya dan memaksa APRA untuk meninggalkan Bandung. Untuk menjaga keamanan kota Bandung, didatangkan kesatuan-kesatuan Polisi dan Polisi Militer dari luar Bandung. Operasi penumpasan segera dilaksanakan di Bandung. Sisa-sisa pasukan APRA berhasil ditumpas di luar kota; juga dilakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh negara Pasundan yang diduga terlibat dalam petualangan itu. Ternyata "otak dan dalang" gerakan APRA ini berada di Jakarta, yakni Sultan Hamid II. Rencana gerakannya di Jakarta ialah menangkap atau membunuh beberapa menteri, antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX yang menghadiri sidang Kabinet. Rencana jahat ini berhasil diketahui dan diambil tindakan preventif. Sidang kabinet ditunda. Sultan Hamid ditangkap pada tanggal 4 April 1950, tetapi Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri.

Rongrongan selanjutnya yang dialami oleh RIS adalah petualangan Kapten Andi Azis seorang komandan kompi APRIS bekas KNIL di Makasar (Ujungpandang), mereka menolak kedatangan pasukan-pasukan TNI ke Sulawesi Selatan. Pada saat itu keadaan di Makasar sendiri tidak tenang. Seringkali dilanda demonstrasi-demonstrasi dari golongan yang anti negara federal maupun golongan pendukung negara federal. Untuk menjaga keamanan didatangkan satu batalyon TNI di bawah pimpinan Mayor H.V. Worang. Berita kedatangan pasukan ini menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pasukan Kapten Andi Azis. Pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Azis melakukan gerakan dengan menduduki obyek-obyek vital, seperti lapangan terbang dan kantor telekomunikasi, menyerang pos-pos Polisi Militer dan menawan pejabat Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel A.Y. Mokoginta.

Karena tindakan Andi Azis itu Pemerintah bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum, bahwa dalam waktu 4X24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawab-

kan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan dan semua tawanan dilepaskan. Andi Azis terlambat melapor ke Jakarta, ditangkap dan diadili. Sementara itu batalyon Worang mendarat di Jeneponto. Pada tanggal 21 April batalyon ini bergerak ke Makasar tanpa perlawanan yang berarti. Kedatangan pasukan Worang disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan 2 brigade dan 1 batalyon (antara lain Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, sekarang Presiden Republik Indonesia). Pemberontakan Andi Azis itu ternyata kemudian dilanjutkan oleh pasukan-pasukan KL dan KNIL yang ada di Ujungpandang. Tetapi akhirnya pasukan-pasukan Belanda itu terjepit dan minta berunding. Akhirnya mereka bersedia pergi dari Ujungpandang dengan meninggalkan senjata mereka.

Cobaan terakhir yang dihadapi oleh RIS dari gerakan yang didalangi oleh sisa-sisa kekuatan kolonialis, adalah pemberontakan separatis di Maluku. Pada tanggal 25 April 1950 di Ambon di permaklumkan berdirinya "Republik Maluku Selatan" (RMS) yang dilakukan oleh Mr.Dr.Ch.R.S. Soumokil bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Soumokil sebenarnya telah terlibat di dalam petualangan Andi Azis; setelah gagal gerakan itu ia melarikan diri ke Maluku Tengah dengan Ambon sebagai pusatnya. Mula-mula pemerintah RIS bermaksud menyelesaikan peristiwa ini secara damai. Pemerintah mengutus misi dr. Leimena dengan maksud untuk mengajak berunding. Misi Leimena tidak berhasil, karena "RMS" menolak untuk berunding. Mereka merasa dirinya telah mampu menghadapi kekuatan RIS.

Pemerintah bertindak tegas. Sebuah pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang dikirimkan ke sana. Pasukan APRIS pertama kali mendarat di pulau Buru pada tanggal 14 Juli 1950. Setelah Buru dikuasai, pasukan melakukan pendaratan berikutnya di Piru pulau Seram. Dengan dikuasainya kedua pulau itu tertutuplah jalan lari RMS ke sebelah barat. Dengan terlebih dulu menduduki pulau-pulau Tanimbar, Kei dan Aru, maka pusat kekuatan "RMS" di Ambon semakin terkepung. Pada tanggal 28 September 1950 pasukan ekspedisi mendarat di Ambon, kemudian bagian utara pulau itu berhasil dikuasai.

Setelah kota Ambon jatuh, pertahanan pokok "RMS" berhasil dipatahkan. Dalam penumpasan RMS ini telah gugur Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah. Tokoh-tokoh pemberontak beserta pasukannya melarikan diri ke pedalaman pulau Seram, di mana mereka melakukan aksi gerilya selama beberapa tahun.

Gangguan keamanan lainnya pada masa RIS ini datang dari grombolan "DI/TII" yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat. Persoalan "DI/TII" ini merupakan masalah politik dan militer, yang ditimbulkan oleh golongan ekstrim yang ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan membentuk negara Islam. Soal "DI/TII" timbul sebagai akibat

persetujuan Renville; Sesuai dengan persetujuan itu, semua pasukan TNI yang berada di kantong-kantong gerilya harus hijrah, tetapi Kartosuwiryo menolak untuk hijrah karena ia tidak mengakui lagi Republik Indonesia. Ia menganggap seluruh Jawa Barat sebagai daerah kekuasaannya. Dan pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya "Negara Islam Indonesia" (NII).

Operasi militer terhadap DI di Jawa Barat resminya dimulai pada tanggal 27 Agustus 1949, tetapi akibat campurtangan golongan politik tertentu dan kekuatan kolonialis, pelaksanaannya tidak berjalan lancar. Dalam operasi melawan "DI/TII", dipergunakan taktik pagar betis yang dilaksanakan oleh rakyat yang dalam jumlah ratusan ribu mengepung gunung tempat grombolan bersembunyi. Taktik ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak mereka. Basis-basis mereka dikepung, garis perbekalannya dipotong. Di samping itu dilaksanakan pula operasi tempur yang sasarannya langsung menuju basis mereka. Untuk itu dilancarkan operasi Baratayudha. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di gunung Geber di daerah Majalaya oleh pasukan Siliwangi.

Gerakan "DI/TII" di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah di utara dan Kyai Sumolangu di selatan, berhasil dihancurkan pada tahun 1957 oleh operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan "DI/TII" itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalyon 426 yang menggabung pada mereka, tapi akhirnya tidak dapat bertahan.

Soal otonomi daerah, pertentangan antar-golongan, tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi daerah, merupakan sumbu pembakar yang menjadi sebab meletusnya pemberontakan "DI/TII" daerah Aceh. Walaupun latarbelakangnya berbeda dengan Jawa Barat, namun gerakan di Aceh menyesuaikan diri dengan langkah Kartosuwiryo. Gerakan ini dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh. Selama Perang Kemerdekaan ia menjadi Gubernur Militer. Ketika Pemerintah membentuk provinsi Sumatra Utara dan Aceh dijadikan satu karesidenan dalam provinsi itu, Daud Beureueh memperlihatkan rasa tidak puasnya. Karena ia adalah seorang tokoh dalam PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) dan bekas Gubernur Militer, tidak sulit baginya untuk mencari pengikut. Selama hampir tiga tahun ia dan kawan-kawannya mempersiapkan diri dan pada tanggal 20 September 1953 ia memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari "Negara Islam Indonesia" Kartosuwiryo. Pemberontakan "DI/TII" di Aceh diselesaikan dengan kombinasi operasi-operasi militer dan musyawarah. Musyawarah ini dapat dukungan dari tokoh-tokoh daerah dan dilangsungkan pada tanggal 17 — 28 Desember 1962. Hasil nyata dari musyawarah ini ialah pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh.

Bentuk yang lain dari "DI/TII" Kartosuwiryo ialah gerakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Selama Perang Kemerdekaan, mula-mula

Kahar berjuang di Sulawesi Selatan, kemudian menyeberang ke Jawa di mana ia berjuang dalam lingkungan Brigade 16 TNI. Sesudah Pengakuan Kedaulatan ia mendapat tugas dari Pemerintah ke daerah asalnya (Sulawesi Selatan) untuk menyelesaikan masalah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dibentuk waktu Perang Kemerdekaan. Pemerintah membubarkan kesatuan ini dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Kahar menentang keputusan itu dan menuntut agar KGSS dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya sendiri. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka tidak memenuhi syarat untuk dinas militer, dan Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Sebagian Anggota gerilyawan setuju dan pada tanggal 24 Maret 1951 beberapa batalyon CTN secara resmi dilantik, tetapi Kahar sendiri tidak mau menyetujui kebijaksanaan itu.

Pendekatan-pendekatan yang diadakan sesudah itu kelihatannya akan membawa hasil, ketika Kahar menyatakan bersedia dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima TT VII. Tetapi pada saat pelantikan akan dilakukan Kahar Muzakar dengan para pengikutnya melarikan diri ke hutan dan sejak itu mengadakan pengacauan. Pada tanggal 7 Agustus 1953 ia mengubah nama pasukannya menjadi "Tentara Islam Indonesia" sebagai bagian dari "DI" Kartosuwaryo. Untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakar, dilancarkan serangkaian operasi militer. Ruang gerak gerombolan semakin sempit dan dalam bulan Agustus 1964 didapat informasi bahwa Kahar berada di daerah pegunungan di Sulawesi Tenggara yang medannya sangat berat. Pencarian diintensifkan dan dalam penggerebekan pada tanggal 3 Februari 1965 oleh pasukan TNI, Kahar tertembak mati. Dengan tewasnya Kahar Muzakar, maka berakhirlah gangguan keamanan di Sulawesi Selatan.

Masalah keamanan dalam negeri yang terakhir dan terberat dalam jaman Demokrasi Liberal adalah pemberontakan PRRI-Permesta yang didahului oleh pembentukan dewan-dewan di beberapa daerah. Untuk menumpas pemberontakan ini dilaksanakan operasi gabungan terdiri dari unsur-unsur darat, laut, udara, dan kepolisian. Perlu diketahui bahwa dalam daerah-daerah yang bergolak itu terdapat juga kekuatan-kekuatan yang memihak Pusat dan menentang kegiatan separatisme yang dilakukan oleh dewan-dewan tersebut. Tenaga-tenaga penentang dalam Dewan Banteng ialah pertama kelompok yang dipimpin oleh Komisariss Besar Polisi Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa. Kelompok lain ialah yang dipimpin oleh Mayor Nurmathias, Komandan Batalyon 140. Di Sumatra Timur tokoh Dewan Gajah ex-Kolonel Simbolon ditentang oleh Letnan Kolonel Djamin Gintings dan lain-lain, di Sumatra Selatan Letnan Kolonel Barlian ditentang oleh Letnan Kolonel Harun Sohar. Permestapun mempunyai lawan-lawan dalam daerahnya, yakni Kapten Frans Karang, Inspektur Polisi Suaeb dan Residen Nani Wartabone. Dengan adanya kekuatan-kekuatan ini, maka pasukan-pasukan Pemerintah telah mempunyai pancangan kaki yang mem-

permudah operasi yang dilancarkan. Secara berturut-turut kaum pemberontak PRRI dipatahkan kekuatannya di Riau, di Sumatra Utara, di Sumatra Barat, Sumatra Selatan. Kemudian menyusul pemberontak Permesta di Sulawesi Tengah, di Maluku Utara dan akhirnya di Sulawesi Utara. Pada pertengahan tahun 1958 kekuatan PRRI-Permesta telah lumpuh. Dan pada tahun 1961 sisa-sisa pemberontak semuanya telah menyerahkan diri.

2. Menguji Politik Luar Negeri Yang Bebas-aktif

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan antara lain "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Rumusan ini mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia di dalam menggalang hubungan internasional, yang dalam praktek menjadi sumber utama bagi politik luar negeri RI. Sejak bangsa Indonesia berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan, cita-cita bangsa Indonesia tidak terbatas kepada mencapai kemerdekaan, melainkan juga untuk mencapai susunan kehidupan yang adil dan makmur.

Tujuan pokok politik luar negeri Indonesia antara lain adalah:

- mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga kedaulatan negara
- perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun untuk kesejahteraan rakyat
- persaudaraan antara semua bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila.

Untuk mencapai tujuan itu Republik Indonesia melaksanakan politik luar negeri dengan cara:

- politik damai, ikut serta membina perdamaian dunia
- bersahabat dengan semua bangsa atas dasar saling menghargai dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing
- memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menyusun perdamaian yang abadi
- berusaha melalui PBB untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang masih belum merdeka.

Konfigurasi politik sesudah Perang Dunia II ditandai oleh munculnya dua kekuatan raksasa (*superpowers*) yaitu Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Kedua kekuatan itu masing-masing mempunyai ideologi dan sistem pemerintahan yang berbeda. Keduanya saling berlomba dalam menyusun dan mengembangkan kekuatan secara ideologis, politis dan militer termasuk pengembangan senjata nuklir. Masing-masing pihak ingin menarik sebanyak-banyaknya negara masuk ke dalam blok-nya.

Dalam menghadapi kekuatan raksasa ini Republik Indonesia bukan menganut politik luar negeri netral, karena menolak mengkaitkan diri

dengan salahsatu kekuatan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas-aktif. Bebas artinya bahwa Indonesia menempuh cara sendiri dalam menanggapi masalah-masalah internasional. Sedang aktif berarti Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dan meredakan ketegangan dunia. Contoh konkrit yang dilakukan oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara Asia-Afrika adalah antara lain menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 di Indonesia, Konferensi Non-Alignment (Non Blok) dan misi-misi perdamaian dalam bentuk kontingen Garuda untuk PBB.

Kita merintis hubungan luar negeri sejak masa Perang Kemerdekaan terutama dengan negara-negara Asia-Arab dalam rangka usaha mencari pengakuan terhadap kemerdekaan kita. Secara formil hubungan bilateral RI — Belanda diselenggarakan sejak diadakannya perundingan-perundingan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua pihak. Hubungan itu berkembang sesudah Perserikatan Bangsa-bangsa ikut campur, terutama dengan kegiatan Amerika Serikat, Australia dan Belgia yang tergabung di dalam Komisi Tiga Negara (KTN). Pada bulan Januari 1949 di New Delhi atas inisiatif Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru diselenggarakan Konferensi Hubungan Antar Bangsa-bangsa Asia (Inter-Asian Relations Conference). Konferensi ini dihadiri wakil-wakil negara: Afganistan, Australia, Birma, Sri Langka, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Suriah dan Yaman sebagai peserta, dan negara-negara Cina, Nepal, Selandia Baru dan Muang Thai sebagai peninjau. Hal ini merupakan petunjuk mulai tumbuhnya hubungan internasional RI.

Sesudah Pengakuan Kedaulatan, hubungan internasional dengan prinsip bebas-aktif semakin berkembang. Pada masa RIS dikembangkan hubungan dengan negara-negara Asia dan negara-negara Barat, karena untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan Indonesia masih berkiblat ke Eropa, pasaran hasil bumi Indonesia masih berpusat di Nederland. Sedangkan untuk membangun pasaran ekonomi, masih diperlukan bantuan Amerika Serikat. Hubungan dengan negara-negara Barat diteruskan oleh Kabinet Natsir (1950-1951), sedangkan Kabinet Sukiman (1951-1952) melakukan kebijaksanaan yang menyimpang dari politik yang bebas-aktif. Pada bulan Januari 1952, Menteri Luarnegeri Ahmad Subardjo mengadakan pertukaran nota dengan Dutabesar Amerika Serikat Merle Cochran (bekas anggota komisi PBB untuk Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan), dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan teknik, ekonomi dan militer dari Amerika Serikat di dalam ikatan *Mutual Security Act* (MSA). Langkah yang ditempuh oleh Menteri Luarnegeri itu mengundang reaksi dari semua pihak, sekalipun langkah itu masih dalam tingkat saling menukar nota. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) mengajukan interpelasi (pertanyaan) atas kebijaksanaan politik luar negeri Pemerintah, khususnya yang menyangkut masalah ikatan MSA. Pemerintah dianggap telah meninggal-

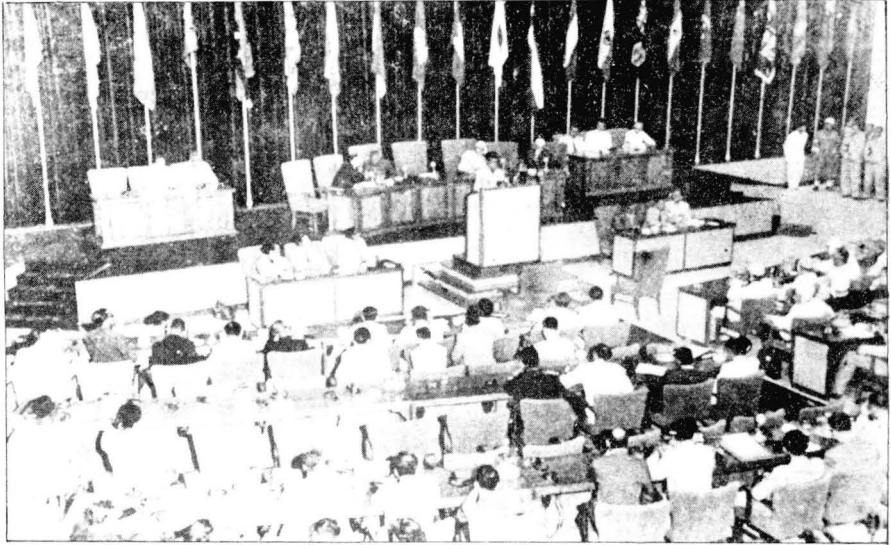
kan prinsip bebas-aktif, dan memasukkan Indonesia ke dalam *periferi* (pinggiran) sistem pertahanan Barat. Akibatnya Kabinet Sukiman jatuh dan digantikan oleh Kabinet Wilopo (1952-1953). Dasar hubungan dengan Amerika Serikat diteruskan sesuai dengan sopan-santun hubungan internasional. "Nota" Subardjo — Cochran diubah dalam bentuk lain yang tidak menyimpang dari batas kerjasama antar-bangsa, yakni terbatas pada bantuan ekonomi dan teknik. Bagi Pemerintah selanjutnya peristiwa itu merupakan batas "kanan" pelaksanaan politik bebas-aktif demi kepentingan nasional.

Pada Kabinet Ali Sastroamidjyo I (1953-1955) pelaksanaan politik bebas-aktif lebih mendekatkan diri pada negara-negara Asia-Afrika dan blok sosialis. Ali telah merintis ofensif diplomatik bebas-aktif yang diwujudkan dengan menggalang solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika. Ofensif ini bertujuan untuk menghapuskan kolonialisme dan meredakan ketegangan dunia yang ditimbulkan karena ancaman perang nuklir oleh konfrontasi superpowers. Pada tanggal 18-24 April 1955, Indonesia beserta India, Pakistan, Birma dan Sri Langka mengundang negara-negara Asia-Afrika untuk menghadiri Konferensi Asia — Afrika di Bandung. Negara-negara yang diundang adalah India, Pakistan, Birma, Sri Langka, Afganistan, Kamboja, Republik Rakyat Cina, Mesir, Ethiopia, Pantai Emas, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Libanon, Liberia, Libia, Nepal, Filipina, Suriah, Saudi Arabia, Sudan, Muangthai, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan dan Yaman. Konferensi ini bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika merupakan puncak daripada penggalangan solidaritas dikalangannya untuk memberikan dukungan yang lebih tegas terhadap perjuangan kemerdekaan. Konferensi ini membicarakan pelbagai masalah mengenai kepentingan bersama Asia-Afrika, kolonialisme dan perdamaian dunia serta kerjasama yang meliputi bidang-bidang ekonomi dan budaya. Konferensi juga memandang perlu mengadakan perluasan perdagangan antar-bangsa Asia-Afrika, menganjurkan agar para peserta mempergunakan sebaik-baiknya organisasi-organisasi internasional yang ada untuk memajukan ekonomi. Juga konferensi Asia-Afrika mendukung sepenuhnya prinsip-prinsip dasar hak-hak manusia sebagaimana yang tercantum di dalam piagam PBB. Konferensi mendukung sepenuhnya prinsip untuk menentukan nasib sendiri, yang merupakan syarat utama untuk dapat menikmati hak-hak dasar manusia. Konferensi mengutuk kepada politik diskriminasi rasial yang dilakukan oleh beberapa resim kulit putih di Afrika dan lain-lain negara.

Dalam membicarakan bangsa-bangsa Asia-Afrika yang belum merdeka, konferensi menyetujui untuk mengutuk kolonialisme dalam segala bentuknya; kolonialisme adalah kejahatan yang harus segera diakhiri. Bangsa-bangsa Asia-Afrika membantu perjuangan bangsa-bangsa yang belum merdeka, dan menyerukan kepada negara-negara penjajah agar segera memberi kemerdekaan kepada tanah jajahannya.

Dokumen utama yang dihasilkan oleh Konferensi Asia-Afrika adalah

pernyataan tentang usaha memajukan perdamaian dan kerjasama di dunia, dengan jalan menghormati integritas teritorial dan tidak melakukan intervensi ke dalam soal-soal dalam negeri masing-masing negara. Dokumen ini berisi 10 fasal, dan karenanya dikenal dengan nama *Dasasila Bandung*.



Salah satu adegan Konferensi Asia-Afrika di mana wakil Indonesia sedang menyampaikan pidatonya

Konferensi Asia-Afrika merupakan puncak daripada usaha politik luar-negeri yang bebas-aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Bagi Indonesia, Konferensi Asia-Afrika ini memberi dukungan utama bagi pembebasan wilayah Irian yang masih diduduki oleh Belanda. Sesudah Pemilihan Umum, ofensif diplomasi bebas-aktif ke negara-negara blok sosialis dan barat dilaksanakan oleh Presiden Sukarno. Namun pernyataan bersama (joint statement) RI-Uni Sovyet di Moskwa tanggal 11 September 1956 mengenai perlucutan senjata, pakta militer dan lain-lain, juga mengundang reaksi dari pelbagai pihak. Dianggap bahwa pernyataan bersama itu telah melampaui batas "kiri" dari prinsip politik bebas-aktif.

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

A. PERCOBAAN SISTEM TERPIMPIN

1. *Kembali Secara Tidak Murni ke UUD-45*

Gagalnya Konstituante untuk membuat undang-undang dasar baru menyebabkan Negara kita dilanda kekalutan konstitusional. Terdapat terlalu banyak partai politik yang dirasakan terus-menerus merusak persatuan nasional dan stabilitas nasional, ditambah dengan timbulnya gerakan separatis di daerah-daerah pada awal tahun 1958, yang mengancam integritas nasional itu sendiri. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu itu pada bulan Februari 1957 Presiden Sukarno mengajukan gagasan yang disebut Konsepsi Presiden mengenai:

- a. dibentuknya Kabinet Gotong-royong yang terdiri dari wakil-wakil semua partai termasuk PKI ditambah dengan golongan fungsional (golongan karya)
- b. dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil semua partai dan golongan fungsional dalam masyarakat.

Beberapa partai yakni Masyumi, NU, PSII, Katholik dan Partai Rakyat Indonesia menolak Konsepsi Presiden tersebut. Mereka berpendapat bahwa hak mengubah tatanegara secara radikal ada pada Konstituante. Lagi pula secara prinsipil mereka berkeberatan mengikutsertakan PKI dalam pemerintahan, karena tujuan komunis di seluruh dunia adalah menggulingkan pemerintah yang tidak mereka kuasai. Dan menurut kenyataannya PKI-pula sudah pernah mencoba menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemberontakan Madiun.

Masalah Konsepsi Presiden untuk sementara waktu menjadi beku, karena perhatian masyarakat tertuju kepada usaha menumpas pemberontakan separatis PRRI-Permesta. Sesudah pemberontakan berhasil dipadamkan pada tanggal 22 April 1959, di hadapan sidang Konstituante, Presiden Sukarno menganjurkan supaya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menentukan sikap terhadap anjuran Presiden itu, Konstituante mengadakan pemungutan suara 3 kali. Hasilnya adalah lebih banyak suara setuju daripada yang menolak kembali ke UUD 1945. Namun jumlah suara masih kurang untuk mencapai suatu keputusan, sehingga situasi tetap terkatung-katung. Nyatalah sekarang bahwa partai-partai politik di dalam wadah Konstituante selama tiga tahun telah berdebat tidak menentu tanpa hasil apapun, gagal merumuskan sebuah Undang-Undang Dasar yang dipercayakan oleh Rakyat kepadanya. Konstituante juga tidak mampu memberi kata putus terhadap anjuran Presiden untuk kembali ke UUD-45. Maka terdapat kesan bahwa partai-partai politik tidak mampu

Sampai pertengahan tahun 1960 telah selesai disusun lembaga-lembaga negara, baik yang tercantum di dalam UUD-45 maupun yang tidak. Lembaga-lembaga itu adalah MPR(S), DPA, DPR-GR dan Front Nasional. Semua keanggotaan lembaga itu disusun dengan komposisi "gotong-royong", sebagai pengejawantahan Demokrasi Terpimpin. Sementara itu TNI dan Polisi yang pada tahun 1964 dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mulai memainkan kembali peranan sosial-politiknya seperti selama jaman Perang Kemerdekaan. TNI dan Polisi diakui sebagai salahsatu golongan fungsional (karya) yang berdasarkan ketentuan dalam UUD-45 mempunyai wakil dalam MPR(S).

Pada masa ini Presiden Sukarno tidak saja melakukan politik imbalan kekuatan (balance of power) antara angkatan yang satu dengan angkatan yang lain, melainkan juga antara ABRI dengan partai-partai politik. Dengan semboyan "politik adalah panglima" yang dilancarkan oleh PKI, maka usaha untuk memperpolitikkan ABRI semakin jelas. Presiden mengambil-alih secara langsung pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata, dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi (Koti). Masing-masing angkatan berdiri sendiri di bawah seorang Menteri/Panglima yang masing-masing langsung berada di bawah Presiden/Panglima Tertinggi. Masing-masing angkatan didorong untuk persaingan satu-sama lain dalam "kompetisi manipolis" atau suasana "jor-joran" (unggul mengungguli).

Kegiatan politik dalam masa Demokrasi Terpimpin ini didominasi oleh PKI. Garis politik PKI dapat kita ikuti sejak pemberontakan PKI di Madiun 1948, yang tujuan akhirnya adalah perebutan kekuasaan Negara. Dalam usaha mencapai tujuan politiknya, PKI menjalankan tindakan-tindakan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1). Dalam Negeri: berusaha keras untuk memecah-belah atau menyusupi tubuh partai atau organisasi massa atau badan-badan lainnya dari pihak yang dianggap lawan. Di bidang pendidikan berusaha memasukkan Marxisme sebagai salah satu matapelajaran wajib. Di bidang militer berusaha untuk mengindoktrinasi perwira-perwira dengan ajaran komunisme dan membina sel-sel di kalangan ABRI.

(2). Luar Negeri: berusaha untuk membelokkan politik luar negeri yang bebas-aktif menjadi politik yang condong ke blok komunis.

Landasan dari semua gerakan PKI adalah Manipol yang menyatakan, bahwa rakyat Indonesia sedang menyelesaikan revolusinya atau lebih populer: "revolusi belum selesai". Dengan dalih ini PKI mengajak rakyat untuk "menyelesaikan revolusi" menurut tahapan-tahapan yang telah ditentukannya. Yakni tahap "nasional-demokratis" dan tahap "sosialistis". Selanjutnya untuk mengaburkan kenyataan bahwa PKI bersifat internasionalis dan anti-agama, PKI mengakui menganut Manipol (yang dikatakan sudah mencakup Pancasila), dengan dalih bahwa Manipol adalah satu-satunya doktrin Revolusi Indonesia yang harus dipegang teguh. Apalagi dengan adanya anjuran Presiden Sukarno supaya jangan berkomunifobi,

maka amanlah PKI dari serangan. Pada awal tahun 1964, diketemukan dokumen mengenai rencana perjuangan PKI yang mengandung pula rencana merebut kekuasaan. PKI menyatakan bahwa dokumen itu palsu. Tetapi karena sikap Presiden Sukarno yang melindungi PKI yang dominasinya sudah hampir mutlak pada panggung politik dewasa itu, partai-partai dan ABRI tidak dapat bertindak mengusut rencana PKI itu secara terang-terangan. Adanya heboh karena ucapan Aidit di depan Kader Revolusi pada tanggal 16 Oktober 1964 bahwa "Pancasila hanya merupakan alat pemersatu, dan kalau kita sudah bersatu, Pancasila tidak perlu lagi", dapat diredakan karena Presiden Sukarno tidak mengambil tindakan. Dengan perlindungan Presiden Sukarno, PKI dan ormasnya dapat dengan aman melakukan intimidasi dan teror politik terhadap pihak-pihak dan tokoh-tokoh yang dianggapnya lawan dengan mengatakan siapa saja yang menentang Nasakom apalagi anti-PKI, adalah "kontra-revolusioner" dan anti Bung Karno.

Dengan adanya perlindungan resmi dari Presiden Sukarno, ormas PKI meningkatkan aksi-aksinya dengan aksi sepihak. Ormas PKI Barisan Tani Indonesia (BTI) di beberapa tempat mengacaukan pelaksanaan landreform. Terjadilah peristiwa Boyolali dan Bandar Betsy di mana buruh-tani dihasut untuk merampas tanah milik orang lain. Kedua peristiwa ini merupakan ujian untuk mengukur kekuatannya dalam menghadapi ABRI. Front Nasional juga mereka gunakan untuk melancarkan aksi-aksinya. Sebagai reaksi atas teror PKI di bidang budaya dan pers, suatu kelompok budayawan mengajukan suatu "Manifes Kebudayaan" dan suatu kelompok wartawan dan penerbit surat kabar membentuk Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). Kedua kelompok itu dengan caranya sendiri bermaksud memecahkan belenggu absolutisme PKI yang mengekang kegiatan kreatif mereka.

Mengenai Manifes Kebudayaan, yang ditentang PKI sebenarnya adalah terselenggaranya Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI) yang berhasil membentuk organisasi pengarang dengan nama Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI) yang dapat menghambat usaha mereka untuk menguasai bidang budaya. Oleh Presiden Sukarno, Manifes Kebudayaan dan BPS kemudian dilarang setelah dikeluarkan tuduhan "dibiayai oleh CIA" (badan intelijen Amerika Serikat). Dua instansi sebagai alat komunikasi massa yang vital yaitu Kantor Berita Antara dan Radio Republik Indonesia (RRI) juga mereka kuasai. Di antara parpol-parpol yang ada, masih ada satu yang mengadakan perlawanan aktif terhadap PKI, yakni Partai Murba. Akhirnya PKI berhasil mempengaruhi Presiden Sukarno sehingga pada bulan September 1964 Murba dibubarkan.

Terhadap ABRI dilakukan usaha untuk menguasai melalui komisaris politik Nasakom yang mendampingi panglima atau komandan pada setiap eselon. Usaha itu tidak berhasil karena keteguhan sikap pimpinan ABRI. Semboyan "Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu" yang juga dibuatkan

lagunya, dibalas dengan semboyan "Nasakom jiwa-ru" yang berarti Nasakom dianggap sudah ada pada setiap organisasi, termasuk ABRI sehingga tidak perlu lagi menempatkan tiga orang komisaris politik ke dalamnya yang berasal dari PNI, NU dan PKI. Dalam pada itu PKI juga tetap melakukan penyusupan ke dalam organisasi-organisasi dan partai-partai lain. Kasus yang paling terkenal adalah kasus PNI, yang disusupi sedemikian rupa sehingga menyebabkan PNI pecah menjadi dua. Separoh yang terbesar di bawah Ali Sastroamidjoyo, diselundupi tokoh PKI Ir. Surachman, sehingga haluannya sejajar dengan PKI. Sedangkan tokoh-tokoh Marhaenis sejati malah dikeluarkan dengan dalih "Marhaenis gadungan". Mereka ini kemudian membentuk pengurus besar baru PNI di bawah pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranuwijaya. Dengan demikian terdapatlah PNI Osa-Usep dan PNI Asu.

Sekarang satu-satunya kekuatan sosial-politik yang terorganisasi, yang mampu menghalang-halangi PKI dalam usahanya merobohkan Pancasila adalah TNI. Karena itulah PKI memusatkan perhatiannya kepada usaha untuk menguasai TNI dengan cara menanam sel-sel serta membina simpatisan-simpatisan dan dengan menjelek-jelekkan nama serta memfitnah pemimpin-pemimpin TNI yang gigih membela Pancasila. Di daerah-daerah, terutama yang banyak kader PKI-nya, mereka melancarkan aksi-aksi sepihak dalam rangka landreform. Anggota PKI atau Barisan Tani Indonesia (BTI) sebagai ormas PKI diperintahkan begitu saja mengambil tanah orang lain untuk kemudian dibagi-bagikan kepada buruh-tani. Tindakan ini oleh PKI dimaksudkan untuk menguji tekad TNI dan Polisi. Di daerah-daerah seringkali terjadi pengeroyokan terhadap petugas-petugas TNI dan Polisi, sebagaimana yang terjadi di Bandar Betsy (Sumatra Timur), Boyolali (Jawa Tengah) dan Jengkol (Jawa Timur). Ternyata TNI dan Polisi tidak mundur meskipun telah jatuh korban-korban dari kalangan anggotanya seperti Peltu Sudjono.

Pada suatu ketika ada saran dari RRC kepada Presiden Sukarno agar dibentuk Angkatan ke-5 di samping Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polisi. Tujuannya adalah untuk memberikan kekuatan kepada PKI yang berupa sukarelawan Dwikora yang sudah dikerahkan. Tapi usaha ini juga menemui kegagalan. Pada akhirnya PKI melakukan kampanye untuk pembentukan kabinet Nasakom, yang baru mencapai hasil sedikit dengan masuknya pemimpin-pemimpin utama PKI sebagai menteri-menteri tanpa portofolio, seperti D.N. Aidit, M.H. Lukman dan Nyoto.

B. MENYELEWENG DARI CITA-CITA 1945

1. *Sistem Ekonomi Terpimpin*

Sampai saat didekritkan berlakunya kembali UUD-45, keadaan ekonomi dan keuangan Pemerintah sangat suram, akibat pecahnya pemberontakan PRRI-Permesta. Tindakan pertama yang dilakukan oleh

Pemerintah adalah melaksanakan serangkaian tindakan di bidang ekonomi dan keuangan. Pada tanggal 24 Agustus 1959 uang kertas yang mempunyai nilai nominal Rp. 500,— di-devaluasi menjadi Rp. 50,— dan yang bernilai Rp. 1.000,— dihapuskan. Semua simpanan dalam bank yang melebihi Rp. 25.000,— dibekukan. Usaha Pemerintah ini tidak dapat menghentikan kemerosotan ekonomi yang semakin jauh. Index biaya hidup menunjukkan perkembangan menaik, dalam tahun 1961-1962 mengalami kenaikan 70% yang berarti mengalami kenaikan 225% dari index tahun 1960.

Untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu "Deklarasi Ekonomi" atau "Dekon", beserta 14 peraturan pokoknya. Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia yang menjadi bagian daripada strategi umum Revolusi Indonesia. Tujuan Dekon adalah "menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme, untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin". Konsepsi Dekon ini di dalam pelaksanaannya membawa akibat stagnasi bagi ekonomi Indonesia. Pada tanggal 26 Mei 1963 dikeluarkan 14 pokok peraturan, tetapi peraturan-peraturan itu sendiri dalam pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip-prinsip Dekon. Di dalam praktek kesulitan-kesulitan ekonomi bertambah menyolok. Pada tahun 1961-1962 harga-harga pada umumnya naik menjadi 400%. Kondisi politis, yaitu konfrontasi dengan negara-negara Barat dan Malaysia, melibatkan Indonesia ke dalam situasi perang yang mempercepat proses kemerosotan ekonomi. Di dalam melaksanakan ekonomi terpimpin ini Pemerintah lebih menonjolkan "terpimpin"-nya daripada azas-azas ekonominya. Akibatnya ialah bahwa bidang kelembagaan ekonomi semakin terjerumus ke dalam kebiasaan yang unsur terpimpinnya lebih dominan daripada unsur ekonominya yang efisien. Struktur ekonomi Indonesia mengarah kepada etatisme (segala-galanya diatur atau dipegang oleh negara). Ekonomi terpimpin ala Dekon lebih bersifat ekonomi peraturan yang menjurus menjadi ekonomi-anarchi. Pengeluaran Negara bertambah besar karena prinsip-prinsip ekonomi diabaikan. Defisit dari tahun ke tahun meningkat 40 kali dari Rp. 60,5 milyar menjadi Rp. 2.514 milyar. Sedang penerimaan negara pada tahun 1960 Rp. 53,6 milyar, hanya meningkat 17 kali pada tahun 1965 menjadi Rp. 923,4 milyar. Volume uang pada tahun 1960 Rp. 47,8 milyar pada tahun 1965 menjadi Rp. 2.775,0 milyar. Pada tahun 1966, dari bulan Januari-Agustus pengeluaran Negara menjadi Rp. 11 milyar, sedang penerimaan Negara hanya Rp. 3,5 milyar. Defisit yang berjumlah Rp. 7,5 milyar menambah volume dalam sirkulasi. Defisit yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan bahwa hal itu menambah beratnya inflasi.

Dengan melihat angka-angka di atas, ternyata Pemerintah telah hidup di luar kemampuan, karena terlalu banyak yang dilaksanakan padahal biaya tidak ada. Misalnya proyek-proyek pembangunan non-ekonomi yang bersifat

"mercusuar". Inflasi kita sudah mencapai tingkat hiper-inflasi. Pada tahun 1966 inflasi mencapai 600%. Berdasarkan Penetapan Presiden No. 8/1965 tanggal 11 Mei 1965 organisasi bank-bank Pemerintah dipusatkan ke dalam satu tangan, yaitu di tangan Menteri Urusan Bank Sentral. Bank-bank Pemerintah menjadi unit-unit daripada Bank Negara Indonesia. Tindakan ini menyebabkan timbulnya spekulasi dan penyelewengan penggunaan uang Negara karena tidak adanya kontrol.

Adapun sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpimpin yang berlandaskan Dekon adalah:

- (1). penanganan masalah ekonomi tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak ada kontrol.
- (2). tidak adanya ukuran yang obyektif di dalam menilai sesuatu usaha atau hasil orang.

Dilihat dalam keseluruhannya, gambaran ekonomi kita pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan gambaran yang paling suram di dalam sejarah Republik Indonesia. Volume uang yang meningkat akibat defisit dan arus uang yang cepat tidak membangkitkan produksi atau melancarkan arus barang. Arus barang mundur akibat kurangnya produksi dalam negeri sebagai akibat kurangnya *spareparts*. Kepentingan rakyat dikorbankan dengan dihentikannya import beras, sedang devisa digunakan untuk tujuan-tujuan politik seperti membiayai perjalanan delegasi-delegasi asing.

2. Politik Luar Negeri Nefo-Oldefo

Pada masa Demokrasi Terpimpin kebijaksanaan politik luar negeri banyak terpusat di tangan Presiden Sukarno sendiri. Politik bebas-aktif dibelokkan menjadi politik konfrontasi terhadap apa yang disebut Old Established Forces (Oldefo) bersama-sama dengan New Emerging Forces (Nefo). Nampak bahwa konsepsi Oldefo-Nefo ini adalah sejajar dengan doktrin "dua kubu" kaum komunis. Dan memang negara-negara maupun golongan-golongan yang oleh Presiden Sukarno dimasukkan ke dalam kelompok Nefo adalah kurang lebih sama dengan yang oleh blok komunis dimasukkan ke dalam kelompok komunis dan "progresif", sedangkan yang masuk Oldefo adalah kurang lebih sama dengan yang masuk blok kapitalis-imperialis — "reaksioner" Barat bersama pihak-pihak yang bersimpati kepada mereka.

Hubungan dengan pihak Barat merenggang, karena mereka bersikap pasif terhadap perjuangan pembebasan Irian. Sebaliknya hubungan dengan blok Timur semakin erat, karena Uni Sovyet bersedia memberi kredit dalam pembelian peralatan militer sehingga Indonesia dapat memperlengkapi Angkatan Perangnya secara modern. Sekalipun wilayah Irian akhirnya berhasil kita kuasai, politik konfrontasi berjalan terus. Sasarannya adalah pembentukan Federasi Malaysia yaitu penggabungan antara negara-negara bekas jajahan Inggeris di Asia Tenggara yang terdiri atas Persatuan Tanah

Melayu, Singapura, Sabah dan Serawak, yang oleh Presiden Sukarno dianggap membahayakan Indonesia dan Nefo pada umumnya. Dalam kenyataannya Malaysia sebagai negara yang rakyatnya pada umumnya serumpun dan seagama dengan Indonesia, tidak mempunyai rasa permusuhan terhadap kita. Lagi pula mereka juga tidak ingin menjadi boneka Neo-kolonialisme/Imperialisme (Nekolim) seperti yang dikatakan oleh Presiden Sukarno. Sebaliknya yang untung karena konfrontasi itu adalah Republik Rakyat Cina (RRC) yang memang tidak menyukai pemimpin-pemimpin Malaysia dan sebaliknya mendukung pemberontak Cina komunis di negara tetangga itu.

Dalam rangka konfrontasi itu pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta Presiden Sukarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), yakni:

1. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak, Brunai, untuk membubarkan negara boneka Malaysia.

Untuk melaksanakan politik konfrontasi terhadap Malaysia itu dibentuk Komando Mandala Siaga (Kolaga) di bawah pimpinan Marsekal Madya Omar Dani, Menteri/Panglima Angkatan Udara (yang kemudian terlibat di dalam pemberontakan Gestapu/PKI). Komando ini mengirimkan pasukan sukarelawan memasuki daerah Malaysia, baik di Malaysia Barat maupun Malaysia Timur (Kalimantan Utara).

Aspek lain dari pelaksanaan politik Nefo-Oldefo ini kita kenal dengan politik "mercusuar". Presiden Sukarno berpendapat bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Karena itu Indonesia harus menyelenggarakan proyek-proyek politik yang kolosal dan spektakuler, yang diharapkan dapat menempatkan kita pada kedudukan terkemuka di kalangan Nefo. Misalnya dengan menelan biaya beberapa milyar rupiah diselenggarakan *Games of the New Emerging Forces* (Ganefo) yang dimulai dengan pembangunan kompleks olahraga Senayan dan meliputi pula biaya perjalanan pelbagai delegasi asing. Ekonomi Indonesia yang sudah berantakan itu samasekali tidak mampu membiayai proyek-proyek itu dan kegiatan Pemerintah mencetak uang kertas tanpa batas dan tanpa dukungan apa-apa, menyebabkan inflasi sudah tak dapat dikendalikan lagi. Akibatnya ialah bahwa rakyat kecil tertimpa bencana karena uang dikantongnya nilainya merosot dengan pesat.

Pengiriman delegasi-delegasi besar ke pelbagai negara maupun mendatangkan delegasi-delegasi asing atas biaya kita, juga tambah merusak keuangan Negara. Demikian pula pembangunan pabrik-pabrik dilakukan tanpa perencanaan yang matang baik mengenai letak maupun pembiayaan, sehingga usaha itu macet di tengah jalan dan banyak perlengkapan menjadi besi tua. Jelas bahwa politik luarnegeri mercusuar mengorbankan kepentingan nasional, padahal politik luar negeri seharusnya mendukung kepentingan rakyat, mendukung pembangunan nasional untuk masadepan kita semuanya.

C. PERJUANGAN DAN PENGKHIANATAN

1. Perjuangan Membebaskan Irian

Usaha membebaskan Irian atau Irian Jaya (dulu bernama Irian Barat) melalui jalan diplomasi telah dimulai sejak kabinet pertama dalam Negara Republik Indonesia Kesatuan 1950 dan secara terus-menerus telah dijadikan program oleh setiap kabinet. Tetapi usaha itu telah mengalami kegagalan sebagai akibat daripada sikap Belanda yang berkeras kepala hendak tetap menguasai wilayah Irian, bahkan pada bulan Agustus 1952 Pemerintah Belanda dengan persetujuan parlemennya secara sepihak memasukkan Irian ke dalam wilayah Kerajaan Belanda. Pihak Indonesia membalas tindakan Belanda itu pada bulan April 1953 dengan menghapuskan Misi Militer Belanda.

Setelah usaha-usaha diplomasi secara bilateral tidak berhasil, maka kabinet Ali Sastroamidjoyo I membawa masalah Irian ke forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Namun usaha inipun tidak membawa hasil. Kabinet Burhanuddin Harahap meneruskan usaha kabinet yang digantinya, melalui Sidang Majelis Umum PBB. Pihak Belanda menanggapi dengan pernyataan bahwa masalah Irian adalah masalah bilateral antara Indonesia — Belanda dan mengajukan usul-balas yaitu penempatan Irian di bawah Uni Indonesia — Belanda, suatu hal yang tidak dapat diterima oleh Indonesia. Sesudah pemilihan umum 1955, Kabinet Ali Sastroamidjoyo II membatalkan seluruh Persetujuan KMB. Setelah pembatalan KMB itu, tepat pada hari ulang tahun kemerdekaan RI ke XI (17 Agustus 1956) diresmikan pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soasiu. Sultan Tidore Zainal Abidin Syah diangkat menjadi gubernur yang pertama. Karena jalan diplomasi yang ditempuh telah gagal, pihak Indonesia mengalihkan perjuangannya ke jalan konfrontasi. Konfrontasi untuk membebaskan Irian ini lain sifatnya dengan konfrontasi terhadap Malaysia, yang dilancarkan empat tahun kemudian mulai 1964. Konfrontasi untuk pembebasan Irian dengan sepenuh hati didukung oleh seluruh rakyat dan adalah sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 serta jelas untuk kepentingan nasional, berlainan dengan konfrontasi Dwikora. Sebagai persiapan untuk melaksanakan konfrontasi pada tahun 1957 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Aksi-aksi pembebasan dilancarkan di seluruh tanahair. Pada bulan Desember 1958 semua perusahaan milik Belanda sejumlah 700 perusahaan, dinasionalisasi. Puncak daripada konfrontasi adalah pemutusan hubungan diplomatik RI — Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Sidang Majelis Umum pada tahun 1961 PBB kembali memperdebatkan masalah Irian. Sekretaris Jenderal PBB U Thant meminta kepada seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk membantu dengan jalan mengajukan usul penyelesaian masalah Irian kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Pokok-pokok usul Bunker adalah agar Belanda menyerahkan Irian kepada RI dengan perantaraan PBB dalam jangka waktu dua tahun.

Pemerintah RI pada prinsipnya menyetujui usul itu dengan catatan jangka waktu diperpendek. Pemerintah Belanda membalas usul Bunker itu dengan menyatakan akan melepaskan Irian untuk ditempatkan di bawah perwalian (trusteeship) PBB untuk kemudian membentuk "Negara Papua". Sikap pemerintah Belanda yang demikian itu merupakan pukulan langsung terhadap kedaulatan RI. Karena itu Pemerintah menganggap bahwa kita sudah cukup sabar terhadap Belanda selama sebelas tahun dalam persoalan Irian, dan sekarang sudah tiba saatnya untuk menempuh cara yang drastis, yakni dengan menggunakan kekuatan fisik. Untuk melaksanakan tekad itu Pemerintah mempersiapkan kekuatan militer. Dalam rangka rencana itu, pada bulan Desember 1960 Pemerintah mengirimkan misi ke Uni Sovyet yang ditugaskan untuk melakukan pembelian senjata dan perlengkapan perang lainnya. Misi itu dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional/KSAD A.H. Nasution, dan menghasilkan persetujuan kredit sebesar US \$ 400 juta, yang akan diangsur dalam tempo 10 tahun. Realisasi kredit akan diberikan dalam bentuk peralatan militer. Termasuk senjata-senjata berat untuk Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Maka dalam waktu singkat Angkatan Perang telah menerima pesawat-pesawat pancargas, tank, kapal perang dan roket. Persetujuan ditandatangani pada tanggal 6 Januari 1961.

Menghadapi persiapan Indonesia, pihak Belanda mengajukan protes kepada PBB, menuduh Indonesia melakukan agresi. Selanjutnya Belanda memperkuat angkatan perangnya di Irian, baik personil maupun materilnya, bahkan kapal induk *Karel Doorman* dikirim ke sana untuk menggentarkan kita. Untuk lebih meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (Trikor) yang diucapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Bunyi Trikor adalah:

1. Gagalkan pembentukan "Negara Papua" buatan Belanda kolonial.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum.

Selanjutnya dibentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan putra Irian sebagai gubernur maupun sebuah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang langsung memimpin operasi-operasi merebut Irian Barat. Selaku Panglima Mandala ditunjuk Brigadir Jenderal Soeharto (sekarang Presiden RI), dengan markas besar di Ujungpandang. Pada tanggal 13 Januari 1962, Brigadir Jenderal Soeharto dilantik dan dinaikkan pangkatnya setingkat menjadi Mayor Jenderal. Pada bulan Januari itu juga ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat sebagai berikut:

Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat:

1. Panglima Besar: Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno.
2. Wakil Panglima Besar: Jenderal A.H. Nasution.
3. Kepala Staf: Mayor Jenderal Achmad Yani.

Sedangkan susunan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat adalah:

Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto
Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subono
Wakil Panglima II : Kolonel Udara Leo Wattimena
Kepala Staf : Kolonel Achmad Tahir

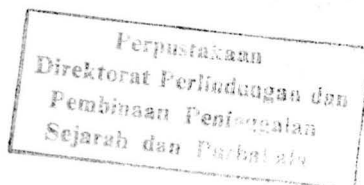
Sementara itu pada tanggal 15 Januari 1962 sebelum Komando Mandala selesai dengan konsolidasinya, telah terjadi Pertempuran Laut Aru. Pertempuran laut yang tidak seimbang itu terjadi antara tiga perahu-motor-terpedo atau MTB Angkatan Laut RI di bawah pimpinan Komodor (Laksamana Pertama) Yos Sudarso, Deputy Kepala Staf Angkatan Laut melawan kapal perusak dan fregat Belanda yang dibantu oleh pesawat jenis Neptune, yang berkesudahan dengan tenggelamnya MTB *Macan Tutul* dan gugurnya Komodor Yos Sudarso dan komandan kapal, Kapten Wiratno.

Operasi-operasi untuk membebaskan Irian didasarkan atas Instruksi Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No: 1. kepada Panglima Mandala yang isinya:

- 1). Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer, dengan tujuan untuk mengembalikan wilayah provinsi Irian ke dalam kekuasaan Negara RI.
- 2). Mengembangkan situasi militer di wilayah provinsi Irian:
 - a. sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi,
 - b. supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di wilayah provinsi Irian secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas/atau didudukkan unsur kekuasaan/pemerintah daerah RI.

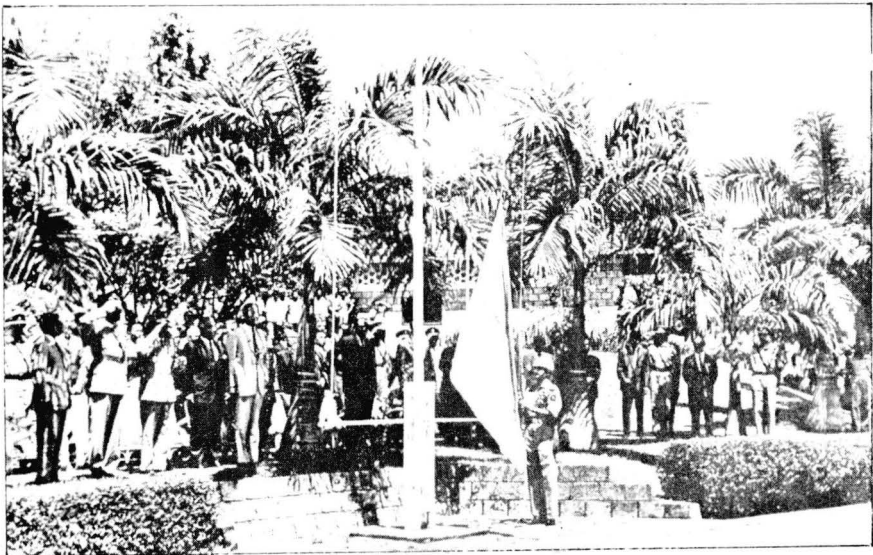
Untuk melaksanakan instruksi itu, Panglima Mandala menyusun Rencana Strategis dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1). Sampai akhir 1962
Dengan jalan infiltrasi memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto, yang cukup ulet sehingga tidak dapat dihancurkan secara bagian demi bagian oleh musuh. Malah kesatuan-kesatuan ini harus dapat mendudukkan dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian.
- 2). Awal 1963
Mulai fase eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.
- 3). Awal 1964
Fase konsolidasi dengan mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian.



Tetapi sampai pada triwulan ketiga tahun 1962 penyelesaian tugas tersebut harus dipercepat enam bulan dengan membatalkan fase kedua yang sedianya akan dilaksanakan dengan operasi Jayawijaya. Dalam pada itu pada tanggal 18 Agustus 1962 telah dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Surat Perintah Presiden tersebut dikeluarkan setelah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda mengenai Irian di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa di New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Berhasilnya Tri Komando Rakyat itu adalah berkat kerjasama antara bidang militer dan bidang diplomasi. Diplomasi tanpa dukungan kekuatan militer akan sia-sia, sebagaimana yang telah dialami sebelum masa Trikora. Pihak Belanda bersedia menerima baik usul-usul Bunker hanya setelah pasukan-pasukan kita berhasil melakukan infiltrasi dari laut dan dari udara dalam tahap pertama operasi. Berlawanan dengan dugaan pihak Belanda, ternyata penerbang-penerbang kita cukup mahir dan berani untuk dapat menembus tabir radar pihak Belanda di tengah malam buta. Sedangkan pasukan payung kita tidak hanya berani diterjunkan di dalam gelap di hutan-hutan lebat dan daerah rawa Irian, melainkan juga, setelah melawan keganasan alam, masih punya cukup semangat dan tenaga tempur. Demikianlah kota Teminabuan dapat direbut oleh pasukan payung kita, yang menyebabkan pihak Belanda menyadari, bahwa perlawanannya akan sia-sia. Karena itu mereka mau menandatangani Persetujuan New York.



Pengibaran bendera Merah Putih pada tanggal 1 Mei 1963 di Irian Jaya petanda utuhnya sudah wilayah nasional Indonesia

Setelah tercapainya persetujuan, Irian diserahkan oleh pihak Belanda kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Dan pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan di Irian kepada Republik Indonesia. Dengan demikian utuhlah sudah wilayah nasional Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

2. Pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI

Peluang yang diperoleh PKI selama jaman Demokrasi Terpimpin mencapai klimaknya pada pertengahan tahun 1965. Dalam suatu persekutuan dengan Presiden Sukarno mereka telah membagi kekuatan politik di Indonesia atas kawan dan lawan, yang kawan dirangkul, yang lawan disingkirkan. Yang masih ragu-ragu digarap supaya menjadi kawan.

Sejak tahun 1964 dan berjalan selama tahun 1965 sikap PKI semakin agresif. Pimpinannya menyerukan kepada apa yang mereka namakan "kekuatan progresif-revolusioner berporoskan Nasakom" untuk "meningkatkan ofensif-revolusioner sampai ke puncaknya". Melalui rapat-rapat umum, kampanye pers dan radio serta kampanye poster dan papan-papan propaganda, tokoh-tokoh yang mereka anggap lawan dikutuk dan diserang dengan menggambarkan mereka sebagai "setan desa, setan kota, kapitalis-birokrat, kontra revolusi, agen nekolim" yang harus dibunuh dan dibasmi. Dan usaha mereka tidak terbatas pada kata-kata dan gambar belaka. Di pelbagai daerah mereka sudah melancarkan aksi-aksi sepihak di mana kader-kader mereka menghasut buruh-tani supaya merampas tanah yang bukan haknya dengan semboyan *landreform*. Aksi-aksi itu kemudian disusul dengan tindakan-tindakan fisik terhadap pihak-pihak yang mereka anggap lawan, seperti petugas-petugas keamanan, ulama-ulama di pesantren, dan lain-lain. Dan korban-korban telah pula jatuh di kalangan pihak-pihak itu. Dalam tahun-tahun 1964-1965 itu suasana kekerasan menggantung di udara. Dan seluruh masyarakat cemas bertanya kapan ketegangan itu akan meledak mencapai klimaknya.

Sesuai dengan doktrin setiap partai komunis di manapun di dunia, mereka bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dan menyingkirkan kekuatan-kekuatan politik lainnya dalam rangka menegakkan "diktatur proletar" yang dilaksanakan oleh partai komunis. Usaha merebut kekuasaan itu selalu dilakukan dengan kekerasan, dengan kudeta atau dengan menggunakan kekuatan tentara seperti terjadi di Eropa Timur maupun di Cina dan Asia Timur lainnya. Di Indonesia, PKI telah pula berusaha merebut kekuasaan dengan kekerasan dengan meletuskan Pemberontakan Madiun yang dimulai pada tanggal 18 September 1948. Usaha itu gagal dan PKI selama beberapa tahun bergerak di bawah-tanah. Tetapi sejak tahun 1950, PKI muncul kembali dan ikut dalam kehidupan politik partai. Nampaknya seolah-olah PKI hendak mencapai kekuasaan negara dengan jalan parlementer, terutama pada jaman Demokrasi Terpimpin.

Tetapi kemudian terbukti bahwa mereka melakukan strategi dua muka yaitu mempergunakan cara-cara parlementer yang respekabel tetapi sementara itu mereka juga mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu kondisinya matang beralih kepada "cara lain", yakni dengan menggunakan kekerasan atau kudeta. Untuk "cara lain" itu mereka harus dapat membina suatu blok di dalam Angkatan Bersenjata yang terdiri atas kader-kader PKI atau setidaknya simpatisan-simpatisan mereka. Dari Pemberontakan Madiun mereka belajar bahwa tidak cukup untuk menguasai pasukan tempur, melainkan mutlak perlu untuk menetralisasi pucuk pimpinan ABRI, jika perlu dilikwidasi.

Untuk melaksanakan strategi muka-dua itu, Ketua PKI DN Aidit mempergunakan dua aparat yang terpisah: untuk cara demokratis parlementer ia mempergunakan aparat partai terbuka, sedang untuk "cara lain" ia mempergunakan Biro Khusus. Tugas Biro Khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan dengan kekerasan atau dengan jalan kudeta. Untuk melaksanakan tugasnya, agen-agen Biro Khusus secara sistematis telah melakukan usaha "pembinaan" terhadap perwira-perwira ABRI mulai dari panglima Angkatan/Polisi sampai kepada kepala seksi staf komando-komando resort militer (korem) dan distrik militer (kodim).

Pada tahun 1965 Presiden Sukarno jatuh sakit keras dan menurut suatu team dokter yang khusus didatangkan dari RRC ada kemungkinan ia akan lumpuh jikapun tidak meninggal. Mengingat perkembangan situasi yang demikian, Aidit memutuskan mempercepat bagan waktu peralihan dari taktik demokratis-parlementer ke taktik kekerasan. Sasaran utama tindakan kekerasan itu adalah pucuk pimpinan TNI-Angkatan Darat yang ternyata tidak berhasil dibina oleh Biro Khusus. Untuk beberapa bulan lamanya, Biro Khusus telah melancarkan kampanye fitnah yang berisi issue seolah-olah pemimpin-pemimpin TNI-Angkatan Darat membentuk "Dewan Jenderal" yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Sukarno. Dalam kampanye fitnah itu juga dikatakan seolah-olah anggota-anggota "Dewan Jenderal" itu adalah agen Amerika dan Inggris yang pada waktu itu dinyatakan sebagai "nekolim" (neokolonialis/kolonialis/imperialis).

Untuk melaksanakan rencananya, Biro Khusus mengerahkan agen-agensya di dalam ABRI, yang terkemuka di antaranya adalah Brigjen Supardjo dan Letnan Kolonel Untung dari TNI-AD, Kolonel Sunardi dari TNI-AL, dan Letnan Kolonel Anwas dari Polisi.

Mereka menentukan sebagai sasaran-antara menyingkirkan pimpinan TNI-AD di bawah Letnan Jenderal Achmad Yani dan menggantinya dengan tokoh-tokoh simpatisan PKI atau setidaknya tokoh-tokoh yang bukan lawan PKI, dan bertolak dari suatu "Dewan Revolusi" membentuk pemerintah Nasakom, dengan mendemisionerkan Kabinet Dwikora yang ada. Jika sasaran-antara sudah tercapai, akan dijangkau sasaran sesungguhnya, yakni secara terang-terangan merebut kekuasaan negara dan mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Marxisme-Leninisme

Dengan mundurnya Yon 530 dari lingkungan petualangan, satu tahap penyelesaian sudah dilalui. Tahap ini disusul dengan cepat oleh tahap berikutnya. Sasaran berikutnya adalah Gedung RRI dan Pusat Telekomunikasi. Untuk merebut kedua obyek vital ini digerakkan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Dengan memegang teguh prinsip Panglima Kostrad, yaitu memperkecil kemungkinan pertumpahan darah dan menghindari tembak-menembak, dalam waktu duapuluh lima menit kedua obyek vital itu berhasil direbut. Dengan dikuasainya kedua obyek vital itu, maka pada pukul 20.10 berkumandanglah pengumuman resmi dari Mayor Jenderal Soeharto melalui RRI. Dalam siarannya yang pertama, Mayor Jenderal Soeharto selaku Pimpinan Sementara Angkatan Darat memberitahukan kepada seluruh Rakyat bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi peristiwa penculikan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yang dilakukan oleh golongan kontra-revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Selanjutnya mereka telah mengambil-alih kekuasaan Negara atau melakukan *coup* dari tangan Presiden. Mayor Jenderal Soeharto menegaskan bahwa gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti akan dapat kita hancur-leburkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya. Dengan pidato itu rakyat di seluruh Indonesia yang sehari itu diliputi suasana gelisah, mulai menjadi tenteram dan mendapat gambaran yang jelas mengenai situasi Negaranya.

Sementara itu operasi penumpasan diteruskan. Sasarannya adalah Pangkalan Udara Utama (Lanuma) Halim Perdanakusuma, yang menjadi basis kekuatan G30S/PKI. Operasi ini juga bertujuan untuk mencari tempat dan mengusut nasib para Jenderal yang diculik. Gerakan merebut pangkalan udara Halim dimulai pada pukul 03.00 tanggal 2 Oktober dan tiga jam kemudian daerah sasaran berhasil dikuasai. Kesatuan-kesatuan petualangan G30S/PKI yang berada di Halim melarikan diri, dan akhirnya dibubarkan oleh komandan masing-masing. Sesudah pangkalan Halim berhasil dibersihkan dari pasukan-pasukan G30S/PKI, operasi diteruskan dengan mencari dan mengusut nasib para Jenderal yang diculik oleh pemberontak. Akhirnya jenazah para perwira itu berhasil ditemukan berkat petunjuk seseorang anggota Polri, sebagaimana telah dikisahkan.

Dalam waktu yang singkat pengkhianatan yang dilakukan G30S/PKI berhasil dipatahkan, berkat kesetiaan Rakyat dan ABRI terhadap Pancasila. Dengan melalui kudeta ini, jelaslah bahwa PKI berusaha merebut kekuasaan Negara untuk selanjutnya menggantikan falsafah Pancasila dengan Marxisme-Leninisme. Sukses kita menumpas pemberontakan G30S/PKI itu sekarang kita peringati setiap tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Di daerah-daerah, terutama yang pernah mengalami pembunuhan massal oleh PKI pada bulan September — Oktober 1948 pada waktu Pemberontakan PKI di Madiun maupun yang telah mengalami aksi-aksi

sepihak dalam bulan-bulan sebelumnya, rakyat mengambil prakarsa untuk bertindak terhadap tokoh-tokoh PKI. Tindakan sendiri-sendiri itu terutama disebabkan karena tidak tegasnya Presiden Sukarno menghadapi pemberontakan G30S/PKI itu, sehingga rakyat cemas, bahwa dengan perlindungan Presiden, PKI akan bangkit kembali untuk melancarkan kegasannya.

MASA ORDE BARU

A. MENEGAKKAN ORDE BARU

1. *Meletakkan Landasan Struktural*

Sejak gagalnya kudeta G30S/PKI, sampai awal tahun 1966, Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Sukarno tidak pernah mengutuk PKI selaku dalang pemberontakan itu. Presiden Sukarno hanya berjanji akan memberikan penyelesaian politis (*political solution*), tetapi janji itu selalu ditunda-tunda pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan ketidak-sabaran Rakyat, karena bertentangan dengan rasa keadilannya. Keadaan menjadi berlarut-larut dan menjurus kepada timbulnya krisis kepemimpinan nasional. Mahasiswa, pemuda, pelajar, partai-partai politik maupun organisasi massa yang mengutuk petualangan G30S/PKI, menuntut agar PKI segera dibubarkan. Di daerah-daerah, terutama yang pernah mengalami pembunuhan massal oleh PKI pada bulan September-Oktober 1948 pada waktu pemberontakan PKI di Madiun, rakyat mengambil prakarsa untuk bertindak terhadap tokoh-tokoh PKI. Di samping itu banyak pula cabang dan ranting PKI di daerah-daerah yang membubarkan diri dan kemudian pemimpin-pemimpinnya menyerahkan diri dan minta perlindungan alat negara terhadap kemarahan rakyat. Di daerah Jawa Barat pembubaran PKI dilakukan secara menyeluruh oleh Panglima Daerah Militer VI/Siliwangi, karena hampir seluruh cabang PKI telah membubarkan diri. Dengan kebijaksanaan itu dapat dicegah tindakan sendiri-sendiri oleh rakyat. Tindakan pembubaran ini dilakukan pula di daerah-daerah luar Jawa, yakni di Sumatra, Sulawesi dan Maluku. Pada umumnya di daerah luar Jawa, Pemerintah dan ABRI segera dapat menumpas G30S/PKI, sehingga gerakannya tidak dapat menjalar. Alat-alat Negara segera mengambil langkah-langkah sehingga tindakan sendiri-sendiri dari masyarakat dapat dicegah sampai ke taraf minimum.

Di Jakarta sendiri sebagai ibukota RI, rakyat pembela Pancasila segera membentuk Komando Aksi Pengganyangan G30S/PKI. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1965 mahasiswa Indonesia membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Berdirinya KAMI segera diikuti oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya. Dalam rangka meningkatkan kegiatannya, KAMI/KAPPI beserta partai-partai politik dan organisasi massa mendirikan Front Pancasila. Mereka memulai aksinya yang pertama pada tanggal 8 November 1965 di dalam Rapat Umum Pemuda Pelajar di Jakarta.

Sementara itu keadaan ekonomi Indonesia semakin memburuk akibat pemberontakan G30S/PKI. Pada tanggal 13 Desember Pemerintah

mengambil kebijaksanaan untuk melakukan devaluasi rupiah lama, menjadi rupiah baru dengan nilai Rp. 1.000,— (uang lama) sama dengan Rp. 1,— (uang baru). Sebagai lanjutan kebijaksanaan ini harga bahan bakar dinaikkan sebesar 4X lipat, yang dimulai pada tanggal 3 Januari 1966, yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa di semua bidang. Pada tanggal 6 Januari 1966 KAMI meminta agar kenaikan harga barang itu ditinjau kembali, namun tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah. Akhirnya dimulailah aksi demonstrasi pada tanggal 10 Januari 1966, yang melanda hampir seluruh jalanan ibukota selama kurang-lebih 60 hari. Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yaitu:

- Bubarkan PKI
- Retool Kabinet Dwikora
- Turunkan harga/perbaiki ekonomi.

Menanggapi aksi-aksi mahasiswa dan pelajar di Jakarta itu Presiden Sukarno mengundang para wakil mahasiswa untuk mengikuti sidang paripurna Kabinet Dwikora pada tanggal 15 Januari 1966. Dalam sidang ini Presiden Sukarno mengutuk aksi-aksi mahasiswa, bahkan memberi komando kepada pendukungnya untuk membentuk "Barisan Sukarno". Dengan komando itu berarti Presiden Sukarno membangkitkan konflik antara kelompok-kelompok pemuda, rupa-rupanya untuk mengalihkan perhatian dari penyelesaian politik terhadap pemberontakan G30S/PKI.

Sementara aksi-aksi mahasiswa berjalan terus, Presiden Sukarno mengadakan *reshuffle* kabinet Dwikora, dengan nama "Kabinet Dwikora yang disempurnakan". Kabinet baru ini memiliki 102 orang menteri. Susunan personalianya diumumkan pada tanggal 21 Februari 1966. Ternyata susunan kabinet baru ini tidak memenuhi harapan Rakyat. Hal yang mencengangkan Rakyat ialah disingkirkannya tokoh-tokoh yang justru gigih menentang G30S/PKI, seperti Jenderal A.H. Nasution, Menteri Koordinator Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Presiden Sukarno mendudukkan sejumlah orang yang diragukan iktikad baiknya, bahkan orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan G30S/PKI seperti dr. Subandrio, Ir. Surachman, Oei Tjoe Tat SH, dan lain-lain. Tidak mengherankan kalau para mahasiswa memberikan nama "Kabinet Gestapu" (Gerakan 30 September/PKI) kepada kabinet itu. Kabinet itu juga diberi julukan "Kabinet 100 Menteri" karena banyaknya jumlah anggotanya.

Menjelang waktu dilantiknya para menteri "Kabinet Dwikora yang disempurnakan" itu, demonstrasi mahasiswa semakin meningkat. Pada tanggal 24 Februari 1966, hari pelantikan para menteri kabinet baru itu, KAMI melakukan aksi serentak mengempeskan ban-ban mobil di jalan-jalan raya di seluruh ibukota, sehingga lalulintas praktis terhenti. Dalam demonstrasi itu gugurlah Arif Rachman Hakim seorang Mahasiswa UI, karena peluru Resimen Cakrabirawa, pengawal Presiden. Kemudian ia

Sesudah menerima Surat Perintah 11 Maret 1966, tindakan pertama yang diambil oleh Jenderal Soeharto keesokan harinya adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massa yang bernaung dan berlindung ataupun seazas dengannya di seluruh wilayah Indonesia. Pembubaran itu mendapat dukungan dari Rakyat, karena salahsatu di antara Tritura telah terlaksana. DPR-GR dalam sidang paripurnanya tanggal 16 Maret 1966 mendukung kebijaksanaan tersebut. Tindakan kedua yang diambil berdasarkan SP 11 Maret adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 mengenai penahanan 15 orang menteri yang dinilai terlibat di dalam pemberontakan G30S/PKI atau memperlihatkan iktikad tidak baik dalam rangka penyelesaian masalah itu. Yang ditahan adalah Dr. Subandrio, Dr. Chairul Saleh, Jusuf Muda Dalam, Ir. Setiadi Reksoprodjo, Sumardjo, Oei Tjoe Tat SH, Ir. Surachman, Armunanto, Sutomo Martopradopo, Astrawinata SH, Mayjen. Achmadi, Drs. Achadi, Letkol. Syafi-i, J. Tumakaka dan Mayjen. dr. Sumarno.

Penahanan para menteri dengan Keppres No. 5 itu mendapat dukungan pula dari Rakyat. Front Pancasila menyatakan tindakan itu tepat. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pada tanggal 18 Maret 1966 itu pula Jenderal Soeharto mengadakan pertemuan dengan para anggota Kabinet untuk memberi pertanggungjawaban atas langkah-langkah yang telah diambilnya berdasarkan SP 11 Maret. Kemudian diangkat 5 orang waperdam *ad interim* (sementara) yang bersama-sama menjadi Presidium Kabinet, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Dr. Roeslan Abdulgani, Dr. Idham Chalid, dr. J. Leimena dan Adam Malik. Kemudian ditunjuk pula beberapa orang menteri *ad interim* untuk mengisi kekosongan, sebelum terbentuknya kabinet baru. Pada tanggal 27 Maret 1966 terbentuk kabinet baru, yang susunannya terdiri dari:

1. Kabinet inti atau Presidium
2. Kementerian-kementerian
3. Departemen-departemen

Kabinet inti terdiri atas 6 orang waperdam, dengan dr. Leimena sebagai Ketua Presidium. Waperdam bertugas untuk memimpin sesuatu bidang. Personalia Waperdam adalah:

1. Dr. J. Leimena, Waperdam Bidang Umum
2. Dr. K.H. Idham Chalid, Waperdam a.i. Bidang Hubungan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi
3. Dr. Roeslan Abdulgani, Waperdam Lembaga-Lembaga Politik
4. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Waperdam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
5. Letnan Jenderal Soeharto, Waperdam a.i. Bidang Pertahanan Keamanan
6. Adam Malik, Waperdam Bidang Sosial-Politik

Kementerian berjumlah 24, yang dipimpin oleh seorang menteri, sedang departemen dipimpin oleh seorang deputy menteri.

Serangkaian tindakan yang diambil oleh Jenderal Soeharto pada hakekatnya adalah untuk menyelamatkan martabat Kepresidenan dan kewibawaan Pimpinan Nasional. Karena jika krisis kewibawaan berlangsung terlalu lama, masyarakat mungkin akan mengalami gejolak yang terus-menerus. Pembubaran PKI merupakan keharusan mutlak, karena hanya dengan pembubaran PKI, keamanan dan ketertiban, serta persatuan dapat dipulihkan dan rasa keadilan Rakyat dipuaskan. Tindakan selanjutnya adalah pembersihan aparatur pemerintah, dan lembaga-lembaga legislatif dari unsur-unsur G30S/PKI dan Orde Lama, termasuk DPR-GR dan MPRS. Adapun yang disebut Orde Lama adalah pemerintahan Presiden Sukarno sejak Dekrit 5 Juli 1959 setelah melakukan penyelewengan dari kemurnian pelaksanaan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945 lagipula didominasi oleh PKI.

Pembinaan Orde Baru dilanjutkan dengan meletakkan kembali landasan konstitusionalisme dengan menegakkan kewibawaan MPRS sebagai lembaga tertinggi dalam Negara Republik Indonesia dan yang mengungkapkan kehendak rakyat. Untuk itu MPRS pada tanggal 20 Juni — 6 Juli 1966 mengadakan Sidang Umum ke-IV di Jakarta. Tindakan pertama yang diambil oleh MPRS adalah mengukuhkan Surat Perintah 11 Maret 1966 dalam Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

Seterusnya Sidang Umum ke-IV MPRS ini menghasilkan ketetapan-ketetapan yang menjadi landasan struktural Orde Baru. Di antaranya Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, yang menugaskan Jenderal Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera selambat-lambatnya dalam bulan Agustus 1966. Sesuai dengan ketetapan MPRS itu, duapuluh hari kemudian, pada tanggal 25 Juli 1966 Jenderal Soeharto berhasil membentuk *Kabinet Ampera* yang terdiri dari 5 menteri utama (menutama) dan 24 menteri dengan susunan:

- Ketua Presidium merangkap Menutama Bidang Pertahanan Keamanan: Letnan Jenderal Soeharto
- Menutama Bidang Politik: Adam Malik
- Menutama Bidang Ekonomi dan Keuangan: Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Tugas-pokok Kabinet Ampera adalah stabilisasi politik dan stabilitasi ekonomi. Sedangkan programnya adalah:

- a. memperbaiki peri-kehidupan Rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
- b. melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968

- c. melaksanakan politik luar negeri yang bebas-aktif untuk kepentingan nasional
- d. melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Tugas-pokok dan program itu masing-masing dikenal sebagai Dwi Darma dan Catur Karya Kabinet Ampera. Dengan tersusunnya Kabinet Ampera, landasan struktural Orde Baru diletakkan, guna menegakkan kembali kehidupan konstitusional serta demokrasi yang berdasarkan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Landasan Idiil Orde Baru

Sejak tanggal 11 Maret 1966 rakyat Indonesia mengisi lembaran baru dalam sejarahnya, dan memasuki masa Orde Baru. Orde Baru adalah:

1. Tatahan seluruh kehidupan Rakyat, Bangsa dan Negara, yang diletakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Orde Baru merupakan koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan di segala bidang yang terjadi pada masa lampau, dan berusaha menyusun kembali kekuatan Bangsa dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional jangka panjang, sehingga mempercepat proses pembangunan Bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Orde Baru mempunyai dua landasan, yakni landasan tetap yang tidak berubah-ubah, dan landasan yang bersifat situasional. Landasan tetap yang tidak berubah-ubah adalah:

- a. landasan idiil: Falsafah dan Ideologi Negara Pancasila
- b. landasan konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun aspek-aspek positif Orde Baru yang harus diperkuat dan dikembangkan bersama-sama oleh kita semua, adalah:

a. Aspek idiil:

Orde Baru yang merupakan tatanan dari seluruh perikehidupan kita, baik yang menyangkut individu, dalam masyarakat negara maupun antar negara, harus dijiwai oleh falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, baik dalam landasan, haluan maupun gerak dinamikanya.

b. Aspek mental-psikologis:

Orde Baru adalah paduan jiwa, semangat dan dinamika yang bersifat idealistis, realistik, dan pragmatis sekaligus. Idealistis, yang berarti kita dengan penuh kesadaran dan keyakinan memegang teguh cita-cita nasional serta sanggup memperjuangkannya sekuat tenaga. Realistik yang berarti bahwa dalam rangka mencapai tujuan

itu tiap-tiap kebijaksanaan, langkah dan tindakan selalu memperhitungkan situasi dan kondisi, ruang dan waktu untuk mencapai hasil yang optimal. Pragmatis, yang berarti bahwa setiap usaha dan kegiatan harus dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi rakyat, bangsa dan negara sebesar-besarnya.

c. Aspek hukum :

Orde Baru adalah suatu tertib masyarakat dan negara berdasarkan hukum, di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dan di mana warganegara maupun penguasa tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku.

d. Aspek struktural prosedural:

Secara struktural prosedural Orde Baru adalah suatu tata susunan masyarakat dan Negara yang stabil, dinamis dan demokratis baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi, dengan pimpinan berdasarkan kelembagaan, yang kuat dan bijaksana, yang menjamin gerak masyarakat yang tertib teratur, maju dan tepat.

e. Orde Baru adalah dinamika gerak masyarakat yang tepat, teratur, terarah dan terkoordinasi, menuju sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

B. MEMBINA STABILITAS NASIONAL

1. *Stabilitas Politik*

Sesudah gagalnya kudeta G30S/PKI, Negara dilanda instabilitas politik akibat tidak-tegasnya kepemimpinan Presiden Sukarno. Partai-partai politik terpecah-belah dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan, antara pendukung dan penentang kebijaksanaan Presiden Sukarno. Penyelesaian politis (*political solution*) yang dijanjikan oleh Presiden Sukarno tidak kunjung datang. Presiden bersikap seolah-olah keadaan masih sama dengan keadaan sebelum terjadinya pemberontakan G30/PKI. Bahkan pemberontakan itu dinilainya hanya merupakan "suatu kerutan kecil pada permukaan air samudra revolusi". Di kalangan masyarakat luas timbul kecemasan, jangan-jangan Presiden Sukarno hendak memulihkan kembali Orde Lama dengan teror PKI-nya. Maka terjadilah di kalangan masyarakat dua pola pemikiran. Yang satu hendak melakukan koreksi total terhadap segala penyelewengan yang terjadi pada masa yang baru lalu yang didominasi oleh PKI. Yang lain hendak memulihkan keadaan yang lama itu. Karena itulah timbul situasi konflik yang membahayakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Melihat situasi konflik antara Orde Lama dan Orde Baru semakin gawat, DPR-GR berpendapat bahwa situasi konflik harus segera diselesaikan secara konstitusional. Pada tanggal 9 Februari 1967 DPR-GR

mencetak uang baru, sehingga volume uang yang beredar melebihi kebutuhan. Inflasi atau merosotnya nilai matauang rupiah melaju dengan deras, bahkan sampai kepada hiper-inflasi. Hiper-inflasi yang melanda masyarakat mempercepat lumpuhnya kapasitas produksi, menambah beban hidup, merongrong daya-tahan rakyat, serta memperbesar jarak antara kelompok-kelompok masyarakat. Dalam keadaan demikian yang menjadi korban adalah golongan yang mempunyai pendapatan tetap, terutama pegawai negeri, ABRI, kaum pensiunan serta mereka yang mempunyai pendapatan rendah, seperti karyawan perusahaan dan lain-lain. Sumber pokok daripada hiper-inflasi ini kembali kepada salah-urus politik, sehingga keuangan negara tidak dapat dikendalikan. Bank Sentral sebagai pelaksanaan utama dari kebijaksanaan moneter, dijadikan sebagai aparat penyalur belaka. Dunia perbankan yang berfungsi sebagai saluran pelayanan di dalam proses ekonomi, dijadikan cabang-cabang Bank Sentral belaka yang hanya meneruskan kredit atas perintah.

2). Bidang produksi dan prasarana sangat menyedihkan, pembangunan ekonomi yang manfaatnya dapat segera dirasakan oleh rakyat, mengalami kemacetan, sebaliknya pembangunan yang bersifat mercusuar dilaksanakan secara berlebih-lebihan.

Di dalam Sidang Umum IV MPRS masalah kebobrokan ekonomi ini dibahas secara intensif. Sebagai jalan ke luar, MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 yang berjudul "Pembaharuan Kebijakan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan". Ketetapan ini meliputi landasan idiil dan operasional. Landasan idiil menentukan pokok yang harus dipegang teguh yaitu azas demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi adalah produksi yang dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan dan penilaian anggota masyarakat. Ekonomi disusun atas dasar kekeluargaan yang tidak mengenal pertentangan klas, yang konsekwensinya adalah adanya pengawasan Rakyat terhadap penggunaan keuangan Negara. MPRS menyadari bahwa kemerosotan ekonomi yang berlarut-larut harus ditanggulangi dengan segera, dengan menggariskan tiga program yang harus diselesaikan secara bertahap oleh Pemerintah.

1. program penyelamatan
2. program stabilitasi dan rehabilitasi
3. program pembangunan.

Sesuai dengan Ketetapan MPRS tersebut, Kabinet Ampera mengambil langkah-langkah penyelamatan sebelum melaksanakan program stabilitasi:

- (1). mendobrak kemacetan ekonomi dan secara simultan menyerang sektor penyebab kemacetan karena:
 - a. Penerimaan Negara terlalu rendah.
 - b. Pengeluaran Negara yang tertentu terlalu tinggi dan tidak efisien.
 - c. Expansi kredit bank terlalu banyak dan tidak produktif.

- d. Tunggakan atas pelunasan hutang-hutang luar negeri terlalu banyak.
 - e. Penggunaan devisa bagi import seringkali kurang berorientasi kepada kebutuhan prasarana.
- (2). Debirokratisasi dan dekontrol sebagai ikhtiar untuk mengurangi gejala ekonomi anarki.
 - (3). Se jauh mungkin berorientasi kepada kepentingan produsen kecil.

Untuk usaha-usaha itu Ketua Presidium Kabinet Ampera secara berturut-turut mengeluarkan serangkaian petunjuk dan instruksi bagi pelaksanaan langkah penyelamatan ini. Tindakan Pemerintah meliputi:

- 1). mengadakan operasi pajak, yaitu meneliti sejauh mana perusahaan besar milik Negara dan swasta telah melangkah dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Diciptakan cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perseroan dan kekayaan dengan Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang (MPO).
- 2). penghematan di bidang pengeluaran Pemerintah, khususnya pengeluaran yang konsumtif dan rutin. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan Negara dihapuskan.
- 3). Kredit bank dibatasi, kredit import dihapuskan.

Dengan bertitktolak dari kenyataan ini, Kabinet Ampera mulai melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi. Hakekat daripada stabilisasi adalah membendung laju inflasi dan program rehabilitasi adalah memulihkan kemampuan berproduksi. Pelbagai peraturan yang berbelit-belit dihapuskan, yang karena kerumitannya menimbulkan kekaburan, kemacetan dan penyelewengan. Langkah-gerak bersayap tiga yang dilaksanakan oleh Pemerintah itu ternyata merupakan "obat penyembuh yang mujarab", tetapi juga suatu pengobatan anti-inflasi yang sangat pedih dirasakan terutama menjelang akhir 1967 dan awal 1968, di mana harga-harga barang pokok sangat melonjak. Namun inflasi berhasil dibendung. Sesudah *Kabinet Pembangunan* dibentuk pada bulan Juni 1968 berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968, kebijaksanaan ekonomi Pemerintah mengalihkan sasarannya ke arah pengendalian yang lebih ketat terhadap gerak harga barang. Terutama harga tiga macam barang, yaitu pangan, sandang, dan kurs valuta asing. Pada awal tahun 1969 pelonjakan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing dapat diatasi. Sejak itu kestabilan ekonomi secara relatif telah dicapai.

Pada bidang rehabilitasi, Pemerintah memusatkan diri pada prasarana ekonomi dan sosial yang selama sepuluh tahun mengalami kelumpuhan dan kerusakan. Kerusakan prasarana ekonomi masyarakat meliputi bidang-bidang:

- 1). bidang prasarana fisik: kerusakan jalan, jembatan, pengairan, tenaga listrik dan lain-lain yang merupakan landasan untuk proses produksi.
- 2). bidang prasarana administratif: kekacauan di bidang administratif akibat mengutamakan pertimbangan kelompok politik daripada penyusunan aparatur Negara sebagai pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah.
- 3). bidang prasarana institusional: seperti lembaga-lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dunia perbankan, disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kepentingan tertentu. Akibatnya lembaga itu tidak melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan perbaikan tatahidup masyarakat, sebaliknya mengekang dan mengacaukan masyarakat.

C. PEMBANGUNAN NASIONAL

1. *Pola Umum Pembangunan Nasional*

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru ini adalah bagian dari Program Umum Nasional, yaitu suatu program untuk mewujudkan Tujuan Nasional bangsa Indonesia. Tujuan Nasional bangsa Indonesia telah ditegaskan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu "membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial . . ."

Untuk melaksanakan pembangunan itu kita telah memiliki modal dasar yang berupa kekayaan dan kemampuan yang bersifat materiil dan spiritual, baik yang riil maupun yang potensial. Modal dasar materiil adalah modal yang telah tergalai dan telah kita miliki, sedang modal dasar materiil yang potensial adalah kekayaan yang harus kita gali dan manfaatkan. Modal dasar yang bersifat spiritual adalah kemerdekaan nasional. Kemerdekaan nasional dan kedaulatan negara sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia, merupakan penentu hasil perjuangan bangsa Indonesia, merupakan penentu nasib bangsa di masa depan. Tanpa kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak dapat menentukan nasibnya sendiri. Karena itu kemerdekaan merupakan modal dasar yang memiliki nilai yang tertinggi bagi pelaksanaan usaha mencapai Tujuan Nasional.

Letak Indonesia yang berada di sepanjang garis khatulistiwa dan berbatasan dengan dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta dikaruniai iklim tropika dengan dua musim, memungkinkan

peranan strategis di dalam tatakehidupan antar-bangsa. Di samping itu isi wilayah Negara kita yang terdiri dari penduduk yang memiliki aneka ragam budaya dan tradisi, serta sukubangsa dan keturunan, memainkan peranan yang utama di dalam pembangunan. Inilah antara lain modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak tercapainya kemerdekaan.

Berdasarkan pembahasan kondisi sosial-ekonomi serta sosial-budaya kita itu, Pemerintah menyusun Pola Dasar Rencana Pembangunan Nasional dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- 1). Perkembangan ekonomi diarahkan kepada tingkat pendapatan penduduk setiap jiwa secara maksimal, sesuai dengan pertambahan penduduk.
- 2). Sektor pertanian mendapat prioritas tertinggi, karena di dalam realitasnya struktur ekonomi kita adalah ekonomi agraria. Namun dalam jangka panjang secara bertahap dan berangsur-angsur diikhtiarkan agar berkembang ke struktur ekonomi yang seimbang antara ekonomi agraris dan ekonomi industri.
- 3). Diusahakan keseimbangan pembangunan yang wajar antara Pusat dan Daerah dan keseimbangan antara pertambahan penduduk dan kesempatan kerja.
- 4). Seluruh usaha pembangunan nasional dilakukan dengan keseimbangan moneter sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang telah dicapai dan keseimbangan neraca pembayaran tanpa memerosotkan ekonomi Indonesia.

Dasar Repelita meliputi:

- 1). Pembangunan mental, bertujuan untuk menciptakan kondisi peri kehidupan bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermental dan berakhlak baik yang positif bagi masyarakat yang membangun.
- 2). Meningkatkan produksi dan penyediaan pangan.
- 3). Meningkatkan produksi dan penyediaan sandang.
- 4). Mengusahakan peningkatan penyediaan rumah rakyat.
- 5). Meningkatkan efisiensi prasarana.
- 6). Meningkatkan penyediaan lapangan kerja di segala bidang.

Kegiatan Masyarakat

Pola Dasar Program Umum dan Pola Dasar Repelita ini oleh Kabinet Ampera diajukan kepada Sidang Umum Ke V MPRS, 1968, yang kemudian menetapkan supaya dibentuk Kabinet Pembangunan dan menyerahkan kepada Presiden untuk memilih konsepsi pembangunan melalui Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968.

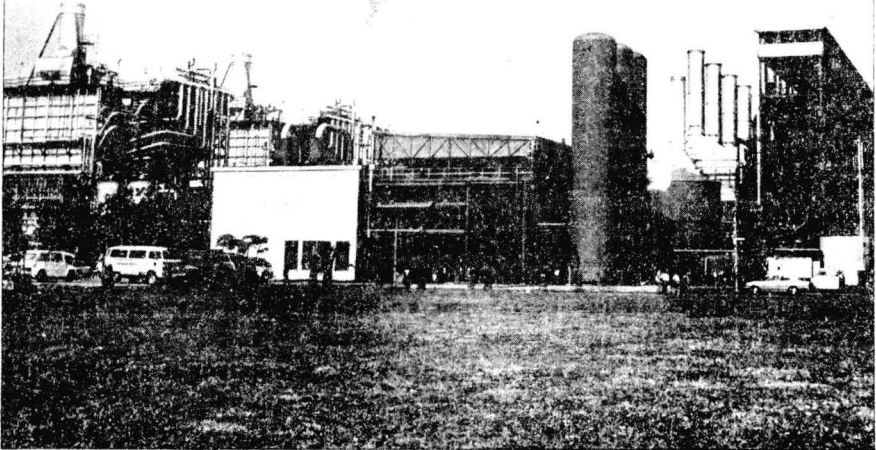
2. Pembangunan Lima Tahun

Pembangunan Lima Tahun adalah tahap-tahap pembangunan nasional yang ditentukan di dalam Pola Dasar Repelita, yang diciptakan oleh Kabinet Ampera. Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Pertama (1969—1973) sesuai dengan Pola Dasar tersebut dimulai pada tanggal 1 April 1969. Sasaran pembangunan dibagi-bagi atas beberapa prioritas, sebagaimana yang digariskan di dalam pola tersebut. Adapun sumber pembiayaan untuk mencapai sasaran itu berasal dari Pemerintah dan Rakyat yang disertai sikap mental yang berupa kegairahan terhadap pembangunan. Sumber dari Pemerintah diperoleh dari tabungan Pemerintah, kredit perbankan jangka pendek dan jangka panjang, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri serta kegiatan masyarakat yang produktif.

Pada tahap pertama, pembangunan dipusatkan pada pembangunan ekonomi, khususnya sektor pertanian. Pembangunan di bidang ekonomi merupakan keharusan mutlak, sebab pembangunan di bidang ini selama bertahun-tahun, sejak masa Demokrasi Liberal, telah diabaikan. Kita telah lama mengalami ketinggalan di bidang ini, dan pada masa Repelita ini harus kita kejar, agar kita memiliki ketahanan nasional dan stabilitas nasional di segala bidang secara seimbang. Ketahanan nasional itu meliputi ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-budaya dan ketahanan dalam bidang pertahanan-keamanan. Karena hanya dengan ketahanan nasional itu bangsa Indonesia mampu melaksanakan pembangunan dan mampu menghadapi bahaya yang datang dari dalam dan dari luar, juga mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional. Pada sektor pangan, pada tahun 1969—1970 telah dialami kenaikan produksi beras yang melebihi target Repelita, yaitu sejumlah 10,8 juta ton. Hal ini merupakan prospek yang cerah bagi pengadaan pangan. Prioritas pertama untuk bidang pertanian ini, bertolak pada pikiran bahwa pertanian adalah basis daripada proses pembangunan yang berlanjut, untuk jangka panjang yaitu karena dalam jangka panjang sasaran yang hendak dicapai oleh Repelita adalah perombakan struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Pembangunan industri secara besar-besaran hanya mungkin dilaksanakan apabila sudah ada basis pertanian yang kokoh. Keseimbangan antara pertanian dan pertumbuhan industri inilah yang ingin dicapai pada Repelita tahap kedua, demikian pula keseimbangan antara pembangunan fisik dengan pembangunan mental dan spiritual.

Pembangunan nasional dalam jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap mulai Repelita itu pada hakekatnya adalah pembangunan bangsa atau *nation building* dalam arti yang luas. Pembangunan bangsa dalam arti yang luas adalah pembangunan nilai-nilai dasar yang vital, untuk menumbuhkan tatakehidupan masyarakat yang harmonis, mengembangkan bakat dan harkat manusia dan mengembangkan lembaga dan tata-cara yang kita pilih untuk hidup ber-bangsa dan ber-negara. Dengan kata lain: pembangunan berarti menjangkau kemajuan di segala bidang yang bagi bangsa

052665



Pabrik baja Krakatau Steel di Cilegon, Jawa Barat

Indonesia mutlak harus berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini termasuk pula usaha-usaha menumbuhkan nilai-nilai politik baru, yaitu demokrasi politik yang berdasarkan Pancasila serta nilai-nilai ekonomi baru yakni demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila pula. Adapun hakekat Pancasila adalah keselarasan dan keseimbangan, antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan manusia, antara individu dan masyarakat, antara Pusat dan Daerah, antara agama dengan agama, antara suku dengan suku, antara kemajuan lahir dan kesejahteraan batin.

Demikianlah makna pembangunan bangsa seutuhnya, untuk menjangkau masa depan yang gemilang.

Prak

...

PE
Perpu
Jenc

C.V. JASANKU JAKARTA